Bappeda
Kabupaten Kepulauan Mentawai

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa





RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)

Kabupaten Kepulauan Mentawai

TAHUN 2026

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode tahun 2026.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 merupakan pedoman:

a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
b. penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS; dan
c. penyusunan Rencana APBD Tahun 2026.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika meliputi:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
   c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
   d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
   e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
   f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemeritahan Daerah; dan
   g. bab VII memuat penutup.

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2026.
(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2026;
   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026; dan
   c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2026.

(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 setiap triwulan tahun berkenaan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati.

Pasal 6

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2026; dan/atau
b. keadaaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun 2026.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah ditetapkan.

(3) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
b. target sasaran pembangunan Daerah;
c. prioritas pembangunan Daerah;
d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
e. target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(4) Tatacara penyusunan perubahan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

Diundangkan di Tua Pejat
pada tanggal 4 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 10 TAHUN 2025
TANGGAL 4 AGUSTUS 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar ix

BAB I PENDAHULUAN I.1
1.1 Latar Belakang I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I.6
1.3 Hubungan Antar Dokumen I.9
1.4 Maksud dan Tujuan I.10
1.4.1 Maksud I.10
1.4.2 Tujuan I.11
1.5 Sistematika Penyusunan RKPD I.11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah II.1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis II.1
2.1.1.1 Aspek Geografis II.1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II.10
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana II.40
2.1.1.4 Aspek Demografi II.48
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II.53
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II.53
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II.61
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga II.68
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II.70
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II.71
2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II.105
2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan II.133
2.1.3.4 Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan II.144
2.1.3.5 Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan II.146
2.1.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan II.154
2.1.3.7 Unsur Pemerintahan Umum II.155

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....II.157
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....II.157
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....II.164
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi II.167
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia.....II.169
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II.172
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....II.390
2.3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II.390
2.3.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II.390
2.3.1.2 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II.395
2.3.1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pilihan II.403
2.3.1.4 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Penunjang II.406
2.3.2 Evaluasi terhadap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs 2024 .....II.408
2.3.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) II.429
2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah II.436

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....III.1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III.3
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Tahun 2026 .....III.3
3.1.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional III.3
3.1.1.2 Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat III.7
3.1.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah.....III.10
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026 .....III.13
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....III.14
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah III.16
3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah.....III.22
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaaan Daerah.....III.27

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV.1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun

2026. .....IV.2
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2026. IV.4
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026.IV.10
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026 .....IV.15
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026. .....IV.15
4.2.2. Prioritas Pembangunan Propvinsi Sumatera Barat Tahun 2026.....IV.72
4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026. .....IV.84

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V.1
5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026.....V.1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....VI.1

BAB VII PENUTUP VII.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024 ..... II.3
Tabel 2.2 Luas Wilayah, Jumlah kecamatan, Kelurahan, Nagari, dan Desa menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera BaratKabupaten Kepulauan Mentawai, 2024..... II.4
Tabel 2.3 Jumlah Desa dan Dusun Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024 ..... II.5
Tabel 2.4 Luasan Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Mentawai II.6
Tabel 2.5 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan menurut Kabupaten/kota di Sumatera Barat Tahun 2024..... II.8
Tabel 2.6 Perkembangan PDRB ADHB dan Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024 (juta rupiah)..... II.10
Tabel 2.7 Kontribusi Sektor Primer Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Sektor Primer Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024 (juta rupiah) II.11
Tabel 2.8 Kontribusi Sektor Pariwisata/Jasa Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Sektor Pariwisata/Jasa Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024 (juta rupiah)..... II.12
Tabel 2.9 Kontribusi Sektor Konstruksi Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Sektor Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024 (juta rupiah)..... II.13
Tabel 2.10 Kontribusi PMTB Kabupaten Kepulauan Mentawai PMTB PDRB Berdasarkan Pengeluaran Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024 (juta rupiah) II.14
Tabel 2.11 Hasil Perhitungan Location Quotient PDRB ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.17
Tabel 2.12 Klasifikasi Sektor Unggulan Menurut Tipologi Klassen II.20
Tabel 2.13 Kontribusi Sektor Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.21
Tabel 2.14 Klasifikasi Sektor-Sektor Pembangunan Berdasarkan Tipologi Klassen Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.23
Tabel 2.15 Shift-Share PDRB ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.26
Tabel 2.16 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai II.40
Tabel 2.17 Tingkat Kerentanan Desa Terhadap Perubahan Iklim,2024 ..... II.42

Tabel 2.18 Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024 ..... II.50
Tabel 2.19 Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024 ..... II.51
Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024 ..... II.52
Tabel 2.21 Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.69
Tabel 2.22 Perkembangan Kepemudaaan dan Keolahragaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.70
Tabel 2.23 Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.87
Tabel 2.24 Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.88
Tabel 2.25 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.93
Tabel 2.26 Jumlah Layanan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.94
Tabel 2.27 Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.96
Tabel 2.28 Kondisi Jalan Trans Mentawai, 2024 ..... II.96
Tabel 2.29 Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.100
Tabel 2.30 Perkembangan Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.102
Tabel 2.31 Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.104
Tabel 2.32 Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.105
Tabel 2.33 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.108
Tabel 2.34 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.109
Tabel 2.35 Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.110
Tabel 2.36 Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.112
Tabel 2.37 Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.113

Tabel 2.38 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020-2024 .. II.115
Tabel 2.39 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.116
Tabel 2.40 Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.117
Tabel 2.41 Perkembangan Pelabuhan Laut dan Penyebrangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024 ..... II.118
Tabel 2.42 Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.120
Tabel 2.43 Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 .. II.122
Tabel 2.44 Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.123
Tabel 2.45 Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.124
Tabel 2.46 Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.126
Tabel 2.47 Perkembangan Indikator Urusan Persandian kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.128
Tabel 2.48 Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.129
Tabel 2.49 Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.130
Tabel 2.50 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.132
Tabel 2.51 Produksi Perikanan Tangkap dan Budi Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.134
Tabel 2.52 Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.136
Tabel 2.53 Produksi Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.138
Tabel 2.54 Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.140
Tabel 2.55 Perkembangan Indikator Perindustrian Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.142
Tabel 2.56 Perkembangan Indikator Urusan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.143
Tabel 2.57 Perkembangan Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.144
Tabel 2.58 Perkembangan Indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.145
Tabel 2.59 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024... II.149
Tabel 2.60 Perkembangan Indikator Kepegawaian Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.151
Tabel 2.61 Perkembangan Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.139

Tabel 2.62 Perkembangan Indikator Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 .....II.155
Tabel 2.63 Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.167
Tabel 2.64 Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.172
Tabel 2.65 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan.....II.174
Tabel 2.66 Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS).....II.411
Tabel 2.67 Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (SS).....II.418
Tabel 2.68 Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (BB) Dengan Tahun Berjalan.....II.426
Tabel 2.69 Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024.....II.430
Tabel 2.70 Realisasi Capaian SPM Bidang KesehatanTahun 2024.....II.431
Tabel 2.71 Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....II.432
Tabel 2.72 Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024.....II.433
Tabel 2.73 Realisasi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024.....II.434
Tabel 2.74 Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023.....II.435
Tabel 3.1 Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2020-2024.....III.15
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023-2027 .....III.19
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023-2027.....III.25
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023-2027 .....III.29
Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026.....IV.4
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Provinsi Sumatera Barat, 2025-2029.....IV.5
Tabel 4.3 Proyeksi Indikator Makro Daerah Provinsi Sumatera Barat 2026.....IV.10
Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026.....IV.11
Tabel 4.5 Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026.....IV.14
Tabel 4.6 Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2026 .....IV.14
Tabel 4.7 Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai 2026 .....IV.15
Tabel 4.8 Sasaran Pembangunan Nasional 1.....IV.16
Tabel 4.9 Sasaran Pembangunan Nasional 2.....IV.18
Tabel 4.10 Sasaran Pembangunan Nasional 3.....IV.36
Tabel 4.11 Sasaran Pembangunan Nasional 4.....IV.42
Tabel 4.12 Sasaran Pembangunan Nasional 5.....IV.52
Tabel 4.13 Sasaran Pembangunan Nasional 6.....IV.56
Tabel 4.14 Sasaran Pembangunan Nasional 7.....IV.62

Tabel 4.15 Sasaran Pembangunan Nasional 8 ..... IV.68
Tabel 4.16 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Tahun 2026 ..... IV.86
Tabel 4.17 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Tahun 2026 ..... IV.89
Tabel 4.18 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pemerataan Jaringan Listrik Tahun 2026..... IV.90
Tabel 4.19 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pemerataan jaringan Listrik Tahun 2026..... IV.91
Tabel 4.20 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Penyediaan Internet Tahun 2026..... IV.91
Tabel 4.21 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Penyediaan Internet Tahun 2026..... IV.92
Tabel 4.22 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Air Bersih Tahun 2026..... IV.93
Tabel 4.23 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Air Bersih Tahun 2026 ..... IV.94
Tabel 4.24 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 ..... IV.98
Tabel 4.25 Program Prioritas Mendukung Pembangunan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 ..... IV.99
Tabel 4.26 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Peningkatan Pendapatan Per Kapita Tahun 2026 ..... IV.102
Tabel 4.27 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Peningkatan Pendapatan per Kapita Tahun 2026 ..... IV.103
Tabel 4.28 Dukungan RKPD Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2026 Terhadap kegiatan Prioritas Terhadap Prioritas Nasional..... IV.105
Tabel 4.29 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi..... IV.232
Tabel 5.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026..... V.2
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama..... VI.1
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah VI.4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I.9
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai II.2
Gambar 2.2 Persentase Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Mentawai II.7
Gambar 2.3 Peta Fungsi Kawasan Hutan II.9
Gambar 2.4 ICOR Kabupaten Kepulauan Mentawai 2019 dan 2024 ..... II.29
Gambar 2.5 Peta Sidik Kabupaten Kepulauan Mentawai II.41
Gambar 2.6 Peta Rawan Bencana II.44
Gambar 2.7 Perkembangan Indikator Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015-2023 ..... II.46
Gambar 2.8 Proses Terjadinya Gempa Bumi Tektonik II.47
Gambar 2.9 Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai,2023 ..... II.48
Gambar 2.10 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.54
Gambar 2.11 Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.56
Gambar 2.12 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.58
Gambar 2.13 Perkembangan Indek Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.60
Gambar 2.14 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.62
Gambar 2.15 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.64
Gambar 2.16 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.68
Gambar 2.17 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.72
Gambar 2.18 Harapan Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.74
Gambar 2.19 Angka Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2024 ..... II.76
Gambar 2.20 Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2024 ..... II.78
Gambar 2.21 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.80
Gambar 2.22 Perkembangan Angka Kesakitan/morbilitas (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.82
Gambar 2.23 Cakupan Jaminan Kesehatan (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.85
Gambar 2.24 Perkembangan Rumah Tangga Berakses Air Bersih Layak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.97

Gambar 2.25 Perkembangan Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.98
Gambar 2.26 Jalur pelayaran Padang -Kep Mentawai II.119
Gambar 2.27 Layanan Perpustakaan untuk Masyarakat dan Anak Sekolah..... II.131
Gambar 2.28 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.152
Gambar 2.29 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.157
Gambar 2.30 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.159
Gambar 2.31 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.160
Gambar 2.32 Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.162
Gambar 2.33 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024..... II.164
Gambar 2.34 Angka Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.170
Gambar 2.35 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan..... II.438
Gambar 2.36 Konektivitas Antar Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs II.439

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan akan melanjutkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun diwarnai oleh berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil tumbuh sebesar 4,87% (yoy) di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Ini menunjukkan resiliensi perekonomian Indonesia. Faktor Pendorong salah satunya adalah pertumbuhan didorong oleh kombinasi kebijakan fiskal yang proaktif dan dukungan APBN yang optimal dalam melindungi masyarakat dan menjaga daya beli. Investasi dan konsumsi kelas menengah juga menjadi pendorong utama. Pemerintah juga berupaya membuka pasar ekspor baru, mendorong hilirisasi industri, dan transformasi digital.

Tantangan perekonomian pada ketidakpastian situasi global masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk pertumbuhan ekonomi global yang melambat, pelemahan ekonomi yang diakibatkan perang harga oleh China dan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik yang berlanjut, dampak perubahan iklim, serta ketidakpastian suku bunga global.

Peluang Perekonomian secara nyata tampak pada hilirisasi Industri terutama di sektor pertambangan seperti nikel, diharapkan akan menarik investasi besar dan membuka peluang pertumbuhan industri bernilai tambah, seperti industri baterai kendaraan listrik. Begitu juga dengan peningkatan investasi strategis Pemerintah terus berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk menarik investasi.

Penguatan stabilitas makro ekonomi terus dilakukan dalam dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif dan inklusif. Stabilitas ekonomi Nasional yang kuat memberikan dampak dan diharapkan dapat dirasakan secara signifikan hingga ke daerah. Stabilitas ekonomi yang kuat tidak hanya berarti angka pertumbuhan PDB yang baik, tetapi juga terjaganya daya beli masyarakat, terkendalinya inflasi, serta iklim investasi yang kondusif. Dampak yang sangat dirasakan oleh UMKM dan pelaku usaha di daerah adalah stabilitas harga dalam memberikan kepastian dalam perencanaan biaya produksi dan harga jual, sehingga mengurangi risiko kerugian, dan mendorong investasi lokal. Begitu juga, belanja daerah dirancang untuk menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, dengan fokus pada belanja produktif, program prioritas dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 disusun dengan tema "Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang

Produktif dan Inklusif". Ini merupakan turunan langsung dari prioritas yang digariskan dalam RPJMN 2025-2029, dengan sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2026 mencapai 5,8-6,3%. target pertumbuhan ini menjadi landasan bagi daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang juga menjadi bagian dari penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029. Tema RKP 2026 ini mencerminkan prioritas strategis pemerintah untuk mencapai target pembangunan jangka menengah dan panjang, khususnya dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan visi Indonesia Emas 2045. Kedaulatan Pangan mengandung arti untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan bagi seluruh rakyat Indonesia secara mandiri. Kedaulatan Energi bertujuan untuk menjamin akses energi yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Ekonomi yang produktif fokus pada peningkatan nilai tambah ekonomi, daya saing, dan inovasi. Ekonomi yang inklusif memiliki tujuan yaitu memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memberdayakan kelompok rentan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah

mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah sebagai pedoman perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran setiap tahun dari RPJMD.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana amanat dari Permendagri 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dimana pada diktum Keenam penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan RPJMD 2025-2029. Selain itu, penyusunan dokumen RKPD ini berpedoman pada Permendagri terkait pedoman penyusunan RKPD Tahun

2026, RKP Tahun 2026, RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2026. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RKPD ini sangat penting, mengingat:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029.
2. Menjadi dasar peletakan fondasi pembangunan periode pertama menuju visi pembangunan jangka panjang daerah menuju Mentawai Emas 2045.
3. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.
4. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026 .
5. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dan penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026.

Sebagai sebuah sistem perencanaan yang selaras dan berkelanjutan, Penguatan Infrastruktur Daerah untuk Peningkatan Produktivitas menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan produktivitas masyarakat berbasis sumber daya lokal yang memberikan nilai tambah pada setiap komoditas yang dikembangkan sehingga pada setiap usaha ekonomi yang sedang dan terus diupayakan menuju

transformasi ekonomi daerah. Penyusunan RKPD Tahun 2026 mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2026, antara lain:

1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);

a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

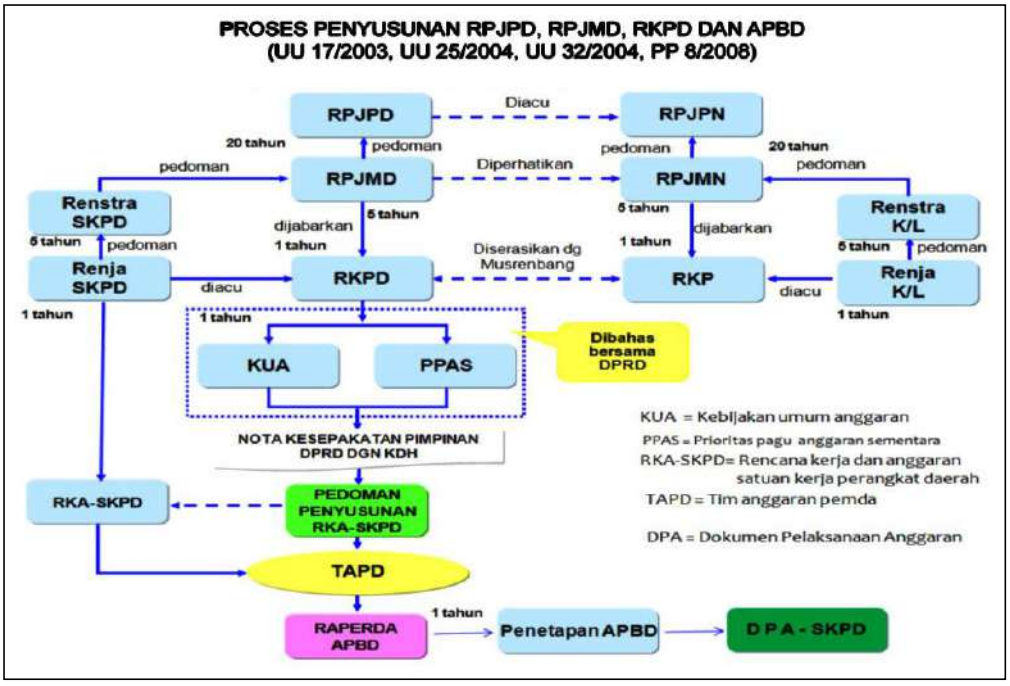
b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Tahun 2026 merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029.



Gambar 1.1
Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan antara RKPD Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2026 memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

2. RKPD Tahun 2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035.
3. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.
4. RKPD Tahun 2026 pedoman/dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dimaksudkan agar terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan,

sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2026 antara lain:

1. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah.
2. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan.
3. Menjadi acuan Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026.
4. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026.

1.5. Sistematika Penyusunan RKPD

RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I **Pendahuluan**;

memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD;

BAB II **Gambaran Umum Kondisi Daerah**;

terdiri atas Kondisi Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Permasalahan Pembangunan Daerah. Kondisi Umum Kondisi Daerah menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD tahun lalu yang mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/ pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPD.

Permasalahan Pembangunan Daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III **Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah**;

terdiri atas Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi yang secara nyata memiliki keterkaitan dan pengaruh pada kondisi ekonomi daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran strategi yang disusun untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV **Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**;

mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan

capaian kinerja sebagai evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional.

BAB V **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**; mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB VI **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;**

berisi Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun perencanaan.

BAB VII **Penutup**;

berisi penegasan bahwa RKPD adalah pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

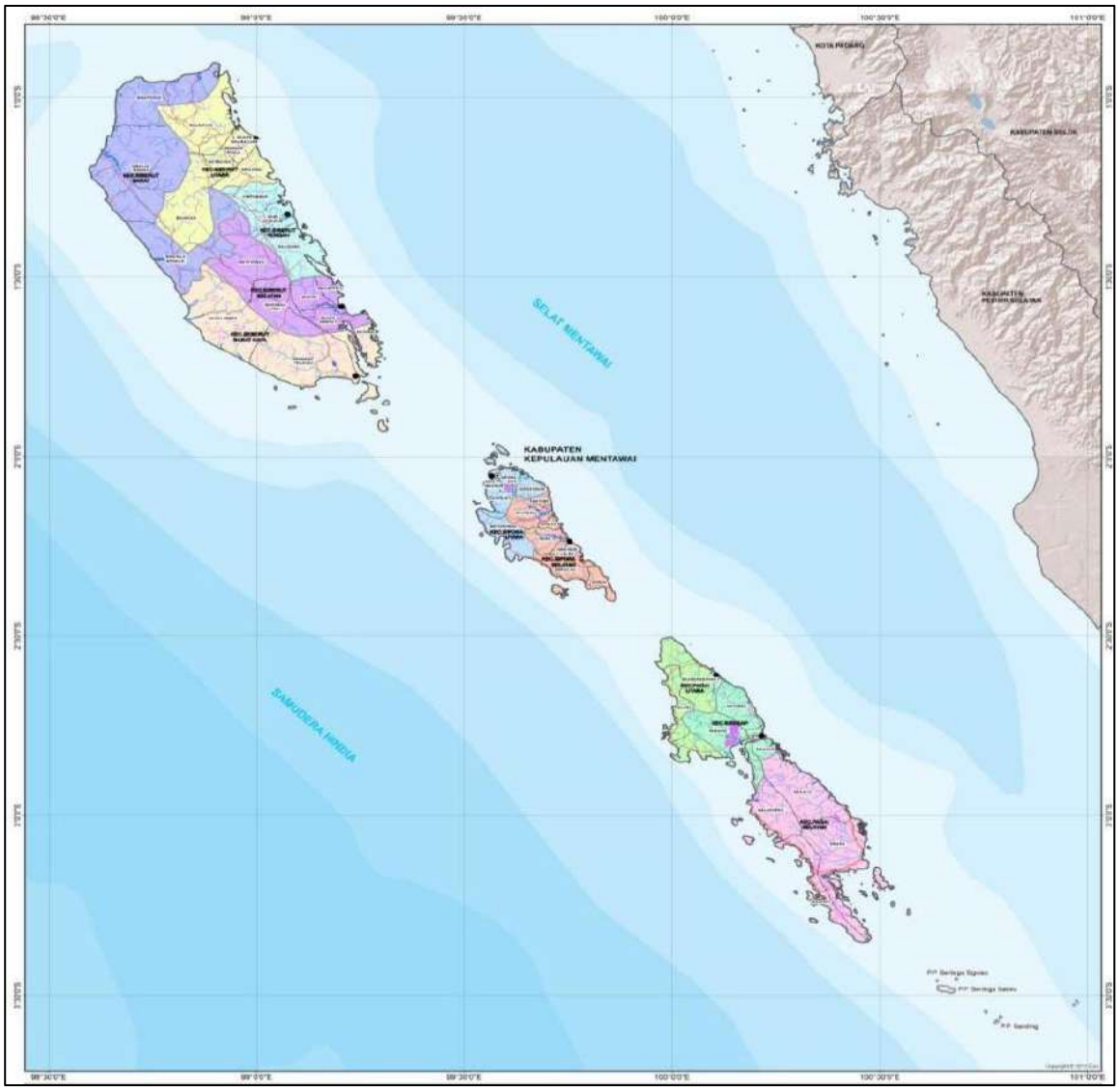
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografis

Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Barat, Indonesia yang wilayahnya disebelah Barat Sumatera dan terpisah oleh laut dari daratan Pulau Sumatera. Ibukotanya terletak di Tua Pejat dengan jumlah penduduk (2024) sebesar 97.837 jiwa. Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Kepulauan Mentawai terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 yang terdiri atas 10 kecamatan, 43 desa dan 358 dusun. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki luas wilayah sekitar 5.983,22 km^2 dan panjang garis pantai 1.402,66 km, sebagaimana Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 4 (empat) pulau besar antara lain Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan serta terdiri atas 103 pulau kecil lainnya.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai



Berdasarkan luas wilayah setiap kecamatan, Kecamatan Siberut Barat menjadi kecamatan terluas yaitu 1.163,64 km^2 atau sebesar 19,29 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai dan Kecamatan Siberut Barat Daya dengan luas wilayah terbesar kedua yaitu 1.013,83 km^2 atau sebesar 16,80 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sipora Utara yaitu dengan luas 272,40

km^2 atau sebesar 4,51 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai dan Kecamatan Sikakap dengan luas wilayah terkecil kedua yaitu seluas 312,60 km^2 atau sebesar 5,18 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai. Secara geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak pada posisi $0^0$55'00"–$3^0$21'00" Lintang Selatan dan $98^0$35'00"-$100^0$32'00" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara geografis berbatasan dengan:

- sebelah Utara adalah Selat Siberut.
- sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
- sebelah Timur berbatasan dengan Selat Mentawai.
- sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Adapun keadaan geografis dan administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap kecamatannya disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 2.1
Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km^2)	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Pagai Selatan	Bulasat	851,28	$2^0$49'04"-$3^0$21'00"	$100^0$07'01"-$100^0$32'00"
2	Sikakap	Taikako	312,60	$2^0$37'12"-$3^0$55'04"	$100^0$00'00"-$100^0$16'12"
3	Pagai Utara	Saumanganya	371,25	$2^0$30'00"-$2^0$51'36"	$99^0$57'00"-$100^0$09'36"
4	Sipora Selatan	Sioban	348,33	$2^0$06'00"-$2^0$24'36"	$99^0$36'00"-$99^0$52'12"
5	Sipora Utara	Sido Makmur	272,40	$1^0$57'00"-$2^0$18'00"	$98^0$30'00"-$99^0$42'00"
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	328,00	$1^0$19'48"-$1^0$42'00"	$98^0$48'00"-$99^0$18'00"
7	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	1.013,83	$1^0$27'36"-$1^0$57'00"	$98^0$45'00"-$99^0$19'48"
8	Siberut Tengah	Saibi Samukop	589,75	$1^0$15'00"-$1^0$33'00"	$98^0$54'00"-$99^0$12'00"
9	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	782,68	$0^0$54'00"-$1^0$27'00"	$98^0$40'48"-$99^0$06'00"
10	Siberut Barat	Simalegi	1.163,64	$0^0$55'00"-$1^0$34'12"	$98^0$35'00"-$98^0$59'24"

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025

Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan terbesar kedua yaitu sekitar 14,20% dari total wilayah Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas 6,045,65 ribu km² atau sekitar 14,35%. Seluruh wilayah administrasi pemerintahan terkecil di Sumatera Barat disebut nagari kecuali untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki wilayah administrasi terendah berupa desa.

Tabel 2.2
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Nagari, dan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Luas Wlayah (km^2)	Jumlah Kecamatan	Kelurahan	Nagari	Desa
1.	Kab. Kep. Mentawai	5.983,222	10	-	-	43
2.	Kab. Pesisir Selatan	6.045,649	15	-	182	-
3.	Kab. Solok	3.590,404	14	-	74	-
4.	Kab. Sijunjung	3.150,580	8	-	61	1
5.	Kab. Tanah Datar	1.377,186	14	-	75	-
6.	Kab. Padang Pariaman	1.342,266	17	-	103	-
7.	Kab. Agam	2.226,270	16	-	92	-
8.	Kab. Lima Puluh Kota	3.273,405	13	-	79	-
9.	Kab. Pasaman	3.902,444	12	-	62	-
10.	Kab. Solok Selatan	3.282,144	7	-	39	-
11.	Kab. Dharmasraya	2.920,925	11	-	52	-
12.	Kab. Pasaman Barat	3.852,993	11	-	90	-
13.	Kota Padang	694,337	11	104	-	-
14.	Kota Solok	58,720	2	13	-	-
15.	Kota Sawahlunto	231,945	4	10	-	27
16.	Kota Padang Panjang	23,560	2	16	-	-
17.	Kota Bukittinggi	24,173	3	24	-	-
18.	Kota Payakumbuh	74,552	5	47	-	-
19.	Kota Pariaman	64,767	4	16	-	55
	Jumlah	42.119,542	179	230	909	126

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Jumlah dusun terbanyak terdapat pada Kecamatan Pagai Selatan dengan jumlah 52 dusun lalu diikuti Kecamatan Sipora

Selatan dengan jumlah 48 dusun sedangkan untuk Kecamatan Siberut Utara menjadi kecamatan dengan jumlah paling sedikit yaitu dengan jumlah 26 dusun. Wilayah kecamatan dengan jumlah pulau terbanyak berada pada Kecamatan Pagai Selatan dengan jumlah 34 pulau dan Kecamatan Siberut Barat Daya sebanyak 22 pulau, secara keseluruhan Kepulauan Mentawai memiliki 103 pulau.

Tabel 2.3
Jumlah Desa dan Dusun
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah Pulau	Daerah (desa) Pesisir/ Tepi Laut
1	Pagai Selatan	Bulasat	4	52	34	4
2	Sikakap	Taikako	3	44	9	3
3	Pagai Utara	Saumanganya	3	30	9	3
4	Sipora Selatan	Sioban	7	48	3	6
5	Sipora Utara	Sido Makmur	6	29	15	3
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	5	36	1	2
7	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	3	31	22	3
8	Siberut Tengah	Saibi Samukop	3	33	5	3
9	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	6	26	4	3
10	Siberut Barat	Simalegi	3	29	1	3
Jumlah			43	358	103	33

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaian besar wilayah desanya merupakan daerah pesisir pantai yaitu sebanyak 33 desa atau sebesar 76,75 persen. Kecamatan Sipora Selatan menjadi kecamatan dengan desa diwilayah pesisir terbanyak yaitu dengan jumlah 6 desa dan Kecamatan Pagai Selatan dengan 4 desa di wilayah pesisir.

Luasan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dibagi kedalam 5 kawasan penggunaan lahan, antara lain hutan lindung, kawasan suaka dan pelestarian alam, hutan produksi tetap, hutan produksi dapat dikonversi dan areal penggunaan lainnya.

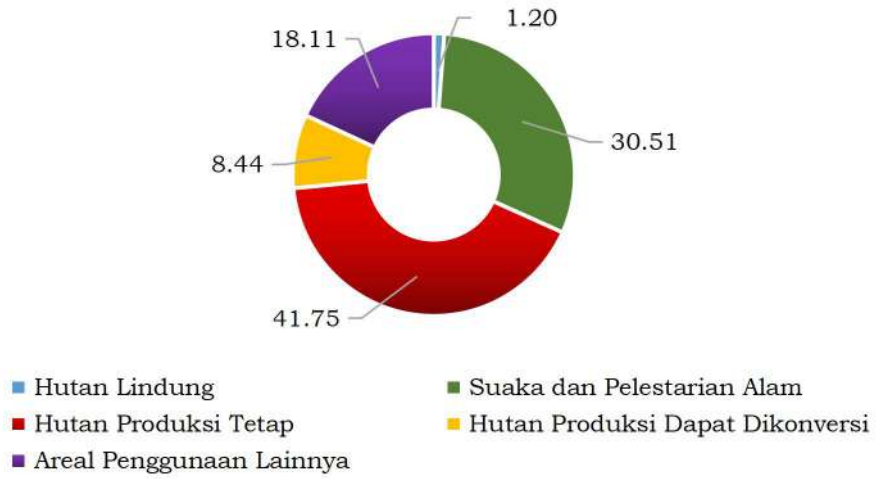
Tabel 2.4
Luasan Penggunaan Lahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Uraian	Hutan Lindung	Suaka dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	Areal Penggunaan Lainnya	Total
Penggunaan Lahan (ha)	7.217,28	183.378,9	250.971,2	50.727	108.840,62	601.135

Sumber: BPS Kepulauan Mentawai

Luasan penggunaan lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai didominasi oleh kawasan hutan dengan persentase sekitar 81,89 persen dan areal penggunaan lainnya sekitar 18,11 persen. Untuk luasan hutan produksi tetap menjadi kawasan hutan dengan persentase sebesar 41,75 persen atau seluas 250.971,2 ha dan kawasan suaka dan pelestarian alam sebesar 30,51 persen atau seluas 183.378,9 ha, kawasan hutan lindung sebesar 7.217,28 ha atau sekitar 1,20 persen dari luas wilayah. Untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 50.727 ha atau sekitar 8,44 persen dari total luas wilayah dan memiliki potensi yang besar untuk dikelola oleh masyarakat dan pemerintah. Areal penggunaan lainnya sebagai areal penopang kehidupan masyarakat sebesar 108.840,62 ha atau sekitar 18,11 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai.

Gambar 2.2
Persentase Penggunaan Lahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai



Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025

Peruntukan dan Penggunaan kawasan hutan oleh pihak swasta maupun pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain KSA/KPA yang ditunjuk seluas ± 183.397 Ha termasuk Kawasan Taman Nasional Siberut (TNS) di Pulau Siberut melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor K.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 96.904 ha, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 147.213 Ha, peruntukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 9.906 Ha di Provinsi Sumatera Barat, Hutan Produksi (HP) yang ada di Pulau Siberut dikelola dalam bentuk IUPHHK-HA oleh PT. Salaki Summa Sejahtera seluas ± 48.420 Ha sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 794/ MENLHK/ SEKJEN/ HPL.0/9/2021 tanggal 17 September 2021, persetujuan Usaha Pemanfaatan Hutan atas Areal Hutan Produksi Periode 2024-2033 kepada PT. Minas Pagai Lumber melalui surat

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7989/MenLHK-PHL/ PUPH/ HPL.1/ 8/ 2023 seluas 78.000 Ha.

Tabel 2.5
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan
menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024

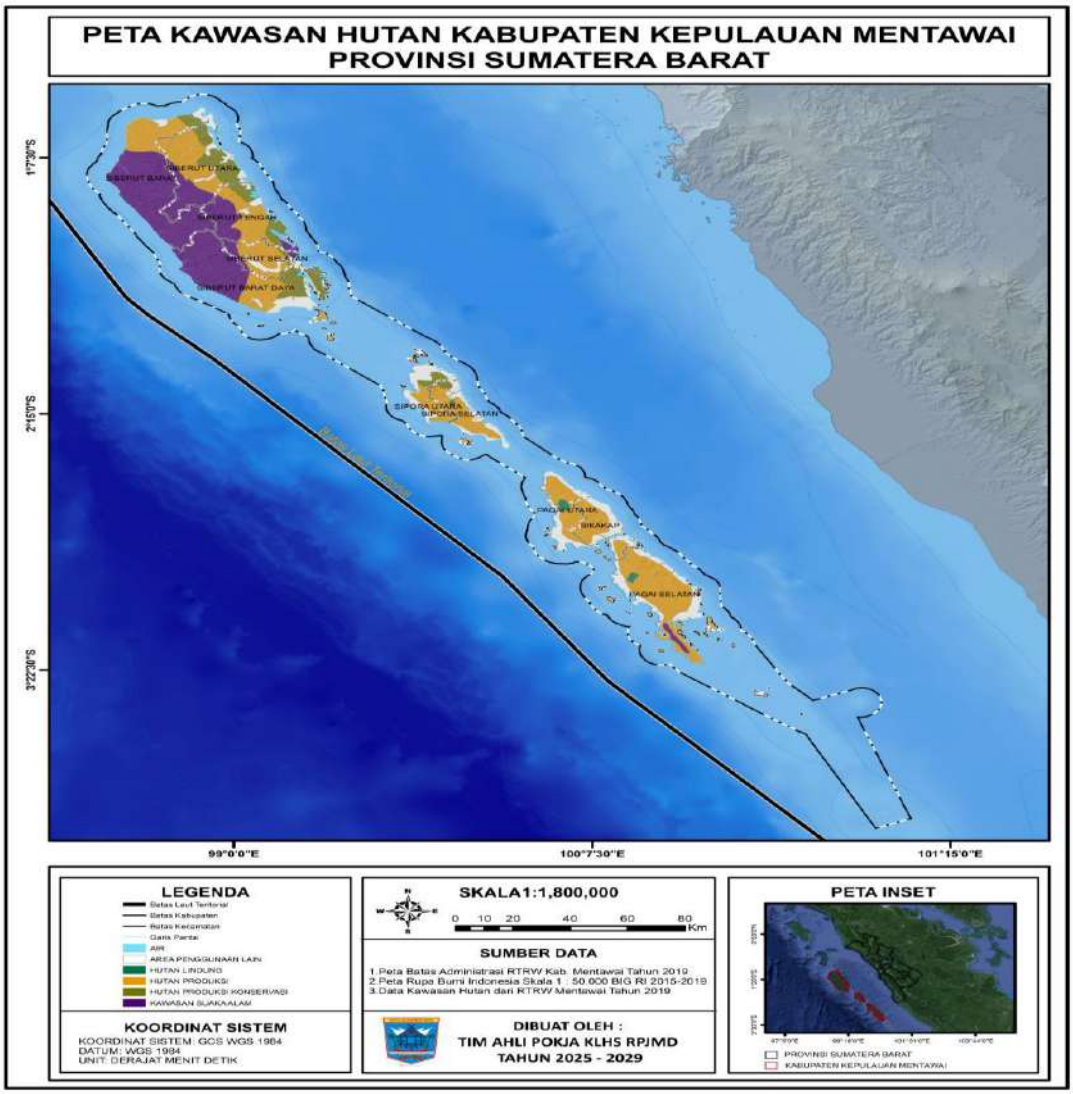
No	Kabupaten/ Kota	Hutan Lindung (Ha)	Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Produksi Tetap (Ha)	Hutan Produksi yang dapat konversi (Ha)	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
1.	Kab. Kep. Mentawai	7.212,95	183.378,9	-	250.971,2	50.727	491.992,17
2.	Kab. Pesisir Selatan	22.435,37	283.209,35	45.255,70	3.953,16	31.135,88	385.989,46
3.	Kab. Solok	117.417,24	47.388,32	10.980,59	4.477,36	9.873,36	190.136,87
4.	Kab. Sijunjung	77.268,61	41.514,22	28.107,41	19.077,37	4.468,79	170.436,40
5.	Kab. Tanah Datar	18.421,98	20.061,04	-	7.304,05	32,95	45.820,02
6.	Kab. Padang Pariaman	13.344,55	15.219,90	-	-	-	28.564,45
7.	Kab. Agam	20.000,30	28.869,41	7.321,31	2.493,89	8.767,05	67.451,96
8.	Kab. Lima Puluh Kota	116.394,79	20.140,14	20.359,92	3.904,19	11.164,21	171.963,25
9.	Kab. Pasaman	196.386,70	32.821,55	29.717,05	-	4.888,77	263.814,07
10.	Kab. Solok Selatan	82.691,41	65.939,34	53.456,60	12.780,63	13.181,74	228.049,72
11.	Kab. Dharmasraya	10.125,75	4.906,05	28.069,77	26.767,87	14.956,27	84.825,71
12.	Kab. Pasaman Barat	73.387,71	268,30	3.595,18	18.051,57	5.110,46	100.413,22
13.	Kota Padang	12.599,39	25.423,88	245,33	-	-	38.268,60
14.	Kota Solok	298,96	883,06	-	-	-	1.182,02
15.	Kota Sawahlunto	116,77	-	37,21	4.362,46	4.215,37	8.731,81
16.	Kota Padang Panjang	241,98	3,42	-	-	-	245,40
17.	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-
18.	Kota Payakumbuh	270,70	-	-	-	-	270,70
19.	Kota Pariaman	-	- 5,70	-	-	-	5,70
	Jumlah	768.615,16	769.923,31	227.146,07	353.994,82	158.482,17	2.278.161,53

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025

Luasan kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 491.992,17 ha atau sebesar 21,59% dari total kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat. Luasan kawasan ini menjadikan Kawasan hutan Kepulauan Mentawai menjadi kawasan hutan terbesar di Provinsi Sumatera Barat, tentunya ini akan memberikan

kontribusi pada menjaga dan meningkatkan fungsi ekologis seperti pengurangan gas karbon, penghasil oksigen, pengaturan siklus air dan beberapa fungsi sosial ekonomi lainnya.

Gambar 2.3
Peta Fungsi Kawasan Hutan



2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kehidupan masyarakat di Kepulauan Mentawai bertopang pada sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan dengan kontribusi PDRB sekitar 48,04 persen (BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025). Hal ini menunjukkan begitu

besarnya peran sektor primer dalam keberlangsungan hidup masyarakat di Kepulauan Mentawai serta menjadi bagian penyumbang atau berkontribusi pada total produksi barang dan jasa secara agregat di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.6
Perkembangan PDRB ADHB dan Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024 (juta rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
		PDRB ADHB	(%)	PDRB ADHB	(%)	PDRB ADHB	(%)	PDRB ADHB	(%)	PDRB ADHB	(%)
1	Kab. Kep. Mentawai	4.647,10	1,92	4.843,91	1,91	5.445,70	1,91	5.915,00	1,89	6.245,80	1,88
2	Kab. Pesisir Selatan	14.095,98	5,82	14.926,57	5,89	16.606,49	5,83	18.025,68	5,77	19.182,15	5,77
3	Kab. Solok	13.581,97	5,61	14.178,06	5,59	15.781,14	5,54	17.316,41	5,54	18.391,99	5,54
4	Kab. Sijunjung	9.136,56	3,77	9.567,67	3,77	10.668,55	3,74	11.676,77	3,74	12.488,94	3,76
5	Kab. Tanah datar	13.023,11	5,38	13.590,94	5,36	15.059,26	5,28	16.459,56	5,27	17.496,03	5,27
6	Kab. Padang Pariaman	17.934,81	7,41	18.455,09	7,28	22.193,35	7,78	25.070,85	8,03	26.808,95	8,07
7	Kab. Agam	20.376,57	8,42	21.440,41	8,45	23.924,34	8,39	26.162,66	8,38	27.975,68	8,42
8	Kab. Lima Puluh Kota	15.541,50	6,42	16.182,39	6,38	17.900,61	6,28	19.604,20	6,28	20.850,62	6,28
9	Kab. Pasaman	8.969,72	3,70	9.432,45	3,72	10.390,58	3,64	11.360,36	3,64	12.165,24	3,66
10	Kab. Solok Selatan	5.530,55	2,28	5.777,98	2,28	6.430,74	2,26	7.044,41	2,26	7.587,87	2,28
11	Kab. Dharmasraya	10.243,27	4,23	10.757,47	4,24	12.233,47	4,29	13.345,77	4,27	14.327,63	4,31
12	Kab. Pasaman Barat	15.253,00	6,30	15.933,88	6,28	17.875,83	6,27	19.544,80	6,26	21.115,66	6,36
13	Kota Padang	62.181,01	25,68	65.178,86	25,70	72.978,95	25,60	79.704,67	25,52	84.182,56	25,34
14	Kota Solok	4.041,64	1,67	4.251,89	1,68	4.793,15	1,68	5.262,10	1,68	5.561,16	1,67
15	Kota Sawahlunto	3.656,59	1,51	3.851,69	1,52	4.389,76	1,54	4.825,30	1,54	5.058,00	1,52
16	Kota Padang Panjang	3.473,23	1,43	3.651,12	1,44	4.086,55	1,43	4.474,08	1,43	4.756,96	1,43
17	Kota Bukittinggi	8.627,53	3,56	9.026,56	3,56	10.194,02	3,58	11.131,58	3,56	11.747,42	3,54
18	Kota Payakumbuh	6.827,09	2,82	7.302,51	2,88	8.250,30	2,89	8.982,35	2,88	9.421,00	2,84
19	Kota Pariaman	4.994,09	2,06	5.258,66	2,07	5.881,85	2,06	6.435,12	2,06	6.801,89	2,05
Provinsi Sumatera Barat		242.135,34		253.608,12		285.084,63		312.341,67		332.165,55	

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Tabel 2.6 menunjukkan kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku dalam kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 1,88-1,92 persen. Kontribusi ini dapat dikategorikan masih relatif sedikit jika dibandingkan kontribusi kabupaten/kota lainnya telah di atas 5 persen dan bahkan Kota Padang dengan kontribusi terbesar yaitu

25,84 persen di tahun 2024. Rendahnya capaian ini tentunya di samping kapasitas ruang/kawasan untuk dikelola yang relatif sedikit (APL sekitar 108.840,62 ha) di sisi lain jumlah penduduk yang relatif masih sedikit dan struktur ekonomi masyarakat Mentawai masih bertumpu pada sektor primer yang belum memberikan dampak pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara signifikan.

Tabel 2.7
Kontribusi Sektor Primer Kabupaten Kepulauan Mentawai
Terhadap PDRB Sektor Primer Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024 (juta rupiah)

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep. Mentawai	2.260,83	2.366,96	2.614,90	2.865,75	3.000,49
Provinsi Sumatera Barat	54.009,58	54.886,37	60.509,71	65.800,58	71.161,99
Persentase (%)	4,19	4,31	4,32	4,36	4,22

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Tabel 2.7 menunjukkan kontribusi sektor primer (pertanian, perternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) belum memberikan kontribusi signifikan pada total PDRB sektor primer di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2020-2024 yaitu hanya sebesar 4,19-4,36 persen atau dengan rata-rata kontribusi sebesar 4,28 persen. Hal ini menunjukkan belum optimalnya produktivitas komoditi sektor primer di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.8
Kontribusi Sektor Pariwisata/Jasa Kabupaten Kepulauan Mentawai
Terhadap PDRB Sektor Pariwisata/Jasa
Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024 (juta rupiah)

Transportasi, Pergudangan, Akomodasi dan Makan Minum	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep. Mentawai	433,21	401,31	469,81	468,58	502,04
Provinsi Sumatera Barat	28.254,07	29.251,24	34.923,07	39.637,83	41.578,19
Persentase (%)	1,53	1,37	1,35	1,18	1,21

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Sebagai salah satu tujuan destinasi pariwisata khususnya wisata bahari seperti selancar (*surfing*), *snorkling* dan wisata pantai, kontribusi sektor pariwisata yang dilihat dari aktivitas Transportasi, Pergudangan, Akomodasi dan Makan Minum juga belum memberikan kontribusi pada sektor yang sama di Provinsi Sumatera Barat. Tabel 2.8 menunjukkan kontribusi sektor pariwisata/jasa di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat kecil yaitu pada kisaran 1,2-1,53 persen atau dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,33 persen dari total PDRB sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan pengembangan sektor jasa belum optimal dalam menarik kunjungan wisatawan khususnya wisatawan nusantara yang meningkatkan *occupancy* dan lama tinggal (*length of stay*) di Kepulauan Mentawai selain *branding* yang tetap dipromosikan juga hal yang perlu diperhatikan adalah *hospitality* dan pengembangan destinasi melalui 6 A komponen pengembangan pariwisata yang terdiri dari *attraction, amenities, accessibility, accommodation, activity,* dan *ancillary.*

Tabel 2.9
Kontribusi Sektor Konstruksi Kabupaten Kepulauan Mentawai
Terhadap PDRB Sektor Konstruksi
Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024 (juta rupiah)

Konstruksi	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep. Mentawai	613,16	661,81	764,04	837,87	879,81
Provinsi Sumatera Barat	24.584,73	25.775,65	28.702,17	31.758,36	33.562,98
Persentase (%)	2,49	2,57	2,66	2,64	2,62

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Kontribusi sektor konstruksi Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap total PDRB sektor konstruksi di Provinsi Sumatera Barat

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir belum menunjukkan pengaruh yang signifikan yaitu pada kisaran 2,49-2,66 persen atau dengan rata-rata sebesar 2,60 persen. Hal ini menunjukkan belum masifnya pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan aktivitas investasi yang ada di Kepulauan Mentawai belum menunjukkan kontribusi yang besar dalam akumulasi investasi secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat. Aktivitas investasi ini di kategorikan sebagai komponen pembentukan modal tetap bruto dalam PDRB berdasarkan pengeluaran. Berdasarkan Tabel 2.10 menunjukkan kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PMTB Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 5 tahun masih sangat kecil yaitu pada angka 0,00192 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa akumulasi aset tetap di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai bentuk investasi modal tidak mengalami peningkatan yang berarti atau tidak begitu berkembang secara *time series* jika dibandingkan dengan akumulasi Pembentukan Modal Tetap Bruto di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.10
Kontribusi PMTB Kabupaten Kepulauan Mentawai
PMTB PDRB Berdasarkan Pengeluaran
Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024 (juta rupiah)

Pembentukan Modal Tetap Bruto	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep. Mentawai	1.394,20	1.462,99	1.601,98	1.797,93	1.873,46
Provinsi Sumatera Barat	72.587.050,51	76.010.282,24	83.802.012,69	92.519.704,43	97.828.078,42
Persentase (%)	0,00192	0,00192	0,00191	0,00194	0,00192

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata, identifikasi sektor unggulan menjadi hal yang sangat penting. Sektor unggulan merupakan sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di suatu daerah dibandingkan dengan wilayah lain. Keunggulan ini ditunjukkan oleh tingginya kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat produktivitas, serta potensi pengembangan yang dimilikinya. Penetapan sektor unggulan menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena dapat menjadi prioritas dalam alokasi sumber daya, pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, serta promosi investasi. Dengan mengenali sektor-sektor yang memiliki kinerja dan potensi terbaik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang efektif dan berbasis potensi lokal.

Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan adalah analisis *Location Quotient* (LQ). Melalui pendekatan ini, dapat diketahui sektor-sektor ekonomi yang memiliki konsentrasi lebih tinggi dibandingkan wilayah acuan (misalnya provinsi atau nasional), sehingga berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan memiliki kemampuan untuk mendorong ekspor antarwilayah. Dengan demikian, analisis terhadap sektor unggulan tidak hanya membantu dalam memahami struktur ekonomi suatu daerah, tetapi juga menjadi dasar dalam menetapkan

strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran, berorientasi pada potensi lokal, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. *Location Quotient* (LQ), yaitu alat analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar keunggulan atau konsentrasi suatu sektor ekonomi di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah acuan (biasanya provinsi atau nasional). Pendekatan LQ pada penelitian dihitung dengan rumus :

$$LQ = \frac{Y_{ij}/Y_j}{Y_i/Y}$$

Keterangan:
Yij : PDRB sektor i di Kabupaten Kepulauan Mentawai
Yj : PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai
Yi : PDRB sektor i di Sumatera Barat
Y : PDRB Sumatera Barat

Berdasarkan rumus, ada dua kemungkinan nilai LQ yang dapat diperoleh, yaitu:

a. Jika nilai LQ ≥ 1, mempunyai arti bahwa peranan sektor i di Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih besar dibandingkan dengan peranan sektor i di Provinsi Sumatera Barat. Sektor ini disebut sektor unggul atau basis.
b. Jika nilai LQ < 1, mempunyai arti bahwa sektor i di Kabupaten Kepulauan Mentawai peranannya lebih kecil dibandingkan dengan sektor i di Provinsi Sumatera Barat. Sektor ini disebut sektor non unggul atau non basis.

Berdasarkan perhitungan koefisien LQ masing-masing sektor pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, terdapat 3 sektor

yang terkategori sektor basis dan 14 sektor yang terkategori non basis. 3 sektor ini terkategori sektor basis sebab sektor ini mempunyai nilai rata-rata LQ dari tahun 2020-2024 lebih besar dari 1, artinya sektor-sektor tersebut mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sektor-sektor tersebut adalah 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2) Konstruksi, serta 3) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Disamping itu terlihat bahwa nilai LQ sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,18 yang lebih besar dari 1 menunjukkan sektor yang dominan dalam menunjang perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat terkonsentrasi pada beberapa sektor tertentu, terutama sektor primer seperti pertanian.

Tabel 2.11
Hasil Perhitungan *Location Quotient* PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020–2024

No	Lapangan Usaha	Y ij / Y j (%)	Yi / Y (%)	Rata- Rata LQ	Kriteria
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	47,86	21,92	2,18	Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	1,59	3,92	0,40	Non Basis
C	Industri Pengolahan	2,95	9,25	0,32	Non Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,10	0,26	Non Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,10	0,04	Non Basis
F	Konstruksi	13,72	9,22	1,49	Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,13	16,64	0,85	Non Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	6,90	10,46	0,66	Non Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,73	1,09	0,67	Non Basis

No	Lapangan Usaha	Y ij / Y j (%)	Yi / Y (%)	Rata- Rata LQ	Kriteria
J	Informasi dan Komunikasi	1,41	8,71	0,16	Non Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,12	2,96	0,04	Non Basis
L	Real Estat	0,97	2,02	0,48	Non Basis
M, N	Jasa Perusahaan	0,05	0,44	0,11	Non Basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,78	5,52	1,23	Basis
P	Jasa Pendidikan	1,17	4,18	0,28	Non Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	1,65	0,45	Non Basis
R, S, T, U	Jasa lainnya	0,86	1,81	0,48	Non Basis

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menempati posisi dominan dengan nilai LQ sebesar 2,18, yang menunjukkan bahwa sektor ini memiliki keunggulan komparatif sangat kuat dibandingkan Provinsi Sumatera Barat. Kontribusi sektor ini terhadap total PDRB Kabupaten jauh lebih besar dibandingkan kontribusinya di tingkat provinsi. Hal ini mencerminkan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor primer, yang lazim dijumpai di daerah kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang besar namun minim aktivitas industri hilir.

Selain sektor pertanian, sektor Konstruksi juga menunjukkan karakteristik sebagai sektor basis dengan nilai LQ sebesar 1,49. Ini dapat mengindikasikan adanya aktivitas pembangunan infrastruktur yang cukup aktif selama periode 2020–2024. Besarnya kontribusi sektor konstruksi juga dapat mencerminkan proyek-proyek pembangunan yang sedang digencarkan oleh pemerintah daerah, seperti pembangunan fasilitas umum, jalan, atau sarana transportasi

yang penting bagi wilayah kepulauan. Sektor ketiga yang masuk kategori basis adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dengan LQ sebesar 1,23. Hal ini lazim terjadi di daerah-daerah tertinggal atau 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), di mana sektor pemerintahan menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah masih menjadi salah satu pendorong utama kegiatan ekonomi lokal, sedangkan ada 14 sektor non basis yang mempunyai nilai rata-rata LQ dari tahun 2020-2024 lebih kecil dari 1. Sektor-sektor ini disebut sektor non basis sebab sektor ini mempunyai nilai rata-rata LQ dari tahun 2020-2024 lebih kecil dari 1. Dengan makna bahwa sektor-sektor tersebut mempunyai kontribusi yang lebih kecil perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sektor-sektor tersebut adalah 1) Pertambangan dan Penggalian, 2) Industri Pengolahan, 3) Pengadaan Listrik dan Gas, 4) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 5) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 6) Transportasi dan Pergudangan, 7) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 8) Informasi dan Komunikasi, 9) Jasa Keuangan dan Asuransi, 10) Real Estate, 11) Jasa Perusahaan, 12) Jasa Pendidikan, 13) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta 14) Jasa lainnya.

Tipologi Klassen merupakan suatu metode untuk menentukan *output* sektor tertentu yang dihasilkan suatu daerah berdasarkan

pertumbuhan dan kontribusi *output* sektor tersebut dibandingkan dengan pertumbuhan dan kontribusi *output* rata-rata suatu wilayah. Tipologi Klassen mengklasifikasikan sektor berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kontribusi terhadap nilai rata-rata output pada suatu daerah. Kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Sektor yang berada pada kuadran I (sektor maju) disebut sektor unggulan. Pendekatan Tipologi Klassen dihitung berdasarkan pertumbuhan (Si) dan kontribusi (Ski) masing-masing sektor pembentuk PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut lapangan usaha.

Tabel 2.12
Klasifikasi Sektor Unggulan Menurut Tipologi Klassen

Kuadran I	Kuadran II
Sektor Maju (*Developed Sector*) si > s dan ski > sk	Sektor Berkembang (*Stagnant Sector*) si < s dan ski > sk
Kuadran III	**Kuadran IV**
Sektor Potensial (*Depeloping Sector*) si > s dan ski < sk	Sektor Tertinggal (*Under developed Sector*) si < s dan ski< sk

Sjafrizal (2018)

Keterangan :
si : pertumbuhan sektor i dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai
s : rata-rata pertumbuhan seluruh sektor dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai
Ski : kontribusi sektor i terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai
sk : rata-rata kontribusi seluruh sektor terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tabel 2.13
Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pembangunan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Sektor	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,46	47,88
2	Pertambangan dan Penggalian	3,08	1,59
3	Industri Pengolahan	2,86	2,96
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,99	0,03

No	Sektor	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,63	0,00
6	Konstruksi Transportasi dan Pergudangan	3,50	13,70
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,23	14,12
8	Transportasi dan Pergudangan	-4,62	6,91
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,96	0,72
10	Informasi dan Komunikasi	7,34	1,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,12	0,12
12	Real Estate	3,82	0,97
13	Jasa Perusahaan	3,59	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,42	6,78
15	Jasa Pendidikan	3,99	1,17
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,96	0,74
17	Jasa lainnya	5,53	0,86
	Rata - Rata	3,76	5,88

Sumber : BPS (Data Diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan dan kontribusi sektor pembangunan kurun waktu 2020-2024 sebagaimana Tabel 2.13 didapat bahwa ada 1 sektor yang berada pada Kuadran I atau sektor yang terkategori Maju. Sektor ini terkategori maju sebab sektor ini mempunyai pertumbuhan dan kontribusi di atas rata-rata. Sektor-sektor tersebut adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Terdapat 4 sektor yang berada pada Kuadran II atau sektor yang terkategori Berkembang. Sektor ini terkategori berkembang karena pertumbuhan sektor ini di bawah rata-rata sedangkan kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai di atas rata-rata. Sektor tersebut adalah 1) Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan, 2) Konstruksi, 3) Transportasi dan Pergudangan, dan 4) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Tabel 2.14
Klasifikasi Sektor-Sektor Pembangunan Berdasarkan Tipologi Klassen
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Pertumbuhan / Kontribusi	Pertumbuhan di atas Rata – Rata (si > s)	Pertumbuhan di Bawah Rata – Rata (si < s)
Kontribusi di Atas Rata – Rata (ski > k)	1. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor SEKTOR MAJU	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Konstruksi Transportasi dan Pergudangan 3. Transportasi dan Pergudangan 4. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib SEKTOR BERKEMBANG
Kontribusi di Bawah Rata – Rata (ski < k)	1. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3. Informasi dan Komunikasi 4. Jasa Keuangan dan Asuransi 5. Real Estate 6. Jasa Pendidikan 7. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8. Jasa lainnya SEKTOR POTENSIAL	1. Pertambangan dan Penggalian 2. Industri Pengolahan 3. Pengadaan Listrik dan Gas 4. Jasa Perusahaan SEKTOR TERTINGGAL

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (Data Diolah)

Terdapat 8 sektor yang berada pada Kuadran III atau sektor yang terkategori Potensial. Sektor-sektor ini disebut potensial sebab sektor-sektor ini pertumbuhan di atas rata-rata namun kontribusinya di bawah rata-rata. Sektor-sektor tersebut adalah 1) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 3) Informasi dan

Komunikasi, 4) Jasa Keuangan dan Asuransi, 5) Real Estate, 6) Jasa Pendidikan, 7) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan 8) Jasa lainnya. Kemudian, terdapat 4 sektor yang berada pada Kuadran IV atau sektor yang terkategori Tertinggal. Sektor ini terkategori tertinggal karena sektor ini mempunyai pertumbuhan dan kategori di bawah rata-rata. Sektor-sektor tersebut adalah 1) Pertambangan dan Penggalian, 2) Industri Pengolahan, 3) Pengadaan Listrik dan Gas, dan 4) Jasa Perusahaan.

Analisis *Shift-Share* merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengukur perubahan (*shift*) dan kontribusi (*share*) sektor atau sub sektor terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pendekatan ini menyoroti tiga komponen utama yang memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi daerah:

1. *National Share* (*Regional Share*): Menggambarkan pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional atau luar daerah terhadap sektor-sektor di suatu wilayah.
2. *Proportionality Shift*: Menunjukkan sejauh mana sektor di daerah memiliki kesamaan pola pertumbuhan dengan sektor yang sama di tingkat nasional. Sektor yang tumbuh lebih cepat secara nasional cenderung menjadi sektor unggulan.
3. *Differential Shift* (*Competitiveness Effect*): Menggambarkan keunggulan kompetitif atau kekhasan lokal, seperti ketersediaan lahan subur, potensi sumber daya alam, atau kualitas sumber

daya manusia, yang membuat suatu sektor tumbuh lebih cepat dibandingkan secara nasional.

Metode *Shift-Share* di dasarkan pada Teori Basis Ekspor (*Export-Based Model*) dan Teori Ekonomi Basis (*Economic-Based Model*), yang menekankan pentingnya potensi ekonomi spesifik daerah sebagai penggerak utama pembangunan wilayah. Berbeda dengan model pertumbuhan ekonomi seperti Model Solow, yang lebih fokus pada faktor-faktor makro seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi, model *Shift-Share* lebih kontekstual dan aplikatif untuk pembangunan daerah karena mempertimbangkan keunggulan lokal secara langsung. Teknik ini sangat bermanfaat untuk:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, baik dari pengaruh nasional maupun kekuatan internal daerah;
2. Menentukan sektor dan sub sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif dan daya saing tinggi;
3. Menyusun kebijakan pembangunan ekonomi sektoral dan menentukan arah prioritas pembangunan berbasis potensi unggulan daerah.

Dengan demikian, *Shift-Share analysis* menjadi alat strategis dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis potensi, terutama untuk menggali sektor-sektor unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif.

Shift-Share dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\Delta e_i = e_{i,t} - e_{i,t-1} = NS_i + PS_i + DS_i$$

Dimana :
Δe_i = Perubahan Nilai Tambah Sektor i
NS_i = National (Regional) Share
PS_i = Proportional Shift
DS_i= Differential Shift

Tabel 2.15
***Shift-Share* PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha**
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020–2024 (Rp.Miliar)

No	Lapangan Usaha	*NSi*	*PSi*	*DSi*	Δe_i
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	252,19	-84,35	44,00	211,84
B	Pertambangan dan Penggalian	8,26	-4,08	3,82	8,00
C	Industri Pengolahan	15,38	-5,28	2,91	13,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	-0,01	0,04	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	-0,00	-0,00	0,02
F	Konstruksi	69,66	-6,83	24,80	87,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	71,66	16,78	4,34	92,78
H	Transportasi dan Pergudangan	39,17	7,45	-37,38	9,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,37	4,03	0,74	8,14
J	Informasi dan Komunikasi	6,88	4,50	0,22	11,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,61	0,20	-0,05	0,76
L	Real Estat	5,04	1,21	-0,43	5,82
M, N	Jasa Perusahaan	0,25	0,05	-0,02	0,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	36,64	-9,90	-0,60	26,15
P	Jasa Pendidikan	6,16	-1,79	0,42	4,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,63	1,58	0,65	5,86
R,S, T, U	Jasa lainnya	4,03	4,82	1,04	9,89
	Rata-Rata	58,12	-3,98	0,96	55,11

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Dari hasil perhitungan *Shift-Share* pada Tabel 2.15, dapat diinterpretasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai dari tahun 2020-2024 didukung oleh 2 unsur yaitu :

1. Peran daerah luar (NSi), sebesar Rp.58,12 Miliar
2. Potensi khusus daerah (DSi), sebesar Rp.0,960 Miliar

   sebab nilai kedua komponen ini positif.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak didukung oleh Potensi sektoral (PSi) sebab bernilai negatif = -Rp.3,98 Miliar. Dalam teori ekonomi modal dapat direpresentasikan dari investasi. Investasi merupakan mesin bagi percepatan pembangunan suatu daerah. Investasi dapat menyerap lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, menurunkan kemiskinan dan seterusnya. Investasi yang berkualitas akan dapat meningkatkan kualitas pembangunan itu sendiri. Investasi berkualitas dapat dilihat dari seberapa besar efisiensi investasi tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa yang mampu diproduksi.

Konsep efisiensi investasi dikenal dengan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). ICOR mengukur besarnya investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan 1 unit *output*. ICOR yang rendah menunjukkan bahwa investasi menghasilkan peningkatan *output* yang relatif besar, yang berarti investasi tersebut efisien. Sebaliknya, ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa banyak investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan peningkatan *output* yang relatif kecil, yang mengindikasikan efisiensi investasi yang rendah. Efisiensi ini sangat penting bagi pembuat kebijakan dan investor,

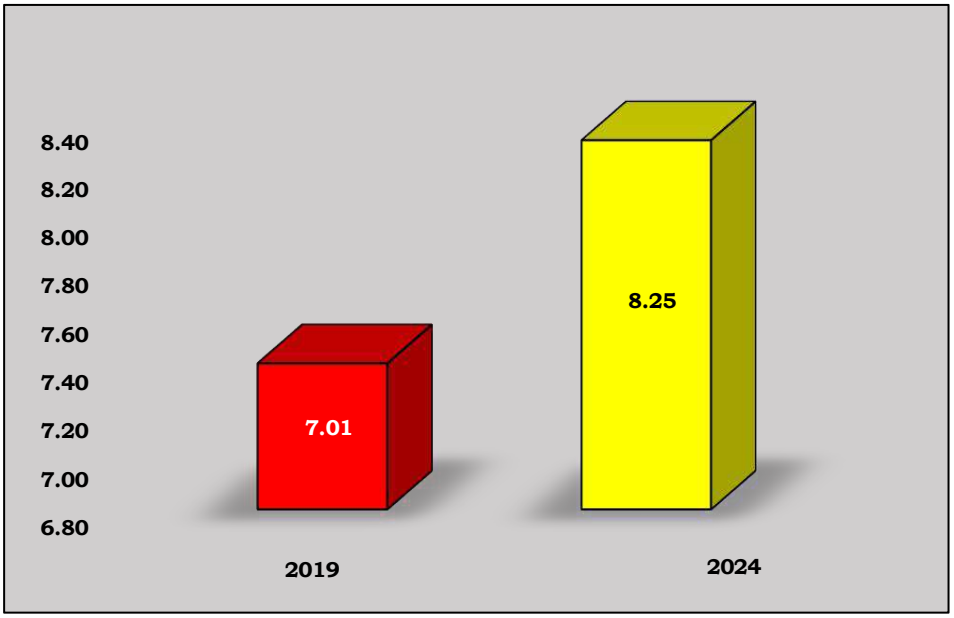
karena menunjukkan apakah tambahan investasi akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah dapat menggunakan ICOR untuk merancang kebijakan investasi. Jika ICOR suatu negara tinggi, ini bisa menunjukkan bahwa ekonomi memerlukan reformasi atau peningkatan efisiensi untuk membuat investasi lebih produktif. Hal ini bisa mendorong kebijakan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pendidikan tenaga kerja, atau mengurangi hambatan birokrasi yang menghalangi produktivitas investasi. Sebaliknya, ICOR yang rendah dapat menunjukkan bahwa investasi baru dapat menghasilkan hasil yang lebih besar, sehingga mendorong peningkatan investasi lebih lanjut.

Dalam kinerja permodalan atau investasi Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan peningkatan angka ICOR dari tahun 2019 dan 2024. Pada tahun 2019, ICOR Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai 7,01 artinya dibutuhkan investasi sebesar 7,01 miliar rupiah untuk menghasilkan tambahan 1 miliar rupiah *output*. ICOR Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkat pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2024 ICOR Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai 8,25. Artinya dibutuhkan investasi yang lebih besar dari tahun 2019 untuk menghasilkan tambahan 1 miliar rupiah *output*. Peningkatan nilai ICOR ini mengindikasikan bahwa efisiensi investasi dalam mendorong pertumbuhan *output* mengalami penurunan.

Artinya, untuk menghasilkan tambahan *output* sebesar 1 miliar rupiah pada tahun 2024, dibutuhkan investasi yang lebih besar dibandingkan tahun 2019. Fenomena ini mencerminkan bahwa efektivitas pemanfaatan investasi di daerah masih perlu ditingkatkan.

Gambar 2.4
ICOR Kabupaten Kepulauan Mentawai 2019 dan 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas 601.135 ha terdiri atas kawasan hutan lindung seluas 492.294,38 ha sekitar 81,90 persen dari luas wilayah, sedangkan 108.840,62 ha atau sekitar 18,10 persen adalah kawasan Area Penggunaan Lain (APL), memiliki potensi pengembangan wilayah Kepulauan Mentawai yang dapat dikembangkan melalui pengembangan kawasan budi daya yang telah ditetapkan antara lain.

1) Kawasan peruntukan hutan produksi.

   Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan hutan produksi tetap yang merupakan hutan yang dapat dieksploitasi

dengan perlakuan cara tebang pilih maupun cara tebang habis. Kawasan ini terdapat di seluruh kecamatan, dengan luasan 246.011,41 hektar. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan hutan yang dapat dicadangkan atau diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan diluar sektor kehutanan seperti perkebunan, pertanian, permukiman, industri. Kawasan ini terdapat di Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Siberut Barat, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Utara, Kecamatan Siberut Selatan dengan luasan kurang lebih 54.856,28 hektar.

2) Kawasan peruntukan pertanian.

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan komoditas padi sawah dan komoditas tanaman pangan lainnya dengan total luas adalah 24.934,03 ha. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan komoditi sayuran dan buah-buahan dengan total luas adalah 3.740,17 ha. Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas lahan adalah 90.818 ha dengan komoditas perkebunan skala kecil atau perkebunan rakyat khas Mentawai yaitu coklat, karet, cengkeh, pala, kelapa, nilam, manau. Kawasan perkebunan rakyat tidak merusak alam dan lingkungan sekitar hutan. Kawasan peruntukan peternakan terdapat di seluruh wilayah daerah dengan memanfaatkan areal pertanian dan perkebunan.

3) Kawasan peruntukan perikanan.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap di seluruh perairan wilayah daerah dengan pusat perikanan tangkap di Kecamatan Siberut Utara, Tuapejat, Pagai Utara dan Sikakap. Kawasan peruntukan budi daya perikanan terdiri dari budi daya perikanan laut meliputi: Muara Sigep, Malancan, Sirilogui, Saibi Samukop, Saliguma, Malilimok, Katurei (Pulau Siberut), Teraet, Teluk Beriulou, Teluk Pukarajat, Tuapejat (Pulau Sipora), Sikakap dan Betumonga (Pulau Pagai Utara), Pulau Tanopo, Makalo dan Sinaka (Pulau Pagai Selatan). budi daya perikanan darat meliputi: Bosua, Saureinu, Nemnemleleu, (Sipora Selatan), Malancan, Sirilogui, Bojakan, Sotboyak, Muara Sikabaluan, Monganpoula (Siberut Utara), Muara Siberut, Salappak, Maileppet, Muntei, Madobag, Matotonan (Siberut Selatan), Saibi Samukop, Cimpungan (Siberut Tengah), Saumanganya, Betumonga, Silabu (Pagai Utara), Matobe, Taikako (Sikakap), Desa Malakopa dan Desa Bulasat (Pagai Selatan). Kawasan Minapolitan adalah Sikakap dan Muara Siberut (Siberut Selatan). Kawasan pengolahan hasil perikanan memiliki prasarana pendukung, meliputi bagian wilayah Tuapejat di Kecamatan Sipora Utara dan bagian wilayah Muara Siberut di Kecamatan Siberut Selatan, Muara Sikabaluan di Kecamatan Siberut Utara, Sikakap. Prasarana pendukung kawasan pengolahan hasil perikanan terdiri atas rencana pengembangan

Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Tuapejat dan Sikakap, rencana pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuapejat, Sikakap, Muara Siberut dan Muara Sikabaluan, dan rencana pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Sikakap.

4) Kawasan peruntukan industri.

   Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan peruntukan industri rumah tangga yang dapat dikembangkan di setiap kecamatan dengan memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

5) Kawasan peruntukkan pertambangan.

   Kawasan peruntukkan pertambangan diperuntukkan untuk wilayah pertambangan terdapat di Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang memiliki potensi bahan tambang jenis bebatuan (galian C).

6) Kawasan peruntukan pariwisata.

   Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya dan sejarah terdapat di Pulau Siberut yang meliputi kawasan Madobag dan Matotonan (Siberut Selatan), Simalegi dan Simatalu (Siberut Barat), Bojakan (Siberut Utara), Sagulubbek (Siberut Barat Daya), benteng peninggalan Jepang di Sioban (Sipora Selatan). Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat dipulau Siberut yang meliputi kawasan Sigapokna, Simalegi dan Simatalu (Siberut Barat), Bojakan

(Siberut Utara), Sibudda Oinan (Siberut Tengah), Matotonan dan Madobag (Siberut Selatan), Katurei dan Sagulubbek (Siberut Barat Daya). Kawasan peruntukan pariwisata bahari terdapat di Silabu (Pagai Utara), Sikakap, Malakopa dan Sinakak (Pagai Selatan), Katiet, Bosua, Gobi dan Pulau Siruamata (Sipora Selatan), Mapaddegat, Teluk Pukarajat, Taraet dan Matuptuman (Sipora Utara), Teluk Katurei dan Taileleu (Siberut Barat Daya), Saibi Samukop dan Saliguma (Siberut Tengah), Sirilogui (Siberut Utara), dan Pulau-pulau kecil lainnya. Kawasan peruntukan ekonomi khusus pariwisata terdapat di Mapaddegat seluas 300 ha, Katiet, Gobi dan Bosua 100 ha, Teluk Katurei 300 ha, Taraet 50 ha, Matutuman Buggei Siata 50 ha. Kawasan peruntukan konservasi budaya terdapat di Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan dan Sakudei Kecamatan Siberut Barat Daya, Simatalu Kecamatan Siberut Barat.

7) Kawasan peruntukan permukiman.

Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan yaitu Muara Siberut (PKW), Tuapejat (PKL), Sikakap (PKLp), Muara Sikabaluan, Saibi Samukop, Pasakiat Taileleu, Saumanganyak, Bulasat, Sido Makmur dan Sioban. Kawasan peruntukan perdesaan yaitu pusat lingkungan pemukiman di setiap dusun diluar kawasan perkotaan dan kawasan hunian tetap (huntap) korban tsunami.

8) Kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, seperti kawasan bandara, kawasan militer AD, AL, kepolisian dan satuan keamanan dan pertahanan lainnya.

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dikelompokkan berdasarkan potensi komoditas/ sumber daya alam dan karakteristik wilayahnya. Beberapa Kawasan pengembangan wilayah, antara lain:

1. Kawasan pertanian, perkebunan/ mandiri pangan

Masyarakat Mentawai dengan mayoritas sumber ekonominya berasal dari sektor primer yaitu pertanian dan perkebunan memiliki berbagai komoditas unggulan sebagai sumber mata pencarian utama antara lain pisang, keladi, sagu, cengkeh, pala, kelapa. Komoditas unggulan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, hilirisasi komoditas unggulan sangat potensial dilakukan dalam memberikan nilai tambah di setiap produk komoditas unggulan sektor pertanian/ perkebunan. kawasan pengembangan pertanian tanaman pisang pada Desa Monganpoula, Desa Bulasat, Pengembangan Sagu di Desa Muntei, Desa Madobag. Kawasan pengembangan holtikultura pada Desa Goisoionan, Desa Bukit Pamewa, Desa Sikakap, Desa Matobe. Kawasan pertanian sawah pada Desa

Saureinu, Desa Nemnemleleu, Desa Matobe, Desa Saumanganya, Desa Sotboyak. Pembangunan ekonomi pedesaan dengan konsep agribisnis juga dapat dikembangkan dalam pembangunan desa seperti pada kawasan perkebunan cengkeh di Desa Sirilogui, kawasan perkebunan kelapa di Taraet Desa Betumonga dan Desa Sagulubbeg.



Melalui pengembangan pertanian berbasis kawasan tentunya akan memberikan kemudahan dalam hal integrasi dalam hal keterkaitan *input* dan *output* (*backward dan forward linkage*), efektivitas dan efisiensi skala ekonomi tentunya dalam jengka Panjang akan memberi dampak pada pengembangan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta membentuk kemandirian desa dan masyarakat.

2. Kawasan perikanan/kelautan

   Pembangunan sektor perikanan, kelautan diharapkan dapat dipercepat dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh. Kemudahan atau peluang yang biasanya ada perlu dikembangkan di daerah-daerah pedesaan, seperti

prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi di sentra-sentra produksi, yang didukung sarana prasarana, energi, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan dan sumber daya manusia yang memadai.

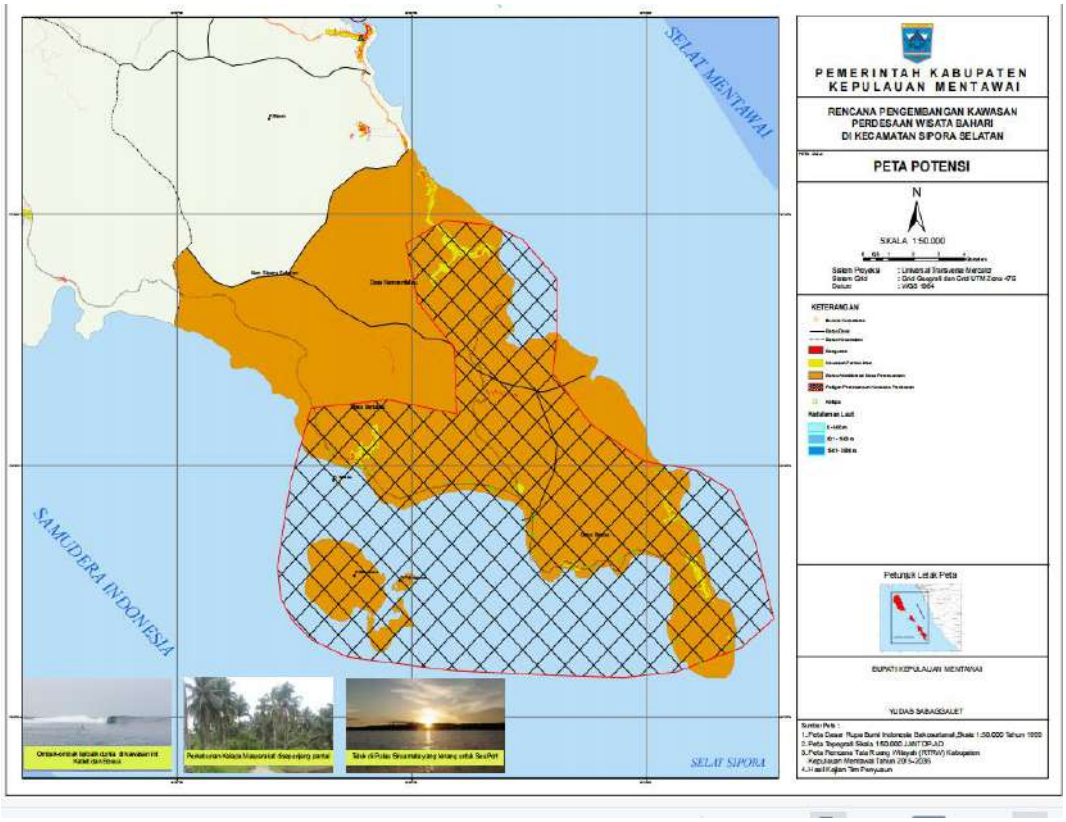
Pengembangan kawasan budi daya perikanan laut sangat potensial dikembangkan di kawasan perikanan di Desa Sikakap, Desa Sinaka, Desa Matobe, Desa Sikabaluan, Desa Tuapejat, Desa Muara Siberut. Selain itu juga dengan pembandan kawasan budi daya kepiting bakau, lobster dan udang di kawasan Desa Katurei, Desa Sikakap, Desa Pasakiat Taileleu. Produksi ikan yang melimpah juga potensial untuk pengembangan industri pengolahan ikan asin, ikan asap dan pengalengan ikan di kawasan Desa Sikabaluan Dusun Bose, Desa Sigapokna. Begitu juga dengan potensi pengembangan kawasan budi daya perikanan darat sangat memungkinkan dikembangan pada kawasan di Desa Saureinu, Desa Sido Makmur, Desa Sikakap.





3. Kawasan Pengembangan Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi sektor yang potensial dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai daerah kepulauan tentunya panorama alam dan lautnya sangat memukau dan potensial untuk dikembangkan.



Sektor pariwisata menjadi unggulan antara lain wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Wisata bahari yang menjadi sangat potensial dikembangkan di Kepulauan Mentawai hampir pada seluruh kawasan pesisir, Namun beberapa lokasi yang menjadi prioritas pengembangan seperti Desa Bosua pada kawasan Katiet, Desa Nemnemleleu, Desa Beriulou.

Arah pengembangan produk dan pariwisata bahari selain *surfing*, *snorkling, diving* juga dikembangkan wisata ekowisata, budaya,

kano dan pengembangan kuliner serta akomodasi yang ramah lingkungan, memadai dengan kualitas standar internasional.

Arah pengembangan produk dan pariwisata bahari selain *surfing, snorkling, diving* juga dikembangkan wisata ekowisata, budaya, kano dan pengembangan kuliner serta akomodasi yang ramah lingkungan, memadai dengan kualitas standar internasional.

Zona Wilayah	Aktivitas Pariwisata Bahari
Desa Katurei	- Pemandangan alam Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan *diving*, *surfing* dan *snorkling* - Wisata pulau-pulau kecil
Desa Taileleu	- Pemandangan alam Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan *diving*, *surfing* dan *snorkling* - Wisata pulau-pulau kecil
Desa Bosua/ Katiet	- Surfing - Diving, snorkling - Sewa peralatan dan perlengkapan *diving*, *surfing* dan *snorkling*

Wisata Alam dan Wisata Budaya menjadi bagian yang saling melengkapi yang ada di Kepulauan Mentawai. Potensi pengembangannya ada dibeberapa titik di wilayah Pulau Siberut seperti di Desa Matotonan, Desa Madobag, Desa Muntei, dimana kelestarian alam dan budaya masyarakat yang masih terjaga dan tetap eksis hingga saat ini.

Zona Wilayah	Aktivitas pariwisata
Desa Matotonan	- Pemandangan alam pedalaman Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Manfaat Lansekap, misalnya jalur *tracking* ke Taman Nasional; - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan *camping*; - Pendidikan dan keterampilan membuat tato dan turuk Mentawai

Zona Wilayah	Aktivitas pariwisata
Desa Madobag	- Pemandangan alam pedalaman Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Manfaat Lansekap, misalnya jalur *tracking* ke Taman Nasional; - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan *camping*; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai.
Desa Muntei	- Pemandangan alam pedalaman Siberut - atraksi lingkungan dan budaya, - Manfaat Lansekap, misalnya jalur *tracking* ke Taman Nasional; - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan *camping*; - Pendidikan dan keterampilan membuat tato dan turuk Mentawai.
Desa Maileppet	- Pemandangan alam/bahari - Atraksi lingkungan dan budaya, - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan *camping*; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk dalam kawasan potensi yang rawan bencana baik berupa gempa bumi (tektonik), gelombang besar tsunami, abrasi pantai dan longsor. Jumlah 43 desa yang ada, 33 desa diantaranya merupakan desa pesisir, yang pada kondisi saat ini kawasan pesisir merupakan kawasan rawan bencana terhadap bahaya tsunami. Dilihat dari tingkat bahaya bencana yang akan terjadi bahwa tingkat bahaya bencana diperoleh berdasarkan luas terdampak bahaya (rendah, sedang dan tinggi) yang memiliki persentase luas bahaya terdampak paling besar.

Tabel 2.16 memperlihatkan bahwa tingkat bahaya tinggi berpotensi terjadi terhadap bencana gelombang Ekstrem dan abrasi, tsunami, cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir, bencana gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan sedangkan tingkat bahaya sedang

terhadap bencana kekeringan. Indeks bahaya disesuaikan dengan standar parameter yang telah ditentukan oleh BNPB dengan merujuk kepada peta bahaya setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.16
Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai

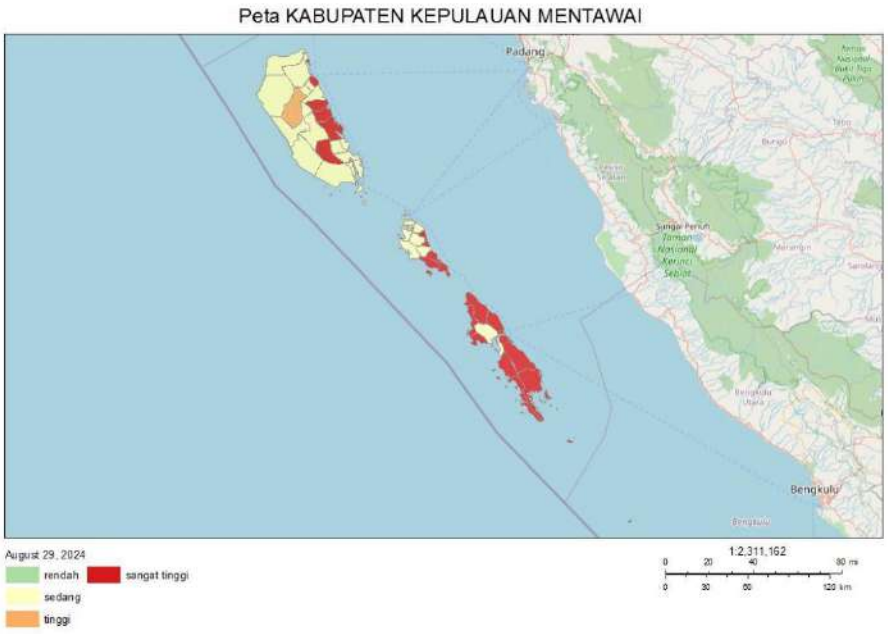
No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko
1	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi
2	Gempa Bumi	Tinggi
3	Tsunami	Tinggi
4	Cuaca Ekstrem	Tinggi
5	Tanah Longsor	Tinggi
6	Banjir	Tinggi
7	Kekeringan	Sedang
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi

Sumber: Risiko Bencana Indonesia (IRBI), 2024

Merujuk kepada Sistem Informasi Data dan Indeks Kerentanan (SIDIK) Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukan bawah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap tingkat kerentanan berkategori sedang. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang memengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya adaptasi.

Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Kondisi kerentanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada peta berikut:

Gambar 2.5
Peta Sidik Kabupaten Kepulauan Mentawai



Sumber : Sidik KLHK, 2024

Adapun sebaran per kelas kerentanan disajikan pada chart berikut:



Berdasarkan gambar, terdapat 19 desa yang memiliki kerentanan sangat tinggi terhadap perubahan iklim, 1 desa kategori tinggi dan 21 desa kategori sedang serta 2 desa kategori rendah. Agar

desa ini keluar dari kategori rentan maka indikator tersebut dapat intervensi oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikut disajikan daftar desa dengan tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim.

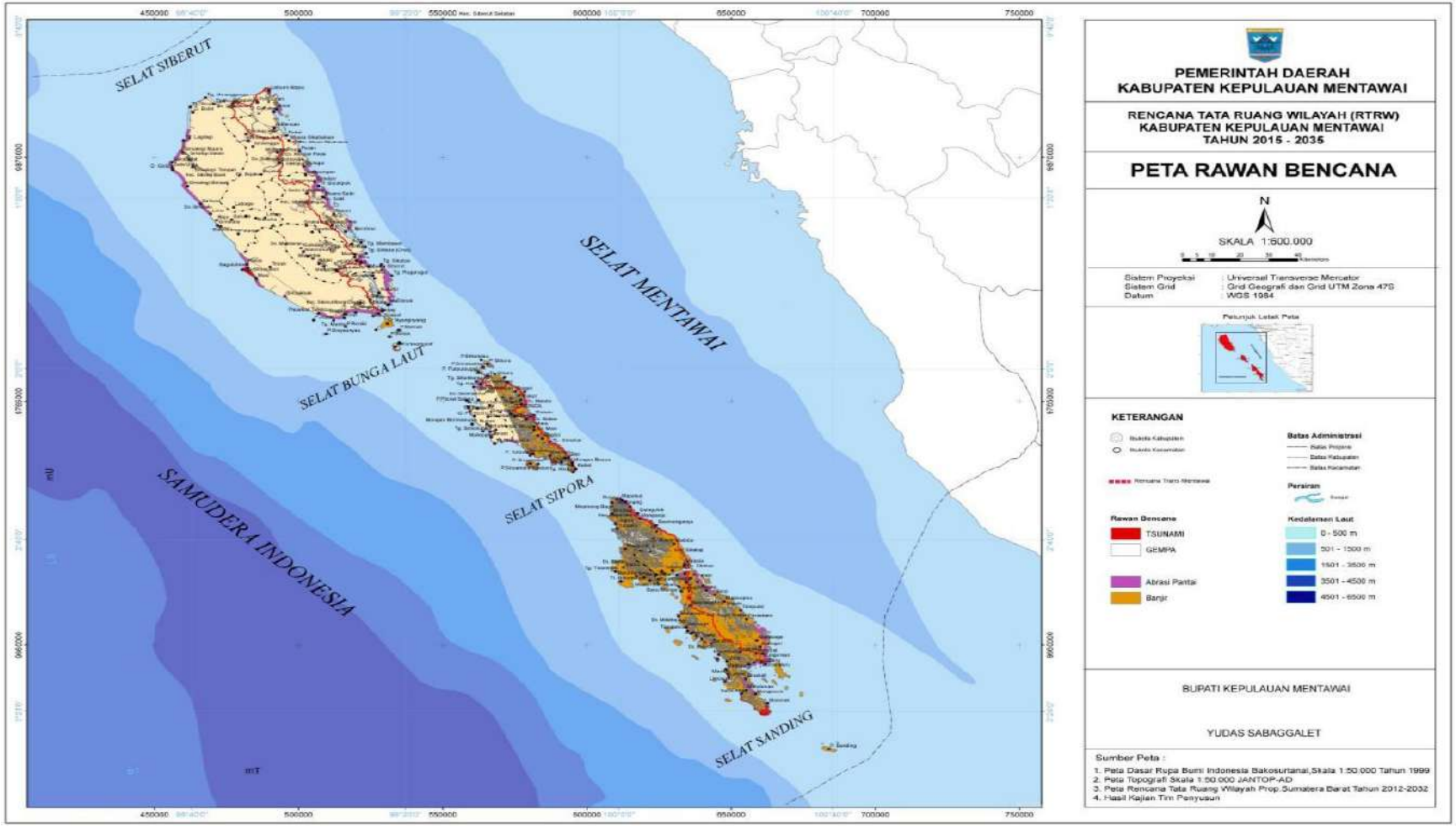
Tabel 2.17
Tingkat Kerentanan Desa Terhadap Perubahan Iklim, 2024

No.	Kecamatan	Desa	Indeks Kapasitas Adaptif	Indeks Keterpaparan dan Sensivitas	Tingkat Kerentanan
1	PAGAI SELATAN	BULASAT	0.25472	0.678	5
2	PAGAI SELATAN	SINAKA	0.27385	0.5924	5
3	PAGAI SELATAN	MAKALO	0.22351	0.5423	5
4	PAGAI SELATAN	MALAKOPA	0.38991	0.8095	5
5	SIKAKAP	TAIKAKO	0.3572	0.5903	3
6	SIKAKAP	SIKAKAP	0.37473	0.6379	5
7	SIKAKAP	MATOBE	0.37626	0.6308	5
8	PAGAI UTARA	SAUMANGANYA	0.32312	0.7528	5
9	PAGAI UTARA	SILABU	0.33681	0.6261	5
10	PAGAI UTARA	BETUMONGA	0.3125	0.6938	5
11	SIPORA SELATAN	BOSUA	0.23255	0.5339	5
12	SIPORA SELATAN	NEMNEMLELEU	0.29037	0.5826	5
13	SIPORA SELATAN	BERIULOU	0.27194	0.5279	5
14	SIPORA SELATAN	MARA	0.34448	0.4594	3
15	SIPORA SELATAN	SIOBAN	0.36329	0.6684	5
16	SIPORA SELATAN	SAUREINU	0.35092	0.5348	3
17	SIPORA SELATAN	MATOBE	0.31895	0.6119	5
18	SIPORA UTARA	BETUMONGA	0.42048	0.6594	3
19	SIPORA UTARA	GOISOOINAN	0.452	0.5064	3
20	SIPORA UTARA	BUKIT PAMEWA	0.58744	0.6822	2
21	SIPORA UTARA	SIPORA JAYA	0.49971	0.4522	3
22	SIPORA UTARA	SIDO MAKMUR	0.5954	0.6547	2
23	SIPORA UTARA	TUAPEJAT	0.49815	0.4112	3
24	SIBERUT SELATAN	MADOBAG	0.29472	0.5988	5
25	SIBERUT SELATAN	MUARA SIBERUT	0.40092	0.6467	3
26	SIBERUT SELATAN	MAILEPPET	0.55085	0.6327	3
27	SIBERUT SELATAN	MUNTEI	0.46316	0.5081	3
28	SIBERUT SELATAN	MATOTONAN	0.35085	0.4328	3
29	SEBERUT BARAT DAYA	PASAKIAT TEILELEU	0.44493	0.4116	3

No.	Kecamatan	Desa	Indeks Kapasitas Adaptif	Indeks Keterpaparan dan Sensivitas	Tingkat Kerentanan
30	SEBERUT BARAT DAYA	KATUREI	0.41428	0.4899	3
31	SEBERUT BARAT DAYA	SAGULUBBEG	0.43912	0.5513	3
32	SIBERUT TENGAH	SALIGUMA	0.25713	0.5598	5
33	SIBERUT TENGAH	SAIBI SAMUKOP	0.29675	0.6439	5
34	SIBERUT TENGAH	CIMPUNGAN	0.20406	0.6146	5
35	SIBERUT UTARA	SIRILOGUI	0.34429	0.4569	3
36	SIBERUT UTARA	MUARA SIKABALUAN	0.35557	0.6084	5
37	SIBERUT UTARA	MONGAN POULA	0.31383	0.5174	3
38	SIBERUT UTARA	SOTBOYAK	0.48841	0.4772	3
39	SIBERUT UTARA	BOJAKAN	0.29865	0.4404	4
40	SIBERUT UTARA	MALANCAN	0.38069	0.4876	3
41	SIBERUT BARAT	SIMATALU	0.37616	0.4354	3
42	SIBERUT BARAT	SIMALEGI	0.41517	0.6579	3
43	SIBERUT BARAT	SIGAPOKNA	0.41587	0.6094	3

Sumber : Sidik KLHK, 2024

Gambar 2.6
Peta Rawan Bencana



Sebagai daerah dengan potensi bencana yang besar, Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berupaya melakukan usaha-usaha mitigasi bencana untuk mengurangi dampak negatif dari setiap bencana yang terjadi. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu informasi/kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana dapat digunakan oleh berbagai pihak dan terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasional penanggulangan bencana.

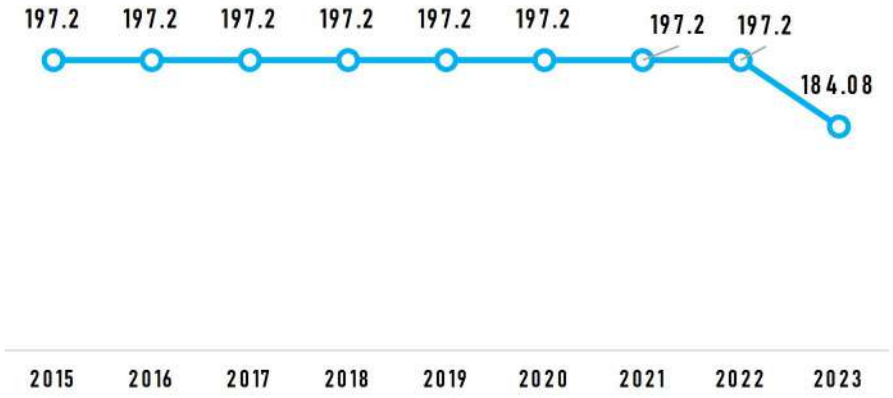
Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu dari 18 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan tsunami (Direktorat Geologi dan Sumber Daya Mineral). Tumbukan antara dua lempeng besar yakni Lempeng Samudera Hindia-Australia dengan Lempeng Benua Asia menyebabkan terbentuknya patahan sepanjang 1.650 km di pantai barat Sumatera, yang disebut dengan Mentawai Fold Zone. Tumbukan yang terjadi dapat menimbulkan gempa yang berpotensi terjadinya tsunami. Kawasan rawan tsunami meliputi seluruh kawasan pesisir Kepulauan Mentawai beserta pulau- pulau kecil lainnya, yang dapat dikelompokan menjadi tiga kategori zona kerawanan yaitu:

a. Zona Kerawanan tinggi, wilayah dengan jarak garis pantai 50 m, sepanjang pantai dengan ketinggian kontur kurang dari 10 m dpl.

b. Zona Kerawanan menengah yaitu daerah sepanjang pantai dengan kontur ketinggian 10 – 15 m dpl, dengan kemiringan lereng cukup terjal.

c. Zona kerawanan rendah yaitu wilayah sepanjang pantai dengan ketinggian 15 — 30m dpl, dengan morfologi curam dan relief tinggi atau berbukit, dan daerah ini dapat dimanfaatkan untuk evakuasi dan lokasi pengungsian.

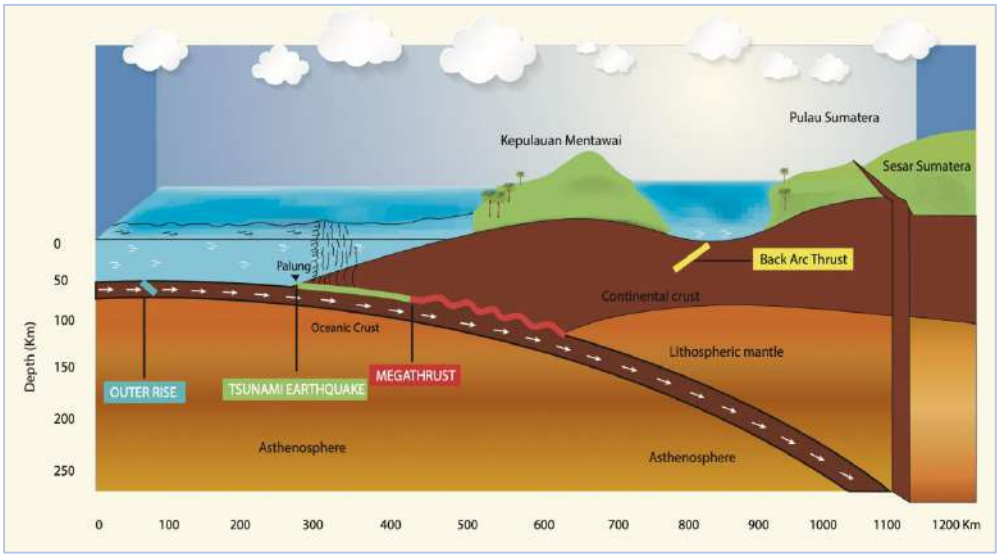
Gambar 2.7
Perkembangan Indikator Indeks Risiko Bencana
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015-2023



Sumber : IRBI BNPB

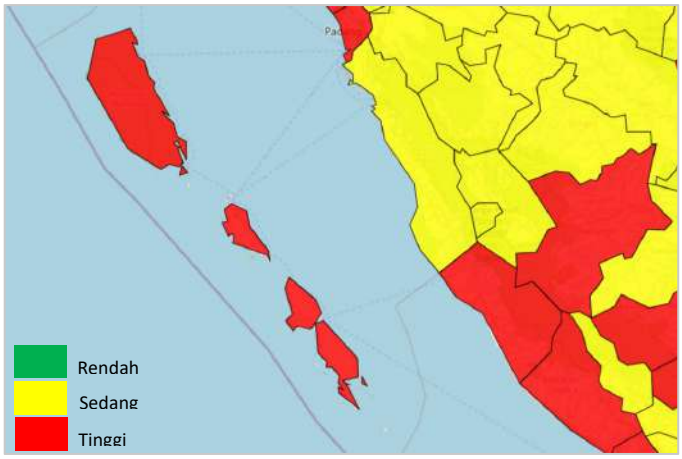
Gambar 2.7 perkembangan indikator Indeks Risiko Bencana kurun waktu 2015-2023 menunjukkan tren penurunan, yaitu dari 197,2 pada tahun 2015 turun menjadi 184,08 pada tahun 2023 meskipun capaian IRBI di Kepulauan Mentawai terlihat stagnan dalam kurun waktu 2015-2022. Penurunan angka ini di tahun 2023 menjadi indikasi ada upaya dan kesadaran masyarakat dalam mengelola potensi bencana yang besar melalui penguatan kapasitas, kepedulian dan kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana.

Gambar 2.8
Proses Terjadinya Gempa Bumi Tektonik



Salah satu bencana yang mengancam kehidupan masyarakat Mentawai adalah gempa bumi Zona Megathrust Mentawai-Siberut yang menjadi salah satu zona tumbukan lempeng yang terletak di sepanjang batas barat Pulau Sumatera, tepatnya barat Kepulauan Mentawai dengan kedalaman dangkal. Zona Megathrust Mentawai-Siberut ini merupakan hasil dari aktivitas subduksi atau pergerakan Lempeng Indo-Australia ke arah utara dan menyusup di bawah Lempeng Eurasia.

Gambar 2.9
Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023



Upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana daerah menjadi hal penting dilakukan terutama dalam pengarusutamaan kebencanaan untuk setiap sektor pembangunan. Penguatan kapasitas masyarakat dalam meminimalisir risiko dan memitigasi dampak bencana bagian penting dalam tahapan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bencana.

2.1.1.4 Aspek Demografi

Demografi dapat diartikan sebagai dinamika kependudukan manusia. Menurut Philip M. Hauser dan Otis Dudley Duncan (1959) berpendapat bahwa demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial, komposisi penduduk, serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut. Secara lebih rinci, demografi meliputi:

1. Ukuran penduduk: Jumlah total penduduk dalam suatu wilayah tertentu.
2. Struktur penduduk: Komposisi penduduk berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan agama.
3. Distribusi penduduk: Penyebaran penduduk di suatu wilayah geografis, termasuk kepadatan penduduk dan pola urbanisasi.
4. Perubahan penduduk: Bagaimana jumlah dan struktur penduduk berubah seiring waktu akibat faktor-faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi.

Secara umum keadaan kependudukan di Kepulauan Mentawai dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Secara teori (BPS), penduduk diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Hubungan antara penduduk dan pembangunan adalah hubungan yang dinamis dan kompleks. Pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan faktor-faktor kependudukan dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan seluruh penduduk. Pembangunan yang berhasil dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesetaraan. Integrasi perencanaan dengan kependudukan menjadi hal penting bagi daerah dalam mengarahkan esensi pembangunan daerah, bahwa pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibanding dengan orientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan.

Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 berjumlah 97.837 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk terpadat pada Kecamatan Sipora Utara yaitu dengan kepadatan penduduk sebesar 50,93 orang/km^2 dan tingkat kepadatan penduduk yang jarang penduduknya terdapat pada Kecamatan

Siberut Barat yaitu dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 7,33 orang/km^2.

Tabel 2.18
Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

No	Kecamatan	Luas Daerah (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (orang/km^2)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Pagai Selatan	851,28	10.575	12,42	0,73
2	Sikakap	312,60	11.156	35,69	0,78
3	Pagai Utara	371,25	6.617	17,82	1,59
4	Sipora Selatan	348,33	10.781	30,95	1,62
5	Sipora Utara	272,40	13.874	50,93	2,98
6	Siberut Selatan	328,00	11.042	33,66	1,77
7	Siberut Barat Daya	1.013,83	8.051	7,94	1,65
8	Siberut Tengah	589,75	7.892	13,38	1,69
9	Siberut Utara	782,68	9.325	11,91	0,78
10	Siberut Barat	1.163,64	8.524	7,33	1,61
2024		5.983,22	97.837	16,21	1,53
2023		5.983,22	95.068	15,29	1,56
2022		6.011,35	89.401	14,82	1,15
2021		6.011,35	88.389	19,96	0,84

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025

Laju pertumbuhan penduduk di Kepualaun Mentawai tahun 2024 sebesar 1,53 persen, artinya ada penambahan 1,5 orang penduduk dari 100 orang penduduk yang ada dan secara keseluruhan ada penambahan penduduk sebesar 1,5 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.19
Keadaan Jumlah Penduduk, Rasio Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Pagai Selatan	5.523	5.052	10.575	109,32
2	Sikakap	5.780	5.376	11.156	107,51
3	Pagai Utara	3.475	3.142	6.617	110,60

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio
		Laki-Laki	Perempuan		
4	Sipora Selatan	5.560	5.221	10.781	106,49
5	Sipora Utara	7.160	6.714	13.874	106,64
6	Siberut Selatan	5.715	5.327	11.042	107,28
7	Siberut Barat Daya	4.217	3.834	8.051	109,99
8	Siberut Tengah	4.115	3.777	7.892	108,95
9	Siberut Utara	4.848	4.477	9.325	108,29
10	Siberut Barat	4.439	4.085	8.524	108,67
	TOTAL	50.832	47.005	97.837	108,14

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan jenis kelamin seperti pada Tabel 2.19 yang dikelompokkan berdasarkan rasio jenis kelamin menunjukkan rasio sebesar 108,14 artinya jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Rasio jenis kelamin juga dinyatakan sebagai jumlah laki-laki per 100 perempuan, artinya dalam 100 orang perempuan terdapat sebanyak 108 orang laki-laki.

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur dan jenis Kelamin
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

Kelompok Umur (tahun)	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
0 - 4	3.595	3.170	6.765	113,41
5 - 9	4.698	4.376	9.074	107,36
10 - 14	5.022	4.585	9.607	109,53
15 - 19	5.178	4.983	10.161	103,91
20 - 24	4.781	4.595	9.376	104,05
25 - 29	4.395	3.980	8.375	110,43
30 - 34	3.748	3.449	7.197	108,67
35 - 39	3.908	3.530	7.438	110,71
40 - 44	3.686	3.171	6.857	116,24
45 - 49	3.043	2.874	5.917	105,88
50 - 54	2.596	2.222	4.818	116,83

Kelompok Umur (tahun)	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
55 - 59	2.133	1.967	4.100	108,44
60 - 64	1.525	1.531	3.056	99,61
65 - 69	1.158	1.146	2.304	101,05
70 - 74	662	662	1.324	100,00
75+	704	764	1.468	92,15
Total	50.832	47.005	97.837	108,14

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025

Pengelolaan tren perkembangan penduduk yang baik dapat membantu dalam memanfaatkan potensi bonus demografi dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Bonus demografi memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan suatu daerah.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan apakah suatu individu ataupun kelompok masyarakat berada pada kondisi yang sejahtera. Kesejahteraan dapat diindikasikan ketika kondisi kesehatan baik, perekonomian yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi serta kualitas hidupnya yang layak.

Pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh positif tidak serta merta memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang terdistribusi merata dan setidaknya menjadi t*rickle-down effect* yang diharapkan menetes ke bawah membantu ekonomi masyarakat dengan tetap membutuhkan

intervensi pemerintah daerah sebagai katalisator pembangunan sehingga masyarakat benar-benar merasakan arti pembangunan.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan ekonomi suatu daerah, semakin membaiknya distribusi ekonomi/ pendapatan masyarakat dan meningkatnya daya beli masyarakat serta menurunnya tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

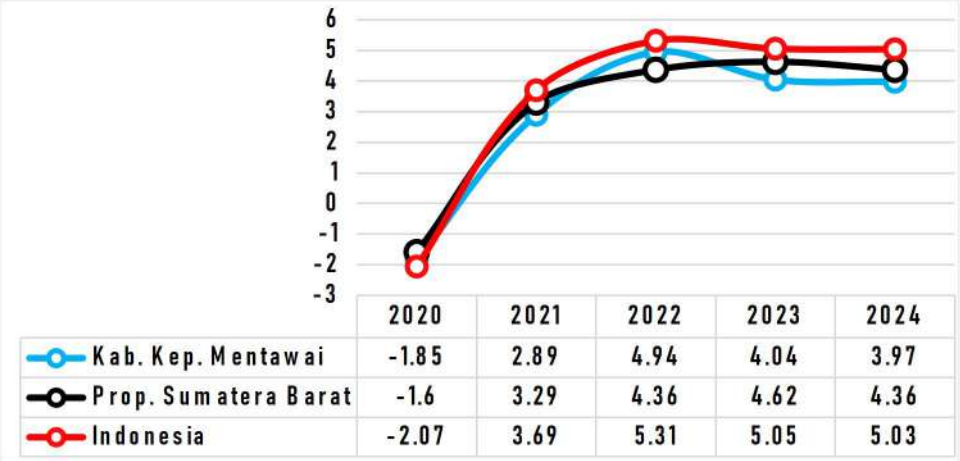
1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan secara umum. Pertumbuhan ekonomi juga sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah yang dilihat dari berbagai waktu tertentu.

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren kenaikan, terkhususnya setelah kejadian COVID-19 yang melanda pada tahun 2020. Kenaikan dalam sisi permintaan domestik dengan terbukanya aktivitas sosial ekonomi masyarakat turut menyumbang kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu dari -1,86 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,89 persen

pada tahun 2021. Hal ini sejalan dengan kenaikan secara regional untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu dari -1,6 persen tahun 2020 meningkat menjadi 3,29 persen pada tahun 2021 dan secara nasional dari -2,07 persen tahun 2020 meningkat menjadi 3,69 persen pada tahun 2021.

Gambar 2.10
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep. Mentawai	-1.85	2.89	4.94	4.04	3.97
Prop. Sumatera Barat	-1.6	3.29	4.36	4.62	4.36
Indonesia	-2.07	3.69	5.31	5.05	5.03

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2025

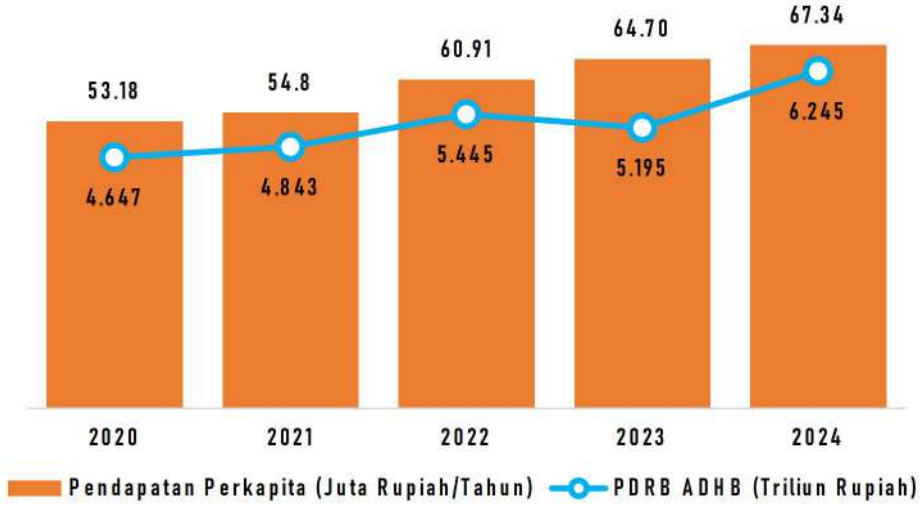
Kenaikan produksi barang dan jasa pasca COVID-19 secara masif mempengaruhi positif pada sosial ekonomi masyarakat di Kepulauan Mentawai, ini dapat terlihat pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Mentawai mencapai 4,94 persen dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024). Namun di tahun 2023 dan 2024 mengalami sedikit *decline* yaitu menjadi 4,04 persen (2023) dan 3,97 persen (2024) khususnya untuk sektor konstruksi, perdagangan, transportasi dan akomodasi/makan minuman pada tahun 2023 dan penurunan pada sektor akomodasi/makan

minuman, pertanian kehutanan dan perikanan sektor informasi dan komunikasi pada tahun 2024.

2. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah atau wilayah. Indikator ini mengacu pada rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu dalam suatu populasi dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan tingkat kemakmuran antara daerah atau wilayah yang satu dengan yang lainnya. Selain sebagai data pencapaian pembangunan daerah, pendapatan per kapita juga dapat menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi daerah. Pendapatan per kapita yang tinggi mengindikasikan tingginya daya beli masyarakat.

Gambar 2.11
Perkembangan Pendapatan Per Kapita
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2025

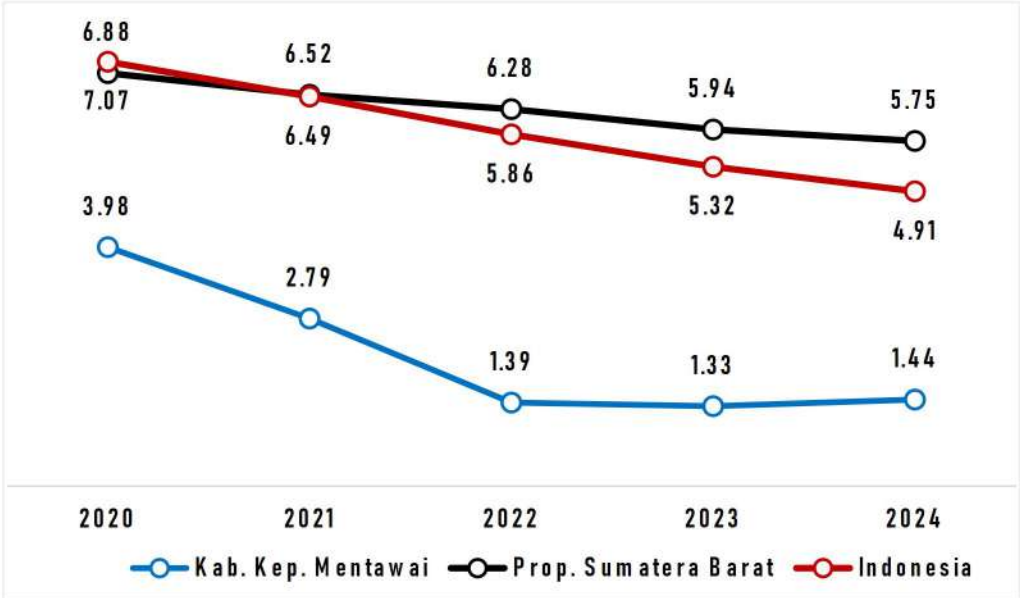
Perkembangan pendapatan per kapita di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024). Hal ini seiiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap tahunnya sebagaimana tampak pada Gambar 2.11. Pada tahun 2020 pendapatan per kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp.53,18 juta/kapita meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp.67,34 juta/kapita. Begitu juga dengan PDRB Atas Harga Berlaku mengalami peningkatan yaitu dari Rp.4,64 triliun pada tahun 2020 meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2024 menjadi Rp.6,27 triliun. Peningkatan pendapatan per kapita dan PDRB ini menunjukkan terjadinya penambahan jumlah produksi barang dan jasa seiring dengan telah membaiknya aktivitas sosial ekonomi budaya masyarakat dengan pertumbuhan yang positif.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, yang menunjukkan persentase orang yang mencari kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menghambat pembangunan karena mengurangi produktivitas dan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Contoh pengangguran terbuka antara lain lulusan baru yang belum

mendapatkan pekerjaan sesuai kualifikasi, angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tinggi yang mencari pekerjaan di kota, tetapi tidak dapat tertampung, seseorang sarjana dengan kualifikasi tertentu yang menganggur karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.12 menunjukkan tren penurunan dengan persentasi angka yang sangat kecil, yaitu TPT pada tahun 2020 sebesar 3,98 persen lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,79 persen. Kemudian tahun 2022 kembali turun ke angka TPT sebesar 1,39 persen hingga tahun 2024 TPT Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 1,44 persen.

Gambar 2.12
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2025

Angka ini menginterpretasikan bahwa sangat rendahnya jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini disebabkan salah satunya adalah struktur perekonomian masyarakat Mentawai yang bertumpu pada sektor primer sehingga masyarakat akumulatif dinyatakan bekerja dalam durasi waktu tertentu atau tidak dalam kondisi menganggur mencari pekerjaan. Pencapaian TPT Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan yang terendah di Provinsi Sumatera Barat begitu juga jika dibandingkan dengan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional seperti tampak pada Gambar 2.12.

4. Rasio Gini

Indeks Gini, juga dikenal sebagai Rasio Gini atau Koefisien Gini, adalah alat untuk mengukur tingkat ketimpangan atau kesenjangan pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Semakin rendah nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan di suatu wilayah.

Indeks Gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan, penting dalam pembangunan karena menunjukkan seberapa merata pendapatan di suatu wilayah atau daerah, dan ketimpangan yang tinggi dapat menghambat kemajuan pembangunan. Pembangunan yang merata dan inklusif

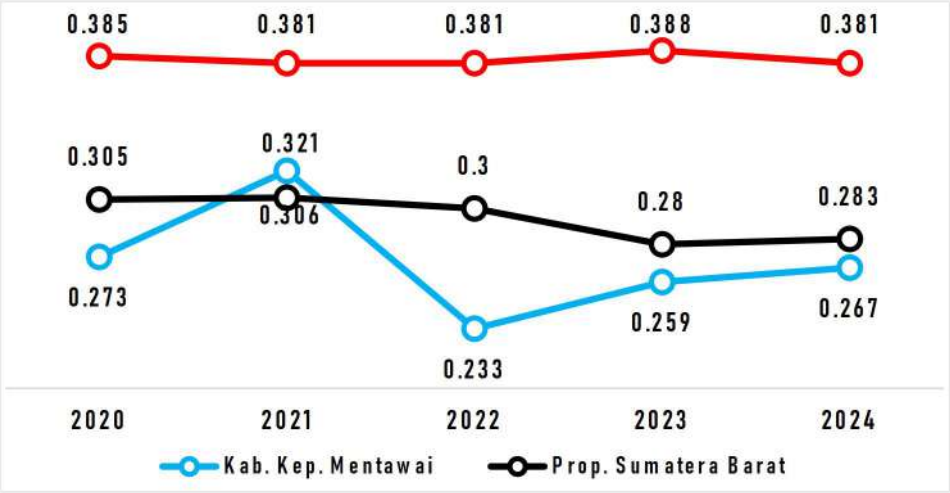
membutuhkan pemerataan pendapatan, di mana Indeks Gini yang rendah dapat membantu mewujudkannya, Pemerataan pendapatan dapat mendorong peningkatan produktivitas karena semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Jika nilai rasio gini bernilai 0 maka dikatakan pemerataan pendapatan sempurna, namun jika rasio gini bernilai 1 maka dikatakan ketimpangan pendapatan sempurna.

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Ketimpangan Rendah
0,4 - 0,5	Ketimpangan Sedang
> 0,5	Ketimpangan Tinggi

Perkembangan distribusi pendapatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat dilihat dari indikator Indeks Gini dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan relatif masih terjaga di bawah 0,4 yaitu dengan kategori ketimpangan rendah. Secara numerik, nilai Indeks Gini di Kepulauan Mentawai mengalami penurunan yaitu dari 0,273 pada tahun 2020 menjadi 0,267 pada tahun 2024.

Ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif merata (bahkan di bawah 0,3) dan tidak ada masyarakat yang dominan dalam menguasai sumber daya/pendapatan.

Gambar 2.13
Perkembangan Indeks Gini
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Demikian halnya juga tren penurunan Indeks Gini juga dialami oleh Provinsi Sumatra Barat yaitu dari 0,305 pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga tahun 2024 nilai Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat menjadi 0,283. Namun dala skala Nasional, upaya penurunan Indeks Gini masai relatif stagnan pada kisaran 0,38 tentu upaya pemerataan pendapatan terus dilakukan agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta dapat mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan di daerah, dan distribusi pendapatan yang timpang. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang

diperlukan (*necessary*), tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) bagi proses pembangunan (Esmara, Meier dalam Kuncoro, 2010). Untuk menyempurnakan tujuan pembangunan tersebut, munculah konsep pembangunan manusia. Menurut UNDP (1990) mengenai pembangunan manusia ialah suatu proses memperluas pilihan-pilihan penduduk *(a process enlarging people's choices*). Ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu panjang umur dan sehat (*longevity*), berpendidikan/ berpengetahuan (*knowledge*), dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak (*living standard*).

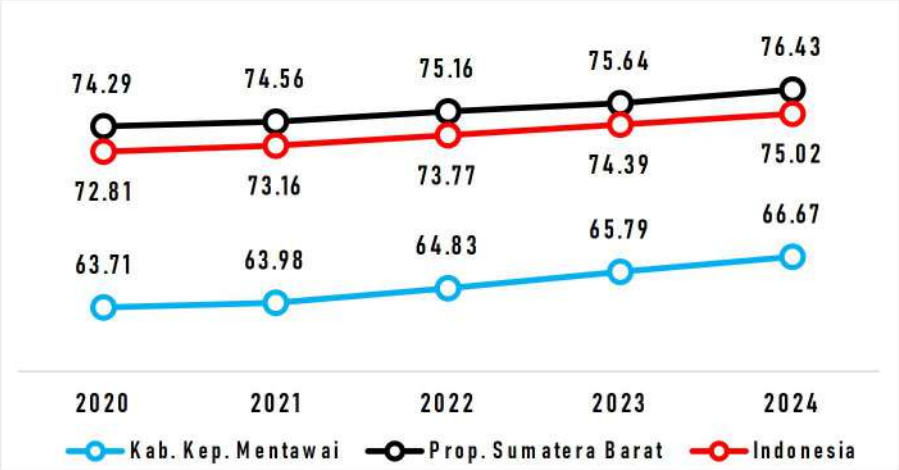
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Komponen penyusunan IPM adalah:

- Umur harapan hidup saat lahir mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat.
- Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan.
- Pengeluaran per kapita mewakili dimensi standar hidup layak.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Gambar 2.14 menunjukkan IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020

sebesar 63,71 mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 63,98 dan di tahun 2024 menjadi sebesar 66,67.

Gambar 2.14
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tren peningkatan ini cukup signifikan jika dilihat dari tahun 2021-2020 dengan kenaikan 0,27 poin sedangkan tahun 2022-2021 kenaikan 0,85 poin dan tahun 2023-2022 dengan kenaikan 0,96 poin tahun 2024-2023 dengan kenaikan sebesar 0,88 poin. Peningkatan ini menjadi hal yang baik dalam upaya menghadirkan kesejahteraan yang sebenarnya kepada masyarakat.

2. Tingkat Kemiskinan Daerah dan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya multidimensional. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah pengertian kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai

ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum (Word Bank, 1990). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi kemiskinan, tetapi kemiskinan juga dapat menghambat pembangunan ekonomi. Kemiskinan menciptakan kesenjangan, mengurangi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan dapat menghambat investasi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur yang penting untuk pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi perlu adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Gambar 2.15
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum menunjukkan penurunan yang berarti dan cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari penurunan tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu hanya pada angka 0,25 tahun 2023. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,35 persen dan mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi sebesar 14,84 persen. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 13,97 dan turun lagi di tahun 2023 menjadi sebesar 13,72 persen, namun pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan menjadi 13,89 persen. Hal yang mendasar menjadi indikasi belum signifikannya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah terkait perbaikan dan pemutakhiran data kemiskinan (*updating*) baik *exclusion error* dan *inclusion error* data dan belum terintegrasinya program penanganan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Disisi lain, target kemiskinan harus segera diatasi adalah penuntasan/pengentasan masyarakat miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah tingkat kemiskinan ekstrem yang dihitung dari penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan dari 7,78 persen atau sebanyak 7.254 orang pada tahun 2020 turun menjadi 2,14 atau sebanyak 2.104

orang pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 kembali turun menjadi sebesar 2,12 persen atau sebanyak 2.100 orang dan pada tahun 2024 turun menjadi 1,44 persen. Berbagai upaya dilakukan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan pencapaian target SDG's yaitu tanpa kemiskinan antara lain integrasi program, pemutakhiran pensasaran data kemiskinan daerah (P3KE) dan kolaborasi pemangku kepentingan dan dunia usaha.

Pada perspektif dan asumsi umum bahwa hubungan antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berkorelasi positif, artinya peningkatan jumlah pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan suatu daerah dan sebaliknya. Hal ini senada dengan Todaro (2003), pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam memengaruhi pada tingkat kemiskinan. Pengangguran yang tinggi akan menyebabkan pendapatan berkurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang pada akhirnya akan mengalami kemiskinan, dengan demikian jumlah pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan. Hal ini sedikit berbeda dengan kondisi faktual (paradoks) di Kabupaten Kepulauan Mentawai di mana tingkat pengangguran yang rendah yaitu 1,44 persen tahun 2024 (terendah di Provinsi Sumatera Barat) namun memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu 13,89 persen tahun 2024 (tertinggi di

Provinsi Sumatera Barat). Fenomena ini tentunya perlu kajian mendalam untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perbedaan asumsi. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat khususnya yang bekerja di sektor primer menjadi fokus dan lokus pembangunan sehingga apa yang dikerjakan (yang bekerja) bisa memberikan efek dan dampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

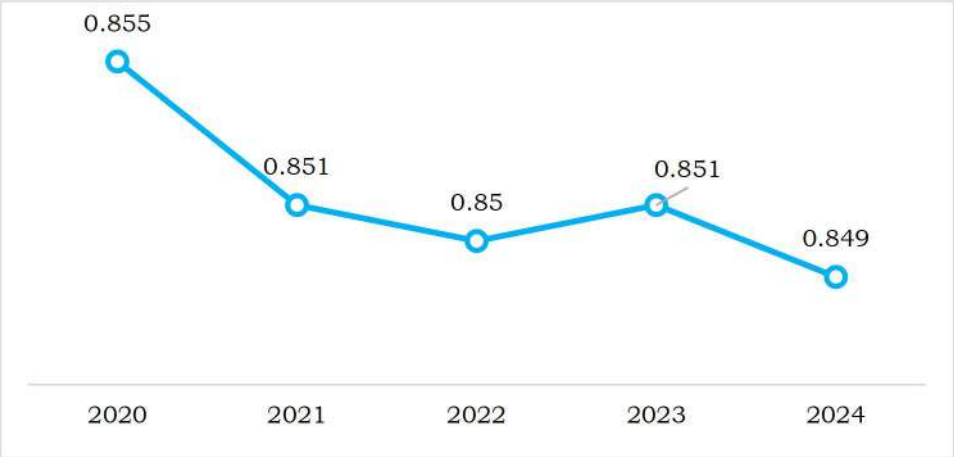
3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Ketimpangan gender merujuk pada ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Beberapa contoh ketimpangan gender meliputi ketimpangan dalam akses dan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan formal. Ketimpangan dalam kesempatan kerja, upah, dan partisipasi perempuan dan laki-laki di pasar tenaga kerja. Ketimpangan dalam akses perempuan dan laki-laki terhadap layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit, dan perawatan medis. Ketimpangan dalam partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan politik dan kepemimpinan. Ini mencakup perwakilan perempuan dalam parlemen, pemerintahan, dan lembaga-lembaga publik.

Pembangunan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Ketimpangan Gender sebagai kondisi semakin baiknya kesetaraan

yang ada khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Gambar 2.34 menunjukkan perkembangan Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 yang masih tinggi yaitu lebih dari angka 0,8.

Gambar 2.16
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Rentang nilai Indeks Ketimpangan Gender adalah 0-1, artinya semakin kecil nilai IKG maka semakin baiknya kesetaraan gender di daerah tersebut. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Hal ini dapat dilihat capaian IKG pada tahun 2020 sebesar 0,855 dan mengalami pepenurunan pada tahun 2021 menjadi 0,851 dan pada akhir 2024 nilai IKG Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,849.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan erat kaitannya dengan eksistensi jati diri kearifan lokal masyarakat. Pembangunan kebudayaan

melalui pemajuan kebudayaan menjadi hal penting agar sejarah, nilai-nilai luhur dan kelestarian budaya dapat terjaga dengan baik sehingga kelompok, ras dan masyarakatnya tidak kehilangan identitas dan marwah. Pemajuan kebudayaan di Kepulauan Mentawai telah lama dimulai dengan pelestarian budaya melalui berbagai festival atau even lokal dan regional.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai senantiasa dilakukan dalam upaya pelestarian tata cara/ norma kehidupan bermasyarakat. Meningkatkan kepedulian dan minat masyarakat menjadi hal penting dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya pada masyarakat terutama kaum muda agar nilai tersebut berkelanjutan dan lestari kegenerasi berikutnya.

Tabel 2.21
Perkembangan Seni dan Budaya
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	0	0	0	2	1
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	2	2	4	2
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	55	55	55	55	55

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Melalui berbagai even/ festival yang dilakukan juga berbagai pembangunan sarana, pelestarian objek dan warisan budaya diharapkan mampu memajukan kebudayaan daerah sehingga menjadi lestari dan dikenal dengan baik.

Tabel 2.22
Perkembangan Kepemudaan dan Keolahragaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah organisasi pemuda	10	10	10	10	10
2	Jumlah organisasi olahraga	10	10	10	10	10
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	0	0	1	2	3
4	Jumlah kegiatan olahraga	3	0	7	9	10
5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0	0	1	1	1
6	Lapangan olahraga	5	5	16	16	16

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Perkembangan keolahragaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat identik dengan kehidupan bermasyarakat Mentawai, hal ini dapat terlihat dari aktivitas sehari-hari khususnya pada sore hari emngisi waktu luang selalu ada kegiatan olah raga yang dilakukan masyarakat, seperti bola voli, sepak takraw, bola kaki, bulu tangkis. Namun di beberapa tempat sarana keolahragaan dimasing-masing desa berada dalam kondisi tidak terawat dan tidak difungsikan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan pelayanan yang secara umum dibutuhkan dan menjadi prasyarat kehidupan masyarakat yang bermartabat dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga atas suatu barang jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan

kepentingan publik menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Pelayanan umum ini pada dasarnya terbagi 2 (dua) urusan yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan.

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisa kinerja layanan urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah, yaitu : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; (6) sosial.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

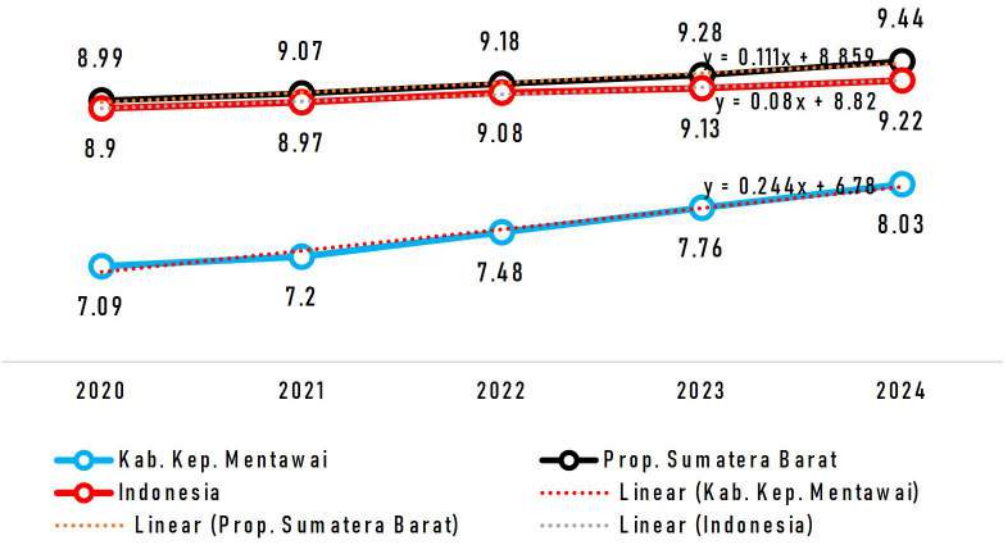
Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencerdaskan hingga mewujudkan peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan adalah salah satu komponen yang penting dalam proses pembangunan berkelanjutan yang memungkinkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang lebih bijaksana. Pendidikan akan membantu mengembangkan kapital manusia, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang meningkatkan produktivitas, peran besar pendidikan juga dapat memutus mata rantai kemiskinan. Tujuan pendidikan itu dapat mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan

(Tan Malaka). Pendidikan yang merata adalah fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan, memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi pada masyarakat.

a. Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh penduduk untuk menempuh pendidikan formal. RLS digunakan untuk melihat kualitas pendidikan dan penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. RLS dihitung untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas, RLS tidak termasuk tahun yang diulang dan RLS dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan, kualitas pendidikan, perencanaan kebijakan, dan evaluasi program pendidikan.

Gambar 2.17
Rata Lama Sekolah (tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

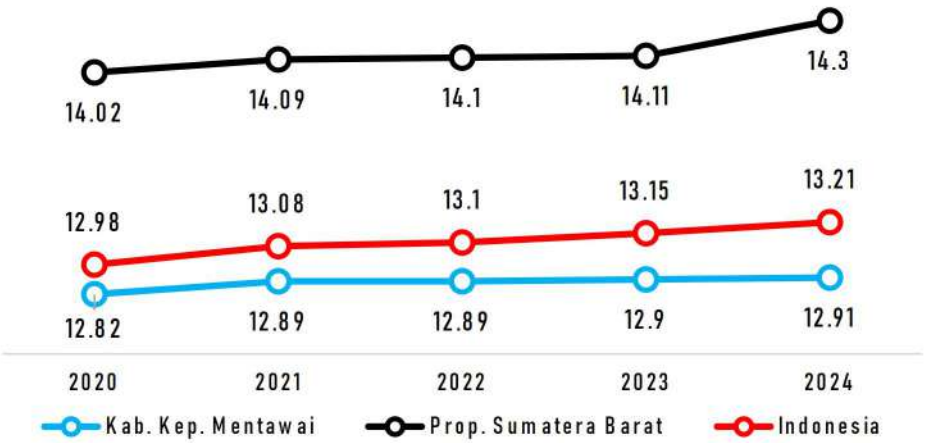
Tren perkembangan rata lama sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan hasil yang positif, dapat dilihat dalam Gambar 2.17 bahwa pada tahun 2020 RLS Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 7,09 tahun dan meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar 7,2 tahun begitu juga selanjutnya hingga tahun 2024 RLS Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 8,03 tahun. Peningkatan RLS ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan pencapaian RLS di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yaitu dengan *slope* (kemiringan) yang lebih besar (0,244) dari RLS Provinsi Sumatera Barat (0,111) dan Nasional (0,08). Pencapaian ini tentunya sebagai respons positif terhadap program pemerintah daerah yang memberikan beasiswa perguruan tinggi, penyediaan sarana dan sarana pendidikan, serta memperluas keikursertaan program kesetaraan bagi masyarakat. Namun pencapaian RLS Kabupaten Kepulauan Mentawai masih jauh berada dibawah capaian Rata Lama Sekolah (RLS) tingkat Provinsi Sumatera Barat dan secara Nasional.

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya masa sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang, dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas. HLS merupakan indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan pendidikan, karena mencerminkan peluang anak-anak untuk mendapatkan

pendidikan yang lebih lama dan berkualitas. Beberapa faktor yang memengaruhi nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah kualitas pendidikan, akses terhadap pendidikan, kebijakan pemerintah terkait pendidikan, kondisi ekonomi dan sosial.

Gambar 2.18
Harapan Lama Sekolah (tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan capaian Harapan lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 12,82 tahun pada tahun 2020 meningkat hingga tahun 2024 HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi 12,91 tahun. Namun peningkatan nilai HLS ini tidak signifikan yaitu peningkatan hanya 0,09 poin selama 5 tahun terakhir. Pencapaian HLS yang belum signifikan mengalami peningkatan tentu menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali program sektor pendidikan terutama terhadap akses dan mutu layanan pendidikan sehingga ekspektasi (harapan) masyarakat untuk

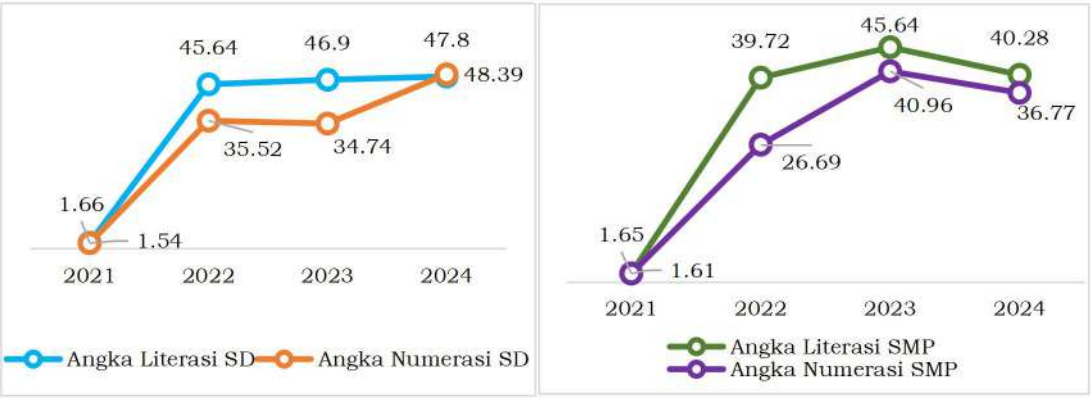
mengenyam pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin bertambah/meningkat. Capaian HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada dibawah capaian HLS Provinsi Sumatera Barat dan secara nasional. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.18 menujukkan pada tahun 2020 HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 12,82 tahun sedangkan HLS Provinsi Sumatera Barat sebesar 14,02 tahun dan HLS Nasional sebesar 12,98 tahun hingga tahun 2024 posisi HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai (12,91 tahun) masih dibawah capaian HLS Provinsi Sumatera Barat (14,3 tahun) dan HLS Nasional 13,21 tahun). Selain itu jarak (selisih) peningkatan capaian HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jarak (selisih) peningkatan HLS Provinsi Sumatera Barat dan HLS Nasional, yaitu untuk jarak (selisih) peningkatan capaian HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,09 poin, Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,28 poin dan secara Nasional sebesar 0,23 poin.

c. Literasi dan Numerasi Pendidikan

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Kemampuan literasi dan numerasi juga sangat penting

dalam pendidikan. Siswa yang memiliki keterampilan literasi dan numerasi yang baik memiliki keunggulan dalam memahami pelajaran dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, literasi dan numerasi adalah dua keterampilan dasar yang harus dipelajari dan dikuasai oleh semua orang, terutama anak-anak di usia sekolah.

Gambar 2.19
Angka Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2024



Sumber: Rapor Pendidikan Kab. Kepulauan Mentawai

Gambar 2.19 menunjukkan bahwa perkembangan capaian angka literasi baik jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami tren peningkatan. Untuk jenjang pendidikan SD, angka literasi meningkat dari 1,66 pada tahun 2021 menjadi 47,8 pada tahun 2024. Begitu juga dengan angka literasi pada jenjang pendidikan SMP mengalami peningkatan dari 1,65 pada tahun 2021 meningkat menjadi 40,28 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbaikan yang signifikan atas kemampuan literasi peserta didik jenjang pendidikan SD dan SMP sehingga mampu lebih memaknai suatu narasi atau teks yang dibaca/tertulis.

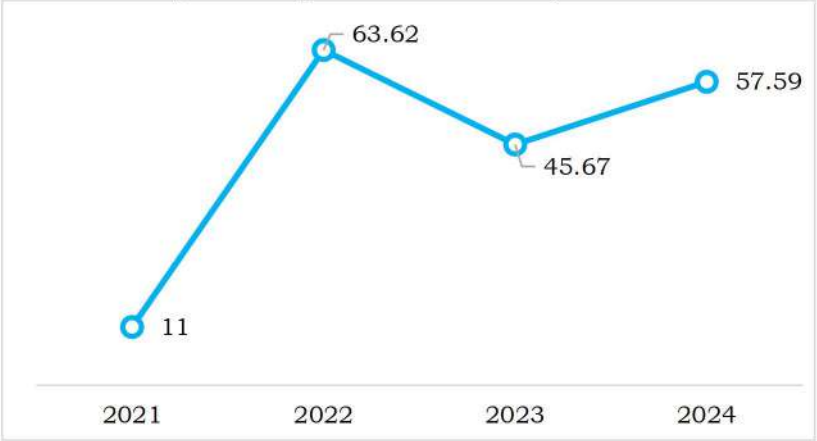
Perkembangan angka numerasi pada jenjang pendidikan SD dan SMP juga menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya kurun waktu 2021-2024. Pada jenjang pendidikan SD, angka numerasi mengalami peningkatan dari 1,54 pada tahun 2021 menjadi 48,39 pada tahun 2024. begitu juga pada jenjang pendidikan SMP, angka numerasi mengalami peningkatan dari 1,61 pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 36,77 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan terhadap kemampuan numerasi peserta didik baik pada jenjang pendidikan SD maupun SMP sehingga lebih mampu memaknai dan memahami bilangan atau angka yang disajikan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

d. Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menunjukkan peningkatan sebagaimana Gambar 2.20 Pada tahun 2021 nilai IPLM sebesar 11 dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 63,62 namun sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 45,67. Penurunan nilai IPLM di tahun 2023 terletak pada komponen ketercukupan koleksi perpustakaan dari 2,3757 poin menjadi 0,1773 poin dan

komponen perpustakaan yang dibina seusai SNP dari 1,0738 poin menjadi 0,3045 poin.

Gambar 2.20
Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2024



Sumber: Perpustakaan Nasional RI

Pada tahun 2024 mengalami peningkatan sehingga nilai IPLM Kab. Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 57,59. Peningkatan ini terdapat di beberapa unsur salah satunya adalah peningkatan skor pada unsur perpustakaan yang dibina sesuai SNP menglami peningkatan dari 0,3045 poin menjadi 0,8436 poin. Upaya peningkatan literasi masyarakat terus dilakukan selain mengupayakan adanya gedung perpustakaan daerah dan pembinaan perpustakaan di tingkat desa juga melakukan upaya peningkatan layanan dan akses baca masyarakat.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kesehatan adalah suatu hal yang tidak tergantikan karena merupakan fondasi utama dari kualitas hidup dan produktivitas. Tanpa kesehatan yang baik, individu tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari untuk melakukan pekerjaan dan kegiatan

sosial ekonomi. Kesehatan yang buruk dapat menghambat kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan dan potensi penuh mereka, serta meningkatkan beban ekonomi baik pada individu maupun masyarakat melalui biaya perawatan medis yang tinggi sehingga kehilangan produktivitas. Disisi lain, kesehatan juga berpengaruh langsung pada kesejahteraan mental dan emosional, sehingga menjaga kesehatan adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan bahagia. Dalam konteks yang lebih luas, masyarakat yang sehat merupakan dasar bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

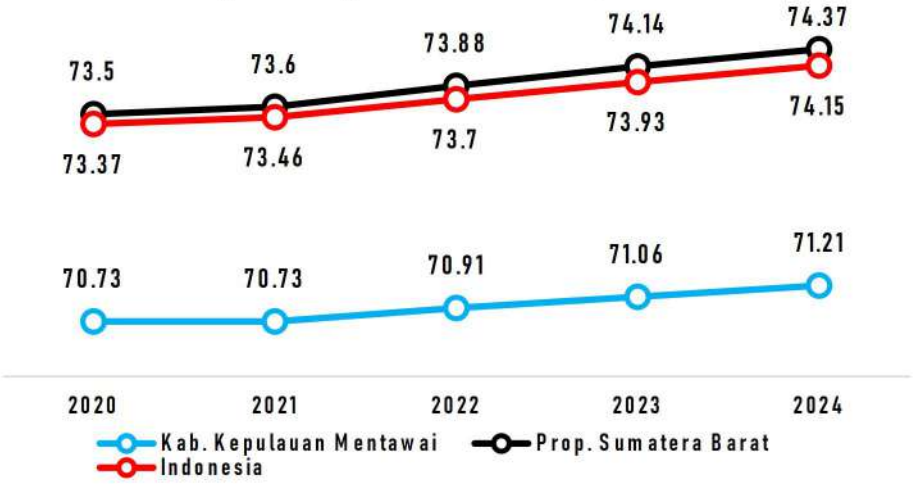
a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan tahun yang dapat dijalani seseorang sejak lahir, dan merupakan indikator penting untuk menilai kualitas hidup dan kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. UHH dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keadaan lingkungan, sarana dan prasarana layanan kesehatan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah, dan perekonomian masyarakat.

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan, menunjukkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, dan merupakan komponen penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan UHH

mencerminkan kemajuan dalam kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Gambar 2.21
Perkembangan Usia Harapan Hidup (tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan pencapaian berdasarkan hasil *long form* SP2020. Ini terlihat pada tahun 2020 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 70,73 tahun meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar 71,21 tahun. Jika dibandingkan capaian UHH Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Sumatera Barat dan secara Nasional, tentunya capaian UHH Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada dibawah capaian UHH Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, seperti pada Gambar 2.21 menunjukkan pada tahun 2020 UHH Provinsi Sumatera Barat mencapai 73,5 tahun dan UHH Nasional sebesar 73,37 tahun, setiap tahunnya mengalami

peningkatan hingga tahun 2024 UHH Provinsi Sumatera Barat sebesar 74,37 tahun dan UHH Nasional sebesar 74,15 tahun. Upaya peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) sangat erat kaitannya angka kematian anak lahir, gizi yang cukup bagi ibu hamil dan bayi lahir, nutrisi dan gizi bagi anak, pola hidup sehat dan produktivitas, mutu layanan kesehatan, kualitas lingkungan, kualitas hidup bagi lanjut usia.

b. Angka Kesakitan/Morbiditas

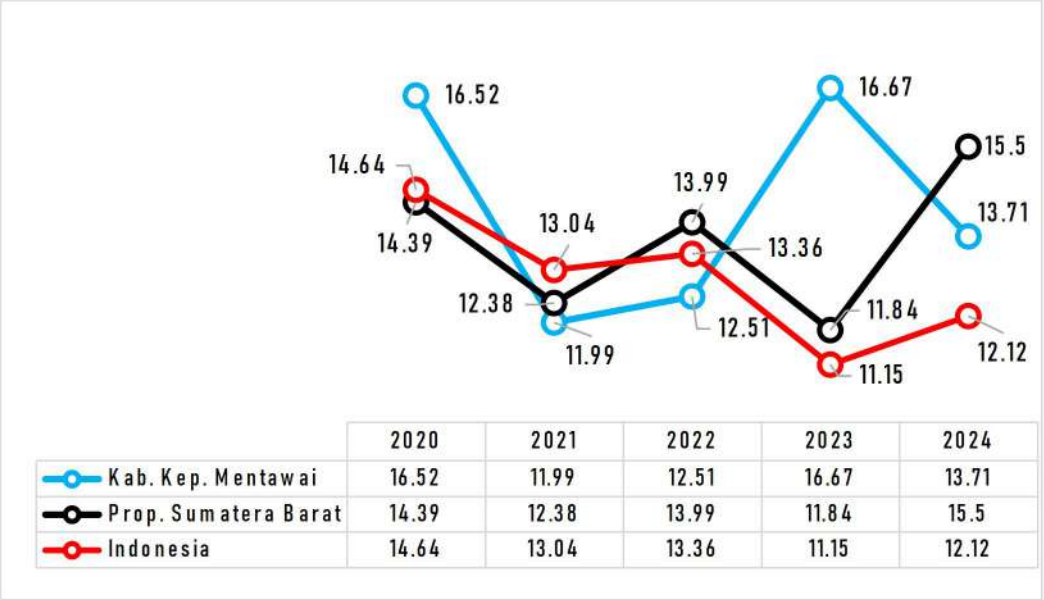
Angka kesakitan atau morbiditas adalah indikator yang menunjukkan seberapa sering gangguan kesehatan terjadi dalam suatu populasi, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan merupakan indikator penting untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan seberapa banyak orang dalam suatu populasi yang menderita suatu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu dalam periode waktu tertentu. Semakin tinggi angka kesakitan, semakin buruk derajat kesehatan penduduk. Pentingnya angka kesakitan (morbiditas) ini dihitung untuk:

a) Penilaian Program Kesehatan: Angka kesakitan membantu dalam mengevaluasi efektivitas program kesehatan dan intervensi yang bertujuan untuk mengurangi penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

b) Perencanaan Kesehatan: Data morbiditas digunakan untuk perencanaan program kesehatan yang lebih baik, seperti alokasi sumber daya dan pengembangan layanan kesehatan.

c) Pemantauan Kesehatan: Angka kesakitan membantu memantau tren penyakit dan masalah kesehatan dalam suatu populasi, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan dan intervensi yang tepat waktu.

Gambar 2.22
Perkembangan Angka Kesakitan/Morbiditas (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep. Mentawai	16.52	11.99	12.51	16.67	13.71
Prop. Sumatera Barat	14.39	12.38	13.99	11.84	15.5
Indonesia	14.64	13.04	13.36	11.15	12.12

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Angka kesakitan (morbiditas) secara *time series* 2020-2024 di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020 angka kesakitan di Kepulauan Mentawai sebesar 16,52 persen, artinya dari 100 orang penduduk terdapat 16-17 orang yang mengalami keluhan kesehatan. Angka ini turun di tahun 2021 menjadi 11,99 persen dan tahun 2022 sebesar 12,51

persen. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan 4,16 poin menjadi 16,67 persen dan kembali turun di tahun 2024 menjadi 13,71 persen. Hal yang sama, angka kesakitan (morbiditas) di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional juga mengalami penurunan yaitu dari 14,39 persen pada tahun 2020 (Provinsi Sumatera Barat) dan 14,64 persen secara Nasional mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 12,38 persen untuk Provinsi Sumatera Barat dan sebesar 13,04 persen untuk Nasional. Namun, untuk 2024, angka morbiditas di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan yaitu menjadi 15,5 persen sedangkan untuk skala Nasional angka kesakitan (morbiditas) mengalami penurunan yaitu menjadi 12,12 persen.

c. Cakupan Jaminan Kesehatan

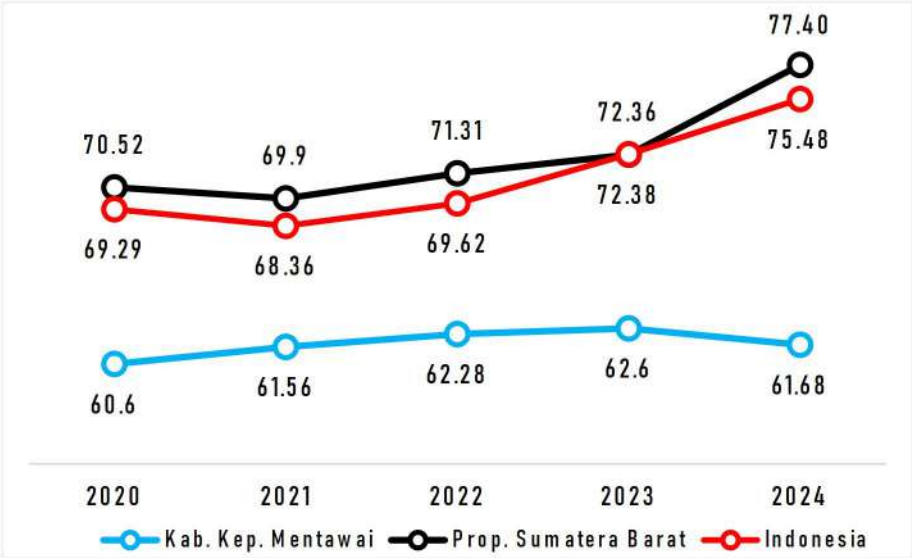
Cakupan jaminan kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diimplementasikan oleh BPJS Kesehatan, merupakan komponen penting dalam pembangunan, karena memastikan akses layanan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat, mendukung peningkatan kualitas hidup dan produktivitas, serta mengurangi beban ekonomi akibat penyakit. Cakupan jaminan kesehatan yang dihitung dalam layanan jaminan kesehatan berupa JKN, asuransi swasta, perusahaan/kantor. Pentingnya Jaminan Kesehatan dalam Pembangunan antara lain:

a) Peningkatan Kualitas Hidup: Jaminan kesehatan yang memadai memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan, mencegah penyakit, dan mendapatkan pengobatan yang tepat, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas.
b) Peningkatan Produktivitas: Dengan jaminan kesehatan, masyarakat tidak perlu khawatir akan biaya pengobatan yang mahal, sehingga dapat fokus pada pekerjaan dan kegiatan produktif lainnya.
c) Pencegahan Kemiskinan: Jaminan kesehatan dapat membantu mencegah orang jatuh ke dalam kemiskinan akibat biaya pengobatan yang mahal, karena beban finansial akibat penyakit akan berkurang.
d) Pembangunan Sumber Daya Manusia: Kesehatan yang baik merupakan modal penting bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, karena masyarakat yang sehat dapat berkontribusi lebih besar bagi pembangunan.

Cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menjadi perhatian dan hal yang mendasar khususnya bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penanganan *stunting* dan program pembangunan lainnya. Gambar 2.23 menunjukkan cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum menyentuh angka 70 persen. Artinya masih terdapat 30

persen masyarakat Mentawai tidak memiliki jaminan kesehatan untuk layanan kesehatannya.

Gambar 2.23
Cakupan Jaminan Kesehatan (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2020-2024

Hal ini berbeda dengan cakupan jaminan kesehatan di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan secara Nasional yang telah melebihi angka 75 persen. Ini dapat dilihat pada tahun 2020 cakupan jaminan kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 60,6 persen dan mengalami peningkatan tahun 2021 menjadi sebesar 61,56 persen, hingga pada tahun 2024 cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 61,68 persen. Secara keseluruhan tren cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif stagnan, tentu perlu keberpihakan dan kerja keras pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat memiliki jaminan kesehatan baik

secara mandiri, melalui pemerintah (Jamkesda/BPJS) dan dibiayai perusahaan/kantor.

d. Prevalensi *stunting*

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya. Dampak dari *stunting* adalah dalam jangka pendek: hambatan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, peningkatan risiko infeksi, dan gangguan metabolisme. Jangka panjang: Kesulitan belajar, gangguan kesehatan kronis (diabetes, penyakit jantung), dan penurunan produktivitas di masa depan.

Stunting merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-2, yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Pencegahan dan penanganan *stunting* menjadi prioritas penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan karena *stunting* menurunkan produktivitas dan pendapatan, tidak memiliki potensi untuk menjadi kurang cerdas dan memiliki kemampuan yang terbatas di masa depan.

Tabel 2.23
Perkembangan Prevalensi *Stunting*
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi *stunting* (%)	19,3*	27,3	32	33,7	26,2

Catt : 2020 (COVID)
Sumber : SSGI, 2020-2024

Capaian angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara tren selama lima tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan yaitu dari 25,2 persen di tahun 2019 menjadi 32,0 persen pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 33,7 persen, peningkatan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat begitu juga pemenuhan asupan gizi kepada pasangan atau ibu hamil/ 1.000 hari pertama kehidupan ketika sudah diketahui ada janin, begitu juga dengan pemantauan gizi ibu hamil yang senantiasa dilakukan melalui pelayanan kesehatan. Begitu juga perbaikan sarana dan prasarana lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan berupa pembangunan toilet RT, pengelolaan limbah, drainase dan berbagai intervensi yang terpadu. Akselerasi penanganan *stunting* telah tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gerakan Mentawai Anti *stunting* dan Gizi Buruk Peduli Anak (Masgibur Dua) dengan sasaran intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. *stunting* adalah masalah serius yang berdampak luas pada pembangunan. Penanganan *stunting* membutuhkan upaya yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta melibatkan berbagai pihak. Dengan penanganan yang tepat, *stunting* dapat dicegah dan diatasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2.24
Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Indikator Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup (tahun)	64,73	64,73	64,93	65,1	71,21
Prevalensi Stunting	19,3*	27,3	32	33,7	26,2
Angka Kematian Bayi (kematian/1.000 kelahiran hidup)	20,2	23	20,4	18	28.4
Angka Kematian Balita (1.000 balita)	3,6	3,2	13,8	12	32.5
Angka Kematian Ibu (kematian/100.000 kelahiran hidup)	356,3	207	191	304	277.2
Cakupan Desa UCI (%)	61,36	59,52	51,2	35,87	30,3
Kunjungan ibu hamil)%)	43,9	53,1	75,71	81,4	82,1
Rasio Daya Tampung RS Rujukan (TT/100.000 penduduk)	59	71	71	85	86
Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	50,99	66,50	70,18	76,42	42,04
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin (%)	61,76	55,14	75,71	81,4	55,31
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	65,33	59,07	60,00	68,26	58,51
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	27,24	58,01	49,13	56,28	69,13
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	12,74	17,74	21,43	24,05	85,43
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	31,71	32,71	54,60	56,24	62,60
Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	8,79	84,61	75,20	78,31	91,00
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	15,54	48,83	35,44	47,82	57,00
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	14,36	10,88	67,25	70,05	22,00
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	36,04	38,91	90,15	92,46	27,00
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan standar pelayanan TBC sesuai standar (%)	30,04	18,52	60,74	65,62	85,00
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	0,00	0,00	0,00	0	59,00
Angka kesakitan Malaria	0,77	0,5	1,31	1,43	1,08
Angka kesembuhan TB	85	85	85	90	88,5

sumber: data (diolah)

Perkembangan indikator kinerja kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2020-2024 secara umum menunjukkan capaian yang variatif, ada beberapa indikator yang pencapaiannya sudah baik namun juga terdapat indikator lainnya yang masih perlu upaya lebih lagi untuk pencapaian target kinerjanya salah satunya indikator kesehatan prevalensi stunting. Pada Tabel 2.24 menunjukkan beberapa capaian indikator kesehatan daerah selama 5 tahun terakhir. Capaian angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara tren selama lima tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan yaitu dari 19,3 persen di tahun 2020 menjadi 27,3 persen pada tahun 2021, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 26,2 persen, peningkatan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat begitu juga pemenuhan asupan gizi kepada pasangan atau ibu hamil/ 1.000 hari pertama kehidupan ketika sudah diketahui ada janin, begitu juga dengan pemantauan gizi ibu hamil yang senantiasa dilakukan melalui pelayanan kesehatan. Begitu juga perbaikan sarana dan prasarana lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan berupa pembangunan toilet RT, pengelolaan limbah, drainase dan berbagai intervensi yang terpadu. Akselerasi penanganan stunting telah tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gerakan Mentawai Anti *Stunting* dan Gizi Buruk Peduli Anak (Masgibur Dua) dengan sasaran intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.

Indikator angka kematian bayi yang diukur dari jumlah kelahiran per 1.000 kelahiran hidup capaiannya juga mengalami perbaikan. Jumlah angka kematian bayi yang dilahirkan meninggal hingga berumur 1 tahun pada tahun 2020 sebanyak 20,2 kasus kematian lalu kasus ini meningkat dan pada tahun 2021 tercatat ada 23 kasus kejadian kematian bayi dari 1.000 kelahiran bayi hidup dan pada tahun 2024 kasusnya meningkat menjadi 28,4 kasus. Selain itu, indikator kesehatan lain yang sangat penting adalah angka kematian ibu yang capaiannya atau kasusnya masih cukup tinggi. Pada tahun 2020 angka kematian ibu melahirkan tercatat 356 kasus mengalami penurunan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 277 kasus. Angka ini masih tergolong cukup tinggi karena 1 (satu) nyawapun ibu pada saat bersalin/melahirkan harus tertolong. Begitu juga dalam upaya penanggulangan stunting dan pemberian asupan vitamin melalui imunisasi kepada balita, capaian indikator cakupan desa UCI mengalami peningkatan dalam kurun 5 tahun terakhir.

Pada tahun 2020 cakupan desa UCI mencapai 61,36 persen dan capaian tahun 2024 cakupannya menjadi sebesar 30,3 persen. Upaya peningkatan cakupan desa UCI terus dilakukan selain secara konvensional melalui posyandu yang telah terjadwal setiap bulannya, juga dilakukan kerjasama dengan lembaga keagamaan ataupun melalui kunjungan langsung ke rumah tangga. Persentase kunjungan ibu hamil dalam kurun 5 tahun terakhir

(2020-2024) mengalami penurunan dari 50,99 persen tahun 2020 turun menjadi 42,04 persen di tahun 2024 dengan harapan menurunnya risiko atau kasus kematian ibu melahirkan dan anak lahir. Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan persalinan juga mengalami penurunan, pada tahun 2020 tingkat layanan ibu hamil sebesar 61,76 persen mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 55,31 persen dan persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan tahun 2020 sebesar 65,33 persen mengalami penurunan hingga tahun 2024 layanan bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan baru mencapai 58,51 persen.

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 12,74 persen mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar 85,43 persen. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan *skrining* kesehatan sesuai standar tahun 2024 sebesar 62,60 persen. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan *skrining* kesehatan sesuai standar sudah mencapai 91,0 persen pada tahun 2024 tentu ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat usia lanjut dan meningkatkan angka harapan hidup masyarakat.

Cakupan layanan kesehatan bagi penderita hipertensi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2020 sebesar 15,54 persen meningkat menjadi 57,0 persen pada tahun

2024. Cakupan layanan penderita diabetes melitus (DM) juga mengalami peningkatan yaitu dari 14,36 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 22,00 persen pada tahun 2024. Cakupan orang terduga TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar yaitu 85,0 persen pada tahun 2024. Untuk rasio daya tampung RS rujukan setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu sebesar 86 TT per 100.000 penduduk, artinya telah tersedia sebanyak sekitar 86 tempat tidur untuk melayani rujukan dan rawatan di RS, angka ini juga sebagai syarat untuk peningkatan akreditasi layanan RS dimana hingga pada tahun 2024 masih dengan tipe D. Pembangunan kesehatan masyarakat tidak terlepas dari jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki atau yang tersedia pada daerah tersebut. Tentunya tenaga kesehatan yang tersedia sudah seharusnya memiliki standar keahlian dimasing-masing disiplin ilmunya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyediakan tenaga kesehatan melalui beberapa saluran, antara lain penerimaan CPNS, tenaga medis kontrak, tenaga penyuluh, kemitraan dengan perdesaan/dusun, tenaga kesehatan PTT dan melalui saluran lainnya.

Tabel 2.25
Jumlah Tenaga Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Tenaga Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
Dokter	48	38	43	42	50
Perawat	297	137	353	346	367
Bidan	250	79	263	265	260

Sumber : Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025

Jumlah tenaga kesehatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan jumlah yaitu untuk tenaga kesehatan perawat dan bidan. Untuk penyediaan tenaga kesehatan dokter masih menjadi tugas berat dalam menyediakan jasa layanan kesehatannya terkhusus di desa dan dusun.

Pembangunan kesehatan adalah bentuk pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan bermartabat. Tentunya akses terhadap layanan kesehatan harus menjadi catatan penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan sarana kesehatan untuk mempermudah dalam mengatasi permasalahan kesehatannya. Penyediaan sarana kesehatan sebagai sarana bagi masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhan permasalahan kesehatan baik itu preventif, kuratif dan promotif kesehatan bagi masyarakat.

Tabel 2.26
Jumlah Layanan Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Sarana Layanan Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	RSUD/RS Pratama	1	1	2	2	1
2	Puskesmas	15	15	15	15	15
3	Puskesmas Pembantu (Pustu)	38	27	39	40	39
4	Poskesdes	82	128	90	90	96
5	Posyandu	279	279	289	289	285
6	Polindes	33	33	90	90	38

Sumber : Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025

Ketersediaan layanan kesehatan berupa sarana dan prasarana kesehatan adalah dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengakses layanan kesehatan. Pusat layanan kesehatan masyarakat harus menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga masyarakat tidak bersusah payah pergi ke daerah lain untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Tabel 2.26 menunjukkan perkembangan sarana kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami perkembangan dalam hal jumlah sarana, terutama di daerah terpencil yaitu di dusun-dusun. Tentunya tidak sekedar penyediaan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat, yang lebih esensial lagi adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan promosi pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan Pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat dalam memperlancarkan aktivitas sosial dan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan meningkatkan produktivitas serta daya saing. Pembangunan jalan menjadi hal utama dan pertama yang harus disediakan pemerintah. Ketersediaan jalan menjadi pra syarat awal dalam pembangunan

yang berkelanjutan. Jalan memegang peranan penting dalam kegiatan transportasi dan mobilitas penduduk. Sebagai penopang sistem sosial dan ekonomi masyarakat, jalan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perkembangan sektor lain, terutama dalam peningkatan sektor ekonomi riil masyarakat. Tabel 2.32 menunjukkan panjang jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kondisi baik menunjukkan tren penurunan. Panjang jalan hingga tahun 2024 dengan kondisi baik dan sedang sepanjang 178,13 km dari total panjang jalan yang ada 1.130 km atau 15,76 persen, sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak sedang tahun 2023 sekitar 33,40 km atau 2,95 persen dari total panjang jalan dan panjang jalan dalam kondisi rusak berat sekitar 918,67 km atau sekitar 81,28 persen. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, mengingat peran strategis pembangunan jalan dalam memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Tabel 2.27
Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Tahun	Kondisi Jalan (km)				Panjang Jalan (km)
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
2020	53,89	293,54	388,93	393,82	1.130,2
2021	88,52	60,54	210,18	770,94	1.130,2
2022	111,92	41,54	35,71	941,01	1.130,2
2023	45,50	33,80	79,50	971,40	1.130,2
2024	142,81	35,32	33,40	918,67	1.130,2

Sumber: BPS (diolah)

Perkembangan jalan trans Mentawai yang telah dilaksanakan untuk mendukung kawasan strategis daerah hingga tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2024, panjang jalan yang telah dibangun adalah sepanjang 405,49 km dengan rincian struktur beton sepanjang 121,68 km, dengan perkerasan sepanjang 24,28 km, dengan pembukaan/ tanah sepanjang 239,09 km.

Tabel 2.28
Kondisi Jalan Trans Mentawai, 2024

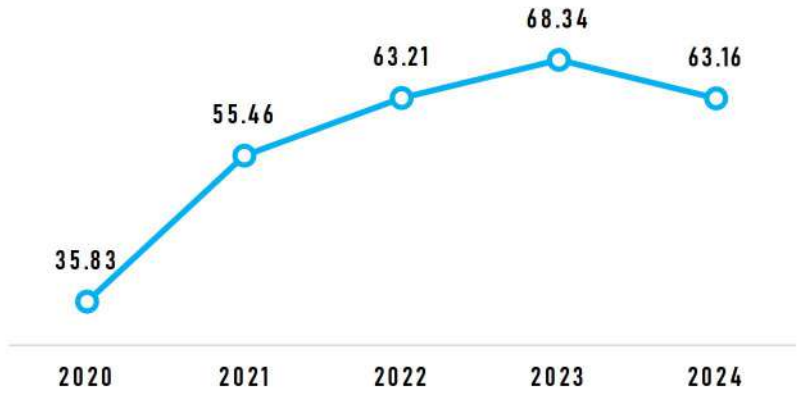
Rencana Jalan TRANS MENTAWAI (393,87 km)	Beton (km)	Perkerasan (km)	Pembukaan/ Tanah (km)	Belum Terbuka (km)
Trans Sipora (77,67 km)	77,67	0	0	0
Trans Pagai Utara (63 km)	15,39	0	38,78	8,84
Trans Pagai Selatan (66 km)	3,38	0	62,62	0
Trans Siberut (187,2 km)	25,24	24,28	137,69	0
Total	121,68	24,28	239,09	8,84

Sumber : Dinas PUPR Kab.Kepulauan Mentawai

Secara total, panjang trans Mentawai yang belum terbangun/ belum terbuka adalah sepanjang 8,84 km. ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan pembukaan jalan trans Mentawai agar wilayah mulai dari ujung utara hingga selatan Pulau Siberut sudah terhubung, begitu juga di 3 pulau lainnya. Gambar 2.24 menunjukkan perkembangan rumah tangga dengan akses air minum layak, selama kurun waktu 2020-2024 tren pencapaiannya meningkat, yaitu pada tahun 2020 persentase RT dengan akses air bersih layak sebesar

35,83 persen dan capaiannya setiap tahun meningkat hingga pada tahun 2024 capaiannya menjadi sebesar 63,16 persen.

Gambar 2.24
Perkembangan Rumah Tangga Berakses Air Bersih Layak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS (diolah)

Angka ini tentunya sangat kecil jika dilihat kebutuhan masyarakat akan layanan dasar air bersih dan juga bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harusnya sudah ada dan dinikmati oleh masyarakat. Capaian ini tentunya menjadi perhatian pemerintah karena intervensi capaiannya dapat didorong dari investasi atau pengelolaan secara mandiri baik berupa perumda atau BLUD untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

Perkembangan capaian rumah tangga dengan sanitasi layak di Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan pencapaian. Gambar 2.55 menunjukkan pada tahun 2020 rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebesar 61,73 persen meningkat pada tahun 2024 menjadi 69,3 persen. Capaian ini tentunya didorong oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat

secara mandiri untuk menyediakan dan mengelola sanitasi layak skala rumah tangga.

Gambar 2.25
Perkembangan Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS (diolah)

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah, selain itu pemerintah daerah juga harus menjamin bahwa rumah yang ditempati masyarakat sudah sesuai dengan struktur geografis di Kepulauan Mentawai dikarenakan bahwa Kepulauan Mentawai adalah daerah rawan gempa. Sebuah rumah harus memiliki fungsi utama sebagai hunian, selain harus memenuhi syarat keamanan gedung dan dapat menjamin kesehatan para penghuninya, juga harus memenuhi kecukupan luas minimum ruangan. Rumah yang terdiri dari ruang tidur atau ruang serba guna serta dilengkapi dengan fasilitas sanitasi.

Perkembangan rasio rumah layak huni di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 rasio rumah layak huni telah mencapai 30,98 persen dan tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sekitar 43,24 persen dengan jumlah rumah tidak layak huni sekitar sebesar 5.303 unit. Begitu juga dengan cakupan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana meningkat dari 7,5 persen di tahun 2020 menjadi 100 persen pada tahun 2024. Untuk persentase fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 1,5 persen pada tahun 2020 menjadi 98 persen tahun 2024.

Tabel 2.29
Perkembangan Indikator Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio rumah layak huni (%)	30.98	38,02	43,05	41,46	43,24
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	7,5	8	10	12,2	100
3	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah/ kota (%)	1,5	1,73	1,85	2,12	98
4	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	4,25	5	5,3	5,5	6
5	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6.800	6.500	5.840	5.787	5.303

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0	1 kawasan	1 kawasan	2 kawasan	0

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Begitu juga dengan jumlah rumah tidak layak huni yang selalu diintervensi melalui program pemerintah daerah yaitu pembangunan rumah layak huni baik itu yang menjadi relokasi kawasan bencana atau berpotensi bencana juga sebagai program pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, yaitu dari 6.800 unit RTLH pada tahun 2020 berkurang menjadi 5.303 unit pada tahun 2024.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan dari pembangunan daerah dalam layanan urusan wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, selama periode waktu 2020-2024, berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.30 sesuai dengan indikator yang tersedia, menunjukkan terjadi peningkatan.

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sangat pluralis/ majemuk secara prinsip memiliki potensi pada gesekan antar golongan, suku atau pun agama, namun penguatan koordinasi antar pimpinan lembaga pemerintahan dan para pemuka agama, pemuka adat dan masyarakat yang sudah terjalin dan terjaga dengan baik menjadikan hal-hal yang mengganggu ketertiban dan

ketenteraman masyarakat tidak terjadi atau tidak ada kasus yang serius. Perkembangan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum kondusif dan masih dalam situasi yang terkendali. Beberapa indikator terkait kebencanaan yang menjadi bagian dari urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dirangkum dalam Tabel 2.30.

Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman di Kepulauan Mentawai dengan tingkat kesulitan geografis mampu diselesaikan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 92 persen. Namun pada cakupan layanan bencana kebakaran telah pada angka 80 persen di tahun 2024.

Tabel 2.30
Perkembangan Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	72	85	88	90	92
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (persen)	30	35	38	60	80
Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	80	30	25	25	20
Persentase Penegakan PERDA (persen)	80	70	65	65	70
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	15.568	2.536	3.217	4.428	9.217
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	15.568	2.536	3.217	4.428	9.217

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	12.560	856	592	672	516
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Sepanjang tahun 2024 telah terjadi 12 kejadian kebakaran diantaranya dapat 10 ditangani sedangkan 2 kejadian kebakaran tidak dapat ditangani segera melalui unit pemadam kebakaran, hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana antisipasi kebakaran di setiap kecamatan belum ada (yang ada di Sikakap, Muara Siberut, Tuapejat, Sioban) sehingga tidak dapat mencakup seluruh wilayah di Kepulauan Mentawai. Untuk *respon time* kejadian kebakaran sudah semakin membaik yaitu 20 menit di tahun 2024. Untuk penegakan perda senantiasa dilakukan dengan mengutamakan sosialisasi dan ajakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan tindakan-tindakan yang mengarah pada preventif dalam upaya menjaga kondusifitas dan kenyamanan masyarakat, seperti pada penertiban lapak atau kios pedagang yang tidak pada peruntukannya telah dilakukan tindakan penertiban langsung. Begitu juga dengan personel penegakan peraturan daerah yang masih sangat terbatas yaitu dengan PPNS sebanyak 2 orang, sehingga untuk capaian penegakan perda pada tahun 2024 hanya mencapai 70 persen.

Untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana daerah menjadi hal penting dilakukan terutama dalam pengarusutamaan kebencanaan untuk setiap sektor pembangunan. Penguatan kapasitas masyarakat dalam meminimalisir risiko dan memitigasi dampak bencana bagian penting dalam tahapan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bencana.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pelaksanaan Pelaksanaan dari pembangunan daerah dalam layanan urusan wajib sosial, selama periode waktu 2020-2024, berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.31 sesuai dengan indikator yang tersedia, menunjukkan terjadi peningkatan pada sarana sosial yang direhabilitasi serta indikator lain.

Tabel 2.31
Perkembangan Indikator Sosial
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PPKS yang memperoleh bantuan (persen)	100	100	100	100	100
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial (persen)	100	100	100	100	100
Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penanganan PPKS (persen)	100	100	100	100	100
Jumlah PPKS	30.286	24.636	24.797	25.241	24.562
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100	100	100	100	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi	100	100	100	100	100

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota					

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sudah sangat baik, dalam artian setiap kejadian dan kebutuhan PPKS selalu difasilitasi dan dibantu. Untuk jumlah PPKS dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebanyak 30.286 orang dan mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 menjadi sebanyak 24.562 orang.

Untuk capaian cakupan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti serta cakupan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota telah mencapai 100 persen, artinya untuk setiap kasus yang ada telah ditangani/difasilitasi oleh dinas terkait.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Salah satu faktor utama dalam pembangunan daerah adalah tersedianya tenaga kerja yang handal dan memiliki daya saing. Penguatan sumber daya manusia menjadi penting dalam

menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Mentawai tingkat pengangguran terbuka terendah di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Indikator tenaga kerja lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.32 dibawah ini.

Tabel 2.32
Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	83,10	81,65	78,25	80,07	83,47
Jumlah pengangguran (orang)	2.063	1.485	716	711	818
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	5	10	20	25	18,2
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	35	35,4	38	41,2	43
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	80	83,6	85	88	90
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	0	0	0	1	1

Sumber : BPS Kepulauan Mentawai dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir relatif konstan pada kisaran 1-2 persen. Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1,39 persen mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi sebesar 1,33 persen dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sehingga TPT Kabupaten

Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 1,44 persen atau bertambah 107 pengangguran dengan total jumlah pengangguran sebanyak 818 orang. Tingkat partisipasi angkatan sebagai bentuk gambaran ketersediaan angkatan kerja pada kelompok penduduk usia kerja yang produktif menunjukkan perkembangan yang membaik pada tahun 2022 yaitu sebesar 78,25 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 80,07 persen dan pada tahun 2024 sebesar 83,47 persen. Untuk jumlah pengangguran di Kabupaten kepulauan Mentawai tahun 2023 sebanyak 711 orang berkurang jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran pada tahun 2022 yaitu sebanyak 716 orang. Namun, mengalami peningkatan jumlah pengangguran di tahun 2024, sehingga jumlah pengangguran sebanyak 818 orang.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi angkatan kerja perempuan kurun waktu 5 tahun tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yaitu dari 42,4 persen tahun 2020 menjadi 80 persen di tahun 2024. Hal ini dapat menggambarkan bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah cukup memadai, namun yang perlu ditingkatkan adalah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Pembangunan gender di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif, untuk tahun 2020

capaian IPG sebesar 89,59 persen dan meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2024 menjadi 90,13 persen. Untuk pencapaian kabupaten layak anak di Kepulauan Mentawai masih pada predikat pratama dan perlu peningkatan, hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk membangun komitmen dan mengintegrasikan program pembangunan dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak di Kepulauan Mentawai.

Dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, setiap kasus yang ada selalu ditangani dengan baik, koordinasi dengan Forkopimda dan muspika di kecamatan sangat baik begitu juga dengan peranan pokja P2TP2A sebagai perpanjangan tangan dan mitra pemerintah daerah melalui unit UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang telah terbentuk sehingga penanganan kasus kekerasan terhadap anak sangat baik serta dalam upaya pencegahan dan penanganan kejadian tanggap dan melibatkan berbagai pihak.

Tabel 2.33
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemenuhan hak anak (persen)	100	100	100	100	100
Pencanangan kecamatan layak Anak (kec)	4 kec	4 kec	4 kec	3 Kec	4 kec
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait (persen)	100	100	100	100	100
Persentase Kepala Keluarga perempuan yang sejahtera (persen)	8,75	9	7	7,4	8,2

Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender	89,59	89,81	89,91	89,57	90,13
Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (persen)	100	100	100	100	100
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	51,03	52	50	53,95	57,20
Partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	42,40	42,93	42,17	72,50	80,0
Persentase PNS perempuan dibanding total PNS (persen)	51,03	51,25	52,37	53,95	52,87
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,13	0,11	0,12	0,13	0,14
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pada urusan wajib pangan berbagai indikator yang terlihat pada Tabel 2.34 mengambarkan perkembangan yang cukup baik dan mengalami peningkatan pencapaian dalam kurun waktu 2020-2024, begitu juga dengan pengawasan dan pembinaan pangan. Perkembangan capaian ketahanan pangan secara nasional di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat rendah yang dilihat dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan. Tahun 2020 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 46,67 dan mengalami penurunan tahun 2021 yaitu dengan indeks ketahanan pangan sebesar 37,67. Pada tahun 2022 capaian indeks ketahanan pangan mengalami

peningkatan menjadi sebesar 52,48 dan pada tahun 2024 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 52,0.

Masih rendahnya pencapaian indeks ketahanan pangan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan pangan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dalam kaitan ketersediaan pangan utama sebagai konsumsi pangan lokal yang tersedia, capaiannya cukup stabil, tahun 2020 sebesar 67 persen dan hingga tahun 2024 capaiannya sebesar 70 persen.

Tabel 2.34
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan pangan utama	67	68	68	70	70
lndeks Ketahanan Pangan	46,67	37,67	52,48	50,91	52
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	48,81	52,07	52,07	65,27	65,27
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	80	82	84	85	85

Sumber :Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Angka ini masih dikatakan sangat kecil mengingat potensi sumber daya alam Kepulauan Mentawai yang sangat besar untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan dan juga sebagai upaya ketahanan pangan untuk antisipasi keadaan mendesak atau terjadinya bencana.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Legalisasi aset berupa tanah sangat penting bagi pemerintah khususnya masyarakat dalam menopang tumbuh kembangnya

sosial ekonomi masyarakat. Sengketa pertahanan/ lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai selalu menjadi konflik sosial di tengah masyarakat. Tanah hak ulayat (adat) dan sengketa tanah masyarakat menjadi persoalan khususnya menyangkut hak masyarakat miskin selalu dimediasi baik melalui pemerintahan desa, di kecamatan dan bahan tingkat kabupaten melalui koordinasi pemangku kepentingan agar hak-hak kepemilikan pertanahan masyarakat terjamin.

Tabel 2.35
Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penanganan sengketa tanah yang dilakukan secara mediasi (persen)	100	100	100	100	100
Persentase luas lahan bersertifikat (persen)	11,05	11,4	20,42	22,05	36,55
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	35	38	40	62,36	0
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	0	0	0	0
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	1.200 ha	1.200 ha	800 ha	800 ha	0
Tersedianya Tanah Obyek *Landreform* (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	0	0	0	0
Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	0	0	0	0

Untuk persentase luas lahan yang telah memiliki sertifikat di Kepulauan Mentawai pada tahun 2024 baru mencapai 36,55 persen atau seluas 135.213.859,65 m^2. Begitu juga dengan pengakuan hak wilayah adat oleh pemerintah melalui Masyarakat Hukum Adat (MHA) sejak tahun 2019 yaitu Uma Goisooinan seluas 971 ha, Uma Rokot seluas 114 ha, Uma Usut Ngaik seluas 83 ha dan Uma Saureinu seluas 5.739 ha.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Perkembangan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup selama tahun 2020-2024 ditunjukkan pada Tabel 2.36 kualitas lingkungan hidup di Kepulauan Mentawai semaksimal mungkin tetap dijaga dan dipastikan tetap pada kondisi awal/lestari. Luas kawasan yang mayoritas adalah kawasan hutan dengan persentase 82 persen tentunya sebagai indikator bahwa wilayah Kepulauan Mentawai relatif masih aman dari deforestisasi yang akan berdampak pada penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan/kawasan. Dalam kurun 5 tahun terakhir indeks kualitas lingkungan hidup perkembangannya mengalami perbaikan dari tahun 2020 dengan predikat baik meningkat hingga pada tahun 2024 pada predikat baik.

Begitu juga respon terhadap kasus-kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga melalui forum pimpinan di tingkat kabupaten

permasalahan pencemaran dan kasus lingkungan dapat ditangani dengan baik.

Tabel 2.36
Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penetapan hak MHA	4	4	17	17	0
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota (persen)	6,84	7,38	14,35	26,47	13,05
Penanganan kasus lingkungan hidup	100	100	100	100	100
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,93	82,24	83,08	83,17	80,01
Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota (%)	45	50	53,4	55,04	66,66

Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Untuk penanganan dan pengelolaan sampah juga capaian setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan cakupan layanan persampahan dan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Namun, intervensi dalam pengelolaan sampah masih sebatas pada kawasan ibukota kabupaten (Kecamatan Sipora Utara/Tuapejat dan sekitarnya) menjadi indikasi masih rendahnya persentase penanganan sampah atau pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 13,05 persen pada tahun 2024.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan data yang terlihat pada Tabel 2.37 menunjukkan berbagai indikator dalam urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selalu mengalami kenaikan selama kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2.37
Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (persen)	45.51	64,90	67,77	73,55	73,28
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	61,44	64,25	66,28	68,44	49,31
Persentase kepemilikan akte kelahiran (persen)	63,36	77,34	77,24	79,03	91,22
Persentase pasangan berakte nikah (persen)	20,23	49,79	42,08	44,15	62,63
Rasio kepemilikan KK	74,38	89,82	85,18	86,08	99,03
Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	20,23	49,79	42,08	55,56	46,15

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian indikator perkembangan kemajuan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti pada tabel 2.37 menunjukkan perkembangan yang baik. Dari sisi rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2024 telah mencapai 73,28 persen. Begitu juga dengan kepemilikan akte kelahiran telah mencapai 91,22 persen. Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2024 telah mencapai 99,03 persen dan pasangan/keluarga yang telah memiliki akte

nikah pada tahun 2024 telah mencapai 62,63 persen. Capaian ini tentu belum maksimal sehubungan dengan berbagai kebutuhan administrasi masyarakat yang sangat membutuhkan kepemilikan KTP sebagai syarat menerima layanan pemerintah (sosial dan ekonomi) khususnya masyarakat miskin.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dikatakan bahwa belum mengalami kemajuan yang cukup berarti hal ini terlihat dari indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seperti terlihat dari Tabel 2.38 perkembangan capaian kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2024 dari sisi kinerja pembangunan masyarakat dan desa, indikator utama yang dapat dijadikan patokan pembangunannya adalah Indeks Desa Membangun (IDM), di mana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan perbaikan capaian. Pada tahun 2020-2024 tidak ada lagi status desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan predikat desa sangat tertinggal.

Tabel 2.38
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020-2024

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	559	559	559	486	486
Jumlah LPM	43	43	43	43	43

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PKK aktif	43	43	43	43	43
Posyandu aktif	100	180	283	286	286
IDM (Desa Tertinggal)	18 desa	15 Desa	11 Desa	8 Desa	6 desa
IDM (Desa Maju)	2 desa	6 Desa	9 Desa	10 Desa	10 Desa
Persentase pengentasan desa tertinggal	21,73	16,67	26,6	27,3	13,95
Persentase peningkatan status desa mandiri	0	200	0	0	33,3

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P2 KB

Tahun 2020-2024 untuk capaian desa dengan kategori maju mengalami penambahan dari 2 desa tahun 2020 menjadi 10 desa di tahun 2024, begitu juga dengan status desa tertinggal dari 18 desa tertinggal tahun 2020 berkurang menjadi 6 desa di tahun 2024. Untuk persentase peningkatan status desa mandiri mengalami peningkatan sebesar 33,3 persen pada tahun 2024, yaitu mengalami penambahan jumlah desa mandiri (2023 = 3 desa mandiri, 2024 = 4 desa mandiri).

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengalami peningkatan walau tidak signifikan, seperti terlihat dari Tabel 2.39. Untuk jumlah rata-rata anak per keluarga relatif stabil untuk setiap tahunnya hingga tahun 2023 rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 3 orang.

Tabel 2.39
Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	4	4	4	3	3
Rasio akseptor KB	58	58	62	67	43,14
Cakupan peserta KB aktif (persen)	58.39	58,40	58,44	58,63	58,46
TFR (Angka Kelahiran Total)	1,90	2,20	2,35	2,43	2,68
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/ mCPR)	13,30	21,27	24,15	24,56	51,6
Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	0,87	0,65	1,12	7,7	12,95

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P2 KB

Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2020-2024 tidak mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dengan capaian sebesar 58,39 persen tahun 2020 dan meningkat setiap tahun hingga tahun 2024 menjadi sebesar 58,46 persen. Rasio akseptor keluarga KB cakupannya mengalami penurunan, yaitu dari tahun 2020 dengan rasio sebesar 58 turun pada tahun 2024 dengan rasio akseptor KB menjadi 43,14. Untuk angka kelahiran total mengalami peningkatan dari 1,9 persen tahun 2020 meningkat pada tahun 2024 menjadi 2,68 persen.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang vital dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bercirikan kepulauan. Konektivitas antar pulau di Kepulauan Mentawai dan sebagai penghubung

Kepulauan Mentawai dan Padang atau daerah lain di luar Mentawai urusan perhubungan mengambil bagian penting dalam menunjang dan memperlancar arus barang dan arus orang yang pergi dan menuju Kepulauan Mentawai.

Perkembangan capaian kinerja urusan perhubungan dapat dilihat dari cakupan layanan transportasi yang melayani seluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada tahun 2020 cakupan layanan transportasi sebesar 80 persen dan capaian ini meningkat di tahun 2024 menjadi 83 persen. Hal ini didukung oleh sudah terbukanya akses transportasi di wilayah pantai barat seperti di Desa Simalegi.

Tabel 2.40
Perkembangan Indikator Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan layanan transportasi (persen)	80	83	85	88	83
Persentase armada angkutan laik jalan/ layar (persen)	70	80	80	82	85
Jumlah orang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun (orang)	149.235	145.206	168.742	182.346	224.049
Jumlah barang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun (ton)	47.654	52.669	65.163	75.003	118.329,88
Rasio konektivitas Kota	51,13	52,19	52,64	53,04	54,68
V/C Ratio di jalan Kota	0,18	0,18	0,18	0,18	0,2

Sumber : Dinas Perhubungan

Begitu juga dengan kondisi sarana dan prasarana perhubungan terutama pelabuhan laut sebanyak 7 buah dan pelabuhan penyeberangan sebanyak 3 buah dengan kondisi baik

dan masih beroperasi hingga sekarang. Sebagai bagian dari sistem konektivitas daerah, selain ketersediaan jalan sebagai penghubung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah rencana pembangunan pelabuhan menjadi kebutuhan untuk menjawab konektivitas total antar wilayah/antar pulau dan konektivitas regional antar kabupaten dan Provinsi. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional bahwa rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut/penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada 9 pelabuhan yaitu di Pulau Siberut antara lain Pelabuhan Sikabaluan, Subelen, Mabukkuk, Sirilogui. Pulau Sipora antara lain Pelabuhan Simaoumbuk, Sao, Sagitsi Pulau Pagai Utara Selatan antara lain Pelabuhan Polaga, Sinaka.

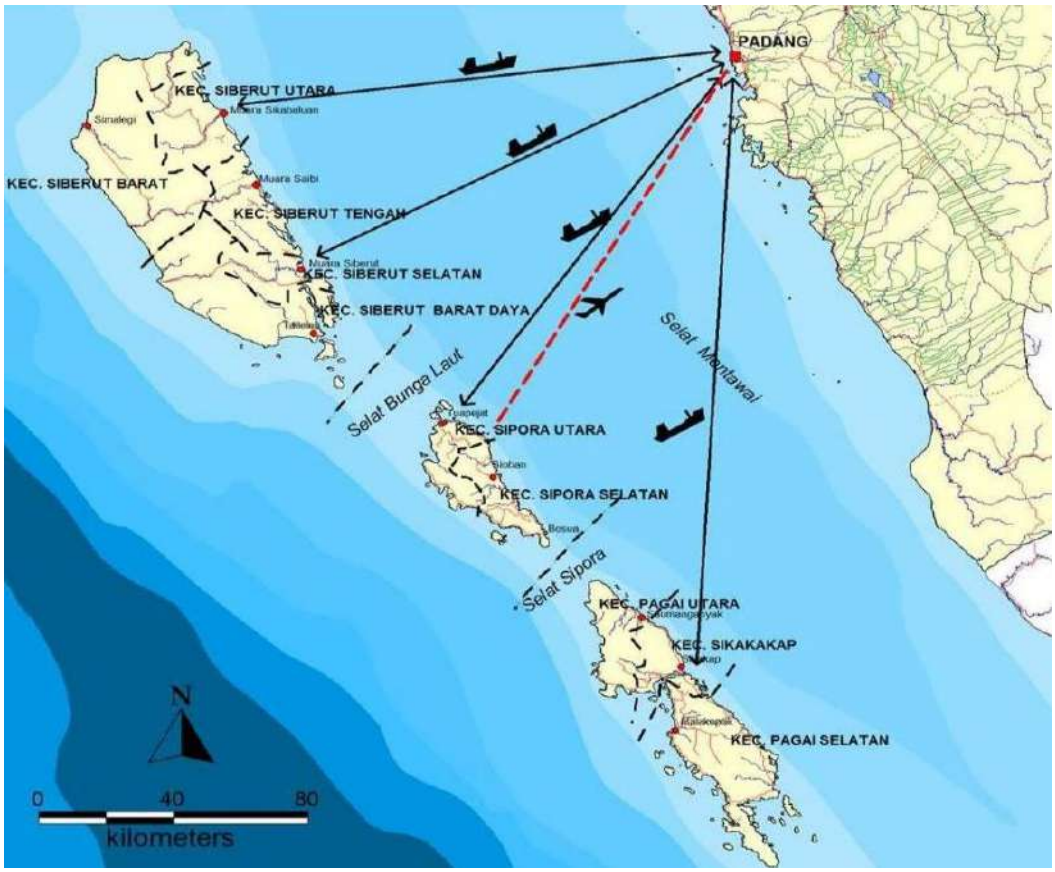
Tabel 2.41
Perkembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

No	Nama Pelabuhan	Kepemilikan Aset	Pengelola	Status	Kondisi	Ket
1	Pelabuhan Muara Siberut	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
2	Pelabuhan Sikakap	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
3	Pelabuhan Siuban	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
4	Pelabuhan Tuapejat	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
5	Pelabuhan Pasapuat	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
6	Pelabuhan Sikabaluan	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
7	Pelabuhan Labuhan Bajau	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
8	Pelabuhan Penyeberangan Tuapejat	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan

No	Nama Pelabuhan	Kepemilikan Aset	Pengelola	Status	Kondisi	Ket
9	Pelabuhan Penyeberangan Siberut	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan
10	Pelabuhan Penyeberangan Sikakap	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan

Sumber : Dinas Perhubungan

Gambar 2.26
Jalur Pelayaran Padang-Kepulauan Mentawai



10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah didukung oleh sistem teknologi informasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah mempunyai website untuk publikasi dan komunikasi proses dan hasil-hasil

pembangunan. Perkembangan sistem komunikasi dan informasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel 2.42 berikut.

Tabel 2.42
Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Layanan Telekomunikasi	86	84,5	85	86	88
Nilai SPBE	NA	0	1,23	1,53	2,46
OPD yang terhubung oleh akses internet yang disediakan Diskominfo (persen)	55,5	63,8	69,4	69,4	75
Layanan publik yang dilayani secara Online (persen)	4,8	5	5,2	5,2	10
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	70	70	70	70	72

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk mendukung pengelolaan website telah menggunakan jaringan komunikasi ASTINet (*Access Service to Internet*). Perkembangan pelaksanaan *e-goverment* di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dapat dikategorikan belum mengalami perkembangan yang signifikan, jika dilihat dari indeks SPBE bahwa pada tahun 2024 untuk SPBE di Kepulauan Mentawai sebesar 2,46 sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan niai SPBE tahun 2024 yang sebesar 1,53 sedangkan untuk tahun 2020 tidak dilakukan penilaian. Infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Akses data dan komunikasi yang sangat terbatas,

sarana dan prasarana yang masih minim juga sumber daya manusia dalam upaya *maintenance* yang belum ada sehingga biaya (*cost*) menjadi sangat besar dan kendala pengembangannya.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Perkembangan indikator urusan wajib koperasi, usaha kecil dan menengah, untuk persentase koperasi aktif secara tren dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 25,3 persen tahun 2020 menjadi 89 persen tahun 2024, indikator pelayanan koperasi, usaha kecil dan menengah di daerah, seperti terlihat pada Tabel 2.40. Untuk jumlah usaha mikro dan kecil juga mengalami tren peningkatan jumlah usaha. Tabel 2.43 menunjukkan untuk usaha mikro sebanyak 1.956 usaha pada tahun 20120 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi sebanyak 3.441 usaha. Dalam upaya menciptakan wirausaha baru (*enterprenuer*), program ke depan yang disusun adalah pelatihan/ peningkatan kapasitas keterampilan keahlian agar memiliki *skill* untuk dapat terjun ke dunia usaha, begitu juga dengan membangun relasi melalui perjanjian kerja sama dengan dunia usaha (*MoU*) sehingga di hulunya pembangunan sumber daya tenaga kerja yang terampil (*skill*) didukung dengan di hilirnya adalah terserapnya tenaga kerja sebagai modal awal untuk menjadi wirausaha baru.

Tabel 2.43
Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase koperasi aktif	25,3	20	20	89	89
2	Jumlah BPR/BPRS	3	3	3	2	2
3	Usaha Mikro	1.956	2.508	3.180	3.180	3.441
4	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (persen)	3	3,50	3,5	3,8	3,5
5	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha (persen)	4	6	7	7,5	8,21

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Harapannya, dengan dukungan semua sektor dan pendampingan dari pemerintah daerah, untuk usaha mikro dan kecil dapat mengambangkan unit usaha/permodalan dan skala pemasaran serta legalitas sehingga mampu memberikan kontribusi pada peningakatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian pelbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Pelayanan perizinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diorganisir melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pelayanan yang seoptimal mungkin dengan rata-rata pengurusan izin sekitar 5-6 hari.

Tabel 2.44
Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Proyek Investasi (PMDN & PMA)	10	16	44	154	540
Realisasi Investasi PMDN (juta Rp)	15.743,30	6.892,80	29.375,30	1.667,70	7.910,1
Realisasi Investasi PMA (000 US$)	148,80	1.158	114,50	4.297	5.373,63

Sumber: Dinas PMPTSP

Perkembangan realisasi investasi PMDN di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan yaitu dari Rp.15.743.300.000 tahun 2020 mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 realisasi PMDN hanya sebesar Rp7.910.100.000. Namun, Realisasi investasi PMA di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 realisasi investasi PMA sebesar 148,80 US$ dan relatif meningkat setiap tahunnya, hingga tahun 2024 realisasi PMA di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 5.373,63 US$.

Angka ini tentunya sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi investasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan sumber daya alam yang melimpah dan proses perijinan yang sangat mudah dan cepat. Untuk realisasi proyek baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020 realisasi proyek sebesar 10 proyek, tahun 2021 sebanyak 16

proyek, pada tahun 2022 sebesar 44 proyek dan pada tahun 2023 sebesar 154 proyek dan pada tahun 2024 sebanyak 540 proyek.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian indikator urusan kepemudaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada perkembangan jumlah organisasi yang masih bertahan. Pemuda yang diasosiasikan dengan paham idealisme yang dapat melihat setiap perkembangan dan isu daerah secara jernih tentunya akan mampu memberikan pemikiran dan dukungan yang utuh tanpa ada unsur kepentingan. Untuk urusan wajib kepemudaan dan olahraga dari data pada Tabel 2.45, secara umum dapat memberikan gambaran bahwa indikator menunjukkan keberhasilan yang cukup baik dan terus meningkat selama periode 2020-2024.

Tabel 2.45
Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah organisasi pemuda	9	12	10	14	14
Jumlah organisasi olahraga	10	15	12	16	16
Jumlah kegiatan kepemudaan	6	8	10	8	8
Jumlah kegiatan olahraga	3	0	5	12	10
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	25	20	20	24	24
Lapangan olahraga	205	145	150	150	150
Pertumbuhan wirausaha (enterprenuer)	0,65	0,58	1,183	0,93	0,93
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	14,14	14,14	15	15,3	15,3
Tingkat partisipasi	25,28	25,28	28	30	32,5

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan					

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Tabel 2.45 menunjukkan perkembangan jumlah organisasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan dari sisi kuantitas. Pada tahun 2020 jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 9 organisasi dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 jumlah organisasi kepemudaan menjadi sebanyak 14 organisasi. Begitu juga dilihat dari kapasitas ekonomi kepemudaan yang dilihat dari pertumbuhan wira usaha mengalami perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2020 pertumbuhan wirausaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,65 persen dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,93 persen pada tahun 2024.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan wajib statistik berkenaan dengan penyediaan data yang diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan, melihat perkembangan pembangunan dan dihilirnya sebagai bahan evaluasi untuk memberikan sebuah informasi analisis pembangunan. Penyelenggaraan urusan statistik menjadi bagian penting dalam penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perkembangan kinerja urusan statistik erat kaitannya dengan ketersediaan data dan

informasi yang digunakan oleh setiap pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah melalui perangkat daerah.

Tabel 2.46
Perkembangan Indikator Statistik
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Buku "Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka"	1	1	1	1	1
2	Buku "PDRB kabupaten"	2	2	2	2	2
3	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah (persen)	72,1	75	76,2	78,15	79,17
4	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	55,56	61,11	69,44	71,4	72,2
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	41,67	50,56	58,33	60,5	72,2

Sumber : BPS dan Bappeda

Selama periode 2020-2024 secara rutin telah diterbitkan buku Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai dan berbagai dokumen atau buku statistik dasar lainnya yang secara resmi dirilis melalui Badan Pusat Statistik (BPS) seperti dilihatkan pada Tabel 2.46 Data statistik ini baik statistik dasar maupun statistik sektoral yang berasal dari perangkat daerah tentunya menjadi pedoman dalam merumuskan dan menganalisis sebuah perkembangan indikator pembangunan daerah. Penyusunan buku Kepulauan Mentawai Dalam Angka (KKMDA) selalu diterbitkan setiap tahunnya oleh BPS Kepulauan Mentawai, begitu juga dengan dokumen lainnya seperti dokumen Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) baik berdasarkan pengeluaran dan lapangan usaha. Untuk data statistik sektoral yang dihasilkan oleh instansi atau perangkat daerah dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan khususnya dalam merumuskan indikator kinerja pemerintah daerah sehingga nantinya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan penerapan *e-goverment* di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya maksimal dilaksanakan. Integrasi sistem informasi pemerintahan masih parsial sehingga perlu dilakukan kesepahaman sistem yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan keamanan dan perlindungan data yang terjamin. Seluruh sistem informasi pembangunan baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, layanan publik harus memenuhi kaidah-kaidah tingkat keamanan dengan menyelenggarakan keamanan persandian sehingga risiko kerusakan sistem, data hilang, *hack* dapat dicegah dan ditangkal.

Urusan persandian yang telah dikukuhkan ke dalam susunan struktur organisasi perangkat daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika belum memadai untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam pengamanan informasi pemerintah daerah, terutama dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya

manusia yang secara keahlian (sertifikasi) belum ada, sehingga data terkait tingkat keamanan informasi pemerintah belum tersedia atau belum dapat dihitung/diukur.

Tabel 2.47
Perkembangan Indikator Urusan Persandian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat keamanan informasi pemerintah	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan erat kaitannya dengan eksistensi jati diri kearifan lokal masyarakat. Pembangunan kebudayaan melalui pemajuan kebudayaan menjadi hal penting agar sejarah, nilai-nilai luhur dan kelestarian budaya dapat terjaga dengan baik sehingga kelompok, ras dan masyarakatnya tidak kehilangan identitas dan marwah. Pemajuan kebudayaan di Kepulauan Mentawai telah lama dimulai dengan pelestarian budaya melalui berbagai festival atau even lokal dan regional yang sudah masuk kedalam agenda pariwisata nasional dalam Pesona Indonesia. Selain itu dalam kebijakannya, telah disusun pokok-pokok pikiran kebudayaan pada tahun 2020 serta telah disertifikasi 4 tenaga tim ahli cagar budaya (TACB) untuk memfasilitasi dalam penilaian warisan budaya benda yang ada di Kepulauan Mentawai. Pembangunan kebudayaan yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan,

terutama tahun 2020 dan tahun 2021 selama pandemi yang dibatasi pergerakan/mobilitas dan bahkan melarang berkumpulnya orang, sehingga even dan festival terkait kebudayaan tidak dilaksanakan. Dengan melihat dari perkembangan periode waktu 2020-2024, penyelenggaraan festival seni dan budaya, benda situs budaya yang dilestarikan pada tahun 2024 ada 1 even atau penyelenggaraan seni budaya setelah vakum pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, perkembangan indikator kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat seperti terlihat pada Tabel 2.48

Tabel 2.48
Perkembangan Indikator Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	0	0	1	3	1
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	2	2	3	2
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	55	55	55	12	13

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Perkembangan objek kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah ditetapkan kurun waktu 2014-2023 telah mencapai 13 warisan budaya. Penetapan ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan antara lain warisan budaya yang ditetapkan adalah Tato (2014), Sikerei (2019), Uma (2020), Kirekat dan Pasikut Abag (2022), Tahun 2023 antara lain Mone, Pangurei,

Panunggru, Gajeumak, Turuk Laggai, Opa dan Pasipiat Sot, Kabid (2024)

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kinerja urusan wajib perpustakaan selama periode 2020-2024 diperlihatkan pada Tabel 2.49 Perkembangan indikator jumlah pengunjung memberi bukti bahwa minat masyarakat untuk memanfaatkan pustaka daerah semakin membaik terutama dalam meningkatkan minat literasi dan numerasi masyarakat. Jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya rata-rata mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 pada masa pandemi yang mengalami penurunan dari 10.273 pengunjung menjadi sebanyak 8.988 pengunjung di tahun 2020. Namun pada tahun 2023 jumlah kunjungan perpustakaan telah mencapai 13.400 pengunjung.

Tabel 2.49
Perkembangan Indikator Perpustakaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perpustakaan	41	82	92	95	98
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	8.988	9.842	12.445	13.400	14.998
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	19.796	21.044	32.733	20.317	21.511
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	11	63,62	45,67	57,59
5	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (persen)	NA	15	43,87	60,80	68,18

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Untuk pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2024 dengan nilai indeks 57,59

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 45,67. Untuk tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2024 sebesar 68,18 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dengan nilai sebesar 60,8. Nilai literasi dan tingkat kegemaran membaca Kabupaten Kepulauan Mentawai baru dinilai pada tahun 2021 sehingga data capaian kinerja perpustakaan untuk tahun 2020 belum tersedia. Upaya untuk meningkatkan literasi dan minat baca di Kepulauan Mentawai seperti perlombaan menulis, bercerita, pidato, cerdas cermat antar jenjang sekolah begitu juga dilakukan program pustaka keliling untuk mempermudah jangkauan anak-anak sekolah/ peserta didik dan juga masyarakat akan layanan perpustakaan seperti buku, buletin dan bahan pustaka lainnya.

Gambar 2.27
Layanan Perpustakaan untuk Masyarakat dan Anak Sekolah



18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kinerja urusan wajib kearsipan dapat diukur dari pembinaan tata kelola arsip secara baku, persentase kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan dan indikator lainnya, seperti yang

diperlihatkan pada Tabel 2.50. Perkembangan pembangunan kearsipan di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dapat dikatakan belum berkembang secara signifikan. Selain dari masih terbatasnya tenaga atau SDM kearsipan yang secara fungsional mengelola dan menata arsip juga masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menata arsip yang baik dan benar. Sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan dan layanan arsip setiap perangkat daerah dan pemerintah daerah tentunya urusan kearsipan sudah mulai menjadi bagian penting yang harus diintervensi sehingga pengelolaan kearsipan daerah semakin lebih baik.

Tabel 2.50
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	2,7	5,5	5,56	3,5	3,93
2	Persentase Kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan	1	1,5	1,17	1,2	1,3
3	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	26	25	33	35	39,3
4	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	5	5	6,5	7	4

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Selain urusan wajib, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menyelenggarakan layanan urusan pilihan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain meliputi beberapa bidang, yaitu (1) Kelautan dan Perikanan (2) Pariwisata (3) Pertanian (4) Energi dan Sumber Daya Mineral (6) Perdagangan. Adapun pencapaian indikator kinerja masing-masing bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sebagai daerah kepulauan yang ditutupi oleh sepanjang garis pantai 1.402,66 km tentunya Kabupaten Kepulauan Mentawai dianugerahi kekayaan laut yang luar biasa. Pengembangan produksi perikanan tangkap memiliki prospek yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, dengan potensi kelautan sebesar 1.229.950 ton ikan, namun yang dikelola sebesar 11.869 ton atau sekitar 0,96 persen. Potensi ini memberikan gambaran nyata terhadap harapan bagi nelayan untuk meningkatkan ekonomi mulai dari peningkatan kapasitas nelayan, sarana dan prasarana, budi daya perikanan, pengolahan bahkan pada pemasaran produk perikanan.

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 produksi perikanan tangkap sebanyak 7.698 ton dan

mengalami peningkatan setiap tahun hingga pada tahun 2024 produksi perikanan tangkap sebesar 11.869 ton.

Tabel 2.51
Produksi Perikanan Tangkap dan Budi Daya
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Jumlah Produksi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perikanan Tangkap (ton)	7.698	8.694,5	10.354	10.800	11.869
2	Perikanan budi daya (ton)	127,59	308,14	320,6	328,65	331,10
3	Produksi Olahan Ikan (kg)	46.490	73.070	81.070	99.730	77.860

Sumber : Dinas Perikanan

Jika dilihat dikonversikan ke dalam penghasilan para nelayan maka penghasilan yang didapatkan masing-masing nelayan adalah Rp.54.708.857/tahun atau sekitar Rp.4,5 juta/bulan. Untuk perikanan budi daya khususnya budidaya wilayah pesisir/ terumbu karang dengan luasan lebih dari 17.636,72 ha. Potensi budi daya kawasan pesisir terumbu karang seperti kerapu, lobster dan kepiting bakau sangat menjanjikan dengan pasar kebutuhan domestik dan juga pasar nasional dan luar negeri dengan produksi rata-rata pertahun sebesar 58 ton.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat potensial untuk mengembangkan sektor jasa melalui pengembangan sektor pariwisata. Sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai *core sector* dan menjadi salah satu pilar utama pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sektor pariwisata memberikan *multiplier*

effect terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa lainnya bahkan sektor pertanian dan industri. Pengembangan sektor ini juga sangat potensial untuk membangun ekonomi kreatif baik itu bagi ekonomi mikro juga pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal. Kabupaten Kepulauan Mentawai dikenal akan potensi pariwisatanya, kabupaten ini memiliki pelbagai kawasan objek wisata yang sudah dikenal hingga penjuru dunia. Perkembangan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir trennya menunjukkan perkembangan yang positif kecuali pada tahun 2020 dan 2021 yang mengalami kontraksi dikarenakan oleh dampak pandemi COVID-19 yang tentunya membatasi aktivitas masyarakat dan juga larangan untuk melakukan even atau kegiatan yang memicu berkumpulnya masyarakat/orang. Banyaknya jenis objek wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dalam Tabel 2.52 berikut.

Tabel 2.52
Perkembangan Indikator Pariwisata
di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara (orang)	1.315	3.807	9.318	9.815	8.488
Jumlah Kunjungan Wisata Domestik (orang)	29.186	31.144	32.979	54.588	98.433
Lama Kunjungan (Lama tinggal)	±5 hari	±5 hari	±5 hari	±5 hari	±3 hari
Penerimaan Retribusi Daerah	1,22 M	4 M	6 M	7,5 M	9,91 M
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per	5	10	11	11,5	12,3

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
kebangsaan					
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	-37,39	6,70	5,89	65,52	80,32
Tingkat hunian akomodasi	1,25	82,43	85,86	86,02	86,54
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,76	0,81	0,84	0,87	0,89
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,4	4,2	6,04	15,69	17,17

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 1.315 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 29.186 orang dan meningkat hingga tahun 2024 sebesar 98.433 orang sedangkan wisatawan mancanegara sebanyak 8.488 orang. Penerimaan pendapatan dari sektor pariwisata memang belum maksimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dengan rata-rata sebesar 15,69 persen setiap tahunnya (kondisi normal), tentu strategi pengembangan pariwisata dan program pemasaran yang tepat menjadi hal penting harus diperhatikan dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Besar harapannya melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengatur besaran tarif retribusi olahraga rekreasi (*surfing*) tentunya memberikan dampak pada peningkatan kualitas sarana dan fasilitas kepariwisataan dan tentunya menambah alokasi Pendapatan Asli Daerah. Rencana aksi pengembangan daerah desa wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet adalah

rencana daerah dalam pengembangan desa wisata untuk periode lima tahun. Penetapan kawasan desa wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet dapat ditentukan atau dikelompokkan berdasarkan jenis potensi pariwisata yang dimiliki. Pengembangan kawasan desa wisata bukan hanya dengan menetapkan lokasi atau daerah mana saja yang menjadi kawasan strategis, namun perlu juga memperhatikan tema pengembangan, ketersediaan dana, perancangan lokasi pengkajian kelayakan dan peluang kerja sama antar pihak.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Hasil pertanian dan perkebunan menjadi andalan dalam perekonomian masyarakat di Kepulauan Mentawai. Dari data BPS didapatkan bahwa dalam 5 tahun terakhir persentase kontribusi sektor pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah lebih dari 48 persen. Begitu juga isu strategis dalam pengembangan sektor pertanian yang tidak sekadar menjual *raw material* tapi harus mampu memberikan nilai tambah terhadap komoditas pertanian, sehingga mampu menyejahterakan para petani. Begitu juga dalam hal pemenuhan kebutuhan lokal (ketahanan pangan), alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman/perkantoran dan alih fungsi lahan untuk komoditas pertanian lainnya (tidak konsisten) menjadi isu penting dalam memengaruhi ketersediaan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian menjadi perhatian serius

pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Tabel 2.53 menunjukkan perkembangan produksi tanaman pertanian, perkebunan dan perkembangan ternak yang dibudidayakan oleh masyarakat. Untuk perkembangan produksi tanaman pertanian/ perkebunan yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti pisang, kelapa, sagu cenderung mengalami penurunan produksi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 2.53
Produksi Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Jumlah Produksi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Keladi (kwintal)	1.155	13.260	8.550	7.830	8.496
2	Ubi Kayu (kwintal)	2.290	1.150	3.750	1.844	2.261
3	Ubi Jalar (kwintal)	22.510	2.630	2.910	2.646	2.569
4	Pisang (kwintal)	75.351	139.873	40.652	42.620	39.934
5	Padi (ton)	514,36	940,98	1.387	1.833	1.675
6	Durian (kwintal)	57.801	117.211	50.085	22.869	12.068
7	Kelapa (ton)	13.824	14.053	16.100	11.228	7.831
8	Cengkeh (ton)	547,22	143,65	91,15	146,92	211,44
9	Cocoa (ton)	210,8	131,24	83,53	36,32	30,43
10	Sagu (ton)	1.061	624,31	692,56	665,57	652,53
11	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	2,5	2,47	2,5	2,5	2,5
12	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus	80	85	85	85	90

No	Jumlah Produksi	2020	2021	2022	2023	2024
	penyakit hewan menular					
13	Babi (ekor) --- produksi	31.878	42.510	44.081	44.991	46.353
	Babi (kg) --- pemotongan	373.440	391.560	536.322	543.212	415.474
14	Ayam Pedaging (kg) --- pemotongan	28.605	82.440	84.101	26.884	59.031

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pada tahun 2020 produksi komoditi pisang sebesar 75.351 kwintal dan mengalami penurunan hingga tahun 2024 produksi komoditi pisang sebesar 39.934 kwintal, komoditi kelapa pada tahun 2020 sebanyak 13.824 ton mengalami penurunan produksi hingga menjadi 7.831 ton pada tahun 2024. Begitu juga dengan komoditi sagu juga mengalami penurunan produksi yaitu pada tahun 2020 produksinya 1.061 ton produksinya turun hingga tahun 2024 produksi komoditinya menjadi 652,53 ton. Beberapa hal yang menjadi indikasi penurunan komoditas unggulan daerah ini antara lain pembudidayaan yang belum dilakukan, peremajaan dan alih fungsi lahan menjadi areal perumahan atau pertanian komoditas lainnya.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai rata-rata 13,96 persen. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan

mulai di tahun 2020-2024. Capaian ini tergolong sangat kecil, dikarenakan belum maksimalnya pengembangan sektor perdagangan terutama pusat-pusat perdagangan seperti pasar yang berkembang. Di sisi lain sektor perdagangan yang didorong yang tumbuh dari tumbuh kembangnya usaha perdagangan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan yang signifikan terutama dalam legalisasi sektor usaha perdagangan.

Tabel 2.54
Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,80	12,72	13,43	13,72	13,96
2	Jumlah Koperasi	84	83	85	89	89
3	Jumlah Perdagangan (Pasar, Toko, Swalayan)	643	880	343	1.412	1.444
4	Jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan	5	6	6	6	10
5	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	0	1,07	1,60	1,80	1,77
6	Persentase kinerja realisasi pupuk	0,38	0,42	0,35	0,4	0,6
7	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0	0,4	0,2	0,2	0,4

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka (diolah)

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan selama 5 tahun terakhir masih sangat konstan diangka 2-2,5 persen terhadap PDRB belum mengalami peningkatan yang signifikan.

Kondisi ini memang sangat berbanding terbalik pada kontribusi sektor *raw material*/primer dengan kontribusi dengan rata-rata 48 persen setiap tahunnya, yang seharusnya sudah mulai reformasi struktur ekonomi ke arah sektor industri/ pengolahan.

Tabel 2.55
Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	2,43	2,57	2,48	2,45	2,48
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	2,07	1,25	0,031	1	3
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	0	0,8	1	1
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	0	0	0,02	0,04	0,06

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
oleh instansi terkait					
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0	0	0,6825	0,2	0,4
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka (diolah)

6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan kawasan pedesaan terutama di daerah tertinggal dan perbatasan, daerah strategis cepat tumbuh, pulau-pulau terluar, kepulauan, dan pesisir. Perkembangan transmigrasi di Kepulauan Mentawai telah menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini dapat dilihat perkembangan satuan permukiman transmigrasi yang telah menyatu menjadi bagian pemerintahan desa seperti pada Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) 1 termasuk desa Desa Sipora Jaya, Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) 2 termasuk pada Desa Sidomakmur dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) 3 termasuk pada Desa Bukit Pamewa.

Tabel 2.56
Perkembangan Indikator Urusan Transmigrasi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) yang difasilitasi pembangunannya.	3	3	3	3	3
Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) yang difasilitasi pembinaan.	3	3	3	3	3

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah sebagai instansi yang memiliki tugas untuk melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah memiliki beberapa indikator pencapaian kinerja sebagai bentuk ukuran keberhasilan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Pencapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat Daerah tidak terlepas dari peran dan kontribusi masing-masing Bagian, para Asisten dan Staf Ahli dan pejabat fungsional yang ada.

Tabel 2.57
Perkembangan Indikator Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai IKM > 60%	77,99	80	83	80,59	81,16
Nilai EKPPD	2,6	2,7	2,8	3,4	3,4
Penyusunan APBD tepat waktu	30 November	30 November	30 November	30 November	30 November
Persentase MoU yang ditindaklanjuti	30	30	40	50	80
Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik > 80 persen	95	83	84	85	88
Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100	100	100	100	100

Beberapa capaian sudah mengalami penignkatan pencapaian seperti pada persentase MoU yang ditindaklanjuti sudah pada angka capaian 80 persen sehingga ini perlu menjadi perhatian agar beberapa MoU yang telah disepakati dengan lembaga atau pemerintah daerah lainnya secara teknis ditindaklanjuti dalam naskah perjanjian kerjasama.

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi *budgeting*. Dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan fungsi Anggota DPRD maka ukuran indikator kinerja yang digunakan adalah kepuasan

pemangku kepentingan dalam hal ini adalah Anggota DPRD serta masyarakat yang mengunjungi DPRD.

Tabel 2.58
Perkembangan Indikator Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Peraturan Daerah disetujui/ ditetapkan oleh DPRD	5	5	16	16	16
Persentase Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap tugas pokok dan fungsi Dewan sesuai SOP	85	90	100	100	100
Jumlah aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD sesuai dengan SOP	5	14	12	12	16
Jumlah produk hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah yang dibahas dan didukung oleh DPRD	5	8	12	12	16
Persentase kebijakan Pemerintah Daerah yang didukung oleh DPRD	80	95	100	100	100

Pelaksanaan tugas sekretariat DPRD secara prinsip adalah memfasilitasi penyelenggaraan agenda setiap pimpinan dan anggota DPRD. Selain itu, juga menjaga keselarasan agenda dan komunikasi antara pemerintah daerah (eksekutif) dan legislatif. Secara umum pelaksanaan tugas sekretariat DPRD telah mencapai 100 persen pada tahun 2024 dengan harapan di tahun berikutnya pelayanan dapat tingkatkan secara kualitas.

2.1.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Penunjang Perencanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diartikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down* untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang visioner dan implementatif. Kurun waktu hingga tahun 2022, perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin baik. Hal ini terlihat dari pencapaian beberapa penghargaan yang diperoleh Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak tahun 2018, antara lain:

1. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2018.
2. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2019.
3. Perencanaan Terbaik III se-Sumatera Barat Tahun 2019.
4. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2020.

5. Perencanaan Terbaik Harapan III se-Sumatera Barat Tahun 2020.
6. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2021.
7. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2022.
8. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2023.
9. Perencanaan Terbaik Harapan III se-Sumatera Barat Tahun 2021.

Begitu juga dengan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2024, dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 yang sedang berproses, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya telah disusun dan batas waktu penetapannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Unsur Penunjang Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan

pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Capaian target indikator kinerja penunjang pada urusan keuangan dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. APBD merupakan instrumen fiskal di daerah yang digunakan dalam membiayai membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Pencapaian kinerja penyelenggaraan keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah pada pencapaian tertinggi yaitu dengan opini keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diperoleh pertama kali sejak kabupaten berdiri yaitu tahun 2019. Namun, pancapaian ini mengalami penurunan yaitu pada tahun 2021 untuk pengelolaan keuangan tahun 2021 dengan opini keuangan dengan predikat WDP dan pada tahun 2022-2024 opini pengelolaan keuangan daerah Kembali mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Tabel 2.59
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini Keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2	Realisasi PAD (persen)	62,25	69,78	112,89	83,26	83,37

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai senantiasa menargetkan maksimal dalam pencapaian kinerja opini keuangan terhadap hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan setiap tahunnya dengan opini wajar tanpa pengecualian.

3. Unsur Penunjang Kepegawaian

Suksesnya pencapaian kinerja pembangunan daerah sangat tergantung dengan kualitas sumber daya manusia yang ada. Perhatian pada unsur kepegawaian menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan, juga sebagaimana amanat Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, seluruh Pemerintah Daerah diamanahkan untuk menerapkan Sistem Merit dilingkungannya. Penerapan sistem merit sebagai salah satu strategi dalam manajemen SDM ASN tentunya bukanlah hal yang mudah. Pada perjalanannya, banyak tantangan dan inkonsistensi yang ditemui dalam pelaksanaan sistem ini. Tantangan dan inkonsistensi datang tidak hanya dari dalam ekosistem birokrasi semata, namun juga dari ekosistem di luar birokrasi yang secara tidak langsung memengaruhi.

Sejak tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah mulai penerapan dan penilaian Sistem Merit dengan indikator Nilai Penerapan Sistem Merit. Penilaian tersebut didasarkan pada aspek antara lain Perencanaan Kebutuhan ASN, Pengadaan ASN, Pengembangan Karier, Promosi dan Rotasi,

Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan Serta Sistem Informasi. Penerapan Sistem Merit akan diukur dengan Penilaian Sistem Merit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya menjadi indikator dalam urusan penunjang kepegawaian menggantikan indikator Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70 persen. Pada tahun 2024 sistem merit di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 129 (skala 0-400) tidak mengalami perubahan pencapaian, di mana tahun sebelumnya (2023) nilai Sistem Merit Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 129. Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui sertifikasi pendidik masih belum dipenuhi sebagai syarat guru/pendidik dengan kisaran baru 19 persen.

4. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Urusan pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas kepemimpinan dan juga dalam jabatan struktural dan fungsional yang diselenggarakan dalam upaya menyesuaikan kapasitas sumber daya dengan jabatan yang diemban sehingga mempercepat tercapainya tujuan organisasi.

Pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari perkembangan indikator persentase penempatan (jabatan) yang diduduki berdasarkan kompetensi sudah mencapai 75

persen tahun 2024 dan diharapkan pada tahun berikutnya telah mengalami peningkatan yaitu pada angka 75-80 persen.

Tabel 2.60
Perkembangan Indikator Kepegawaian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penempatan yang diduduki berdasarkan kompetensi	70	70	72	73	75
Persentase peningkatan kinerja ASN	90	90	100	100	100

Begitu juga dengan upaya peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui berbagai pendidikan dan pelatihan telah mencapai 90 persen dari seluruh ASN khususnya PNS yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan merupakan urusan penunjang yang sangat vital dalam proses penyusunan perencanaan terutama dalam perumusan strategi/ kebijakan dengan penarikan kesimpulan secara ilmiah yang dijadikan pedoman dan dasar/rujukan pengambilan kebijakan.

Masih belum adanya SDM dalam bidang kelitbangan (peneliti) yang kompeten di dalam bidangnya. Selain itu juga disebabkan oleh permasalahan mengenai hasil penelitian dan pengembangan yang belum optimal sedangkan itu digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan dalam penetapan suatu kebijakan. Begitu juga dengan perkembangan inovasi daerah di

Kabupaten Kepulauan Mentawai masih fluktuatif, inovasi yang diartikan sebagai pembaharuan tata kelola dan pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Gambar 2.28
Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Bappeda Kab. Kepulauan Mentawai, 2025 (diolah)

Penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam perspektif kematangan dan kedalaman penerapan inovasi masih belum maksimal. Hal ini disebabkan berbagai faktor seperti jangkauan yang sangat luas, rentang kendali yang terbatas, biaya operasional dan komitmen yang masih rendah. Beberapa hal tersebut menjadi penghambat dalam inisiasi dan penerapan inovasi pada setiap perangkat daerah.

Perkembangan capaian inovasi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diukur dalam indeks inovasi daerah setiap tahun diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui pengukuran IGA (*Innovation Government Award*) mengalami pencapaian yang fluktuatif, yaitu pada tahun 2020 dengan metode

perhitungan lama masuk pada kategori kurang inovatif, lalu pada tahun 2021 dengan metode perhitungan baru masuk pada kategori inovatif dengan nilai 32,53. Pencapaian dengan predikat inovatif ini dapat dipertahankan pada tahun 2022 dengan nilai 40,19. Namun pada tahun 2023 turun menjadi kabupaten kurang inovatif dengan nilai 18,31 kemudian pada tahun 2024 kembali meraih kabupaten dengan kategori inovatif dengan nilai 37,04. komitmen, dukungan dan pembaharuan pola pikir setiap ASN menjadi syarat yang perlu dalam menerapkan inovasi di pemerintah daerah sehingga bisa mendorong percepatan pencapaian tugas dan fungsi di masing-masing perangkat daerah.

2.1.3.5 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kedudukan inspektorat daerah adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Tabel 2.61
Perkembangan Indikator Unsur Pengawasan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tindak lanjut temuan	77,76	86,25	76,80	86,20	71,63
2	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	97,25	97,58	100	100	100
3	Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3

Sumber: Inspektorat

Perkembangan indikator pengawasan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan. Penguatan unsur pengawasan tidak dapat hanya berada pada unsur pengawasan atau berdasarkan temuan-temuan pemeriksaaan, yang lebih penting adalah penguatan tata kelola, tertib adminstrasi dan penguatan sumber daya manusia sehingga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan tertib dan taat azas. Untuk persentasi tindak lanjut temuan mengalami penurunan yaitu dari 77,76 persen pada tahun 2020 turun pada tahun 2024 menjadi sebesar 71,63 persen. Untuk OPD yang menerapkan SPIP telah mencapai 100 persen pada tahun 2024.

2.1.3.6 Unsur Pemerintahan Umum

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62
Perkembangan Indikator Unsur Pemerintahan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kriminalitas	6,96	5,76	5,36	5,6	1,94

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum masih terkendali yaitu pada angka 5-6 persen, dan pada tahun 2024 pada capaian 1,94 persen. Artinya beberapa tindak kriminalitas/ konflik untuk pelbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, pengeroyokan, pelecehan, penyalahgunaan obat dan pelbagai jenis kejahatan lainnya masih pada angka yang relatif aman dan dapat dikendalikan. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Beberapa upaya yang dilaksanakan oleh dalam melakukan pencegahan konflik adalah sebagai berikut :

a. Adanya peran tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi

permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah- tengah masyarakat.

b. Meningkatnya intensitas pertemuan dengan jajaran Forkopimda dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik sehingga dapat terwujud persamaan persepsi dalam penyelesaian masalah.
c. Terjalinnya koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

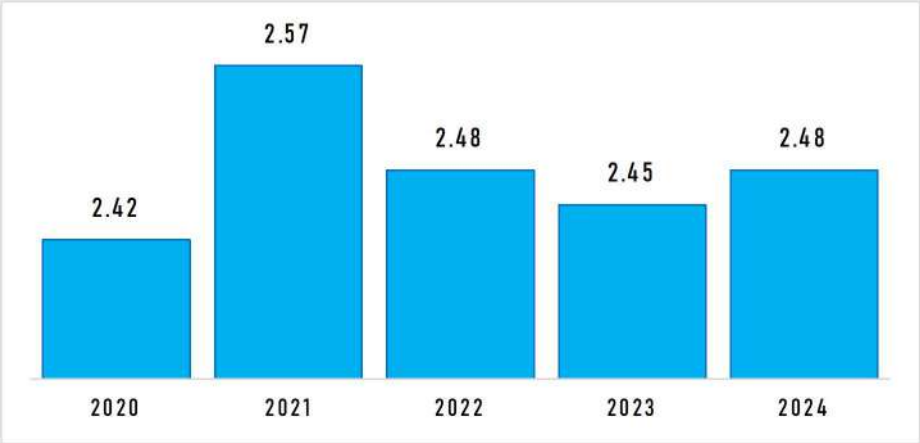
Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Gambar 2.29
Rasio PDRB Industri Pengolahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025 (diolah)

Kondisi ini memang sangat berbanding terbalik pada kontribusi sektor *raw material*/primer dengan kontribusi dengan rata-rata 48 persen setiap tahunnya, yang seharusnya sudah mulai reformasi struktural ekonomi ke arah sektor industri/ pengolahan. Gambar 2.29 menunjukkan perkembangan rasio Industri Pengolahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2024 yang menunjukkan tren peningkatan meskipun tidak signifikan.

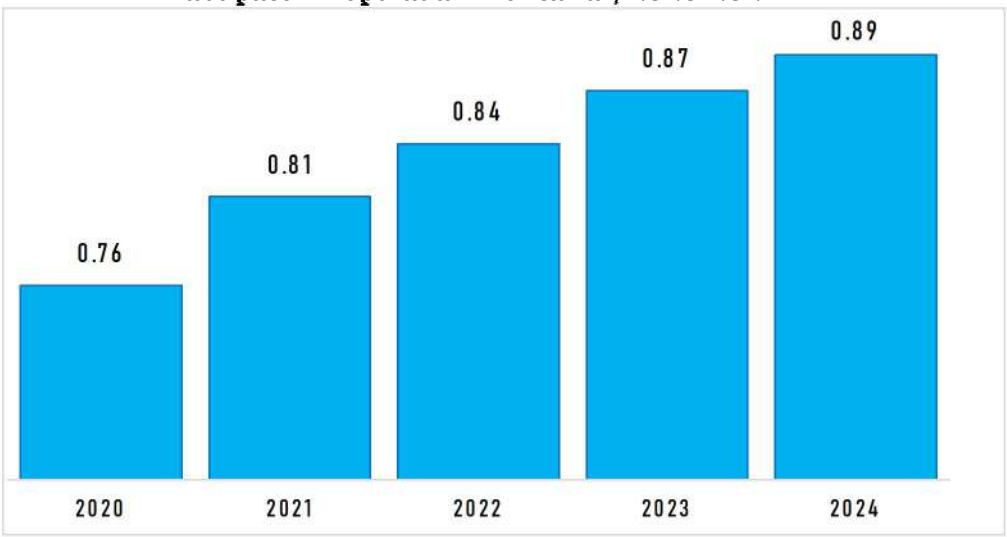
Tahun 2020 rasio PDRB Industri pengolahan terhadap total PDRB sebesar 2,42 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 2,57 persen. Namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 2,48 persen dan selanjutnya perkambangan rasio PDRB industri pengolahan relatif stagnan. Hilirisasi sektor primer yang belum menggeliat dan adanya *pilot project* yang menjadi *success story* bagi masyarakat atau kelompok

sehingga industri pengolahan khususnya pada komoditas unggulanda aerah belum berkembang.

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Sebagai daerah tujuan wisata khususnya wisata bahari sangat potensial untuk mengembangkan sektor jasa melalui pengembangan sektor pariwisata. Sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai *core sector* dan menjadi salah satu pilar utama pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sektor pariwisata memberikan *multiplier effect* terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa lainnya bahkan sektor pertanian dan industri.

Gambar 2.30
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025 (diolah)

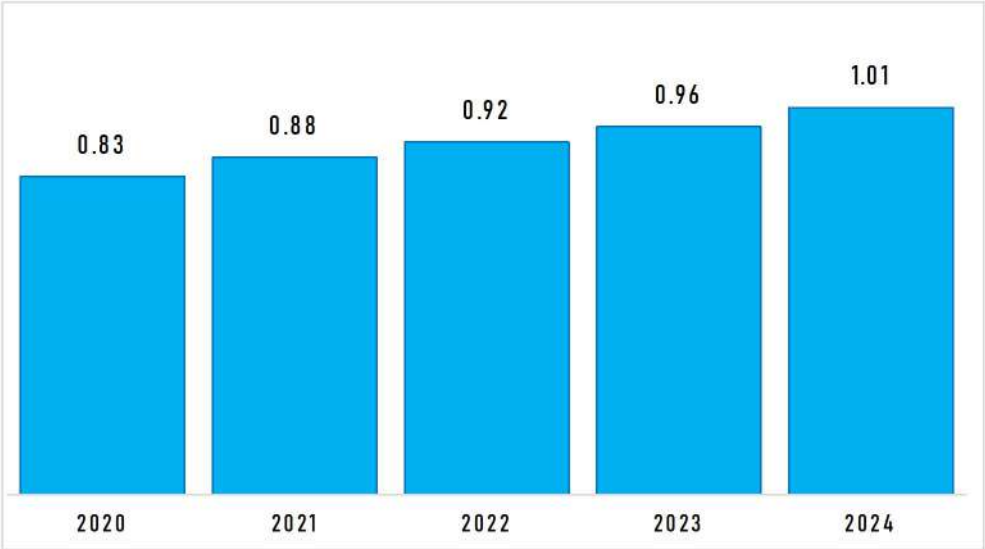
Perkembangan rasio PDRB Akomodasi makan dan Minum di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada tahun

2020 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,76 persen mengalami peningkatan hingga tahun 2021 dengan kontribusi sektor ini sebesar 0,81 persen dan meningkat lagi pada tahun 2022 dengan rasio sebesar 0,84 persen, hingga tahun 2024 rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum menjadi sebesar 0,89 persen. Angka ini relatif masih sangat kecil jika dijadikan Kepulauan Mentawai sebagai kawasan destinasi pariwisata unggulan dan sektor jasa menjadi *core sector* pengembangan wilayah dan ekonomi masyarakat. Pengembangan 6A pariwisata (*attraction, amenities, accessibility, accommodation, activity,* dan *ancillary).* tentunya menjadi skala prioritas menuju pariwisata Mentawai kelas dunia yang menjadi andalan ekonomi utama dengan *hospitality* yang prima tentunya.

Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Ide dan gagasan yang inovatif menjadi poin penting dalam membaca kebutuhan konsumen sebagai bentuk diversifikasi produk pariwisata yang dibutuhkan dan diinginkan para wisatawan dan konsumen lainnya. Pengembangan sektor ini juga sangat potensial untuk membangun ekonomi kreatif baik itu bagi ekonomi mikro juga pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal.

Gambar 2.31
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025 (diolah)

Untuk rasio PDRB Ekonomi Kreatif yang dipilih sektor jasa lainnya menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu 2020-2024 yaitu dari 0,83 persen di tahun 2020 meningkat menjadi ke 1,01 persen pada tahun 2024. Dengan metode perhitungan PDRB menggunakan standar harga berlaku tahun 2010. Perkembangan PDRB Ekonomi Kreatif menunjukkan pencapaian rasio yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, ini menjadi hal yang positif bagi keberlangsungan dan penguatan sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menjaga dan melestarikan identitas budaya, memperkuat daya saing di pasar global, mendorong inovasi dan kreativitas.

Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (PKP) sangat penting dalam pembangunan, memberikan kontribusi signifikan

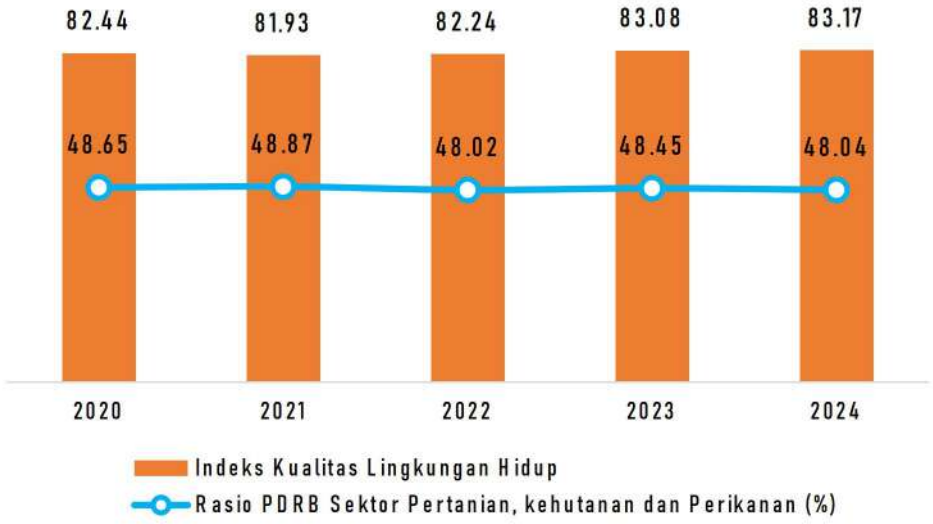
terhadap PDRB, menjadi sumber mata pencaharian, dan mendukung ketahanan pangan. Sektor PKP merupakan salah satu sektor ekonomi primer di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, selain itu sektor ini juga sebagai penyedia pangan dan bahan baku komoditas yang diekspor/kirim ke luar Mentawai. Sektor PKP menjadi sumber bahan pangan dan mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Mentawai.

Sebagai sumber utama pangan dan mata pencarian masyarakat Mentawai, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi *core* sektor yang secara nyata di Kepulauan Mentawai. Ini dapat dilihat dari rasio PDRB sektor ini dengan angka yang sangat tinggi yaitu sebesar 48,65 persen di tahun 2020 dan pada tahun 2024 pada kisaran 48,04 persen. Struktur ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam juga menjadi bagian dari budaya Mentawai tentang keterpaduan kearifan lokal dengan pemenuhan kebutuhan dan kehidupan sehari-hari sehingga menjaga kelestarian alam adalah bagian dari menjaga kehidupan masyarakat Mentawai.

Tingginya rasio dan *share* PDRB pada sektor ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat Mentawai menggantungkan kehidupannya pada sektor ini sehingga agar senantiasa dapat berkelanjutan maka harus dijaga dan dirawat dan dilestarikan. Hal ini dapat dilihat pada pencapaian Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berada pada nilai >80 atau dengan predikat Baik.

Gambar 2.32
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025 (diolah)

Pencapaian ini tentunya tetap dijaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutannya agar dapat dikelola dengan bijak sehingga ekonomi masyarakat tumbuh dan sumber daya alam dapat terjaga.

Ekspor Barang dan Jasa

Komponen ekspor pada PDRB berdasarkan pengeluaran menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak di konsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi diperdagangkan ke luar wilayah (Mentawai), di konsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan kontribusi ekspor barang dan jasa

terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan.

Tahun 2010 kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB sebesar 61,19 persen dan mengalami penurunan tahun 2021 menjadi sebesar 58,54 persen. Tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sehingga kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB menjadi 67,71 persen. Begitu juga pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 80,67 persen dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 86,64 persen.

Gambar 2.33
Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025 (diolah)

Peningkatan ekspor barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Mentawai tentunya perlu didorong pada hilirisasi produk barang dan jasa, karena barang dan jasa yang diekspor di dominasi pada komoditas sektor primer bahan mentah (*raw material*) yang tidak memiliki nilai tambah kepada masyarakat. Transformasi ekonomi dari sektor primer ke industri pengolahan

atau pun jasa menjadi daya ungkit/pendorong akselerasi peningkatan perekonomian di Kepulauan Mentawai.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Salah satu capaian yang dapat dijadikan ukuran dalam daya saing daerah adalah ketersediaan infrastruktur daerah yang mendukung kegiatan sektor rill masyarakat. Ketersediaan fasillitas wilayah/infrastruktur Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya.

a. Aksesibilitas

Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

a) Sarana jalan yang tersedia dalam kondisi baik sepanjang 79,3 km atau sekitar 7 persen dari total jalan yang tersedia, sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 971,4 km atau sekitar 85,96 persen dari total panjang jalan tersedia.
b) Bandar Udara Mentawai melayani penerbangan domestik Padang-Rokot (Tuapejat) dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Pelayanan penerbangan Padang-Tuapejat telah memiliki rute penerbangan tetap (3 kali seminggu) dengan kapasitas pesawat 15 s/d 20 orang.

c) Pelabuhan Laut sebanyak 5 buah, yaitu Pelabuhan Tuapejat, Pelabuhan Sioban, Pelabuhan Sikakap, Pelabuhan Sikabaluan, Pelabuhan Maileppet.

Untuk pelayaran Padang-Mentawai dapat dilalui oleh kelima pelabuhan tersebut dengan rute sudah terjadwal. Kapal yang tersedia sebanyak 2 buah (KMP Gambolo, KMP Ambu-Ambu) dan 2 unit Mentawai Fast juga melayani pelayaran rute Padang-Mentawai. Pelayaran antar pulau dalam wilayah Kepulauan Mentawai tersedia kapal penyeberangan antar pulau antara lain KM Nade, KM Bakkat Benuang dengan rute sudah terjadwal.

b. Air Bersih

Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih secara agregat masih sekitar 55,46 persen. Hal ini menjadi perhatian serius karena kebutuhan akan air bersih akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Oleh karena itu, perlu upaya ekstra untuk memenuhi cakupan dan kualitas pelayanan air minum seperti yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengembangkan SPAM untuk kawasan di 10 kecamatan dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

c. Listrik dan Komunikasi

Rasio elektrifikasi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 masih rendah sekitar 74,59 persen. Kendala utama adalah

infrastruktur jalan yang masih sangat terbatas dan juga kemampuan ekonomi masyarakat calon pelanggan yang tidak mampu membayar biaya penyambungan listrik. Jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sebanyak 14.717 pelanggan. Untuk 4 wilayah antara lain Tuapejat, Sioban, Sikakap, Muara Siberut, Sikabaluan telah beroperasi PLN selama 24 jam, sedangkan di daerah lain masih sekitar 10-12 jam/hari. Pengembangan sektor energi terutama energi baru dan terbarukan kedepan menjadi alternatif pilihan dalam rangka pembangunan energi yang berkelanjutan terutama dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang telah menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 23% hingga tahun 2025.

Layanan surat menyurat juga sudah tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai, antara lain di Sikakap, Sioban, Tuapejat, Muara Siberut, Sikabaluan. Begitu juga untuk akses telekomunikasi sudah dapat melayani konsumen di 10 kecamatan.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk pelbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan pelbagai jenis kejahatan lainnya.

Tabel 2.63
Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Jenis Kriminal	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kasus Narkoba	8	4	5	6	
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	7	14	18	15	4
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	8	8	6	8	5
5.	Jumlah kasus Pencurian	25	20	13	17	9
6.	Jumlah kasus Penipuan	12	5	6	5	2
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	60	51	48	51	19
9.	Jumlah Penduduk	87.623	88.389	89.401	91.427	97.837
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	6,96	5,76	5,36	5,6	1,94

Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Tingkat kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020-2023 cenderung stagnan dikisaran 5-6 persen. Namun para tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu dengan angka kriminalitas sebesar 1,94 persen. Harapannya dengan penguatan forum komunikasi pimpinan daerah dan seluruh unsur masyarakat menjaga ketertiban, keamanan dan keharmonisan masyarakat.

Harapannya dengan penguatan forum komunikasi pimpinan daerah dan seluruh unsur masyarakat menjaga ketertiban, keamanan dan keharmonisan masyarakat. Harapannya dengan penguatan forum komunikasi pimpinan daerah dan seluruh unsur

masyarakat menjaga ketertiban, keamanan dan keharmonisan masyarakat.

b. Layanan Perizinan

Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian pelbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Pelayanan perizinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diorganisir melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan karena SDM yang kompeten dan berkualitas menjadi fondasi utama untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. SDM yang kompeten memiliki kemampuan untuk bekerja lebih efisien dan menghasilkan *output* yang lebih berkualitas, sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan inovasi di berbagai sektor. SDM yang kompeten berperan penting dalam mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, seperti pengelolaan sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim, dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.

Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan (*dependency ratio*) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun), yang mengindikasikan beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk produktif. Angka ketergantungan yang kecil (di bawah 50%) mengindikasikan terciptanya bonus demografi dalam suatu daerah. Angka beban ketergantungan (ABK) merupakan indikator adanya momentum bonus demografi (Parwodiwiyonom & Witono, 2022).

Gambar 2.34
Angka Ketergantungan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025 (diolah)

Bonus demografi terjadi ketika rasio ketergantungan rendah, yang berarti proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Kondisi ini menguntungkan karena penduduk usia produktif yang lebih banyak yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan bonus

demografi memerlukan persiapan dan kebijakan yang tepat, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan lapangan kerja. Perkembangan angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Angka ketergantungan Kepulauan Mentawai sejak tahun 2020 sudah di bawah 50 persen yaitu sebesar 47,02 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 47 penduduk usia tidak produktif. Begitu juga angka ketergantungan ini semakin berkurang hingga di tahun 2024 menjadi 45,39 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 45 penduduk usia tidak produktif. Jika rasio ketergantungan ini di tahun berikutnya mengalami penurunan maka Kepulauan Mentawai akan mendapatkan bonus demografi (40-50 persen) yang tentunya sangat berguna dalam pembangunan di daerah terkhususnya dengan ketersediaan sumber daya manusia yang produktif dan memiliki daya saing dan kompetitif.

Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas kerja yang mengacu pada kualitas sumber daya manusia/tenaga kerja dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan

penduduk suatu wilayah, maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3. Tabel 2.64 menunjukkan adanya peningkatan rasio lulusan sarjana pada jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2.64
Jumlah Lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas berijazah S1/S2/S3	3.512	5.494	5.590	5.753	6.693
Jumlah penduduk 15 tahun keatas	63.474	64 370	65.431	66.936	72.391
Persentase penduduk 15 tahun keatas berijazah S1/S2/S3 (1/2)	5,53	8,53	8,54	8,6	9,25

Sumber: BPS Kepulauan Mentawai (diolah)

Persentase penduduk 15 tahun ke atas dengan kualifikasi pendidikan S1, S2, dan S3 tahun 2020 sebesar 5,53 persen, mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 8,53 persen. Begitu juga pada tahun 2022 persentase penduduk 15 tahun keatas berijazah S1/S2/S3 sebesar 8,54 persen dan pada tahun 2024 sebesar persentase penduduk 15 tahun keatas berijazah S1/S2/S3 mencapai 9,25 persen atau sekitar 6.693 jiwa. Ini menjadi modal pembangunan dalam ketersediaan sumber daya manusia untuk menjadi motor penggerak pembangunan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan, pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah dapat tercapai. Evaluasi pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk melihat keberhasilan program dan kegiatan melalui pencapaian indikator kinerja RKPD yang sesuai/selaras dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

Tabel 2.65
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1800	175.757.700.982	1800	155.550.885.141	100,00	88,50	3299	289.580.405.313	43,99	49,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11	100.000.000	11	75.628.600	100,00	75,63	22	472.448.600	50,00	33,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13	100.000.000	13	99.549.400	100,00	99,55	34	947.148.625	40,48	52,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang	10	42.004.000	10	42.002.000	100,00	100,00	20	84.743.000	50,00	70,62	Dinas

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan											Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	18.000.000	2	18.000.000	100,00	100,00	4	36.000.000	50,00	75,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	78.862.400	30	58.301.267	100,00	73,93	50	158.331.267	41,67	13,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	63.000.000	12	47.269.471	100,00	75,03	24	131.269.471	50,00	36,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	72.750.000	11	66.314.500	100,00	91,15	13	143.064.500	162,50	59,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	2.066.404.750	1	2.066.404.750	100,00	100,00	2	6.729.787.750	66,67	84,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Dipelihara/ Direhabilitasi											
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5	4.276.757.200	5	3.679.135.450	100,00	86,03	13	10.549.389.050	86,67	70,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang dibangun pada sekolah dasar	12	439.050.000	12	362.855.000	100,00	82,65	24	2.187.995.000	120,00	36,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2	907.944.500	2	766.597.900	100,00	84,43	5	1.746.336.300	41,67	32,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2	423.297.704	2	394.104.600	100,00	93,10	19	5.991.619.694	45,24	37,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5	2.427.359.446	5	1.999.628.600	100,00	82,38	15	5.676.471.300	75,00	40,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4	2.475.606.820	4	1.700.620.800	100,00	68,70	27	8.953.544.110	64,29	49,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5	576.105.600	5	547.743.800	100,00	95,08	13	1.354.434.800	86,67	58,89	Dinas Pendidikan dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Kebudayaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13000	14.772.000.000	13000	14.462.167.142	100,00	97,90	26000	29.285.481.682	50,00	49,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	13000	64.200.000	13000	58.425.200	100,00	91,00	26000	358.996.800	50,00	29,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	200	4.415.824.400	200	4.291.628.315	100,00	97,19	514	11.382.453.315	64,25	64,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah yang mengikuti pengembangan karir	200	676.131.000	200	412.494.808	100,00	61,01	400	2.147.437.608	50,00	71,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	134	227.213.800	134	177.700.958	100,00	78,21	268	453.735.858	50,00	37,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	134	50.000.000	134	49.178.500	100,00	98,36	268	220.053.500	50,00	27,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah	5	1.830.704.250	5	1.591.287.060	100,00	86,92	16	5.535.736.410	80,00	69,20	Dinas Pendidikan dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Dibangun											Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama												
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5	2.589.737.011	5	2.441.206.071	100,00	94,26	11	13.079.814.431	45,83	54,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3	1.013.118.000	3	815.099.998	100,00	80,45	6	2.293.774.718	66,67	25,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2	288.349.600	2	233.244.300	100,00	80,89	5	3.510.255.100	55,56	37,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	2.656.427.000	3	2.267.676.538	100,00	85,37	5	3.490.616.338	62,50	69,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	942.425.123	1	795.756.320	100,00	84,44	2	1.459.812.820	50,00	63,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6000	7.965.420.000	6000	7.934.400.325	100,00	99,61	12000	16.280.060.745	200,00	51,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan	92	3.062.338.600	92	2.915.034.000	100,00	95,19	292	6.241.421.000	79,35	69,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sekolah Menengah Pertama											
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100	374.366.700	100	273.378.473	100,00	73,02	200	752.887.273	50,00	62,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan pengelolaan Dapodik dan Aneka Tunjangan	34	207.645.000	34	152.150.708	100,00	73,27	68	372.402.908	50,00	41,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	34	162.315.800	34	140.434.400	100,00	86,52	34	140.434.400	33,33	28,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)												
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3	1.229.038.600	3	1.038.259.800	100,00	84,48	6	1.743.157.400	66,67	108,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100	197.521.400	100	197.135.700	100,00	99,80	200	347.132.300	50,00	77,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100	145.935.582	100	145.512.600	100,00	99,71	250	405.782.500	55,56	50,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50	150.000.000	50	127.939.700	100,00	85,29	100	257.999.500	50,00	51,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	90	1.250.168.500	90	961.112.100	100,00	76,88	180	2.241.974.000	50,00	44,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20	100.000.000	20	98.467.700	100,00	98,47	20	98.467.700	25,00	24,62	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	55	149.994.900	55	147.382.300	100,00	98,26	110	297.377.100	50,00	148,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kualifikasi											
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	13	1.166.580.000	13	848.885.000	100,00	72,77	23	2.523.462.300	52,27	42,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM												
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal												
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2	140.538.900	2	136.563.500	100,00	97,17	4	277.102.300	66,67	69,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Belanja Transfer DAERAH KABUPATEN/KOTA												
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5	34.664.400	5	33.799.600	100,00	97,51	5	33.799.600	100,00	97,51	Dinas Kesehatan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	30.000.000	5	29.940.000	100,00	99,80	5	29.940.000	100,00	99,80	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daera												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	395	62.370.977.675	347	53.322.430.265	87,78	85,49	2127	222.442.624.271	111,93	123,22	Dinas Kesehatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya administrasi keuangan	862	51.600.000	750	42.050.000	87,01	81,49	2500	16.538.155.000	96,67	67,59	Dinas Kesehatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring,Evaluasi ,dan penilaian kinerja pegawai	10	50.000.000	10	45.012.000	100,00	90,02	10	45.012.000	100,00	90,02	Dinas Kesehatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	7	14.994.500	7	14.994.500	100,00	100,00	36	20.944.300	28,80	3,08	Dinas Kesehatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk Perkantoran	50	62.083.000	50	60.694.900	100,00	97,76	125	135.168.850	83,33	90,75	Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	43	56.658.000	40	56.657.400	93,02	100,00	90	152.160.470	58,82	68,00	Dinas Kesehatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk perkantoran	10	18.745.000	10	17.565.000	100,00	93,70	37	145.455.009	123,33	102,36	Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	300	13.995.000	275	13.700.000	91,67	97,89	371	21.900.000	72,04	61,69	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan	24	90.076.400	18	90.025.820	75,00	99,94	83	289.934.820	122,06	25,59	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SKPD	Konsultasi Keluar Daerah											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa telekomunikasi berupa internet, informasi, sumberdaya air dan listrik	36	65.800.000	33	59.357.640	91,67	90,21	38	151.157.640	422,22	22,25	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbayarnya Pajak kendaraan	30	20.000.000	30	19.868.597	100,00	99,34	83	146.891.930	57,64	42,56	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Rakit dan prasarana pendukung yang dibangun	1	225.000.000	1	195.313.000	60,00	86,81	3	11.446.561.183	86,67	21,22	Dinas Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas	Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang	5	2.815.385.600	5	2.391.063.757	100,00	84,93	20	2.541.063.757	66,67	56,47	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kesehatan Lainnya	direhabilitasi											
Pengembangan rumah sakit	Jumlah Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan yang diadakan	1	471.939.400	1	400.021.637	100,00	84,76	2	2.528.411.887	200,00	109,93	Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan penunjang yang tersedia	2	5.454.624.000	2	5.318.543.400	100,00	97,51	19	12.532.105.020	95,00	1139,28	Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah jenis obat, vaksin ,bahan habis pakai yang tersedia	18	1.618.492.854	15	1.607.275.945	84,44	99,31	238	4.948.965.135	73,98	56,24	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	JenisBahan Habis Pakai yang tersedia	15	69.999.900	7	32.673.300	46,67	46,68	25	6.851.317.520	125,00	99,03	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik yang dipelihara	10	64.101.432	10	60.545.097	100,00	94,45	23	352.826.097	153,33	116,72	Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2600	418.944.000	2565	387.906.690	98,65	92,59	12065	661.945.152	92,81	210,14	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	65	539.890.750	25	236.673.012	38,46	43,84	9525	1.716.808.012	73,27	107,96	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar	2364	260.825.300	1500	179.608.100	63,45	68,86	11000	444.571.100	84,62	161,68	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	35	250.000.000	35	246.022.292	100,00	98,41	9535	486.022.217	73,35	194,41	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	5	102.974.100	5	102.259.400	100,00	99,31	15	202.259.400	60,00	80,90	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif mendpat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	15	144.817.100	11	121.770.867	73,33	84,09	71	321.770.847	94,67	128,71	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah orang dengan lanjut usia mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5	86.000.000	5	80.198.961	100,00	93,25	85	160.198.961	89,47	168,63	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang dengan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar	65	99.999.900	65	95.740.797	100,00	95,74	160	205.356.167	152,38	169,50	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah orang dengan Diabetes mellitus medpata pelayanan Kesehatan sesuai standar	50	69.000.000	35	53.535.137	70,00	77,59	95	113.535.137	100,00	94,61	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan Gangguan Jiwa Berat mendapat pelayanan	10	71.725.500	10	66.148.100	100,00	92,22	28	156.148.100	140,00	156,15	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	kesehatan sesuai standar											
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	30	120.443.900	30	106.197.217	100,00	88,17	70	306.197.217	116,67	102,07	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayana Kesehahtan sesuai standar	10	70.774.814	10	59.435.040	101,00	83,98	28	185.435.040	112,40	105,96	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen yang tersedia	25	100.000.000	25	96.670.426	100,00	96,67	55	257.890.426	110,00	159,96	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan mendapat pelayanan sesuai standar	10	96.916.100	10	77.650.300	100,00	80,12	40	1.554.333.700	80,00	34,26	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan sesuai standar	15	317.496.500	15	308.261.600	100,00	97,09	20	408.261.600	200,00	163,30	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen yang tersedia	1	50.000.000	1	45.675.400	100,00	91,35	2	95.675.400	66,67	63,78	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen yang tersedia	15	1.302.621.000	4	1.241.325.542	26,67	95,29	19	1.316.325.542	31,67	107,23	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersedia	5	49.999.510	5	49.999.510	90,00	100,00	13	129.999.510	62,50	65,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan	Jumlah dokumen yang tersedia	236	99.999.800	160	93.275.955	67,80	93,28	310	143.275.955	124,00	180,34	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Mandiri, dan Tradisional Lainnya												
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersedia	1	93.402.000	1	77.845.121	100,00	83,34	3	177.845.121	150,00	177,85	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen yang tersedia	9	555.212.000	9	515.615.424	100,00	92,87	209	1.149.017.924	72,07	164,15	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen yang tersedia	100	13.319.934.364	60	13.114.111.039	60,00	98,45	165	16.804.812.239	4,71	12,49	Dinas Kesehatan
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah dokumen yang tersedia	2	100.000.000	2	83.114.400	100,00	83,11	5	158.524.400	125,00	158,52	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen yang tersedia	12	250.247.750	4	98.539.050	33,33	39,38	19	1.604.751.483	95,00	84,19	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen yang tersedia	37	399.999.900	29	328.652.828	78,38	82,16	69	984.497.828	46,00	52,05	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	5	487.346.800	5	440.492.800	100,00	90,39	11	1.153.092.100	44,00	44,35	Dinas Kesehatan
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV ODHIV	Jumlah dokumen yang tersedia	10	100.000.000	10	93.362.700	100,00	93,36	10	93.362.700	100,00	93,36	Dinas Kesehatan
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah dokumen yang tersedia	10	97.510.000	10	47.763.800	100,00	48,98	10	47.763.800	100,00	48,98	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota												
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersedia	21	24.720.800	21	24.566.400	100,00	99,38	44	54.328.305	176,00	182,54	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersedia	75	791.914.600	20	202.800.500	26,67	25,61	152	334.830.500	108,57	239,16	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN												
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga												
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah dokumen yang tersedia	3	182.714.000	3	168.722.400	100,00	92,34	8	218.782.400	133,33	187,53	Dinas Kesehatan
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Industri Rumah Tangga												
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen yang tersedia	25	85.386.900	20	75.669.800	80,00	88,62	66	173.414.700	126,00	144,51	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen yang tersedia	15	267.091.800	13	233.709.400	86,67	87,50	69	423.314.400	92,00	169,33	Dinas Kesehatan
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen yang tersedia	15	420.315.000	13	346.484.805	88,67	82,43	33	496.484.805	66,60	297,89	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Operasional Pelayanan Puskesmas Mapaddegat	Jumlah dokumen yang tersedia	12	3.033.292.304	1	21.557.250	8,33	0,71	1	21.557.250	8,33	0,71	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sioban	Jumlah dokumen yang tersedia	12	1.803.899.822	1	33.334.000	8,33	1,85	1	33.334.000	8,33	1,85	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Bosua	Jumlah dokumen yang tersedia	12	827.927.200	0	82.221.650	1,67	9,93	0	82.221.650	1,67	9,93	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Ma Siberut	Jumlah dokumen yang tersedia	12	1.727.250.200	1	67.990.846	10,00	3,94	1	67.990.846	10,00	3,94	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Peipei	Jumlah dokumen yang tersedia	12	1.639.943.700	1	89.370.000	8,33	5,45	1	89.370.000	8,33	5,45	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Saibi	Jumlah dokumen yang tersedia	12	1.504.531.220	0	95.840.000	1,67	6,37	0	95.840.000	1,67	6,37	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Ma Sikabaluan	Jumlah dokumen yang tersedia	12	1.885.360.950	0	75.898.700	0,83	4,03	0	75.898.700	0,83	4,03	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Betaet	Jumlah dokumen yang tersedia	12	880.417.212	3	221.902.500	25,00	25,20	3	221.902.500	25,00	25,20	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Malakopa	Jumlah dokumen yang tersedia	12	1.251.372.000	1	149.843.500	8,33	11,97	1	149.843.500	8,33	11,97	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Bulasat	Jumlah dokumen yang tersedia	12	1.016.799.730	1	148.783.250	8,33	14,63	1	148.783.250	8,33	14,63	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sarereiket	Jumlah dokumen yang tersedia	12	756.136.100	1	150.860.100	8,33	19,95	1	150.860.100	8,33	19,95	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Simatalu	Jumlah dokumen yang tersedia	12	840.874.400	3	194.022.850	25,00	23,07	3	194.022.850	25,00	23,07	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sigapokna	Jumlah dokumen yang tersedia	12	497.188.190	3	181.871.800	25,00	36,58	3	181.871.800	25,00	36,58	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sikakap	Jumlah dokumen yang tersedia	12	2.353.315.000	1	61.381.300	8,33	2,61	1	61.381.300	8,33	2,61	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Saumanganya	Jumlah dokumen yang tersedia	12	1.370.869.720	1	146.996.000	4,17	10,72	1	146.996.000	4,17	10,72	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelila kegiatan, gaji pegawai kontrak dan Vakasi Tenaga Kesehatan	218	5.755.730.000	218	5.607.678.750	100,00	97,43	436	11.491.067.750	50,00	40,04	Rumah Sakit umum Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	6	25.802.000	6	25.802.000	100,00	100,00	12	55.762.500	50,00	61,82	Rumah Sakit umum Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	18	82.450.800	18	82.146.500	100,00	99,63	58	188.575.000	32,95	44,30	Rumah Sakit umum Daerah
	Tersedianya Bahan da Perlengkapan Kebersihan Kantor	22	162.368.000	22	148.192.500	100,00	91,27	56	316.551.053	41,18	48,74	Rumah Sakit umum Daerah
	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	30	45.000.000	30	45.000.000	100,00	100,00	60	89.999.400	50,00	50,00	Rumah Sakit umum Daerah
	Tersedianya Tabung Gas	60	18.000.000	60	17.960.000	100,00	99,78	120	35.910.000	50,00	49,88	Rumah Sakit umum Daerah
	Tersedianya benda pos (matrai)	200	2.000.000	200	2.000.000	100,00	100,00	400	4.000.000	50,00	50,00	Rumah Sakit umum Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	32	91.128.400	32	91.055.921	100,00	99,92	64	246.850.129	50,00	49,66	Rumah Sakit umum Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya rekening listrik dan air	3	470.500.000	3	444.165.352	100,00	94,40	6	870.418.233	50,00	43,83	Rumah Sakit umum Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya Gaji pada Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113	3.066.120.000	113	2.955.551.114	100,00	96,39	226	6.043.927.614	50,00	47,88	Rumah Sakit umum Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarkannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	150.000.000	10	149.814.108	100,00	99,88	20	299.678.437	50,00	49,95	Rumah Sakit umum Daerah
	Tersedianya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11904	145.300.000	11904	145.264.500	100,00	99,98	24109	306.072.000	40,18	42,51	Rumah Sakit umum Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (AC)	50	30.500.000	50	30.364.796	100,00	99,56	100	60.790.224	50,00	49,83	Rumah Sakit umum Daerah
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (Genset)	1	40.000.000	1	39.940.000	100,00	99,85	2	99.890.000	50,00	62,43	Rumah Sakit umum Daerah
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	30	21.900.000	30	21.886.140	100,00	99,94	50	36.474.564	62,50	62,46	Rumah Sakit umum Daerah
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	1	50.000.000	1	49.938.900	100,00	99,88	2	99.877.800	50,00	49,94	Rumah Sakit umum Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	(IPAL)											
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (WTP)	1	180.000.000	1	179.389.559	100,00	99,66	2	238.876.124	50,00	99,53	Rumah Sakit umum Daerah
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (Mesin Oksigen Central)	1	250.000.000	1	244.583.505	100,00	97,83	2	560.844.705	50,00	70,11	Rumah Sakit umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												
Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Sakit	3	1.725.110.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit umum Daerah
Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Vaksin dan BMHP	5	2.538.517.053	5	1.898.484.808	100,00	74,79	5	4.001.585.688	25,00	60,86	Rumah Sakit umum Daerah
	Tersedianya Belanja Natura dan Pakan-Natura	58	145.776.000	58	125.870.000	100,00	86,34	116	260.475.900	50,00	48,38	Rumah Sakit umum Daerah
	Tersedianya Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	30	150.815.000	30	124.515.000	100,00	82,56	60	265.787.000	50,00	47,03	Rumah Sakit umum Daerah
	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	450	21.150.000	0	0	0,00	0,00	450	30.549.000	25,00	36,11	Rumah Sakit umum Daerah
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat	Terkalibrasinya Alat Kesehatan/Alat	1	120.680.000	1	116.906.000	100,00	96,87	2	236.647.000	50,00	49,30	Rumah Sakit umum Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	140.680.000	1	136.885.200	100,00	97,30	2	269.990.850	50,00	48,21	Rumah Sakit umum Daerah
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedinya Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	1	25.000.000	0	0	0,00	0,00	1	24.975.000	25,00	24,98	Rumah Sakit umum Daerah
	Tersedianya Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	3	48.600.000	3	42.000.000	100,00	86,42	5	78.000.000	31,25	27,08	Rumah Sakit umum Daerah
	Tersedianya Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	1	306.240.000	1	306.000.000	100,00	99,92	2	662.103.430	12,50	47,98	Rumah Sakit umum Daerah
	Tersedianya Perjlanan dinas bagi narasumber dan peserta pelatihan SDMK	36	180.000.000	36	172.850.000	100,00	96,03	72	376.350.000	27,69	38,48	Rumah Sakit umum Daerah
	Tersedianya Peralatan Cetak	4	15.000.000	4	15.000.000	100,00	100,00	8	23.680.000	200,00	80,65	Rumah Sakit umum Daerah
	Tersedianya Personal Computer	1	55.000.000	1	55.000.000	100,00	100,00	2	159.720.000	50,00	36,61	Rumah Sakit umum Daerah
	Tersedianya Operasional Rumah Sakit	30	286.050.000	30	284.952.473	100,00	99,62	60	558.879.426	33,33	56,48	Rumah Sakit umum Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Alat Kedokteran Radiologi	1	2.450.000.000	1	2.426.567.423	100,00	99,04	1	2.426.567.423	100,00	99,04	Rumah Sakit umum Daerah
	Tersedianya Pendingin / AC	1	186.340.000	1	185.000.000	100,00	99,28	1	185.000.000	100,00	99,28	Rumah Sakit umum Daerah
	Tersedianya Alat Pembersih	2	13.000.000	2	13.000.000	100,00	100,00	2	13.000.000	100,00	100,00	Rumah Sakit umum Daerah
	Tersedianya Pompa	2	6.972.000	2	6.970.000	100,00	99,97	2	6.970.000	100,00	99,97	Rumah Sakit umum Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya tahapan penyusunan perencanaan dan evaluasi											
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	46.910.200	4	46.848.400	100,00	99,87	8	93.758.600	50,00	9,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	5.846.247.543	64	5.565.658.366	88,89	95,20	136	11.411.905.909	47,22	33,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi umum perangkat daerah											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	23.862.500	3	23.860.446	100,00	99,99	6	47.722.946	50,00	17,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	34.314.000	1	34.214.000	100,00	99,71	1	68.528.000	33,33	66,57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	25.602.800	1	25.485.800	100,00	99,54	1	51.088.600	25,00	11,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	102.361.400	1	102.250.000	100,00	99,89	2	204.611.400	50,00	15,62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	1	32.145.000	1	32.145.000	100,00	100,00	2	64.290.000	200,00	10,45	Dinas Pekerjaan Umum dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	disediakan											Penataan Ruang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3	49.500.000	3	49.500.000	100,00	100,00	6	99.000.000	50,00	46,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	68.266.000	1	67.868.300	100,00	99,42	2	136.134.300	50,00	68,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	14.500.000	1	14.260.000	100,00	98,34	1	28.760.000	25,00	57,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya operasional penunjang kegiatan											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	97.750.000	12	86.382.316	100,00	88,37	24	184.132.316	66,67	35,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	39.000.000	1	38.806.000	100,00	99,50	1	77.806.000	33,33	97,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Keandalan BMD											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	40.970.000	35	40.155.200	100,00	98,01	70	81.125.200	39,77	6,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35	327.185.000	30	272.219.927	85,71	83,20	65	599.404.927	90,28	26,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Air Baku											
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Air Baku Berbagai Keperluan dan Terlindunginya Kawasan dari Ancaman Abrasi, Banjir dan Longsor											
Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	1	8.424.678.000	1	8.187.467.334	100,00	97,18	1	16.612.145.334	100,00	197,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	3	3.403.989.900	3	2.928.567.600	100,00	86,03	3	6.332.557.500	100,00	211,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen	1	1.821.916.000	1	1.329.233.927	100,00	72,96	2	3.151.149.927	100,00	274,01	Dinas Pekerjaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku											Umum dan Penataan Ruang
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Layanan Irigasi											
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3,60	1.330.026.000	4	1.275.735.763	100,00	95,92	7	2.605.761.763	45,00	93,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tinggal Beakses Air Minum											
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Air Bersih Bagi Masyarakat											
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1	398.178.100	1	380.035.700	100,00	95,44	1	778.213.800	100,00	195,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan	30	310.258.400	10	95.939.800	33,33	30,92	10	406.198.200	11,11	41,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)											Ruang
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1	555.208.000	1	330.312.800	100,00	59,49	2	885.520.800	200,00	34,20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1	2.326.647.930	1	2.098.186.316	100,00	90,18	1	4.424.834.246	100,00	190,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	20	3.719.429.000	15	2.578.517.375	75,00	69,33	15	6.297.946.375	37,50	98,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	183	3.355.114.800	180	3.172.911.693	98,36	94,57	630	6.528.026.493	25,65	76,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga ramah lingkungan											
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sistim dan Pengelolaan Persampahan											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1.059.468.800	1	843.273.760	100,00	79,59	2	1.902.742.560	40,00	82,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi											
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya MCK Individual bagi Masyarakat											
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	50	2.729.404.700	45	2.388.239.958	90,00	87,50	95	5.117.644.658	95,00	79,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Berkurangnya Titik genangan Air											
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlindunginya lingkungan dari genangan air											
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1	1.524.015.681	1	1.288.332.900	100,00	84,54	1	2.812.348.581	0,11	168,35	Dinas Pekerjaan Umum dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Penataan Ruang
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1	153.515.000	1	132.702.000	100,00	86,44	1	286.217.000	100,00	44,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Lingkungan yang tertata											
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tesedianya Bangunan Gedung Daerah siap Pakai											
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	3.785.095.101	1	3.325.815.925	100,00	87,87	2	7.110.911.026	200,00	70,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung	50	285.505.000	25	120.302.450	50,00	42,14	25	405.807.450	2,50	17,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG											
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Mantap											
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan penyelengaraan jalan Kabupaten											
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1	2.221.741.200	1	1.976.611.358	100,00	88,97	2	4.198.352.558	8,33	96,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	2	2.972.385.070	2	2.681.145.254	100,00	90,20	2	5.653.530.324	20,00	55,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	7	24.784.440.660	6	20.332.934.275	87,46	82,04	13	45.117.374.935	51,44	175,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi	1	54.202.140.664	1	45.081.624.932	74,63	83,17	2	99.283.765.596	1,56	61,53	Dinas Pekerjaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jalan											Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara berkala	6	1.341.597.040	6	1.247.289.872	100,00	92,97	12	2.588.886.912	100,00	25,48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1	1.386.538.960	1	1.071.343.489	100,00	77,27	1	2.457.882.449	100,00	163,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	50	8.381.397.500	25	3.409.985.423	50,00	40,69	75	11.791.382.923	937,50	42,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1	825.635.000	1	638.703.000	100,00	77,36	2	1.464.338.000	100,00	100,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4	3.516.138.254	2	1.615.237.305	50,00	45,94	6	5.131.375.559	60,00	26,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW											
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan	Jumlah Dokumen RTRW dan/atau RRTR											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kabupaten yang ditetapkan dan Disosialisasikan											
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1	169.638.800	1	150.070.369	100,00	88,46	2	319.709.169	50,00	71,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota											
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1	1.271.435.500	1	1.186.067.795	100,00	93,29	2	2.457.503.295	66,67	75,62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	25	2.224.555.538	12	2.028.622.878	48,00	91,19	20	3.814.745.849	35,71	43,21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium PNS	12	41.700.000	12	29.700.000	100,00	71,22	13	58.450.000	325,00	0,50	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	10.000.000	4	7.586.100	100,00	75,86	5	27.585.600	125,00	29,98	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	16	35.000.000	16	28.832.300	100,00	82,38	21	71.152.000	131,25	51,79	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	70.000.000	12	67.975.900	100,00	97,11	15	170.921.900	125,00	72,16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	34.000.000	7	26.427.000	100,00	77,73	11	59.541.900	68,75	43,42	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	10.000.000	12	9.900.000	100,00	99,00	17	32.900.000	141,67	39,19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9	112.810.800	9	80.575.237	100,00	71,43	10	192.449.395	250,00	46,95	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	177.119.920	10	171.800.000	100,00	97,00	13	216.252.000	32,50	87,25	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	8	93.000.000	8	89.130.530	100,00	95,84	11	166.740.835	91,67	44,35	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Prgawai Kontrak	7	460.328.000	7	458.729.389	100,00	99,65	20	831.651.989	45,45	43,07	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	39.500.000	20	35.665.000	100,00	90,29	24	70.678.000	120,00	32,69	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa pemeliharaan, dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan	20	35.500.000	20	23.007.879	100,00	64,81	23	52.378.993	115,00	27,39	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	perizinanya											
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20	13.400.000	20	13.070.000	100,00	97,54	24	39.880.000	46,15	32,17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata											
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											
Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau Terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah dilokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	49.999.900	4	39.563.200	100,00	79,13	6	112.040.300	150,00	31,71	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti sosialisasi Standar	250	145.000.000	102	83.781.600	40,80	57,78	112	139.002.600	10,57	20,11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
tanggap Bencana	Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota											
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Becana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota tang Terehabilitasi	20	878.227.300	8	845.416.700	40,00	96,26	15	2.159.285.900	23,08	80,51	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	110	2.724.473.800	110	2.673.315.530	100,00	98,12	151	6.320.279.144	58,30	40,67	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Menigkatnya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten											
Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2	134.095.000	2	122.423.400	100,00	91,30	3	143.260.400	75,00	40,67	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Tertata											
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	132	5.776.074.300	10	5.744.996.846	7,58	99,46	120	7.893.650.648	46,69	88,78	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kerja sama Perbaikan rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	6	162.699.900	6	127.241.700	100,00	78,21	7	213.173.364	175,00	29,88	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pendataan dan Verifiksi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	2	151.934.500	2	111.243.800	100,00	73,22	3	242.520.963	75,00	32,80	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)												
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Meningkatnya Permukiman yang Didukung oleh PSU											
Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	28	3.332.760.500	28	3.213.726.109	100,00	96,43	35	4.509.843.122	100,00	31,30	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kerja Sama Penyediaan/Pengelola PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja sama Penyediaan/Pengelola PSU Perumahan	4	58.613.000	4	58.016.500	100,00	98,98	5	85.976.800	125,00	33,64	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	30	3.033.464.344	30	2.928.689.204	100,00	96,55	30	2.928.689.204	100	96,55	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelola kegiatan dan gaji pegawai kontrak	3	111.480.000	3	111.480.000	100,00	100,00	3	111.480.000	150	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	1	18.000.000	1	17.996.000	100,00	99,98	1	17.996.000	100	99,98	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya isi ulang gas	1	9.120.000	1	8.237.000	100,00	90,32	1	8.237.000	100	90,32	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	4	62.790.000	4	62.749.000	100,00	99,93	4	62.749.000	100	99,93	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	2	17.999.800	2	17.999.800	100,00	100,00	2	17.999.800	100	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	79.311.800	12	79.226.905	100,00	99,89	12	79.226.905	100	99,89	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarkannya rekening listrik, air,penambahan daya listrik	2	24.720.000	2	21.034.884	100,00	85,09	2	21.034.884	100	85,09	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Tenaga Kontrak	12	2.378.472.000	12	2.330.677.154	100,00	97,99	12	2.330.677.154	100	97,99	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	1	30.400.000	1	30.396.000	100,00	99,99	1	30.396.000	100	99,99	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas operasional dan terpeliharanya kendaraan dinas	7	148.970.000	7	140.287.000	100,00	94,17	7	140.287.000	100	94,17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Dinas Operasional atau Lapangan	operasional											
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	15	9.990.000	15	9.080.000	100,00	90,89	15	9.080.000	100	90,89	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUN												
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terciptanya situasi atau kondisi suasana yang tentram dan tertib	3	1.133.774.800	3	1.093.937.150	100,00	96,49	3	1.093.937.150	100	96,49	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terciptanya situasi atau kondisi suasana yang tentram dan tertib	2	202.429.000	2	202.273.600	100,00	99,92	2	202.273.600	100	99,92	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Meningkatnya pengetahuan aparatur	3	44.412.000	3	44.412.000	100,00	100,00	3	44.412.000	100	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	21.480.000	6	12.800.000	100,00	59,59	6	12.800.000	100,00	12,80	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	414	2.451.134.607	414	2.268.800.757	100,00	92,56	734	4.509.395.799	183,50	38,37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	72	182.230.000	72	106.290.000	100,00	58,33	72	106.290.000	8,33	59,05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	7.500.000	4	5.500.000	100,00	73,33	4	5.500.000	26,67	20,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	5	87.862.500	5	72.747.000	100,00	82,80	10	113.711.125	25,00	38,41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	1	20.030.000	1	17.871.150	100,00	89,22	6	24.992.050	25,00	32,94	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis)	5	9.000.000	5	8.600.000	100,00	95,56	17	18.500.000	35,42	46,26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	184.604.200	12	182.289.881	100,00	98,75	32	300.309.220	45,71	39,28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	57.000.000	12	46.638.386	100,00	81,82	15	93.472.822	125,00	32,12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	1.030.320.000	12	1.025.677.863	100,00	99,55	732	2.068.897.863	146,40	48,12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Terpeliharanya kendaraan dinas	5	77.750.000	5	63.291.729	100,00	81,40	7	115.114.935	87,50	41,05	Badan Penanggulang

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	operasional dan terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas jabatan											an Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas operasional	7	121.707.250	7	97.707.590	100,00	80,28	23	233.692.078	35,94	21,63	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksnanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	17.010.000	12	15.410.000	100,00	90,59	22	29.686.375	137,50	23,82	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1	178.729.850	1	173.881.680	100,00	97,29	2	203.628.555	200,00	55,07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA												
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota												
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Org yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) secara	100	204.102.600	100	102.056.700	100,00	50,00	180	154.827.100	45,00	24,74	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	tatap muka lepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya											
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana												
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100	75.223.000	82	54.409.000	82,00	72,33	82	54.409.000	82,00	36,27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	100	599.068.800	100	207.532.810	100,00	34,64	200	272.663.052	57,14	56,31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan layanan Pusdalops dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12	238.852.000	12	78.565.160	100,00	32,89	24	251.467.060	50,00	24,20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Terhadap Bencana												
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi	1000	284.951.250	1000	206.251.216	100,00	72,38	1500	390.570.620	75,00	32,80	Badan Penanggulangan Bencana

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	per jenis kejadian bencana											Daerah
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1000	172.162.000	850	106.918.830	85,00	62,10	1850	187.509.950	46,25	28,21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana												
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Provinsinyang dilegalkan	2	49.996.000	2	35.807.770	100,00	71,62	2	35.807.770	50,00	23,87	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN												
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota												
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/	Jumlah pembangunan embung yang dapat	4	8.999.999.090	4	4.357.545.654	100,00	48,42	8	6.098.857.962	100,00	56,78	Badan Penanggulang

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kota	diselesaikan											an Bencana Daerah
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN												
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	24	216.147.000	24	215.915.700	100,00	99,89	24	215.915.700	100	99,89	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki sertifikat keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	25	365.063.900	25	365.063.900	100,00	100,00	25	365.063.900	100	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan,penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Terlaksananya Kegiatan pengadaan peralatan pemadam kebakaran	5	7.179.335.400	5	7.057.244.719	100,00	98,30	5	7.057.244.719	100	98,30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pemadaman	20	189.731.600	19	181.470.664	95,00	95,65	19	181.470.664	95	95,65	Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	kebakaran											dan Pemadam Kebakaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah											
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah											
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1	10.203.100	1	10.203.100	100,00	100,00	3	10.203.100	37,50	9,19	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayar											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	5.241.895.021	29	5.241.895.021	90,63	100,00	62	8.222.855.240	48,06	63,99	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi	1	86.990.000	1	86.990.000	100,00	100,00	2	114.590.000	50,00	103,80	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	pelaksanaan tugas ASN											dan Perlindungan Anak
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan dan kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor											
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	10.500.000	1	10.500.000	100,00	100,00	2	21.160.000	50,00	117,56	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	52.009.150	10	52.009.150	100,00	100,00	14	83.295.380	350,00	65,59	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	10	80.549.950	10	80.549.950	100,00	100,00	17	148.923.950	106,25	70,92	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan pengandaan yang disediakan	2,	7.314.800	2	7.314.800	100,00	100,00	4	19.139.700	50,00	34,80	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	1	236.386.244	1	236.386.244	100,00	100,00	2	430.405.905	50,00	101,27	Dinas Sosial Pemberdayaa

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SKPD	koordinasi dan konsultasai SKPD											n perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Jasa pelayanan umum kantor dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar											
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	82.663.003	1	82.663.003	100,00	100,00	2	131.630.273	50,00	65,82	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	764.852.516	1	764.852.516	100,00	100,00	2	1.241.762.516	50,00	49,30	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan											
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3	18.759.000	3	18.759.000	100,00	100,00	3	18.759.000	100,00	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah layak											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
penunjang urusan pemerintah daerah	pakai											
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	1	470.903.696	1	470.903.696	100,00	100,00	2	515.409.351	50,00	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan, kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4	34.363.486	4	34.363.486	100,00	100,00	11	71.801.612	13,75	179,50	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16	32.430.000	12	32.430.000	75,00	100,00	40	62.477.000	333,33	156,19	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1	44.342.200	1	44.342.200	100,00	100,00	4	157.240.030	33,33	270,63	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penurunan PMKS											
Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Persentase PSKS yang dilatih											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja social masyarakat kewenangan kabupaten	43	81.480.000	38	81.480.000	88,37	100,00	52	135.758.942	71,23	138,28	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten	20	103.020.863	15	103.020.863	75,00	100,00	15	103.020.863	11,72	128,78	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah LKS yang meningkat kapasitasnya kewenagan kabupaten	8	99.920.800	8	99.920.800	100,00	100,00	8	99.920.800	200,00	124,90	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran											
Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang mendapatkan bantuan											
Penyediaan permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standat gizi	725	108.559.000	700	108.490.000	96,55	99,94	2672	1.624.753.832	99,07	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	minimal kewenangan kabupaten											Anak
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25	175.213.620	18	175.213.620	72,00	100,00	20	317.465.448	50,00	793,66	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah peserta bimbingan social kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kabupaten	50	70.910.000	31	70.910.000	62,00	100,00	31	70.910.000	38,75	59,09	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kab/kota	200	987.919.300	100	660.996.294	50,00	66,91	100	660.996.294	50,00	66,91	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial telah menerima jaminan social											
Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Persentase data fakir miskin yang valid											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten	50	24.583.000	50	24.583.000	100,00	100,00	250	215.727.586	0,29	179,77	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan social kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten	50	37.634.900	50	37.634.900	100,00	100,00	550	449.372.960	0,64	187,24	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran											
Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Persentase korban bencana mendapatkan bantuan											
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kab/kota	100	350.000.000	100	350.000.000	100,00	100,00	100	350.000.000	100,00	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penangan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten	25	19.193.000	12	19.193.000	48,00	100,00	32	674.686.440	8,00	674,69	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERITAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja											
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan											
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	16	584.998.047	16	552.135.375	100,00	94,38	16	552.135.375	33,33	46,54	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja											
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10	59.990.900	10	48.557.600	100,00	80,94	10	48.557.600	250,00	9,54	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang menggunakan PPRG dalam perencanaan dan penganggaran											
	Persentase peran serta perempuan dibidang politik, ekonomi, social, budaya											
Kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD yang Mengikuti pelembagaan PUG											
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten	1	73.458.600	1	73.458.600	100,00	100,00	2	96.668.200	25,00	241,67	Dinas Sosial Pemberdayaa n perempuan dan Perlindungan Anak
Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti	20	100.493.000	20	100.493.000	100,00	100,00	38	158.677.200	42,70	396,69	Dinas Sosial Pemberdayaa

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PUG termasuk PPRG	advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten											n perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan											
Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30	341.492.600	30	341.492.600	100,00	100,00	210	1.042.520.320	175,00	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaa n perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu											
Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap	Jumlah dokumen/perangkat											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
perempuan lingkup daerah kab/kota	daerah yang melaksanakan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota											
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten /kotaterhadap perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	58.299.400	1	58.299.400	100,00	100,00	2	118.674.400	50,00	78,75	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi											
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	70.048.600	4	70.048.600	100,00	100,00	8	128.906.440	200,00	161,13	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Pencanangan Kecamatan Layak Anak											
Kegiatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
usaha kewenangan kabupaten/kota	usaha yang mendapat Pelembagaan PHA											
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat AdvokasKebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3	147.758.600	3	147.758.600	100,00	100,00	7	283.635.150	100,00	70,91	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	123.775.900	1	123.775.900	100,00	100,00	2	141.630.900	14,29	67,47	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan											
Kegiata pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah para pihak yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	90	103.110.500	90	103.110.500	100,00	100,00	91	176.063.343	126,39	88,03	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiata penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi											
Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	8	393.517.800	8	393.517.800	100,00	100,00	24	725.141.233	600,00	906,43	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiata penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan tingkat daerah											
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	90	109.759.800	90	109.759.800	100,00	100,00	90	109.759.800	100,00	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Perencanaan , penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1	2.211.560	1	2.085.500	100,00	94,30	1	2.085.500	100,00	94,30	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Evaluasi kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1	2.146.000	1	2.146.000	100,00	100,00	1	2.146.000	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		26	2.454.488.762	26	2.189.010.974	100,00	89,18	52	4.412.959.669	50,00	38,62	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN		1	20.400.000	1	20.350.000	100,00	99,75	1	20.350.000	100,00	99,75	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	6	6.604.500	6	6.523.050	100,00	98,77	13	20.542.937	46,43	43,38	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47	151.496.514	47	151.339.544	100,00	99,90	94	355.440.144	50,00	53,53	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang Disediakan	13	6.000.000	13	6.000.000	100,00	100,00	25	10.630.000	48,08	53,15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang - Undangan yyang Disediakan	5	9.600.000	5	9.555.000	100,00	99,53	11	24.780.000	39,29	32,61	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	96.990.400	50	96.975.490	100,00	99,98	100	211.301.977	50,00	53,90	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pentediaan komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	49.550.000	1	40.233.389	100,00	81,20	2	63.504.465	50,00	31,75	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	841.248.000	1	789.786.374	100,00	93,88	12	1.355.568.945	27,27	97,19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16	82.459.858	16	82.259.858	100,00	99,76	32	129.767.825	50,00	60,08	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara, Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	370.328.600	10	370.322.174	100,00	100,00	20	615.312.439	50,00	82,25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	10.110.000	5	10.110.000	100,00	100,00	10	20.220.000	50,00	50,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP												
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota												
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD	2	800.555.400	2	740.806.190	100,00	92,54	2	746.400.490	100,00	62,20	Dinas Lingkungan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
RPJPD/RPJMD	Kabupaten/ Kota yang Disusun											Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota												
Koordinasi Sinskronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkugan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,Air Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,Air,Udara dan Laut	1	50.240.300	1	45.765.000	100,00	91,09	3	1.367.936.216	75,00	170,99	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah pengujian yag dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	5.740.000	1	5.662.800	100,00	98,66	1	5.662.800	100,00	22,96	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)												
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Daerah Kabupaten/Kota												
pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	93.000.900	1	62.495.380	100,00	67,20	2	174.537.764	50,00	21,82	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH												
Pengakuan MHA, Kearifan lokal, Pengetahuan Tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH												
koordinasi, singkronisasi penyediaan data, dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	jumlah dokumen hasil koordinasi, singkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan	1	23.141.240	1	23.128.940	100,00	99,95	1	23.128.940	100,00	99,95	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH											
peningkatan kapasitas MHA dan Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH												
pemerdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA terkait dengan PPLH	jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	2	12.273.925	2	11.766.625	100,00	95,87	2	11.766.625	100,00	95,87	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												
penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota												
pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli lingkungan hidup	4	850.032.680	4	318.108.932	100,00	37,42	4	318.108.932	100,00	55,39	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	110	924.967.500	110	456.511.819	100,00	49,35	110	456.511.819	100,00	49,35	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												
Pengelolaan Sampah												
peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	2	58.625.600	2	54.264.655	100,00	92,56	2	54.264.655	100,00	92,56	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Untuk Kegiatan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemprosesan Akhir	2	221.703.950	2	206.380.966	100,00	93,09	8	479.379.696	25,00	47,94	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah Sampah yang Dipilih, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	9843	95.219.267	2387	89.889.150	24,25	94,40	2419	126.486.250	3,10	12,65	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
peningkatan dan pengawasan pengelolaan sampah yang												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
diselenggarakan oleh pihak swasta												
monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah kabupaten/kota	1	47.737.000	1	47.491.600	100,00	99,49	1	47.491.600	100,00	99,49	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji Pegawai Negeri	24	3.709.358.441	24	3.709.358.441	100,00	100,00	48	6.614.658.288	50,00	44,98	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan administrasi pelaksanan tugas ASN	terbayarnya honorarium PPK,Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang	3	36.320.000	3	27.150.000	100,00	74,75	6	63.150.000	50,00	43,47	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terlaksananya komponen listrik atau sarana penerangan	17	32.422.000	17	27.392.000	100,00	84,49	18	97.392.000	180,00	251,33	Dinas Kependudukan dan Catatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Sipil
Penyediaan bahan logistik kantor	terlasaksananya atk dan makan minum pegawai, kebersihan	4	226.043.400	4	226.043.400	100,00	100,00	7	339.407.600	46,67	96,97	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya cetak dan penggandaan	2	107.886.400	2	107.886.400	100,00	100,00	4	133.996.000	40,00	57,14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2	20.400.000	2	20.400.000	100,00	100,00	4	34.800.000	8,89	362,50	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	terlaksananya rapat koordinasi antar skpd	12	137.737.614	12	137.737.614	100,00	100,00	24	238.243.614	40,00	128,12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rekening air dan listrik	2	70.000.000	2	66.145.472	100,00	94,49	4	139.945.472	40,00	119,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	terbayarnya gji pegawai kontrak	56	1.256.758.200	56	1.256.758.200	100,00	100,00	110	1.728.730.200	40,74	36,52	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	1	58.987.500	1	37.773.180	100,00	64,04	7	86.433.180	28,00	38,50	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1	199.984.800	1	198.864.082	100,00	99,44	1	198.864.082	100,00	99,44	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK												
Pelayanan Pendaftaran Penduduk												
Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	4	368.586.300	4	368.586.300	100,00	100,00	4	368.586.300	1,67	21,42	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
Pelayanan Pencatatan Sipil												
Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	meningkatnya masyarakat memiliki dok pencatatan sipil	5	249.508.905	5	249.508.905	100,00	100,00	10	381.015.805	3,33	15,24	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN												
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												
Komunikasi informasi dan edukasi kepada pemangku	meningkatnya kesadaran masyarakat	2	211.681.370	2	211.681.370	100,00	100,00	4	338.883.120	40,00	45,18	Dinas Kependuduka

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil	terhadap komunikasi dan informasi											n dan Catatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN												
Penyusunan Profil Kependudukan												
Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain		10	31.857.300	9	31.857.300	90,00	100,00	109	35.158.300	109,00	35,16	Dinas Kependuduka n dan Catatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6	43.359.000	6	43.353.000	100,00	99,99	6	43.353.000	100,00	99,99	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS yang Dibayarkan	12	3.072.666.884	12	2.870.125.883	100,00	93,41	24	5.561.086.874	100,00	94,39	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	22.200.000	12	22.200.000	100,00	100,00	24	48.600.000	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Administrasi umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	7.500.000	1	7.499.500	100,00	99,99	2	12.774.500	100,00	94,63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	33.130.000	3	32.013.360	100,00	96,63	6	50.491.360	100,00	97,84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12	59.113.000	12	59.071.000	100,00	99,93	24	174.889.348	100,00	98,51	Dinas Pemberdayaa

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Disediakan											n Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	22.482.500	12	22.481.800	100,00	100,00	24	58.651.800	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12	7.200.000	5	3.000.000	41,67	41,67	5	3.000.000	41,67	41,67	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Dilakukan	12	88.635.000	12	87.959.819	100,00	99,24	24	216.942.643	100,00	98,78	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	37.800.000	12	26.840.868	100,00	71,01	24	55.889.553	100,00	68,49	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.387.760.000	12	1.332.020.856	100,00	95,98	24	2.722.441.462	100,00	97,10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	35.000.000	12	34.968.745	100,00	99,91	24	119.465.340	100,00	89,15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	3	7.390.000	3	7.390.000	100,00	100,00	3	7.390.000	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Keluarga Berencana
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA												
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa												
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunannya		84.982.000	43	72.509.000	#DIV/0!	85,32	43	72.509.000	100,00	85,32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangannya	43	89.173.000	23	47.374.157	53,49	53,13	23	47.374.157	53,49	53,13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembinaan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Hasil Pembinaan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	4	45.626.100	3	45.425.200	75,00	99,56	3	45.425.200	75,00	99,56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Hasil Evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa	3	5.384.500	1	5.364.700	33,33	99,63	1	5.364.700	33,33	99,63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar Desa	5	23.019.800	5	23.001.800	100,00	99,92	5	23.001.800	100,00	99,92	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa yang Dilakukan	2	59.999.900	2	59.743.300	100,00	99,57	4	105.348.800	100,00	99,54	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Hasil Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	4	49.137.900	4	48.296.100	100,00	98,29	4	48.296.100	100,00	98,29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Hasil Fasilitasi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa yang Dilakukan	2	39.355.000	2	39.095.117	100,00	99,34	6	188.231.140	100,00	99,41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT												
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Mayarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,nLPM dan Karang Taruna), Kembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,nLPM dan Karang Taruna),	3	86.165.400	3	84.622.700	100,00	98,21	3	84.622.700	100,00	98,21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											Berencana
Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggara gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang Dilakukan	8	234.612.000	8	232.012.876	100,00	98,89	13	1.089.609.409	81,25	99,37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK												
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten												
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya pencatatan dan pengumpulan data keluarga	24	43.800.000	12	18.000.000	50,00	41,10	15	27.942.000	41,67	32,34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan	50	120.000.000	38	47.354.133	76,00	39,46	38	47.354.133	76,00	39,46	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dan Pelayanan KB											Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)												
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearufan Budaya Lokal												
Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Audit kasus stunting	2	140.000.000	2	108.161.600	100,00	77,26	4	196.304.100	100,00	60,66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana		12	496.000.000	12	287.231.500	100,00	57,91	12	287.231.500	100,00	57,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Rapat	Jumlah Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini	100	150.000.000	49	56.400.000	49,00	37,60	49	56.400.000	49,00	37,60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi Desa, dan Mini Lokakarya	Lokakarya yang di lakukan											Penduduk dan Keluarga Berencana
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang yang Dilakukan	1	100.000.000	1	88.794.673	100,00	88,79	1	88.794.673	100,00	88,79	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kabupaten	10	200.000.000	5	104.174.000	50,00	52,09	5	104.174.000	50,00	52,09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)												
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	43	129.000.000	35	94.800.000	81,40	73,49	38	121.200.000	69,09	56,37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota												
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang Dilakukan	15	13.500.000	6	1.800.000	40,00	13,33	6	1.800.000	31,58	6,90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15	223.510.000	7	116.825.000	46,67	52,27	12	279.638.000	60,00	61,82	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang Dilakukan	15	15.800.000	5	3.463.000	33,33	21,92	6	4.639.000	37,50	17,64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB												
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terlaksananya rapat penguatan kampung KB	1	3.750.000	0	0	0,00	0,00	1	2.910.000	50,00	22,82	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana di kampung Keluarga Berkualitas	Pembinaan POKJA dan POKTAN di Kampung KB	43	271.500.000	18	140.300.000	41,86	51,68	18	140.300.000	41,86	51,68	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)												
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Sarana kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Terdistribusinya BKB Kit Stunting Sebagai Sarana Edukasi untuk Balita dan Orang Tua	31	300.000.000	31	291.276.000	100,00	97,09	51	643.626.000	113,33	97,52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga												
Pemantauan Data dan informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Calom Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Batita	Penginputan Data Pendampingan Catin, Bumil, Bufas, Balita di Aplikas ELSIMIL	52	156.000.000	42	120.600.000	80,77	77,31	42	120.600.000	80,77	77,31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Calom Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Batita	Pendampingan Terhadap keluarga Beresiko Stunting oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)	52	171.600.000	42	118.500.000	80,77	69,06	42	118.500.000	80,77	69,06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lancarnya pelayanan administrasi perkantoran											
Penyusunan dokumen perencanan perangkat daerah	Jumlah dokomen perencanaan perangkat daerah	3	25.006.200	3	23.835.900	100,00	95,32	20	23.835.900	100,00	7,95	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan ASN											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	2.716.164.874	23	2.545.661.187	95,83	93,72	47	3.794.899.574	47,47	31,65	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	62.260.000	5	62.220.000	100,00	99,94	8	80.220.000	16,67	21,98	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran											
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	9.998.000	1	9.998.000	100,00	100,00	2	15.715.500	50,00	36,38	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	107.060.700	3	107.042.359	100,00	99,98	6	253.113.959	37,50	36,54	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	15.002.700	15	15.002.600	100,00	100,00	30	33.802.600	187,50	42,25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	6.000.000	1	4.400.000	100,00	73,33	2	6.050.000	50,00	30,25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	139.874.400	30	134.129.188	100,00	95,89	66	283.771.706	41,25	33,58	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	35.600.000	1	32.970.000	100,00	92,61	1	32.970.000	100,00	4,68	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	14.160.000	2	13.500.000	100,00	95,34	2	13.500.000	10,00	3,75	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah											
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	82.100.000	36	73.800.789	100,00	89,89	72	145.478.112	50,00	33,06	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23	380.616.000	23	379.386.021	100,00	99,68	46	756.382.021	50,00	80,49	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi PD											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	53.600.000	9	53.531.000	100,00	99,87	19	115.836.306	47,50	39,94	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	15.630.000	14	15.630.000	100,00	100,00	37	30.980.000	37,00	27,18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persepsi Kemudahan Berinvestasi											
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pemberian pasilitas/insentif daerah kab/kota											
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi investasi kab/kota	1	103.939.000	1	99.976.846	100,00	96,19	1	99.976.846	10,00	8,55	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu											
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman Modal	Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota												
Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	79.984.000	1	42.129.700	50,00	52,67	5	117.564.900	20,83	23,85	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainya sesuai dengan Kebutuhan Daerah kabupaten/ Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan harga Pangan												
Penyediaan Pangan Berbasis sumber daya lokal	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber daya lokal	1	99.000.000	1	61.750.000	100,00	62,37	1	61.750.000	9,09	3,16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedia Data NBM	1	79.999.500	1	38.042.048	100,00	47,55	1	38.042.048	50,00	16,54	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota												
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	adanya Stok Pangan	5	80.000.000	1	17.278.440	20,00	21,60	19	322.140.604	38,36	44,43	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi												
Penyusunan dan Penetapan target Konsumsi pangan Perkapita	Tersedianya peta Keretanan Pangan	1	19.994.000	1	8.575.500	100,00	42,89	1	8.575.500	33,33	73,29	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran											
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Mengetahui Tingkat Pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah di tetapkan dengan	1	29.997.000	1	26.124.600	100,00	87,09	1	26.124.600	20,00	4,35	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Meningkatnya kesejateraan ASN	75	7.443.417.125	75	6.997.142.890	100,00	94,00	151	13.853.290.803	46,60	43,42	Dinas Ketahanan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Pangan dan Pertanian
Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Meningkatnya kesejateraan ASN	3	24.600.000	2	15.320.000	66,67	62,28	7	22.720.000	58,33	7,57	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	lancarnya administrasi perkantoran	6	8.018.750	5	3.998.000	83,33	49,86	15	23.896.000	50,00	12,37	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	meningkatnya informasi/wawasan ASN	7	9.990.000	7	9.990.000	100,00	100,00	21	23.985.000	75,00	40,65	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya koordinasi dan singronisasi program dan kegiatan antar kab./Provinsi dan pemerintah pusat	12	100.260.000	12	70.158.060	100,00	69,98	60	245.170.218	24,19	30,65	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah											
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	lancarnya administrasi perkantoran	12	85.000.000	12	82.830.991	100,00	97,45	24	153.128.160	50,00	46,05	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase Peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan											
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	167	267.692.200	167	267.692.200	100,00	100,00	835	330.592.200	100,00	24,70	Dinas Perhubungan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah barang yang disediakan											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36	155.875.080	36	155.875.080	100,00	100,00	180	176.944.790	100,00	22,70	Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	30	6.615.000	30	6.615.000	100,00	100,00	150	8.412.000	100,00	25,43	Dinas Perhubungan
	Tersedianya Alat Tulis Kantor	53	265.379.788	53	265.379.788	100,00	100,00	246	352.257.588	121,78	408,30	Dinas Perhubungan
	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	24	102.787.000	24	102.787.000	100,00	100,00	974	149.552.000	34,40	98,21	Dinas Perhubungan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3	208.687.870	3	208.687.870	100,00	100,00	15	226.745.270	42,86	21,73	Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	10	33.400.000	10	33.400.000	100,00	100,00	18	53.200.000	85,71	78,24	Dinas Perhubungan
Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah	24	430.687.725	24	430.687.725	100,00	100,00	63	629.370.153	57,80	43,70	Dinas Perhubungan
Pengadaan barang milik	Tersedianya Peralatan											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kebersihan Kantor											
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharaanya dan terpenuhinya perizinan kendaraan dinas	6	607.089.800	6	466.561.840	100,00	76,85	25	1.229.895.040	250,00	77,22	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan jasa penunjang											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Listrik	6	234.617.300	6	234.617.300	100,00	100,00	25	366.551.350	55,56	23,02	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran	1	5.233.857.275	1	5.233.857.275	100,00	100,00	13	7.587.907.832	86,67	48,33	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jasa Administrasi Umum											
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		8	287.387.253	8	287.387.253	100,00	100,00	24	468.856.653	150,00	81,57	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												
Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Analisa tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan											
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan	1	25.266.270.030	1	25.266.270.030	100,00	100,00	25	36.453.986.658	83,33	28,86	Dinas Perhubungan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengoperasional Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota											
Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota yang tersedia	2	1.599.959.700	2	1.457.677.600	100,00	91,11	3	2.009.541.400	37,50	62,80	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAAN PELAYARAN	TERJAGANYA DAN TERKENDALINYA KEAMANAN LALU LINTAS DARAT											
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Pelabuhan Yang Disusun											
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	1	10.728.459.405	1	8.735.229.282	100,00	81,42	1	10.192.719.256	16,67	83,64	Dinas Perhubungan
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Pelabuhan Yang Disusun											
Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumalh Dermaga Sungai dan Danau yang	1	536.443.610	1	536.443.610	100,00	100,00	1	536.443.610	100,00	100,00	Dinas Perhubungan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Dipelihara											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran											
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	29.099.900	6	29.078.400	100,00	99,93	12	54.140.400	50,00	45,12	Dinas Komunikasi dan Informatika
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan ASN											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	20	2.258.673.153	19	2.081.988.266	95,00	92,18	39	4.042.339.601	48,75	44,74	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	22.200.000	1	21.780.000	100,00	98,11	2	48.180.000	50,00	33,46	Dinas Komunikasi dan Informatika
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatanya Pelayanan Administrasi Perkantoran											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	14.996.000	1	14.996.000	100,00	100,00	2	28.056.000	50,00	53,71	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yng diadakan	5	100.601.000	5	98.421.000	100,00	97,83	9	205.256.295	45,00	46,65	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	2	31.353.300	2	31.351.800	100,00	100,00	6	95.861.800	75,00	36,87	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1	7.200.000	1	4.600.000	100,00	63,89	3	9.400.000	75,00	15,67	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	141.370.200	35	140.813.414	100,00	99,61	65	302.679.658	46,43	49,98	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kelancaran Operasional Pelaksanaan Kegiatan OPD											
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional atau lapangan yang diadakan	2	40.680.000	2	37.706.000	100,00	92,69	2	37.706.000	16,67	6,86	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	13	135.760.214	13	134.600.000	100,00	99,15	13	134.600.000	108,33	96,14	Dinas Komunikasi dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Informatika
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	4	120.500.000	3	99.033.875	75,00	82,19	6	204.859.800	37,50	53,35	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayan Umum kantor yang disediakan	1	574.400.000	1	541.908.645	100,00	94,34	2	1.134.983.793	50,00	33,31	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Perangakat Daerah				0							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	52.479.850	1	52.479.850	100,00	100,00	2	146.173.032	50,00	45,68	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	39	28.470.000	21	12.130.000	53,85	42,61	38	61.184.000	24,36	50,99	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1	49.999.800	1	49.781.540	100,00	99,56	2	128.835.540	50,00	28,01	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah											
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemrintah Daerah											
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	49.999.000	1	36.814.000	100,00	73,63	1	36.814.000	25,00	15,27	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	113.300.000	1	86.909.231	100,00	76,71	1	86.909.231	25,00	36,05	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	34.155.000	1	15.860.814	100,00	46,44	2	91.522.614	50,00	37,96	Dinas Komunikasi dan Informatika
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1	11.899.800	1	11.664.000	100,00	98,02	4	279.532.400	100,00	115,95	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat,Media dan Komunitas Dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1	149.999.800	1	148.257.700	100,00	98,84	2	184.827.100	50,00	76,66	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana pendukung	1	50.000.000	2	47.875.000	200,00	95,75	4	199.506.700	100,00	82,75	Dinas Komunikasi

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah											dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD Yang Terhubung Dengan Layanan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo											
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi											
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemanfaatan nama dan sub domain dilingkungan pemerintah daerah											
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah	31	2.808.660.000	31	2.741.640.500	100,00	97,61	57	5.556.197.700	45,97	45,55	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai SPBE											
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	1	49.975.700	1	48.089.900	100,00	96,23	1	48.089.900	12,50	11,03	Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	163.022.000	1	118.353.600	100,00	72,60	2	341.232.471	50,00	37,47	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan ASN	23	2.546.994.068	23	2.392.128.266	100,00	93,92	111	13.111.557.234	100,91	97,85	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan	60	25.500.000	60	24.850.000	100,00	97,45	120	451.190.000	200,00	353,87	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya 'Bahan Logistik Kantor	3	98.657.800	3	91.814.000	100,00	93,06	123	491.814.000	82,00	98,36	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedinya Barang Cetakan dan Penggandaan	4	24.019.100	4	23.927.600	100,00	99,62	49	407.927.600	75,38	84,98	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	20	16.800.000	18	16.800.000	90,00	100,00	34	80.800.000	170,00	101,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	146.188.800	24	145.800.083	100,00	99,73	80	625.800.083	114,29	104,30	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Perdagangan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Pengadaan Paeralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Paralatan dan Mesin Lainnya	3	28.400.000	3	24.748.000	100,00	87,14	59	504.748.000	84,29	84,12	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya 'Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	38.000.000	12	30.983.241	100,00	81,53	172	254.983.241	86,00	91,07	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI												
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
daerah Kabupaten/Kota												
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya usaha mikro menjadi usaha kecil	20	98.610.100	20	95.967.094	100,00	97,32	180	635.967.094	90,00	97,84	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN												
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota												
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	32	185.515.800	32	176.137.763	100,00	94,94	72	931.321.763	180,00	123,32	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM												
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi usaha mikro	46	2.792.232.560	40	2.387.559.467	86,96	85,51	100	5.969.561.367	142,86	166,65	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah												
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	212.610.000	1	211.211.400	100,00	99,34	2	423.821.400	50,00	49,84	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	120.000.000	1	118.981.000	100,00	99,15	2	208.981.000	50,00	43,54	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	25.000.000	1	24.900.000	100,00	99,60	2	49.900.000	50,00	49,90	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningatnya koordinasi kepariwisataan dan olah raga	12	115.000.000	12	112.654.332	100,00	97,96	24	187.654.332	50,00	40,79	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	132.000.000	1	116.886.252	100,00	88,55	2	200.886.252	50,00	38,05	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan operasional perkantoran											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya layanan operasional perkantoran	2	41.790.000	2	41.777.000	100,00	99,97	4	83.567.000	50,00	49,99	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	37.600.000	5	37.478.000	100,00	99,68	10	75.078.000	50,00	49,92	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Terbentuknya Kapasitas SDM Pemuda dan Organisasi Kepemudaan											
Peberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabupaten/Kota												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan penataan lapangan bola kaki muntei dan maileppet	2	289.580.000	2	272.717.500	100,00	94,18	4	572.717.500	50,00	49,44	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN												
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2	523.483.100	2	507.521.400	100,00	96,95	4	1.007.146.500	50,00	48,10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet											
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet	2	672.326.400	2	629.339.100	100,00	93,61	4	1.315.067.500	50,00	48,90	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Keterisian DATA Pembangunan Perangkat Daerah											
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	1	38.925.000	1	38.925.000	100,00	100,00	1	38.925.000	25,00	49,38	Dinas Komunikasi dan Informatika
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	1	42.809.800	1	31.429.200	100,00	73,42	1	31.429.200	25,00	30,14	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN												
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3	258.703.000	3	227.548.137	100,00	87,96	6	799.429.437	66,67	39,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Tersedianya Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan	2	206.372.000	2	180.914.500	100,00	87,66	4	480.914.500	50,00	40,08	Dinas Pendidikan dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemajuan Tradisi Budaya	Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan											Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL												
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						100,00						
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah pendidik dan pelatihan sumber daya manusia yang ditingkatkan	45	441.445.300	45	397.269.359	100,00	89,99	245	763.464.359	30,63	84,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas p[okok dan fungsi perangkat daerah											
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	40.193.100	2	12.401.400	100,00	30,85	4	29.173.400	50,00	30,71	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					0							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21	2.233.984.885	21	1.601.043.175	100,00	71,67	44	3.552.708.942	52,38	32,84	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	22.320.000	1	12.730.000	100,00	57,03	2	46.330.000	50,00	30,89	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20	10.999.000	5	1.585.000	25,00	14,41	25	11.585.000	31,25	24,14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	77.103.200	3	25.303.600	100,00	32,82	6	69.387.000	50,00	34,12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	13	21.535.200	6	3.267.700	46,15	15,17	19	13.962.700	36,54	20,53	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2	15.000.000	1	11.250.000	50,00	75,00	3	21.250.000	37,50	47,22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	92.279.700	24	57.613.870	66,67	62,43	60	148.497.133	41,67	30,31	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	2	6.000.000	0	3.133.600	0,00	52,23	3	10.020.225	37,50	20,88	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daya Air dan Listrik yang disediakan											
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11	380.732.000	8	251.299.356	72,73	66,00	19	633.562.446	43,18	55,47	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	15.000.000	1	12.030.800	100,00	80,21	1	12.030.800	25,00	26,74	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	41.650.000	7	14.645.000	70,00	35,16	17	57.553.465	42,50	28,78	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15	9.330.000	5	2.190.000	33,33	23,47	20	7.260.000	33,33	30,25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN												
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang	5	75.604.000	2	45.720.400	40,00	60,47	3	181.566.300	15,00	165,06	Dinas Kearsipan dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Peprustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											Perpustakaan
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA												
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	25	185.359.800	20	62.197.800	80,00	33,56	30	209.240.900	30,00	139,49	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang menjadi Kewenangan Dawrah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	4.590.997.155	1	1.659.975.153	100,00	36,16	2	6.566.547.802	50,00	146,22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP												
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA					0							
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	60	100.000.000	40	57.849.900	66,67	57,85	50	184.568.200	20,83	61,52	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	49.740.000	4	48.172.800	100,00	96,85	4	48.172.800	33,33	24,21	Dinas Perikanan
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	62.465.000	1	38.198.600	100,00	61,15	1	38.198.600	100,00	61,15	Dinas Perikanan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	3.377.555.357	14	3.168.713.868	100,00	93,82	28	6.229.721.267	66,67	34,61	Dinas Perikanan
Penyediaan administrasi pelaksanan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	86.400.000	4	71.840.000	33,33	83,15	16	874.276.136	33,33	12,86	Dinas Perikanan
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	7	16.420.000	7	16.407.500	100,00	99,92	13	26.157.500	43,33	26,16	Dinas Perikanan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bangunan Kantor yang Disediakan											
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34	101.011.600	34	95.020.000	100,00	94,07	66	143.366.000	47,14	40,38	Dinas Perikanan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	33.475.300	5	28.585.000	100,00	85,39	10	49.571.500	66,67	30,04	Dinas Perikanan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	30.000.000	2	25.000.000	100,00	83,33	4	40.000.000	50,00	29,63	Dinas Perikanan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	85.128.000	40	84.840.780	100,00	99,66	80	233.825.721	50,00	36,82	Dinas Perikanan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	330.500.000	2	243.412.407	100,00	73,65	4	590.908.591	66,67	33,77	Dinas Perikanan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12	782.592.000	12	720.739.133	100,00	92,10	12	720.739.133	33,33	23,02	Dinas Perikanan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	31.050.000	1	30.610.721	100,00	98,59	1	30.610.721	33,33	32,86	Dinas Perikanan
Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	65.750.000	2	55.565.962	101,50	84,51	15	158.276.462	26,84	21,10	Dinas Perikanan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	31.800.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Perikanan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	52.890.000	3	30.960.000	98,67	58,54	6	42.628.000	49,67	19,83	Dinas Perikanan
PROGRAM PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Kecil											
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah prasarana nelayanan yang diadakan	530	20.846.006.200	530	19.208.409.155	100,00	92,14	1437	37.686.930.239	48,71	139,58	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi perikanan budidaya											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil												
Pengembangan kapsitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah pembudidayaikan kecil yang meningkat kapasitasnya	1	4.307.924.952	0	3.628.054.200	0,00	84,22	0	3.628.054.200	0,00	84,22	Dinas Perikanan
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	6	1.908.088.500	6	1.774.991.894	100,00	93,02	16	1.973.679.394	57,14	135,18	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan											
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Keciln												
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	20	40.110.000	20	39.939.700	100,00	99,58	20	39.939.700	33,33	33,19	Dinas Perikanan
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota												
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	103	100.000.000	103	95.967.660	100,00	95,97	196	205.826.360	45,48	63,33	Dinas Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terbayarnya honoraium Aparatur PNS dan Non PNS											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, laporan keuangan, dan lakip yang terbuat	10	30.000.000	4	28.820.000	40,00	96,07	14	58.820.000	35,00	49,02	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41	3.668.265.391	41	3.406.476.554	100,00	92,86	82	7.346.098.712	50,00	50,07	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya operasional Perkantoran	1	1.150.800.000	1	1.142.911.913	100,00	99,31	2	2.284.111.913	50,00	49,62	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemerintahan Daerah												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2	417.892.000	2	392.620.233	100,00	93,95	4	610.512.233	50,00	36,52	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Kunjungan Wisata											
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	8	4.200.000.000	1	190.639.764	12,50	4,54	9	7.090.637.764	28,13	42,21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1	270.000.000	0	88.102.500	0,00	32,63	1	358.102.500	25,00	33,16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3	100.000.000	3	98.288.200	100,00	98,29	6	198.288.200	50,00	49,57	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam	1	1.300.000.110	1	1.113.953.700	100,00	85,69	2	2.413.953.810	50,00	46,42	Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											Olahraga
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	1.768.000.000	1	1.698.317.071	100,00	96,06	2	3.466.317.071	50,00	49,01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	12	75.000.000	11	73.155.300	91,67	97,54	23	148.155.300	47,92	49,39	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	7	215.204.000	4	148.403.300	57,14	68,96	11	363.607.300	39,29	42,24	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam	12	175.000.100	12	169.305.500	100,00	96,75	24	269.305.500	50,00	38,47	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dan Luar Negeri											
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF												
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Kapasitas SDM											
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1	430.000.000	0	38.155.945	0,00	8,87	1	468.155.945	25,00	27,22	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80	150.000.000	30	51.908.580	37,50	34,61	110	201.908.580	34,38	33,65	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif												
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	35	191.791.300	25	134.972.527	71,43	70,37	60	326.799.227	42,86	42,60	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai ASN	86	1.857.042.000	86	1.791.038.935	100,00	96,45	172	3.442.368.935	197,70	294,59	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatan Pelayanan Perkantoran	6	64.250.000	6	56.295.000	100,00	87,62	49	155.980.200	26,92	56,53	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	4	10.030.000	1	5.705.000	25,00	56,88	4	22.782.100	12,90	23,01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi Pemerintah Daerah											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terkelolanya aset kendaraan dinas operasional	4	15.030.000	4	15.024.000	100,00	99,96	8	48.634.000	13,33	18,47	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpeliharanya AC	12	9.000.000	5	5.800.000	41,67	64,44	16	12.720.000	57,14	45,43	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor bangunan lainnya	terpeliharanya gedung kantor	1	50.000.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian												
Pendampingan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	10	1.114.439.600	10	1.048.260.214	100,00	94,06	22	5.159.577.314	78,57	100,19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain												
Pengadaan benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	80	2.504.099.700	80	2.253.757.356	100,00	90,00	87	4.520.400.756	87,00	86,40	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Kabupaten /Kota												
Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Meningkatnya Kesejahteraan Hewan	43	45.822.906	43	34.733.500	100,00	75,80	43	34.733.500	43,00	34,73	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
ternak dalam daerah Kabupaten /Kota												
Pengawasan Produksi Benih /Bibit dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Meningkatnya kesehatan Hewan	40	29.982.600	35	25.446.600	87,50	84,87	35	25.446.600	35,00	12,72	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN												
Pengembangan Prasarana Pertanian												
Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Tertatanya kawasan Pertanian	1	30.000.000	1	14.025.900	100,00	46,75	1	14.025.900	100,00	3,51	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersalurkannya Bahan Pokok dan Bahan Pangan Lainnya											
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun	2	619.975.500	2	589.212.495	100,00	95,04	2	589.212.495	18,18	20,78	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGEDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN												
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kesejahteraan Petani											
Pengedalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	meningkatnya kesejahteraan masyarakat	3	26.270.800	3	14.025.900	100,00	53,39	3	14.025.900	75,00	0,49	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Pemberdayaan Standarisasi usaha koperasi	14	58.000.000	14	56.187.400	100,00	96,87	32	246.187.400	160,00	153,55	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN												
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan												
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terfasilitasinya Distribusi Perdagangan	3	86.818.000	3	84.130.979	100,00	96,90	21	284.130.979	105,00	113,65	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING												
Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota												
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	4	83.393.000	4	83.271.000	100,00	99,85	6	210.271.000	60,00	114,90	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah ketersediaan barang pokok	8	82.893.000	8	74.236.264	100,00	89,56	10	222.236.264	100,00	132,05	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Non ASN	12	305.088.000	12	304.678.880	100,00	99,87	172	884.678.880	86,00	122,02	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Perdagangan
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI												
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota												
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA	Meningkatnya Izin Usaha Industri	20	46.896.000	7	17.707.500	35,00	37,76	37	160.707.500	92,50	100,24	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
SEKRETARIAT DAERAH												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Perencanaan ,Penganggaran												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	31.250.000	9	31.166.750	90,00	99,73	15	34.416.750	37,50	80,41	Sekretariat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99	10.270.586.414	95	9.785.621.128	95,96	95,28	194	18.750.037.760	48,99	3720,25	Sekretariat Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	92.400.000	11	91.960.000	91,67	99,52	21	189.960.000	43,75	37,69	Sekretariat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	751.734.400	4	750.241.141	100,00	99,80	8	1.686.084.540	50,00	131,59	Sekretariat Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	108.470.000	1	108.362.250	100,00	99,90	2	339.458.893	50,00	78,24	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	789.610.000	12	752.330.624	100,00	95,28	24	2.117.933.824	50,00	159,20	Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	709.660.000	12	709.016.678	100,00	99,91	24	1.745.189.013	50,00	95,79	Sekretariat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemerintah Daerah												
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kiendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disedfiakan	1	367.600.000	1	359.410.700	100,00	97,77	12	2.707.016.680	27,27	24,85	Sekretariat Daerah
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	56.440.600	10	55.512.400	100,00	98,36	20	111.041.790	50,00	43,21	Sekretariat Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	993.673.400	12	984.103.813	100,00	99,04	24	1.628.222.789	50,00	97,26	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	459.810.000	10	441.667.797	83,33	96,05	21	838.922.703	43,75	42,08	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	4.127.843.170	24	4.112.560.849	100,00	99,63	48	8.291.829.664	48,98	162,59	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	476.775.000	8	474.968.555	100,00	99,62	15	1.019.084.406	46,88	65,39	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	4.787.198.000	24	4.702.573.570	96,00	98,23	49	11.559.244.051	49,00	46,66	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	16.900.000	10	16.761.000	100,00	99,18	18	33.550.500	45,00	41,94	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	4	628.637.500	4	621.444.239	100,00	98,86	8	895.960.969	50,00	124,45	Sekretariat Daerah
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	478.446.676	1	399.999.600	100,00	83,60	2	699.999.600	50,00	36,58	Sekretariat Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang Disediakan	28	29.750.000	27	29.614.701	96,43	99,55	55	277.886.001	49,11	62,59	Sekretariat Daerah
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	1	1.170.015.000	1	1.162.890.309	100,00	99,39	2	2.756.925.629	50,00	74,12	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	12	523.345.250	12	523.013.763	100,00	99,94	24	1.241.207.477	50,00	90,91	Sekretariat Daerah
Penataan Organisasi												
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	36	250.243.000	32	231.117.075	88,89	92,36	62	381.871.982	43,06	37,67	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	139.102.000	1	106.547.025	100,00	76,60	2	197.143.730	50,00	37,59	Sekretariat Daerah
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi	36	171.849.000	23	104.407.621	63,89	60,76	55	225.256.771	38,19	32,11	Sekretariat Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	78.000.000	1	39.713.159	100,00	50,91	4	77.895.959	33,33	30,19	Sekretariat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	117.260.000	1	98.551.311	100,00	84,05	2	187.103.651	50,00	36,89	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan												
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	403.698.000	11	335.958.467	91,67	83,22	23	756.601.995	47,92	110,83	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi	12	298.667.000	10	225.336.645	83,33	75,45	22	703.916.712	45,83	95,87	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pimpinan											
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	303.423.400	12	269.959.130	100,00	88,97	24	634.599.786	50,00	88,38	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT												
Administrasi Tata Pemerintahan												
Penataan Administrasi Pemerintahan	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,Terlaksananya Peningkatan Administrasi Pemerintahan,Penyelesaian Permasalahan Administrasi Pemerintah dan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4	152.265.800	4	151.302.611	100,00	99,37	8	285.162.611	50,00	39,11	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi Forum Komunikasi Kecamatan,Inventarisasi Permasalahan di Kecamatan dan solusinya,Terlaksananya Pembinaan terhadap Kecamatan,dan Penyusunan Pedoman teknis Penataan	30	310.483.800	26	278.091.570	86,67	89,57	56	611.407.881	46,67	128,00	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Wilayah Kecamatan											
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Proses Administrasi Pergantian Antar waktu Pimpinan dan Anggota Legislatif,Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM),Menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,Menyusun Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Menyusun Bahan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ)	5	312.849.900	5	296.952.166	100,00	94,92	10	504.470.600	62,50	50,95	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat												
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	15	7.684.868.200	15	7.344.066.680	100,00	95,57	17	8.663.219.294	212,50	144,54	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yasng Meliputi Urusan Sosial,Transmigrasi,Kes	2	394.025.000	2	384.828.840	100,00	97,67	4	5.703.587.796	50,00	42,14	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	ehatan,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Pengendalian Pendududk dan KB											
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olah raga,Pariwisata,Pendidikan,Kebudayaan,Perpustakaan,Kearsipan Trantibum Linmas	25	3.663.286.000	21	3.226.720.063	84,00	88,08	24	7.161.666.513	200,00	55,49	Sekretariat Daerah
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum												
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah berupa Perda, Perbup dan keputusan yang difasilitasi	15	309.953.200	13	283.174.931	86,67	91,36	27	501.667.581	45,00	54,03	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Pemda yang ditangani dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat miskin	5	503.753.000	3	301.129.116	60,00	59,78	8	820.916.316	40,00	31,82	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang di dokumentasikan dan disebarluaskan	4	71.540.800	3	66.591.600	75,00	93,08	7	221.426.000	43,75	35,70	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kerjasama Daerah												
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Melakukan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Kabupaten/Kota dan Instansi Lainnya	1	2.487.378.200	1	2.461.575.836	100,00	98,96	2	4.763.167.813	50,00	59,07	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN												
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian												
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dewan Pengawas Defenitif	3	357.872.178	3	313.802.683	100,00	87,69	5	513.463.458	41,67	238,55	Sekretariat Daerah
	Jumlah Regulasi BUMD dan BLUD	2		1		50,00		2		25,00		
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen ETPD,Dokumen Koordinasi Tim Percepatan TPAKD,Pengendalian Inflasi dan Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa (SSHB)	5	77.486.800	4	53.126.925	80,00	68,56	9	154.934.650	22,50	61,85	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan												
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	161.613.600	1	143.371.050	100,00	88,71	2	279.238.311	50,00	63,14	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	142.204.800	1	131.459.839	100,00	92,44	2	294.721.362	50,00	58,71	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	465.884.900	1	385.699.252	100,00	82,79	2	667.962.352	50,00	71,54	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa												
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Barang dan Jasa	12	272.555.400	12	256.907.655	100,00	94,26	24	619.493.384	50,00	56,31	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	350.642.000	10	294.586.036	83,33	84,01	20	756.819.000	41,67	53,96	Sekretariat Daerah
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah PNS Peserta Sosialisasi Peraturan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	15	168.436.000	9	105.263.314	60,00	62,49	81	313.863.378	25,31	54,82	Sekretariat Daerah
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam												
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air,Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,Pertanahan	1	120.099.000	0	47.328.300	0,00	39,41	1	162.920.831	25,00	29,29	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SEKRETARIAT DPRD												
PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keauangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	3.194.628.610	33	3.096.868.815	100,00	96,94	33	3.096.868.815	100,00	112,62	Sekretariat DPRD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	292.160.000	0	169.090.000	0,00	57,88	0	169.090.000	0,00	454,54	Sekretariat DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalsi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	43.423.000	1	41.580.500	100,00	95,76	1	41.580.500	12,50	179,04	Sekretariat DPRD
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	3	628.420.000	3	608.129.670	100,00	96,77	3	608.129.670	100,00	210,63	Sekretariat DPRD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	5	404.867.500	4	395.424.000	80,00	97,67	4	395.424.000	400,00	112,85	Sekretariat DPRD
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan	2	123.130.000	2	107.940.600	100,00	87,66	2	107.940.600	200,00	90,50	Sekretariat DPRD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedinya Bahan Cetakan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	120.000.000	1	118.581.000	100,00	98,82	1	118.581.000	100,00	95,65	Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	275.043.000	6	275.420.652	100,00	100,14	6	275.420.652	100,00	120,62	Sekretariat DPRD

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan	3	125.250.000	3	117.697.551	100,00	93,97	3	117.697.551	100,00	37,10	Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Pegawai Kontrak	59	1.176.840.000	59	1.079.100.026	100,00	91,69	59	1.079.100.026	100,00	87,73	Sekretariat DPRD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	205.807.000	3	198.617.464	75,00	96,51	3	198.617.464	37,50	63,16	Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16	65.475.000	15	63.736.519	93,75	97,34	15	63.736.519	68,18	48,58	Sekretariat DPRD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	1	149.430.000	1	148.258.620	100,00	99,22	1	148.258.620	100,00	36,34	Sekretariat DPRD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesinnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	45	51.150.000	35	45.340.900	77,78	88,64	35	45.340.900	77,78		Sekretariat DPRD

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD												
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	20	9.074.542.250	20	8.715.424.211	100,00	96,04	20	8.715.424.211	100,00	96,40	Sekretariat DPRD
Penyediaaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	2	188.910.000	1	186.110.600	50,00	98,52	1	186.110.600	1,00	83,12	Sekretariat DPRD
Layanan Administrasi DPRD												
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Tersedianya administrasi keanggotaan DPRD	1	981.010.000	1	850.376.500	100,00	86,68	1	850.376.500			Sekretariat DPRD
Fasiltasi Fraksi DPRD	Tersedianya Fasilitas Fraksi DPRD	4	21.546.000	1	3.194.170	25,00	14,82	1	3.194.170	25,00	85,60	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD												
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD												
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	332.378.000	1	304.172.200	100,00	91,51	1	304.172.200	100,00	140,43	Sekretariat DPRD
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8	1.534.204.000	6	1.330.499.175	75,00	86,72	6	1.330.499.175	75,00	205,19	Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Kajian Perundang -undangan	Terlaksananya Penyelenggara Rancangan Peraturan	2	593.385.600	1	19.064.700	50,00	3,21	1	19.064.700	100,00	7,48	Sekretariat DPRD

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daerah											
Pembahasan Kebijakan Anggaran												
Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	1	17.718.600	1	16.553.600	100,00	93,42	1	16.553.600	100,00	88,43	Sekretariat DPRD
PembahasanPerubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	17.718.600	1	15.542.800	100,00	87,72	1	15.542.800	100,00	50,87	Sekretariat DPRD
Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	1	328.769.000	1	175.421.300	100,00	53,36	1	175.421.300	100,00	83,75	Sekretariat DPRD
Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	1	322.800.800	1	242.776.433	100,00	75,21	1	242.776.433	100,00	109,23	Sekretariat DPRD
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	1	390.515.800	1	388.658.000	100,00	99,52	1	388.658.000	100,00	237,80	Sekretariat DPRD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan												
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang pemerintah dan Hukum	4	1.139.890.000	4	1.097.911.492	100,00	96,32	4	1.097.911.492	100,00	118,20	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4	1.123.510.000	4	700.105.990	100,00	62,31	4	700.105.990	100,00	81,72	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Terlaksananya Pengawasan Urusan	4	890.192.000	3	770.269.638	75,00	86,53	3	770.269.638	75,00	78,77	Sekretariat DPRD

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kesejahteraan Rakyat	Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat											
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4	885.588.000	2	663.769.548	50,00	74,95	2	663.769.548	50,00	92,57	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4	779.406.000	4	646.083.898	100,00	82,89	4	646.083.898	100,00	99,44	Sekretariat DPRD
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggjawaban Kepala Daerah	1	228.678.050	1	201.697.100	100,00	88,20	1	201.697.100	100,00	86,09	Sekretariat DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD												
Orientasi DPRD	Terlaksananya Orientasi DPRD	1	328.630.000	1	240.026.352	100,00	73,04	1	240.026.352	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	5	2.198.112.000	4	1.084.717.515	80,00	49,35	4	1.084.717.515	66,67	69,70	Sekretariat DPRD
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	6	239.500.000	4	178.894.600	66,67	74,70	4	178.894.600	66,67	52,17	Sekretariat DPRD
Penyediaan Kelompok Pakar an Tim Ahli	Terlaksananya Penyediaan Kelompok Pakar an Tim Ahli	3	40.000.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	4	260.000.000	4	225.000.000	100,00	86,54	4	225.000.000	100,00	93,75	Sekretariat DPRD
Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya Penyusunan Program	12	59.998.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kerja DPRD											
Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat												
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah	6	3.465.902.000	6	3.457.121.800	100,00	99,75	6	3.457.121.800	100,00	209,64	Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Pelaksanaan Reses	2	2.910.427.400	2	2.598.850.000	100,00	89,29	2	2.598.850.000	66,67	83,14	Sekretariat DPRD
Pelaksanaan dan Pengawasan kode Etik DPRD												
Penyusunan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Kode etik DPRD	1	99.959.000	0	0	0,00	0,00	0	0			Sekretariat DPRD
Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD	2	28.682.600	0	0	0,00	0,00	0	0			Sekretariat DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD												
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6	4.623.738.000	5	4.609.659.761	83,33	99,70	5	4.609.659.761	83,33	180,19	Sekretariat DPRD
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	3	66.804.400	3	53.835.000	100,00	80,59	3	53.835.000	100,00	1164,25	Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
PERENCANAAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
BUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	38	3.875.011.080	38	3.604.811.755	100,00	93,03	76	6.847.806.077	50,00	40,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	127.600.000	1	126.940.000	100,00	99,48	2	157.140.000	50,00	42,14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	25.000.000	1	24.999.000	100,00	100,00	13	63.813.000	27,08	56,12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	118.550.700	3	118.471.100	100,00	99,93	6	440.223.100	50,00	46,36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyedian Barang Cetak dan Penggandan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	55.342.000	6	55.242.000	100,00	99,82	12	153.462.000	50,00	13,78	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang	1	12.150.000	1	12.150.000	100,00	100,00	2	24.300.000	50,00	17,36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Disediakan											
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	145.330.000	36	145.162.779	100,00	99,88	72	315.215.513	50,00	31,52	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya layanan pengadaan barang milik daerah											
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang Disediakan	2	700.175.250	2	699.230.133	100,00	99,87	2	699.230.133	100,00	182,48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	326.748.100	36	319.403.669	100,00	97,75	72	608.435.443	50,00	33,67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	339.322.000	12	335.537.549	100,00	98,88	24	689.079.971	50,00	33,99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	2	45.180.000	2	42.260.100	100,00	93,54	4	82.652.295	50,00	38,05	Badan Perencanaan Pembangunan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya											Daerah
	Jumlah Liter BBM yang di gunakan	4051	58.320.000	4.051	58.242.158	100,00	99,87	7646	110.131.319	73,66	64,71	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	50.000.000	15	46.147.482	100,00	92,29	15	46.147.482	37,50	23,07	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah											
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pesentase Keselarasan RKPD dengan Renja OPD											
Pelasanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	42.808.900	1	42.808.900	100,00	100,00	2	146.987.900	50,00	24,50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	424.975.200	2	424.786.275	100,00	99,96	4	826.813.296	50,00	53,55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4	468.545.800	4	464.171.183	100,00	99,07	8	1.108.118.083	50,00	55,41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daearh BIdang Perencanaan Pembangunan Daerah												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan dan pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan	72	474.906.800	72	463.050.235	100,00	97,50	144	720.558.100	50,00	120,09	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	40	283.522.200	40	271.022.200	100,00	95,59	40	271.022.200	100,00	80,90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah												
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja	1	218.496.950	1	218.425.900	100,00	99,97	2	483.840.673	50,00	40,32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program Prioritas OPD Dengan Program OPD Pendukung											
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dapat dijadikan sebagai Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan											
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	100.000.000	1	52.510.193	100,00	52,51	2	144.540.115	50,00	24,09	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	2	190.000.000	2	147.339.481	100,00	77,55	4	615.195.672	50,00	102,53	Badan Perencanaan Pembangunan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Daerah Bidang Pembangunan Manusia	RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia											Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah											
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	93.399.900	1	89.757.029	100,00	96,10	1	189.678.654	25,00	31,61	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	1	99.999.800	1	79.611.400	100,00	79,61	1	189.080.100	25,00	31,51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Inspratuktur dan Wilayahan	Menjadi Pedoman dalam Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan											
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Insfratuktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	99.995.500	1	83.940.102	100,00	83,94	2	211.780.082	50,00	35,30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	74.990.000	1	55.430.185	100,00	73,92	2	133.008.916	50,00	22,17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KEUANGAN												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA												
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daearh												
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	108.730.000	2	106.456.000	100,00	97,91	2	106.456.000	66,67	106,88	Badan Keuangan Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53	29.183.878.067	53	26.031.494.410	100,00	89,20	104	42.329.951.478	49,06	36,26	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	10	505.320.000	9	482.259.700	90,00	95,44	12	1.790.607.700	30,00	88,59	Badan Keuangan Daerah
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah												
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	2	172.397.500	2	158.221.103	100,00	91,78	3	227.951.103	37,50	33,06	Badan Keuangan Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang	3	126.737.500	3	126.737.500	100,00	100,00	4	196.467.500	33,33	38,75	Badan Keuangan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	disediakan											
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	225.074.000	3	225.074.000	100,00	100,00	4	546.779.793	33,33	60,73	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	228.427.000	3	227.067.000	100,00	99,40	4	548.772.793	33,33	60,06	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	99.972.900	3	99.900.000	100,00	99,93	4	195.266.847	33,33	48,83	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	19.000.000	3	18.350.000	100,00	96,58	4	32.550.000	33,33	42,83	Badan Keuangan Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3	546.024.000	3	545.882.342	100,00	99,97	4	951.644.807	33,33	43,57	Badan Keuangan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4	928.818.255	3	822.721.700	75,00	88,58	4	1.531.247.401	25,00	41,21	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang	6	793.632.000	6	751.473.494	100,00	94,69	8	1.395.803.417	33,33	43,97	Badan Keuangan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	disediakan											
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	618.672.000	6	606.299.984	100,00	98,00	8	1.250.629.907	33,33	50,54	Badan Keuangan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10	189.738.500	9	189.573.800	90,00	99,91	12	373.676.270	30,00	49,24	Badan Keuangan Daerah
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6	109.450.000	6	109.444.000	100,00	99,99	8	248.080.000	33,33	56,67	Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentsae OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik											
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah												
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	6	49.919.900	6	47.263.500	100,00	94,68	8	134.031.400	33,33	67,12	Badan Keuangan Daerah
Koordnasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	6	49.969.600	6	49.967.500	100,00	100,00	8	112.782.409	33,33	56,43	Badan Keuangan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6	841.933.000	6	823.149.551	100,00	97,77	8	1.558.748.460	33,33	46,28	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6	830.924.000	6	817.678.917	100,00	98,41	8	1.676.717.598	33,33	50,45	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	6	59.965.000	6	52.687.800	100,00	87,86	8	308.513.793	33,33	128,62	Badan Keuangan Daerah
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	160	565.602.000	160	478.950.830	100,00	84,68	232	1.232.405.865	36,25	54,47	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah												
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlaah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	15	390.251.000	12	386.513.235	80,00	99,04	16	728.680.355	26,67	46,68	Badan Keuangan Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas	10	137.903.000	8	131.834.697	80,00	95,60	11	288.231.927	27,50	52,25	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan	10	89.967.200	9	86.740.400	90,00	96,41	12	248.386.050	30,00	69,02	Badan Keuangan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank											
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	35	108.220.000	34	107.331.440	97,14	99,18	46	395.028.306	32,86	91,26	Badan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2d dengan instansi terkait	26	223.658.800	26	184.071.100	100,00	82,30	35	363.014.635	33,65	40,58	Badan Keuangan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah												
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiba, ekuitas,Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiba, ekuitas,Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	5	23.118.500	5	22.938.200	100,00	99,22	7	215.823.590	35,00	233,39	Badan Keuangan Daerah
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	5	80.358.600	5	71.196.700	100,00	88,60	7	264.082.090	35,00	82,16	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	6	55.964.000	6	48.810.400	100,00	87,22	8	297.754.653	33,33	133,01	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian	1	37.312.200	1	9.677.200	100,00	25,94	2	244.870.700	50,00	164,07	Badan Keuangan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daerah											
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	72	112.140.000	72	43.947.500	100,00	39,19	144	196.166.150	50,00	43,73	Badan Keuangan Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	150	91.081.700	143	11.636.500	95,33	12,78	215	163.855.150	35,83	44,97	Badan Keuangan Daerah
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah												
Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4	2.000.000.000	4	1.025.861.621	93,75	51,29	4	5.997.446.932	23,44	74,97	Badan Keuangan Daerah
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	4	110.401.623.674	4	64.480.186.519	100,00	58,41	4	121.612.631.724	25,00	27,54	Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang dan jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik											
Pengelolaan Barang Milik Daerah												
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik	12	88.566.900	12	47.295.300	100,00	53,40	16	63.669.400	33,33	17,97	Badan Keuangan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Daerah	Daerah											Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	100	41.691.400	100	37.936.900	100,00	90,99	136	161.398.600	34,00	96,78	Badan Keuangan Daerah
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30	734.482.000	28	146.274.075	93,33	19,92	38	238.507.375	31,67	8,12	Badan Keuangan Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100	271.459.300	88	88.402.200	88,00	32,57	118	272.776.400	29,50	25,12	Badan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6	134.439.700	6	101.835.200	100,00	75,75	8	252.396.700	33,33	46,93	Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	5	37.689.100	5	25.188.900	100,00	66,83	7	62.712.100	35,00	41,60	Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap total pendapatan											
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah												
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	3	219.891.200	3	81.226.771	100,00	36,94	4	153.793.771	33,33	17,49	Badan Keuangan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah											Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengendalian pajak daerah	20	244.322.000	20	231.521.546	100,00	94,76	24	503.787.046	30,00	51,55	Badan Keuangan Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	2	548.706.400	2	482.740.548	100,00	87,98	3	604.451.548	37,50	27,54	Badan Keuangan Daerah
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	3	102.077.600	3	54.056.496	100,00	52,96	4	166.744.996	33,33	40,84	Badan Keuangan Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	3	556.501.900	3	154.083.410	100,00	27,69	4	330.952.610	33,33	14,87	Badan Keuangan Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	4	702.625.400	12	698.203.550	99,37	99,37	16	1.384.188.940	100,00	49,25	Badan Keuangan Daerah
KEPEGAWAIAN												
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Kegiatan Perkantoran											
Peneydiaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Terwujudnya Ruang Kantor Yang Terang	4	10.000.000	4	2.765.625	100,00	27,66	34	14.410.625	51,52	12,50	Badan Kepegawaian

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Banguan Kantor												dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pnyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Ruangan Kantor yang Bersih	4	15.000.000	0	0	0,00	0,00	30	16.645.000	45,45	14,44	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum ASN	4	63.834.000	4	62.705.500	100,00	98,23	50	128.184.500	78,13	5,21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Tersedianya alat tulis kantor							100		90,91		
Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	4	12.250.000	4	11.011.800	100,00	89,89	69	24.906.800	104,55	3,63	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pemahaman Apartur tentang peraturan perundang-undangan	12	10.000.000	12	9.800.000	100,00	98,00	42	21.445.000	67,74	11,87	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Singkronisasi Informasi dan Pemahaman terhadap pelaksaan Kegiatan	25	127.564.000	25	127.355.848	100,00	99,84	130	256.564.848	114,04	14,83	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Daya Manusia
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Kegiatan Perkantoran	12	124.000.000	12	101.118.427	100,00	81,55	48	226.763.427	72,73	14,45	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya Kegiatan Kantor	17	303.080.056	17	300.800.152	100,00	99,25	32	605.525.208	100,00	99,62	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan	3	39.864.000	3	37.834.435	100,00	94,91	66	79.343.435	91,67	18,67	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan JasaPemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	4	5.100.000	4	2.305.000	100,00	45,20	67	9.050.000	93,06	2,13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pemelihraan/Rehabilitas Gedung kantor dan Bangun	Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan	2	20.000.000	2	19.200.000	100,00	96,00	65	40.845.000	90,28	9,61	Badan Kepegawaian

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Lainnya	terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional											dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Kepegawaian Daerah												
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN												
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terpenuhinnya ASN sesuai dengan formasi jabatan dan analisis kebutuhan	5	260.969.000	5	255.214.600	100,00	97,79	515	453.894.115	85,83	25,22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Koordinasi pelaksaan Administrasi Pemberhentian	Dapat digunakan untuk pencairan taspen dan gaji pensiun	1	39.893.750	1	38.723.395	100,00	97,07	201	68.373.695	201,00	7,43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Data Kepegawaianan	Dapat digunakan untuk pencairan taspen dan gaji pensiun	1	24.999.800	1	23.183.900	100,00	92,74	201	52.834.200	201,00	5,74	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Mutasi dan Promosi ASN												
Pengelolaan Mutasi ASN	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan SDM	3	510.062.000	3	364.297.964	100,00	71,42	128	1.543.340.181	142,22	33,59	Badan Kepegawaian dan Pengembanga

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												n Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dapat dijadikan pedoman untuk pengembangan karir asn	2	113.069.300	2	100.810.800	100,00	89,16	602	164.796.500	200,67	25,19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan Kompetensi ASN												
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan terpenuhinya persyratan dalam penyesuian ijazah dan pindah golongan ruang ASN	1	266.884.800	1	206.556.680	100,00	77,40	581	252.844.860	153,70	1,76	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan terpenuhinya persyratan dalam penyesuian ijazah dan pindah golongan ruang ASN	10	283.680.200	10	238.977.500	100,00	84,24	65	1.008.308.700	216,67	131,06	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												
Pembinaan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin ASN	10	29.999.900	10	13.089.100	100,00	43,63	20	83.088.600	133,33	17,17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Daya Manusia
Pendidikan dan Pelatihan												
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia												
Sertifikat, Kelembagaan kopetensi kopetensi manajerial dan fungsional	Persentase peningkatan dan pengembangan kopetensi manajerial dan fungsional											
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,dan Urusan Pemerintah Umum	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaran Urusan Pemerintah konkuren,Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	2	50.000.000	2	28.672.000	100,00	57,34	582	74.960.180	153,97	0,52	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian / Penelitian yang dimanfaatkan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah											
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengkajian Peraturan												
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1	175.360.600	1	157.173.690	100,00	89,63	1	157.173.690	100,00	89,63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangnan Bidang Sosial dan Kependudukan												
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	241.463.200	1	241.260.200	100,00	99,92	2	547.277.800	50,00	54,73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1	274.727.200	1	271.968.170	100,00	99,00	2	552.026.670	50,00	49,29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan												
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	353.656.200	1	351.153.884	100,00	99,29	1	351.153.884	100,00	107,30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	7.003.000	1	6.998.700	100,00	99,94	1	6.998.700	100,00	3,28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
NSPEKTORAT DAERAH												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA												
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37	4.430.947.937	37	4.215.978.161	100,00	95,15	74	7.649.175.821	100,00	152,98	Inspektorat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	124.500.000	12	108.777.000	100,00	87,37	36	139.577.000	144,00	27,92	Inspektorat
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH												
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	411.205.600	10	405.380.654	95,00	98,58	25	728.619.742	98,00	182,15	Inspektorat
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	13.000.500	1	12.995.620	100,00	99,96	2		6,67	0,00	Inspektorat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Rumah Tangga yang disediakan	2	8.641.000	2	8.100.657	100,00	93,75	4	17.962.657	100,00	11,98	Inspektorat
Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	122.455.600	3	120.058.000	100,00	98,04	8	293.921.000	266,67	117,57	Inspektorat
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	13.500.000	1	13.417.220	100,00	99,39	2	36.306.320	66,67	51,87	Inspektorat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1	28.475.000	1	28.475.000	100,00	100,00	3	46.975.000	150,00	117,44	Inspektorat
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	900.655.400	12	899.546.907	100,00	99,88	24	1.867.918.612	200,00	622,64	Inspektorat
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	8	174.400.000	8	124.880.000	100,00	71,61	13	419.993.000	433,33	280,00	Inspektorat
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36	85.130.000	36	80.508.571	100,00	94,57	72	163.570.966	600,00	90,87	Inspektorat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	710.843.000	12	674.486.120	100,00	94,89	23	978.414.120	191,67	132,95	Inspektorat
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	17.020.000	1	16.982.340	100,00	99,78	2	91.339.296	13,33	45,67	Inspektorat
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6	34.166.400	6	26.699.650	100,00	78,15	12	57.195.160	80,00	28,60	Inspektorat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	3	27.270.000	3	22.240.000	100,00	81,55	6	68.030.000	75,00	136,06	Inspektorat
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	249.173.000	1	248.735.647	100,00	99,82	1	248.735.647	100,00	124,37	Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN												
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL												
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja	12	231.572.000	12	230.913.000	100,00	99,72	42	539.164.900	175,00	98,03	Inspektorat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintah Daerah											
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12	92.216.400	12	92.058.200	100,00	99,83	16	264.314.000	66,67	48,06	Inspektorat
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	108	432.867.000	108	426.836.899	100,00	98,61	216	761.766.499	200,00	138,50	Inspektorat
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	37	30.735.800	37	29.430.800	100,00	95,75	74	67.126.600	200,00	33,56	Inspektorat
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	12	589.055.400	12	589.055.400	100,00	100,00	28	1.199.632.300	140,00	119,96	Inspektorat
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	2	334.932.600	2	318.656.679	100,00	95,14	4	833.155.206	200,00	138,86	Inspektorat
Monitoring dan evaluasi Tindak lanjut HASIL Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	203.328.600	2	199.387.700	100,00	98,06	4	354.866.700	200,00	78,86	Inspektorat
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU												
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12	296.952.200	12	285.600.850	100,00	96,18	24	486.488.450	200,00	88,45	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI												
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN												
Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	2	93.813.000	2	91.525.000	100,00	97,56	4	204.877.600	200,00	68,29	Inspektorat
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI												
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	4	20.123.000	4	15.177.000	100,00	75,42	8	64.462.000	133,33	14,32	Inspektorat
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	57.035.000	10	52.090.000	100,00	91,33	20	111.281.800	76,92	44,51	Inspektorat
Koordinasi, Monitoring danEvaluasi serta Verifikasi Pnecegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	72.551.200	5	65.714.400	100,00	90,58	8	130.679.890	160,00	29,04	Inspektorat
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Darah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2	93.094.500	2	85.241.272	100,00	91,56	4	139.346.672	80,00	55,74	Inspektorat
UNSUR KEWILAYAHAN												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KECAMATAN SIPORA UTARA												
PROGRAM PENUNJANG PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	75.341.100	6	75.341.100	100,00	100,00	12	143.023.100	200,00	238,35	Kecamatan Sipora Utara
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan, perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN	16	1.524.976.428	16	1.399.261.818	100,00	91,76	30	2.700.981.087	187,50	166,16	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	21.500.000	12	21.500.000	100,00	100,00	24	45.900.000	200,00	172,30	Kecamatan Sipora Utara
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan, perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	6.000.000	4	6.000.000	100,00	100,00	8	11.960.000	400,00	56,95	Kecamatan Sipora Utara
Penyedia peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumahtangga yang disediakan	4	35.000.000	4	35.000.000	100,00	100,00	4	35.000.000	100,00	207,25	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7	77.928.800	7	77.925.600	100,00	100,00	295	133.002.200	4214,29	173,92	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7	12.505.800	6	12.375.800	85,71	98,96	12	19.880.600	100,00	169,92	Kecamatan Sipora Utara
Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD	12	104.105.000	9	102.792.450	75,00	98,74	21	212.812.050	175,00	283,83	Kecamatan Sipora Utara
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan, perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah											
Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	33.259.000	1	33.259.000	100,00	100,00	2	38.476.000	3,33	95,31	Kecamatan Sipora Utara
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	17	75.305.270	17	75.276.800	100,00	99,96	17	75.276.800	100,00	59,89	Kecamatan Sipora Utara
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantir atau bangunan lainnya yang disediakan	1	20.000.000	1	19.990.000	100,00	99,95	1	19.990.000	100,00	71,30	Kecamatan Sipora Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan, perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12	26.000.000	12	23.636.897	100,00	90,91	24	42.130.408	200,00	168,52	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	311.448.000	12	311.318.000	100,00	99,96	34	639.609.306	283,33	190,24	Kecamatan Sipora Utara
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan, perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3	33.000.000	3	33.000.000	100,00	100,00	7	68.450.000	700,00	134,77	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kwndaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8	24.000.000	8	23.968.000	100,00	99,87	14	50.571.000	175,00	219,78	Kecamatan Sipora Utara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang	15	10.350.000	11	10.335.000	73,33	99,86	16	13.985.000	106,67	135,12	Kecamatan Sipora Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dipelihara											
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3	83.587.415	3	82.244.775	100,00	98,39	4	280.374.775	100,00	99,52	Kecamatan Sipora Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sipora Utara											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan	85	29.999.900	80	29.999.800	94,12	100,00	230	67.913.800	270,59	226,38	Kecamatan Sipora Utara
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dipecahkan	150	23.037.300	105	23.036.700	70,00	100,00	205	65.597.500	136,67	225,56	Kecamatan Sipora Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	6	18.500.000	6	18.500.000	100,00	100,00	7	34.368.000	58,33	161,74	Kecamatan Sipora Utara
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	12	26.500.000	12	26.500.000	100,00	100,00	18	67.275.000	150,00	207,32	Kecamatan Sipora Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani / diselesaikan											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan RI											
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	6	21.242.400	6	19.372.000	100,00	91,19	12	39.371.800	200,00	140,61	Kecamatan Sipora Utara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu											
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	18	66.290.000	18	66.240.000	100,00	99,92	24	107.971.000	133,33	143,96	Kecamatan Sipora Utara
KECAMATAN SIPORA SELATAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	60.000.000	1	60.000.000	100,00	100,00	1	60.000.000	8,33	150,60	Kecamatan Sipora Selatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Sipora Selatan	25	2.064.956.080	25	1.958.213.798	100,00	94,83	25	1.958.213.798	100,00	100,69	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang	25	82.020.000	25	76.120.000	100,00	92,81	25	76.120.000	62,50	119,18	Kecamatan Sipora Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor											
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	4.999.500	4	4.999.500	100,00	100,00	4	4.999.500	100,00	100,09	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	10.000.000	4	9.400.000	100,00	94,00	4	9.400.000	100,00	94,00	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	4	5.000.000	2	2.330.000	50,00	46,60	2	2.330.000	50,00	9,67	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	70.740.000	4	63.670.650	100,00	90,01	4	63.670.650	100,00	100,72	Kecamatan Sipora Selatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	2	121.732.000	2	66.660.200	100,00	54,76	2	66.660.200	7,69	49,89	Kecamatan Sipora Selatan
Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terlaksannya pengadaan kendaraan Dinas											
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	18.200.000	1	18.200.000	100,00	100,00	1	18.200.000	100,00	6,60	Kecamatan Sipora Selatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	2	44.400.000	2	41.900.000	100,00	94,37	2	41.900.000	200,00	210,21	Kecamatan Sipora Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang Dibayar	4	24.000.000	4	24.000.000	100,00	100,00	4	24.000.000	33,33	120,00	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	19	330.000.000	19	328.064.000	100,00	99,41	19	328.064.000	50,00	100,05	Kecamatan Sipora Selatan
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penumjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Alat Angkutan Darat tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3	18.710.000	3	18.710.000	100,00	100,00	3	18.710.000	100,00	96,62	Kecamatan Sipora Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat											
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan												
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		7	49.999.900	7	49.999.900	100,00	100,00	7	49.999.900	70,00	250,00	Kecamatan Sipora Selatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Jumlah laporan Pelaksanaan	7	50.000.000	7	49.975.700	100,00	99,95	7	49.975.700	70,00	177,50	Kecamatan Sipora Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kewenangan lain yang dilimpahkan											
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Dalam Forum Pembangunan											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan											
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	7	30.000.000	3	14.950.000	42,86	49,83	3	14.950.000	42,86	49,83	Kecamatan Sipora Selatan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terwujudnya Pembinaan Penumbuhan Karakter Kesadaran dalam pengamalan Pancasila											
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran masyarakat akan Pentingnya Penghayatan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek kehidupan Bermasyarakat,Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Berkarakter melalui Pengamalan Pancasila di Tingkat Kecamatan dan Desa terwujudnya Pembinaan Keluarga yang berkarakter melalui Pengamalan pancasila serta Undang-Undang dasar 1945	7	19.999.900	7	19.999.900	100,00	100,00	7	19.999.900	100,00	100,00	Kecamatan Sipora Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
UMUM												
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terwujudnya Nilai-Nilai pancasila Persentase Konplik di Wilayah Kecamatan yang ditangani atau diselesaikan Jumlah Orang yang mengikuti dalam memperingati Hari Ulang tahun negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945	1	85.587.700	1	77.034.700	100,00	90,01	1	77.034.700	100,00	90,01	Kecamatan Sipora Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan masyarakat											
Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pembinaan Dokumen Keuangan Desa	7	70.000.000	7	69.928.900	100,00	99,90	7	69.928.900	100,00	94,85	Kecamatan Sipora Selatan
KECAMATAN PAGAI UTARA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Pagai Utara Utara	14	1.478.745.551	14	1.182.104.538	100,00	79,94	14	1.182.104.538	20,00	13,28	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	12	155.763.000	12	155.267.800	100,00	99,68	12	155.267.800	17,14	6,85	Kecamatan Pagai Utara
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum											
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laptop Komputer dan Printer	3	22.784.250	3	22.781.000	100,00	99,99	3	22.781.000	100,00	99,87	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan Serta Lancarnya Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor	51	58.691.600	51	58.691.600	100,00	100,00	51	58.691.600	25,00	16,79	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	5	10.121.500	3	10.121.500	60,00	100,00	3	10.121.500	10,00	20,79	Kecamatan Pagai Utara
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	15	190.825.000	15	190.711.455	100,00	99,94	15	190.711.455	1,76	52,44	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Rekening listrik yang Dibayar	12	12.000.000	12	12.000.000	100,00	100,00	12	12.000.000	20,00	3,33	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Honororium yang Tersedia	12	314.232.000	12	314.099.789	100,00	99,96	12	314.099.789	200,00	483,23	Kecamatan Pagai Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan											
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	2	51.281.800	2	51.281.200	100,00	100,00	2	51.281.200	40,00	33,08	Kecamatan Pagai Utara
Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan	4	68.477.840	4	64.266.300	100,00	93,85	4	64.266.300	11,11	28,56	Kecamatan Pagai Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Terlaksananya HUT-RI	1	108.370.000	1	106.498.400	100,00	98,27	1	106.498.400	20,00	42,60	Kecamatan Pagai Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Forum Kecamatan	10	15.586.900	10	15.561.800	100,00	99,84	10	15.561.800	25,00	24,96	Kecamatan Pagai Utara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan											
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	9	60.027.000	9	44.038.600	100,00	73,36	9	44.038.600	25,00	18,34	Kecamatan Pagai Utara
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Fungsi Kontrol dan fungsi Evaluasi serta Pelaporan dan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	9	36.321.000	9	36.303.000	100,00	99,95	9	36.303.000	25,00	24,99	Kecamatan Pagai Utara
KECAMATAN SIKAKAP												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah											
PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN	Persentase Kepatuhan Penyusuinan											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	13.600.000	0	4.050.000	0,00	29,78	0	4.050.000	0,00	1,40	Kecamatan Sikakap
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	26	2.345.284.670	26	1.929.458.908	100,00	82,27	26	1.929.458.908	25,00	16,97	Kecamatan Sikakap
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	232.269.000	12	221.328.400	100,00	95,29	12	221.328.400	25,00	30,83	Kecamatan Sikakap
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur Perangkat Daerah											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	8.600.000	3	8.570.500	100,00	99,66	3	8.570.500	7,89	23,33	Kecamatan Sikakap
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Junlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	75.497.500	3	75.497.500	100,00	100,00	3	75.497.500	18,75	31,63	Kecamatan Sikakap
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	3	69.992.600	3	69.868.100	100,00	99,82	3	69.868.100	1,16	15,39	Kecamatan Sikakap
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12	154.429.000	12	149.240.455	100,00	96,64	12	149.240.455	25,00	36,82	Kecamatan Sikakap

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	33.000.000	12	32.859.000	100,00	99,57	12	32.859.000	25,00	23,42	Kecamatan Sikakap
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Junlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	172.272.000	6	172.272.000	100,00	100,00	6	172.272.000	12,50	25,42	Kecamatan Sikakap
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Terpeliharanya Baragn Milik Daerah											
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	1.000.000	2	1.000.000	100,00	100,00	2	1.000.000	22,22	8,32	Kecamatan Sikakap
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan											
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkian	12	17.600.000	0	16.400.000	0,00	93,18	0	16.400.000	0,00	8,54	Kecamatan Sikakap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan											
KOORDINASI PEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan											
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawrah Perencanaan Pembanguan di Desa	3	33.550.000	3	33.550.000	100,00	100,00	3	33.550.000	25,00	17,54	Kecamatan Sikakap
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Permberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	23.180.000	3	21.980.000	100,00	94,82	3	21.980.000	6,25	19,91	Kecamatan Sikakap
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan											
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DAERAH												
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Julah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	95.672.000	100	95.672.000	100,00	100,00	100	95.672.000	25,00	24,75	Kecamatan Sikakap
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6	6.722.000	5	6.717.000	83,33	99,93	5	6.717.000	20,83	5,77	Kecamatan Sikakap
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu											
FASILITASI REKOMENDASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang Dibina											
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam	9	38.500.000	6	28.290.000	66,67	73,48	6	28.290.000	16,67	12,93	Kecamatan Sikakap

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
pendayagunaan aset desa	Rangka Pengelolaan Keuanga Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
KECAMATAN PAGAI SELATAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah											
PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Kepatuhan Penyusuinan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	99.754.000	12	99.753.600	100,00	100,00	12	160.548.600	100,00	100,00	Kecamatan Pagai Selatan
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	168	1.299.870.664	166	1.204.765.597	98,81	92,68	180	2.292.345.653	321,43	41,55	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	204.243.000	12	199.815.100	100,00	97,83	24	369.339.800	50,00	32,12	Kecamatan Pagai Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur Perangkat Daerah											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1.500.000	1	1.500.000	100,00	100,00	2	2.760.000	50,00	39,66	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Pelayanan kantor Kecamatan Pagai Selatan	4	19.200.000	4	19.200.000	100,00	100,00	4	19.200.000	25,00	11,63	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	5	47.174.000	5	46.983.000	100,00	99,60	9	80.846.200	47,37	35,93	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	2.000.000	1	2.000.000	100,00	100,00	1	2.940.000	25,00	20,96	Kecamatan Pagai Selatan
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	177.115.000	12	177.002.255	100,00	99,94	24	329.669.555	21,43	38,75	Kecamatan Pagai Selatan
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya Barang Milik Daerah											
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1	30.000.000	1	30.000.000	100,00	100,00	1	30.000.000	20,00	26,78	Kecamatan Pagai Selatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peningkatan pelayanan dan	1	12.000.000	1	12.000.000	100,00	100,00	1	12.000.000	12,50	4,19	Kecamatan Pagai Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah											
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	4.800.000	6	1.900.000	50,00	39,58	6	2.100.000	12,50	10,94	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Junlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	314.320.000	12	310.024.942	100,00	98,63	24	624.256.942	57,14	45,98	Kecamatan Pagai Selatan
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Terpeliharanya Baragn Milik Daerah											
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	5.000.000	5	4.925.000	100,00	98,50	9	34.015.000	37,50	22,68	Kecamatan Pagai Selatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	15.030.000	7	15.030.000	100,00	100,00	11	17.870.000	34,38	13,75	Kecamatan Pagai Selatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2.105.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan											
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkian	12	35.000.000	12	34.942.800	100,00	99,84	12	0	25,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan											
KOORDINASI PEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan											
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawrah Perencanaan Pembanguan di Desa	7	20.000.000	7	13.400.000	100,00	67,00	14	33.834.200	50,00	33,83	Kecamatan Pagai Selatan
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Permberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	24.997.000	0	24.869.000	0,00	99,49	4	48.513.000	25,00	15,39	Kecamatan Pagai Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan											
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	50.000.000	100	49.850.000	100,00	99,70	200	124.705.000	50,00	43,52	Kecamatan Pagai Selatan
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	24.998.000	4	24.797.800	100,00	99,20	16	33.944.800	33,33	43,01	Kecamatan Pagai Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Waktu											
FASILITASI REKOMENDASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang Dibina											
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuanga Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	74.996.000	12	73.426.200	100,00	97,91	24	146.803.400	50,00	29,46	Kecamatan Pagai Selatan
KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	4	59.991.000	2	38.233.200	50,00	63,73	2	38.233.200	8,33	12,91	Kecamatan Siberut Barat Daya
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	12	1.179.157.362	12	1.067.743.258	100,00	90,55	12	1.067.743.258	8,33	7,92	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelola kegiatan dan gaji pegawai kontrak	12	191.314.000	12	170.288.900	100,00	89,01	12	170.288.900	8,33	6,24	Kecamatan Siberut Barat Daya
Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15	6.997.500	15	4.241.400	100,00	60,61	15	4.241.400	46,88	7,66	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik yang disediakan	17	51.695.800	15	44.659.200	88,24	86,39	15	44.659.200	20,55	10,96	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	8	12.000.400	6	8.605.700	75,00	71,71	6	8.605.700	12,00	20,31	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12	123.606.000	12	112.515.000	100,00	91,03	12	112.515.000	15,00	15,55	Kecamatan Siberut Barat Daya
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3	14.971.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Terbayarnya rekening telepon dan listrik	12	12.000.000	12	12.000.000	100,00	100,00	12	12.000.000	25,00	15,46	Kecamatan Siberut Barat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Air dan Listrik												Daya
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	168	226.272.000	160	226.272.000	95,24	100,00	160	226.272.000	1142,86	118,88	Kecamatan Siberut Barat Daya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah											
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	30.000.000	1	27.550.000	100,00	91,83	1	27.550.000	100,00	12,50	Kecamatan Siberut Barat Daya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Selatan											
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan kepada camat											
Pelaksanaan urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan	300	42.480.000	140	18.903.900	46,67	44,50	140	18.903.900	8,24	7,81	Kecamatan Siberut Barat Daya
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat,											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
Koordinasi Pegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa											
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	34.991.000	1	33.164.500	100,00	94,78	1	33.164.500	100,00	21,71	Kecamatan Siberut Barat Daya
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	34.955.000	0	10.000.000	0,00	28,61	0	10.000.000	0,00	4,87	Kecamatan Siberut Barat Daya
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah											
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamanan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian	Meningkatnya pengetahuan kebinekaan	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00	100,00	1	100.000.000	14,29	18,20	Kecamatan Siberut Barat Daya

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
bhineka tunggal ini serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia.												
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forkopimcam	1	25.000.000	1	20.170.000	100,00	80,68	1	20.170.000	50,00	37,05	Kecamatan Siberut Barat Daya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	1	59.998.000	1	31.647.000	100,00	52,75	1	31.647.000	33,33	24,19	Kecamatan Siberut Barat Daya
KECAMATAN SIBERUT SELATAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Terlaksananya Perencanaan dan											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	4	39.455.500	4	39.176.250	100,00	99,29	4	39.176.250	4,55	13,23	Kecamatan Siberut Selatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	17	1.797.911.106	17	1.629.550.211	100,00	90,64	17	1.629.550.211	13,28	12,08	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelola kegiatan dan gaji pegawai kontrak	12	98.440.000	12	88.740.000	100,00	90,15	12	88.740.000	6,38	3,25	Kecamatan Siberut Selatan
Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15	7.998.250	15	7.998.250	100,00	100,00	15	7.998.250	16,30	14,45	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	6.096.080	2	6.096.080	100,00	100,00	2	6.096.080	100,00	100,00	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan Bnhan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik yang disediakan	17	50.106.000	16	49.806.000	94,12	99,40	16	49.806.000	21,92	12,22	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan	8	8.000.000	8	8.000.000	100,00	100,00	8	8.000.000	16,00	18,88	Kecamatan Siberut

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	penggandaan											Selatan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1	23.640.000	1	10.918.000	100,00	46,18	1	10.918.000	100,00	46,18	Kecamatan Siberut Selatan
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12	119.966.000	12	117.746.000	100,00	98,15	12	117.746.000	4,32	16,27	Kecamatan Siberut Selatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3	23.872.700	3	23.872.700	100,00	100,00	3	23.872.700	100,00	100,00	Kecamatan Siberut Selatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3	17.780.000	3	17.780.000	100,00	100,00	3	17.780.000	100,00	100,00	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon dan listrik	12	12.000.000	12	11.934.000	100,00	99,45	12	11.934.000	14,29	15,38	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	190.344.000	12	190.344.000	100,00	100,00	12	190.344.000	100,00	100,00	Kecamatan Siberut Selatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah											
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	4	38.500.000	4	38.500.000	100,00	100,00	4	38.500.000	8,33	17,47	Kecamatan Siberut Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
atau kendaraan dinas jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya											
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	10.870.000	4	10.260.000	80,00	94,39	4	10.260.000	80,00	94,39	Kecamatan Siberut Selatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1	25.000.000	1	25.000.000	100,00	100,00	1	25.000.000	14,29	21,69	Kecamatan Siberut Selatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya halaman gedung kantor	1	19.999.300	1	19.999.300	100,00	100,00	1	19.999.300	25,00	7,86	Kecamatan Siberut Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Selatan											
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kepuasan layanan terhadap masyarakat	1	24.059.000	1	15.885.000	100,00	66,03	1	15.885.000	14,29	24,17	Kecamatan Siberut Selatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan kepada camat											
Pelaksanaan urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan	300	33.799.900	300	33.227.150	100,00	98,31	300	33.227.150	17,65	13,74	Kecamatan Siberut Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat,											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
Koordinasi Pegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa											
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	24.999.900	1	23.499.900	100,00	94,00	1	23.499.900	14,29	15,38	Kecamatan Siberut Selatan
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	19.997.750	1	3.510.000	100,00	17,55	1	3.510.000	14,29	1,71	Kecamatan Siberut Selatan
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah											
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamanan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian	Meningkatnya pengetahuan kebinekaan	1	84.990.000	1	81.255.000	100,00	95,61	1	81.255.000	14,29	14,79	Kecamatan Siberut Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
bhineka tunggal ini serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia.												
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forkopimcam	1	24.939.000	0	23.590.000	21,08	94,59	0	23.590.000	10,54	43,33	Kecamatan Siberut Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	1	59.994.500	2	57.473.500	212,41	95,80	2	57.473.500	106,21	43,94	Kecamatan Siberut Selatan
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terpasilitasinya kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa	5	24.962.000	5	24.920.000	100,00	99,83	5	24.920.000	16,67	12,90	Kecamatan Siberut Selatan
KECAMATAN SIBERUT TENGAH												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	69.990.000	6	69.750.000	100,00	99,66	6	69.750.000	12,50	33,79	Kecamatan Siberut Tengah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan Siberut Tengah	144	1.316.775.848	144	1.225.116.903	100,00	93,04	144	1.225.116.903	25,00	20,60	Kecamatan Siberut Tengah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	12	172.637.000	12	170.385.100	100,00	98,70	12	170.385.100	25,00	37,80	Kecamatan Siberut Tengah
Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang tersedia	6	9.992.500	6	9.978.000	100,00	99,85	6	9.978.000	25,00	91,41	Kecamatan Siberut Tengah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor,Jumlah makanan dan Minuman di Sediakan	210	70.000.000	210	70.000.000	100,00	100,00	210	70.000.000	16,33	55,41	Kecamatan Siberut Tengah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	5	9.900.000	5	9.200.000	100,00	92,93	5	9.200.000	41,67	45,92	Kecamatan Siberut Tengah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	12	109.581.000	12	108.643.200	100,00	99,14	12	108.643.200	25,00	34,38	Kecamatan Siberut Tengah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Pengadaan Mebel	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	1	32.219.000	1	32.200.000	100,00	99,94	1	32.200.000	2,56	18,40	Kecamatan Siberut Tengah
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	3	24.983.480	3	24.889.000	100,00	99,62	3	24.889.000	25,00	14,22	Kecamatan Siberut Tengah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Rekening listrik yang Dibayar	12	6.000.000	12	5.720.000	100,00	95,33	12	5.720.000	25,00	23,83	Kecamatan Siberut Tengah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Honororium yang Tersedia	168	239.400.000	168	219.450.000	100,00	91,67	168	219.450.000	23,33	21,51	Kecamatan Siberut Tengah
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Fasilitasi Peyelenggaraan											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintahan dan Pelayanan Publik											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Perekaman e-KTP	200	63.995.603	175	63.525.000	87,50	99,26	175	63.525.000	29,17	31,14	Kecamatan Siberut Tengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan											
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	2	27.810.000	2	27.494.700	100,00	98,87	2	27.494.700	4,17	34,37	Kecamatan Siberut Tengah
Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan	2	39.349.600	2	33.044.000	100,00	83,98	2	33.044.000	25,00	41,31	Kecamatan Siberut Tengah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya HUT-RI	100	77.903.000	100	77.903.000	100,00	100,00	100	77.903.000	25,00	20,50	Kecamatan Siberut Tengah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan Yang ditangani/diselesaikan											
PASILITAS REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	12	79.987.500	12	79.800.000	100,00	99,77	12	79.800.000	25,00	22,17	Kecamatan Siberut Tengah
KECAMATAN Kecamatan Siberut Utara												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	6	39.999.000	6	39.914.500	100,00	99,79	6	87.703.500	25,00	34,38	Kecamatan Siberut Utara
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Oarng yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	2.220.064.352	25	2.143.802.835	100,00	96,56	25	4.094.988.325	25,00	49,78	Kecamatan Siberut Utara
Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	155.965.000	12	155.772.800	100,00	99,88	12	362.862.100	25,00	39,76	Kecamatan Siberut Utara
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan kantor yang tersedia	9	2.412.500	8	2.329.500	88,89	96,56	8	4.485.000	22,22	39,30	Kecamatan Siberut Utara
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	82.198.100	3	82.198.100	100,00	100,00	3	103.475.400	25,00	77,38	Kecamatan Siberut Utara
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2.520.000	2	2.520.000	100,00	100,00	2	4.877.900	25,00	44,67	Kecamatan Siberut Utara
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat	1	145.001.000	4	144.882.200	100,00	99,92	4	237.252.900	100,00	46,28	Kecamatan Siberut Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakann	12	12.000.000	12	12.000.000	100,00	100,00	12	24.000.000	25,00	40,00	Kecamatan Siberut Utara
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	180.000.000	12	180.000.000	100,00	100,00	12	360.000.000	25,00	50,00	Kecamatan Siberut Utara
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaandan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	28.095.000	1	28.095.000	100,00	100,00	1	45.545.000	25,00	58,54	Kecamatan Siberut Utara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	13.000.000	3	13.000.000	100,00	100,00	3	14.000.000	25,00	77,78	Kecamatan Siberut Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	3.460.000	3	3.460.000	100,00	100,00	3	17.460.000	12,50	28,23	Kecamatan Siberut Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Kecamatan Siberut Utara											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Tersedianya Layanan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1	81.434.000	1	81.389.000	100,00	99,94	1	171.840.900	4,17	82,76	Kecamatan Siberut Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ketelibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Tersedianya Layanan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	36.075.000	9	36.075.000	90,00	100,00	9	66.793.200	22,50	45,51	Kecamatan Siberut Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	41.007.400	12	40.755.000	100,00	99,38	12	61.380.000	25,00	22,86	Kecamatan Siberut Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan NKRI	100	100.000.000	100	100.000.000	100,00	100,00	100	200.044.000	25,00	93,77	Kecamatan Siberut Utara
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	1	35.115.000	1	34.950.000	100,00	99,53	1	57.235.000	25,00	37,63	Kecamatan Siberut Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kecamatan											
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu											
Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Layanan Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	78.209.000	1	72.002.500	100,00	92,06	1	146.545.200	25,00	30,01	Kecamatan Siberut Utara
KECAMATAN SIBERUT BARAT												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah											
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja OPD Kec Sib Barat											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Perangkat Daerah	12	61.496.500	12	57.945.000	100,00	94,22	12	57.945.000	25,00	16,18	Kecamatan Siberut Barat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	120	1.090.672.330	120	974.101.986	100,00	89,31	120	974.101.986	25,00	19,78	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	308.904.000	12	299.075.000	100,00	96,82	12	299.075.000	25,00	25,07	Kecamatan Siberut Barat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik	12	5.844.000	7	4.276.000	58,33	73,17	7	4.276.000	58,33	12,44	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	12	47.281.200	12	40.656.200	100,00	85,99	12	40.656.200	20,00	17,28	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12	2.508.410	12	2.508.410	100,00	100,00	12	2.508.410	25,00	15,26	Kecamatan Siberut Barat
Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rakor	12	133.698.000	12	125.380.000	100,00	93,78	12	125.380.000	25,00	22,08	Kecamatan Siberut Barat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah											
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/ Lapangan yang disediakan	1	35.763.090	1	34.500.000	100,00	96,47	1	34.500.000	11,11	9,43	Kecamatan Siberut Barat
Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah unit Peralatan dan Mesin	5	34.665.300	1	30.750.000	20,00	88,71	1	30.750.000	20,00	88,71	Kecamatan Siberut Barat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang disediakan	12	24.000.000	12	21.500.000	100,00	89,58	12	21.500.000	25,00	17,92	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	234.144.000	12	230.244.000	100,00	98,33	12	230.244.000	25,00	22,51	Kecamatan Siberut Barat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik daerah											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	8	13.000.000	8	13.000.000	100,00	100,00	8	13.000.000	25,00	22,03	Kecamatan Siberut Barat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD Kecamatan Siberut Barat											
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat											
Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12	45.400.000	10	38.185.000	83,33	84,11	10	38.185.000	20,83	10,92	Kecamatan Siberut Barat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalamPembangunan Tingkat Kecamatan											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat											
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam forum Musrenbang	1	21.462.000	1	21.462.000	100,00	100,00	1	21.462.000	2,08	13,45	Kecamatan Siberut Barat
Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	1	18.984.000	1	18.534.000	100,00	97,63	1	18.534.000	12,50	16,25	Kecamatan Siberut Barat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan UUD 1945 , Pelestariaan Bheneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD 1945,	1	73.535.000	1	73.535.000	100,00	100,00	1	73.535.000	0,25	25,40	Kecamatan Siberut Barat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia	pelestariaan Bheneka Tunggal Ika											
Pelaksanaan Tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen tugas forum pimpinan di Kecamatan	1	22.326.000	1	22.326.000	100,00	100,00	1	22.326.000	6,25	18,22	Kecamatan Siberut Barat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa Se-Kecamatan Siberut Barat Pada tepat waktu											
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa se-kecamatan Siberut Barat											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan Pendayagunaan aset desa	30	75.131.500	30	74.915.000	100,00	99,71	30	74.915.000	25,00	20,32	Kecamatan Siberut Barat
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	11	986.589.279	11	917.754.677	100,00	93,02	11	917.754.677	12,22	7,24	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelila kegiatan dan gaji pegawai kontrak	2	42.600.000	2	28.080.000	100,00	65,92	2	28.080.000	2,67	2,78	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	8	10.000.000	8	10.000.000	100,00	100,00	8	10.000.000	9,41	19,23	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	20	71.530.700	20	61.186.700	100,00	85,54	20	61.186.700	80,00	18,54	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	6	7.999.800	6	7.999.800	100,00	100,00	6	7.999.800	14,63	5,52	Kantor Kesatuan Bangsa,

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis)	6	8.490.000	6	8.000.000	100,00	94,23	6	8.000.000	1,00	9,25	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15	72.529.000	12	71.858.030	80,00	99,07	12	71.858.030	20,00	5,91	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Tersedianya peralatan mesin	1	32.219.000	1	22.650.000	100,00	70,30	1	22.650.000	25,00	3,27	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya peralatan mesin	4	24.280.000	4	22.092.945	100,00	90,99	4	22.092.945	25,00	6,05	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarkannya rekening listrik, internet, dan ijin stasiun radio	24	24.000.000	4	10.515.532	16,67	43,81	4	10.515.532	4,17	14,60	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan jasa peayanan umum kantor	Dana transfer umum Dana Aokasi umum	12	183.144.000	11	179.244.000	91,67	97,87	11	179.244.000	30,56	51,21	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya kendaraan dinas	2	19.992.000	2	19.260.000	100,00	96,34	2	19.260.000	66,67	19,26	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	10	9.500.000	8	8.000.000	80,00	84,21	8	8.000.000	29,63	13,33	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENGUATAN IDEOOGI PANCASIA DAN KARAKTER KEBANGSAAN												
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Peaksanaan Bidang												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
ideoogiPancasia dan Karakter Kebangsaan												
Pembentukan Paskibraka	Terlaksananya perekrutan Paskibra	1	1.164.658.500	1	1.126.680.230	100,00	96,74	1	1.126.680.230	25,00	32,19	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENINFKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELAUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK												
Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik												
Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, Perwakilan	Terbayarnya Bantuan Partai politik	9	21.433.472.600	9	21.432.244.610	100,00	99,99	9	21.432.244.610	20,00	728,99	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Daerah												
Peaksanaan Monitoring Evauasi dan Peaporan di Bidang Pendidikan Poitik Etika Budaya Poitik Peningkatan Demokrasi Fasiitas Keembagaan Pemerintahan Perwakian dan Partai Poitik Pemiihan Umum/Pemiihan Umum Kepaa Daerah serta Pemantauan Situasi Poitik di Daerah	Terbayarnya Bantuan Partai politik	10	58.018.000	3	24.854.400	30,00	42,84	3	24.854.400	25,00	3,82	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN												
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Peaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan												
Peaksanaan Monitoring Evauasi dan Peaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evauasi dan Mediasi Sengketa	Terlaksananya pengawasan ormas	3	74.052.900	2	22.425.200	66,67	30,28	5	22.425.200	83,33	3,45	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah												
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA												
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan Budaya												
Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Teraciptanya hubungan yang harmonis antar Umat Beragama	3	123.153.150	3	64.165.500	100,00	52,10	3	64.165.500	25,00	5,58	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Peaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahan Ekonomi ,Sosi,Budaya dan Fasiitasi Pencegahan Penyaagunaan Narkotika,Fasiitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terawasinya aliran kepercayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai	2	74.996.900	2	13.261.300	100,00	17,68	2	13.261.300	33,33	1,26	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Peaksanaan Koordinasi di bidang ketahan ekonomi,sosia budaya dan Fasiitasi pencegahan	Terawasinya aliran kepercayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	125.922.000	1	118.284.387	100,00	93,93	1	118.284.387	16,67	11,27	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
penyaahgunaan Narkotika,Fasiitasi Kerukunan Umat Bergama dan Penghayat Kepercayaan di daerah												Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL												
Perumusan Kebijakan Teknis dan Peaksanaan Pemantapan Kewajiban Nasiona dan Penganan Konfik Sosia												
Pelaksanaan kebijakan di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Terkendalinya cegah dini konflik di Masyarakat	5	54.053.900	5	36.432.090	100,00	67,40	5	36.432.090	23,81	3,83	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan	Jumlah koordinasi bidang kebijakan dini daerah	10	55.818.000	7	41.178.760	70,00	73,77	7	41.178.760	70,00	4,33	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah												Masyarakat
Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Terpantauanaya tenaga kerja asing	4	54.799.800	4	28.560.920	100,00	52,12	4	28.560.920	16,00	2,86	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Peaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terpantauanaya tenaga kerja asing	4	177.309.800	4	86.708.551	100,00	48,90	4	86.708.551	13,33	7,23	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		86.841	1.044.075.400.697	76.073	866.923.864.890	87,60	83,03	191.199	1.808.675.557.944	32,88	52,44	

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan capaian kinerja yang kemudian dilakukan telaah lebih mendalam dengan perangkat daerah pengampu urusan, berdasarkan capaian tersebut menjadi catatan terhadap permasalahan yang akan ditarik dan didentifikasi pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

2.3.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya guru yang bersertifikat (sertifikasi) sekitar 29 persen.
2) Masih rendahnya guru yang memenuhi kualifikasi Pendidikan sarjana (strata 1) sekitar 52 persen.
3) Akses rumah menuju sarana Pendidikan yang berjauhan (letak geografis) dan tidak dapat ditempuh jalur darat.
4) Belum ada konsep pendidikan berasrama dalam upaya menjawab kondisi geografis Kepulauan Mentawai yang tersebar dengan akses layanan pendidikan yang terbatas.
5) Terbatasnya sarana tempat tinggal/ asrama untuk para peserta didik yang jauh dari orang tua/tempat tinggal.

6) Masih rendahnya tingkat partisipasi kesetaraan, masih sekitar 57 persen.
7) Belum memadainya kualitas dan ketersediaan sarana layanan dan fasilitas pendidikan.
8) Belum tersedianya asrama untuk sebagai tempat tinggal anak yang lokasi rumahnya jauh dari sekolah.
9) Masih lambatnya transformasi digital dalam implementasi proses belajar mengajar dan administrasi pendidikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan sarana layanan kesehatan, dan masih banyak masyarakat masih menggunakan dukun (sikerei)/ tenaga non kesehatan.
2) Masih rendahnya cakupan jaminan kesehatan khususnya masyarakat miskin yang memanfaatkan layanan kesehatan (sekitar 46 persen).
3) Masih terbatasnya ketersediaan layanan kesehatan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat dusun dengan kondisi geografis yang belum sepenuhnya dapat diakses jalur darat.
4) Belum adanya rumah sakit di setiap pulau besar (Siberut, Sikakap) sebagai bagian dari sistem kesehatan daerah.

5) Masih terbatasnya tenaga dokter umum, dokter spesialis dan alat-alat kesehatan hingga ke pusat-pusat layanan kesehatan di desa (Poskesdes).
6) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kasus penyakit menular dan tidak menular.
7) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya cakupan aksesibiltas jalan sebagai prasarana penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
2) Tingginya angka kemahalan kontruksi di Kepulauan Mentawai.
3) Tidak tersedianya material lokal sebagai bahan dasar pembangunan fisik (jalan dan jembatan) seperti batu, pasir, kerikil yang harus didatangkan dari luar Mentawai.
4) Belum terhubungnya akses darat (Jalan) Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, Pulau Pagai Selatan sebagai bagian dari sistem transportasi daerah.
5) Terbatasnya ruang pembangunan fisik di Kepulauan Mentawai dikarenakan sekitar 82 persen adalah Kawasan hutan.

6) Masih rendahnya keterjangkauan/cakupan pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) daerah yaitu sebesar 40,23 persen atau sekitar 13 desa.

7) Ketersediaan sanitasi rumah tangga belum menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh (ada 28 kawasan kumuh).

2) Masih rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

3) Masih banyaknya permukiman potensi bencana alam belum di relokasi.

4) masih terdapat kawasan permukiman masyarakat berada pada kawasan hutan.

5) Belum adanya hamparan lahan/tanah yang dikuasai pemerintah untuk kepentingan pembangunan, khususnya untuk menyediakan permukiman layak bagi masyarakat.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2) Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan masih terjadinya gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum.
3) Masih belum adanya strategi mitigasi bencana kebakaran, serta minimnya sarana prasarana pendukung pemadam kebakaran.
4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta alat peraga informasi kebencanaan.
5) Letak geografis yang kepulauan dan permukiman penduduk yang terpencar di setiap dusun dengan akses dan infrastruktur telekomunikasi yang terbatas menyulitkan dalam koordinasi dan pemberian layanan kebencanaan.
6) Pada umumnya kawasan permukiman masyarakat masih berada pada zona rawan bencana.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih belum maksimalnya pengelolaan dan *updating* data DTKS, masih terdapat *exclusion error* dan *inclusion error* data kemiskinan daerah.
2) Kurangnya penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana seperti lumbung sosial, dapur umum, peralatan dan perlengkapan kesiapsiagaan bencana.

2.3.1.2 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pengembangan dan pendampingan kewirausahaan (*entrepreneurship*) mulai dari hulunya pengembangan dan peningkatan kapasitas sampai pada hilirnya yaitu bisa mengembangkan usaha atau berwirausaha (mandiri).
2) Belum adanya rencana pembangunan tenaga kerja kabupaten.
3) Masih rendahnya kompetensi/skill tenaga kerja.
4) Masih terbatasnya akses pencari kerja terhadap lapangan pekerjaan.
5) Belum adanya pendampingan terhadap akses tenaga kerja dan *enterprenuer* ke dunia usaha, permodalan dan pasar.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya kontribusi alokasi anggaran dalam penguatan kabupaten layak anak dan gender.

2) masih rendahnya komitmen pemangku kepentingan (pimpinan perangkat daerah, desa) dalam mencanangkan dan menerapkan kabupaten layak anak.

3) Kurangnya keberdayaan ekonomi perempuan meliputi wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangakan usaha.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih tingginya ketergantungan pangan dari luar Mentawai.

2) Kebutuhan pangan masih terbatas pada pemenuhan pangan rumah tangga (sub sisten).

3) Masih perlu ditingkatkannya penganekaragaman pangan dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih terbatasnya luasan lahan yang dilakukan sertifikasi lahan melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) perwakilan Kepulauan Mentawai.

2) Mahalnya biaya operasional pengurusan sertifikasi lahan secara mandiri.

3) Belum tersedianya bank tanah yang digunakan sebagai wadah penyediaan tanah untuk pembangunan.

4) Masih rendahnya sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait alih fungsi lahan, pemanfaatan lahan pada kawasan dan proses redistribusi lahan baik itu program TORA, perhutanan sosial, hutan adat (Masyarakat Hukum Adat).

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum adanya tenaga atau sumber daya di bidang keahlian lingkungan hidup.

2) Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum taat melaksanakan ketentuan dalam peraturan bidang lingkungan hidup, sehingga berpotensi melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

3) Pengelolaan persampahan yang belum optimal karena tingkat layanan yang rendah masih di ibukota kabupaten (Tuapejat sekitarnya), sarana dan prasarana yang belum memadai dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah.

4) Masih terbatasnya aparatur dalam melakukan pengawasan, pengujian dan penegakan lingkungan hidup.

5) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Kondisi geografis yang sulit dengan akses yang terbatas sehingga memakan waktu dan biaya yang besar dalam menjangkau di setiap wilayah masyarakat.
2) Belum optimalnya penggunaan data kependudukan untuk perumusan kebijakan daerah (OPD).
3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Kematian, Akta Perceraian dan dokumen kependudukan lainnya.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat.
2) Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi desa (BUMDes) dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait keluarga berencana.
2) Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
3) Masih kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga.
4) Masih Kurangnya sosialisasi terkait kualitas dan ketahanan keluarga.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan seperti di pelabuhan, PJU, rambu-rambu.
2) Belum terbangunnya 5 pelabuhan penyeberangan sebagai simpul konektivitas sistem transportasi daerah.
3) Belum optimalnya pengelolaan pelayaran dalam wilayah kabupaten (antar pulau), masih terdapat wilayah khususnya di pantai barat yang belum mendapatkan layanan transportasi laut.
4) Masih terbatasnya jalur/trayek pelayaran menuju Kepulauan Mentawai akses masih 3 kali seminggu.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum adanya *grand design* pengembangan sistem informatika daerah yang mendukung penerapan SPBE.

2) Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika.
3) Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet
4) Belum optimalnya pelayanan, publikasi dan penyebarluasan informasi publik berbasis elektronik.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya koperasi yang aktif sekitar 20 persen.
2) Minimnya diversifikasi usaha koperasi.
3) Minimnya pelaku usaha mikro yang tumbuh menjadi wira usaha mandiri.
4) Masih rendahnya pendampingan kewirausahaan dan kepada pelaku usaha mikro.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan regulasi tentang Pemberian Kemudahan dan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal.
2) Sulitnya mengurus kerja sama atau pembebasan lahan untuk investasi disebabkan lahan berpotensi investasi pada umumnya adalah tanah adat/ulayat.
3) Belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha di daerah.

4) Belum lengkapnya data kajian terkait potensi dan peluang investasi.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya SDM keolahragaan.
2) Terbatasnya ruang kreatif untuk menumbuhkan talenta pemuda pada berbagai bidang.
3) Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi kepemudaan.
4) Masih minimnya event yang bermuatan kompetisi kepemudaan dan keolahragaan.
5) Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga.
6) Masih rendahnya pembinaan terhadap bibit atlet potensial dan pembinaan bagi atlet.
7) Masih rendahnya pembinaan/pelatihan terhadap pemuda/i untuk berwirausaha.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum defenitifnya SOTK yang mengurusi statistik daerah.
2) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah.
3) Belum terjalinnya kerjasama dengan lembaga statistik (BPS) dan lembaga lain penyedia data dalam mewujudkan satu data terintegrasi.

4) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
5) Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi secara optimal.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan sebagai layanan persandian dalam komunikasi dan pengamanan informasi perangkat daerah.
2) Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada pemerintah daerah.
3) Belum adanya SDM persandian yang kompeten dalam memastikan keamanan sistem infirmasi pemerintah daerah.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Rendahnya pengenalan dan pemahaman budaya daerah oleh kalangan muda.
2) Terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan sehingga belum terintegrasi dengan sektor lainnya.
3) Belum terselenggaranya event atraksi kebudayaan secara kontiniu.
4) Masih sedikitnya pengakuan dan penetapan cagar budaya.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum terdapatnya gedung perpustakaan daerah sebagai sarana layanan perpustakaan publik.
2) Masih terbatasnya sosialisasi dan penggunaan media sosial/elektronik dalam mengampanyekan budaya literasi.
3) belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat (Pengembangan perpustakaan berbasis digital/e-Book), pustaka keliling
4) Terbatasnya tenaga dan sumber daya perpustakaan.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah.
2) Terbatasnya tempat penyimpanan arsip, pengelola dan keamanan penyimpanan arsip.
3) Keterbatasan ketersediaan SDM pengelola kearsipan.

2.3.1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Urusan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan tangkap.

2) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budi daya.
3) Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan usaha kelompok (KUB, kelompok nelayan).
4) Terbatatasnya ketersediaan sarana dan prasarana perikanan (TPI dan pabrik es).
5) Masih rendahnya pendampingan bagi kelompok nelayan tangkap dan budi daya serta pendampingan pada industri pengolahan ikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pengembangan destinasi prioritas 3M1K.
2) Belum optimalnya pendampingan dan pembinaan desa wisata.
3) Masih minimnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyelenggarakan even/festival.
4) Promosi kepariwisataan masih belum efektif dan efisien.
5) Belum tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif menunjang pariwisata.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya tingkat pendapatan petani.
2) Belum optimalnya peningkatan produktifitas produksi pertanian.

3) Belum optimalnya pendampingan petani dan kelembagaan tani (kelompok tani).
4) Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pertanian (jalan pertanian, irigasi), sarana prasarana, lahan, pupuk dan air.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya penggunaan pasar sebagai sarana perdagangan.
2) Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan.
3) Minimnya SDM penera alat UTTP.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
2) Masih kurangnya sarana dan prasarana sentra IKM (revitalisasi IKM Taraet).
3) Belum optimalnya keterkaitan sektor pertanian dan perikanan dengan sektor industri pengolahan dan sektor industri lainnya.
4) Belum optimalnya pendampingan calon dan pelaku industri mikro dan kecil dalam hal bisnis proses, sertifikasi, manajemen mutu, akses pasar, permodalan.

2.3.1.4 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang

a. Unsur Penunjang Perencanaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah dalam penyusunan akuntabilitas kinerja.
2) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.
3) Masih rendahnya kapasitas fungsional perencana dalam Menyusun dokumen perencanaan.

b. Unsur Penunjang Keuangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.
2) Masih rendahnya kontribusi pendapatan daerah (pajak dan retribusi daerah) untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.
3) Belum teradministrasinya aset dengan baik.

c. Unsur Penunjang Kepegawaian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karier ASN.
2) Sistem penilaian kinerja ASN yang belum akurat.
3) Rendahnya kualitas dan produktifitas kerja ASN.
4) Belum terlaksana sepenuhnya merit sistem.
5) Masih terdapatnya ASN yang belum kompeten dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya.
6) Masih belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang berjenjang dan berkelanjutan.
7) Belum dilakukannya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan kepada ASN.

d. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum tersedianya tenaga/ SDM peneliti.
2) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan.
3) Masih kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4) Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam pemanfaatan kelitbangan dan berinovasi.

e. Unsur Penunjang Pengawasan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Perlunya peningkatan kualitas SDM auditor melalui pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian temuan yang ada serta peningkatan sosialisasi kepada penyelenggaraan negara terkait tertib administrasi keuangan.
2) Masih rendahnya penguatan tata kelola pemerintah melalui pendampingan reformasi birokrasi, penerapan ZI, WBK/WBBM, SAKIP dan berbagai penilaian tata kelola pemerintah lainnya.
3) Belum optimalnya peran dan layanan APIP pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

2.3.2. Evaluasi terhadap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs 2024

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah serangkaian tujuan global yang diadopsi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, sebagai agenda untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan hingga tahun 2030. SDGs ini terdiri dari 17 tujuan yang saling terkait, yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran. TPB/SDGs memiliki 17 tujuan dengan 2 diantaranya (TPB 7 dan TPB 14) tidak menjadi kewenangan daerah. 17 tujuan tersebut yaitu:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (tanpa kemiskinan).
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan (tanpa kelaparan).
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (kehidupan sehat dan sejahtera).
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (pendidikan berkualitas).
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan (kesetaraan gender).
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan (air bersih dan sanitasi layak).
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua (energi bersih dan terjangkau).
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi).
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (industri, inovasi dan infrastruktur).

10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara (berkurangnya kesenjangan).
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan (kota dan permukiman yang berkelanjutan).
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab).
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (penanganan perubahan iklim).
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan (ekosistem lautan).
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati (ekosistem daratan).
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediaan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh).
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (kemitraan untuk mencapai tujuan).

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebanyak 52 indikator atau dengan persentase 26,40%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS)

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	1.3.1.(a) = 3.8.2.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%		85%	69%	99%	99%	100%	SS
2.	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	-	-	-	-	26,0%	44,0 %	SS
3.	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.		63,80%	80,40%	83,40%	86,40%	63,20%	SS
4.	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	-	87%	87%	89%	81%	82%	SS
5.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada		0	0	0	3	3	SS
6.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan,	Meningkat		34,60%	38,40%	40,90%	38,00%	39,10%	SS

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
		kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.								
7.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	-	0,18%	0,17%	0,17%	0,14%	0,16%	SS
8.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	16 /100.000 KH	191 Jiwa	356 Jiwa	207 Jiwa	191 Jiwa	304 Jiwa	SS
9.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	-	94%	96%	97%	96%	93%	SS
10.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	-	0	0	0	0	0,04 %	SS
11.	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	76	219	87	88	143	162	SS
12.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	-	204	59	40	124	27	SS
13.	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	-	99,94	90,72	96	96,03	92,4	SS
14.	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%		0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	SS
15.	3.8.2.(a) = 1.3.1.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	-	85%	69%	99%	99%	100%	SS

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
16.	4.6.1.(a) = 4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%		99,51	98,1	98,76	98,76	99,66	SS
17.	4.6.1.(b) = 4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat		99,51	98,1	98,76	98,76	99,66	SS
18.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat		100%	100%	100%	100%	100%	SS
19.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	-	-	365	365	404	438	SS
20.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	-	-	-	-	0,003%	0,006%	SS

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
21.	5.2.1.(a) = 5.2.1*	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%		0,20%	0,10%	0,20%	0,20%	0,10%	SS
22.	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	-	100%	100%	100%	100%	100%	SS
23.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	-	66%	64%	67%	60%	65%	SS
24.	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat		-	0,73%	1,43%	2,55%	-	SS
25.	5.b.1* = 9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat		45,11%	54,35%	64,25%	65,50%	65,50%	SS
26.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	-	71,10	78,90	72,00	72,60	73,30	SS
27.	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat		64,3	71,7	63,1	65	65,9	SS
28.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	-	50.622,7	55.105,2	54.034,8	54.691,7	57.317,6	SS
29.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	-	3	4,1	2,9	1,4	1,3	SS
30.	8.7.1*	Persentase dan jumlah anak usia 15-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur	meningkat		3,4 %	1,87 %	7,44 %	1,86 %	5,43 %	SS

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
		berdasarkan International *Conference of Labour Statisticians*								
31.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%		0,8	0,76	0,81	0,84	0,87	SS
32.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat		34	18	47	28	70	SS
33.	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat dalam Km)		5	5	5	5	5	SS
34.	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Meningkat		35%	35%	35%	35%	50%	SS
35.	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan .	Meningkat	-	7	7	7	7	8	SS
36.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	28%	2,33%	2,42%	2,57%	2,48%	2,45%	SS
37.	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	-	2,2%	2,3%	2,4%	-	-	SS
38.	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	-	115,8%	123,8%	99,6%	110,4%	100,3%	SS
39.	9.c.1.(a) = 5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat		45,11%	54,35%	64,25%	65,50%	65,50%	SS
40.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	ada	-	10	10	10	10	10	SS
41.	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	-	0	0	0	3	3	SS
42.	13.1.1* = 11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat	Ada	ada	0	0	0	3	3	SS

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
		nasional dan daerah.								
43.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	Menurun	0	0	0	0	0	SS
44.	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	Menurun	0	0	0	0	0	SS
45.	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	-	0,17%	0,18%	0,24%	0,17%	0,08%	SS
46.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 40	Meningkat 60 %	0	0	71,74	67,25	68,18	SS
47.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	-	90,8%	78,4%	91,4%	87,2%	88,9%	SS
48.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/ Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten :60%, Kota: 65%	-	WTP	WDP	WDP	WTP	WDP	SS
49.	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/ Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten /Kota: 50%	-	61,97 (B)	63,60 (B)	63,94 (B)	64,56 (B)	65,21 (B)	SS

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
50.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	-	78%	79%	82%	84%	87%	SS
51.	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	-	87%	87%	89%	91%	91%	SS
52.	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	SS

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target (SB) di Kabupaten Kepulauan Mentawai ditemukan sebanyak 64 indikator atau dengan persentase 32,49%. Capaian dengan kategori SB ini lebihh tinggi dari kategori SS kemungkinan disebabkan oleh beberapa factor antara lain; kondisi social budaya masyarakat di kabupaten kepulauan Mentawai yang sebagian masih teguh dalam memegang kebiasaan tradisional yang mereka anut sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan berbagai jenis program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan masalah Kesehatan, Pendidikan dan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (SB)

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	-	13,22 %	13,37 %	14,31 %	13,74 %	13,72 %	SB
2.	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	99,50%	-	-	-	-	57%	SB
3.	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SB
4.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%		-	-	-	-	33%	SB
5.	1.4.1.(c) = 3.7.1.(a)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	-	-	-	-	-	54,80%	SB
6.	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	-	96,91%	90,45%	89,66%	87,77%	88,74%	SB
7.	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	-	97,48%	76,97%	62,90%	60,92%	60,77%	SB
8.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak	Menurun		-	9732	1124	6240	11229	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
		bencana per 100.000 orang.								
9.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah		10	3	5	9	12	SB
10.	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu		6	349	214	47	14	SB
11.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah / Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450		10	3	5	9	12	SB
12.	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6		189,6	189,6	169,42	152,96	162,58	SB
13.	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun		0	0	Rp 93.000.000	Rp 190.000.000	0	SB
14.	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	2,1 %	0	0	0	0	96 %	SB
15.	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	-	15,80%	15,80%	16%	16,28	16,28	SB
16.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan	Menurun		9,50%	8,10%	7,80%	10,40%	11,80%	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
		tipe.								
17.	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%		15%	13%	12%	18%	10%	SB
18.	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	-	-	1,14	1,13	1,03	1,55	SB
19.	3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	-	-	-	-	-	33%	SB
20.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	-	28,1	23,8	28,3	24,2	29,8	SB
21.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	-	11,5	14,3	14,7	11,5	15,2	SB
22.	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	-	25	20,2	24,9	20,4	27,3	SB
23.	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	-	63,8	80,4	83,4	86,4	63,2	SB
24.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%		-	-	42,55%	18,72%	46,26%	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
25.	3.7.1.(a) = 1.4.1.(c)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%		-	-	-	-	54,80%	SB
26.	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	-	-	-	-	14,30%	17,40%	SB
27.	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	-	0	0	55,20%	54,50%	54,10%	SB
28.	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	-	0,0	-	47%	41%	41%	SB
29.	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	-	117,47%	112,33%	110,24%	106%,29	107%.95	SB
30.	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	-	139,03	119,41	90,9	89,16	104,31	SB
31.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	-	60%	34%	25%	27%	28%	SB
32.	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Meningkat menjadi 36,73 %	60%	0	34%	25%	27%	28%	SB
33.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	-	0	1	1	2	6	SB
34.	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun)	Menurun		17%	14%	18%	17%	60%	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
		mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.								
35.	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun		66	64	67	60	65	SB
36.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat		5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	SB
37.	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%		-	-	-	-	26%	SB
38.	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%		65%	73%	43%	25%	47%	SB
39.	6.1.1.(a) = 1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	-	46,9%	55,7%	58,9%	63,7%	66,5%	SB
40.	6.1.1.(c) = 6.1.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	-	46,90%	55,70%	58,90%	63,70%	66,50%	SB
41.	6.3.2.(a) = 6.6.1.(a)	Kualitas air sungai, danau, air permukaan lainnya.	Meningkat		59	0	70	70	63,33	SB
42.	6.3.2.(b) = 6.3.2.(a)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat		59	0	70	70	63,33	SB
43.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	-	6,52	6,11	2,66	10,71	7,03	SB
44.	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta		50,12	53,19	54,60	60,44	64,70	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
45.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	99,50%	0,013	0,012	0,005	0,021	0,013	SB
46.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	-	28,9	21,1	28,0	27,4	27,5	SB
47.	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun		69,9	78,9	72	72,6	70,2	SB
48.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)		7899	1187	854	6052	7556	SB
49.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat		16	16	15	15	15	SB
50.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat	-	-	0,09%	0,002%	0,02%	0,01%	SB
51.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	0,290-0,320	0,34	0,27	0,32	0,23	0,26	SB
52.	10.1.1.(a) = 1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	0,5-0,8 persen	13,22%	13,37%	14,31%	13,74%	13,72%	SB
53.	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Meningkat	-	0,25%	-1,85%	-	-	-	SB
54.	10.4.1.(b) = 1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	99,50%	0	0%	0%	0%	57%	SB
55.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per	Menurun	-	5	9732	1124	6243	11229	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
		100.000 orang.								
56.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	-	189,6 %	189,6 %	169,42 %	152,96 %	162,58 %	SB
57.	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	Menurun menjadi 0,11%	0	0	Rp 93.000.000	Rp 190.000.000	0	SB
58.	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat	Meningkat	-	-	-	1	1	SB
59.	13.1.2* = 11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Menurun	5	9.732	1.124	6.243	11.229	SB
60.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	Meningkat	0	0	1	0	0	SB
61.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	-	0,13%	0,29%	0,34%	0,28%	0,21%	SB
62.	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi menjadi 80%	-	0	0,0%	0,0%	0,0%	21,1%	SB
63.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	-	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
64.	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	-	0	3,3%	6,7%	6,7%	6,7%	SB

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB) di Kabupaten Kepulauan Mentawai ditemukan sebanyak 24 indikator atau dengan persentase 12,18%. Capaian dengan kategori BB ini cukup signifikan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti belum adanya kegiatan hilirisasi dari produk pertanian sehingga tidak memberikan nilai tambah terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Disamping itu, tingkat resistensi masyarakat dalam mengubah pola hidup dan pola makan juga sangat berdampak terhadap status TPB, seperti adanya anggapan bahwa merokok merupakan suatu yang sangat dibutuhkan sehingga dianggap obat. Kondisi geografi yang merupakan kepulauan juga menjadi kendala tersendiri dalam melakukan pemantauan terhadap berbagai jenis program pemerintah akibat jarak yang berjauhan dan kondisi transportasi yang belum memadai dan sangat mahal. Belum meratanya ketersediaan berbagai fasilitas umum seperti pasar dan sekolah ikut memperburuk tingkat capaian TPB/SDGs di Kabupaten Kepulauan Mentawai, akibat rendahnya minat masyarakat untuk

menyekolahkan anak mereka dan juga rendahnya minat guru untuk ditempatkan di berbagai sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (BB)

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No indikator	Nama indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/ tahun	-	0	0	0	0	0	BB
2.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	-	0	0	0	0	0	BB
3.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	-	0	0	0	0	0	BB
4.	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten /kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280	-	0	0	0	0	0	BB
5.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP /kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) hitungan Matematika	Meningkat		0	0	0	0	0	BB
6.	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	-	0	0	0	0	0	BB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No indikator	Nama indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
7.	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	-	0	0	0	0	0	BB
8.	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten /kota.	-	0	0	0	0	0	BB
9.	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	-	0	0	0	0	0	BB
10.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten /kota	-	0	0	0	0	0	BB
11.	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.	ada		0	0	0	0	0	BB
12.	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten (skala nasional)	-	0	0	0	0	0	BB
13.	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	-	0	0	0	0	0	BB
14.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 70%	Meningkat menjadi 100%	0	0	0	0	0	BB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No indikator	Nama indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
15.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat / ada	-	0	0	0	0	0	BB
16.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	100%	0	0	0	0	0	BB
17.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	35%	0	0	0	0	0	BB
18.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	Meningkat	0	0	0	0	0	BB
19.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Meningkat	Meningkat	0	0	0	0	0	BB
20.	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	Meningkat 80 %	0	0	0	0	0	BB
21.	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	-	0	0	0	0	0	BB
22.	16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	ada	-	0	0	0	0	0	BB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No indikator	Nama indikator			2020	2021	2022	2023	2024	
23.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	-	0	0	0	0	0	BB
24.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	18-20%	0	0	0	0	0	BB

2.3.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 6 (enam) pelayanan dasar sebagaimana amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada tahun 2024, seluruh Jenis Pelayanan Dasar dapat terlaksana dengan baik dengan pencapaian setiap indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69
Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pendidikan Anak Usia Dini	3.678	2.075	56,42
2	Pendidikan Dasar	18.260	17.351	95,02
3	Pendidikan Kesetaraan	1.984	1.609	81,10

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Pendidikan tahun 2024 antara lain:

a. Aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dinilai belum maksimal. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini masih rendah yaitu 35,76 persen.
b. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang sekolah dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi.
c. Masih kesulitan untuk mendapatkan data pendidikan (peserta didik tidak mampu (miskin), pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah satuan pendidikan, ruang kelas, jumlah rombongan belajar, jumlah sekolah berakreditasi).
d. Belum maksimalnya kinerja Tim penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan begitu juga dengan pembinaan kepada OPD pengampu SPM.

Tabel 2.70
Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.899	1.899	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.544	1.544	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.363	1.363	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	4.951	4.951	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	13.345	13.345	100%
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11.993	8.447	70,43%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	10.852	8.021	73,91%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.977	2.699	90,66%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	200	177	88,5%
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	43	40	93,02%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.470	1.753	70,97%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	2.807	2.678	95,40%

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2024 yakni :

a. Masih banyak remaja usia produktif belum merasa perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan remaja sehingga partisipasi kunjungan ke layanan kesehatan masih rendah.
b. Aksesibilitas kunjungan layanan kesehatan hingga ke dusun yang masih terbatas dan memerlukan biaya yang mahal menjadi kendala melakukan layanan kesehatan luar gedung untuk pelayanan kesehatan khususnya untuk penduduk usia lanjut.
c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya khususnya yang terindikasi TBC ke layanan

kesehatan. Pada umumnya masyarakat malu dan merasa menjadi perhatian masyarakat jika didiagnosa mengidap penyakit TBC.

Tabel 2.71
Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI MENTAWAI	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	28.242	13.637	14.605	48,29
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	28.242	6.758	21.484	23,93

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2024 yakni :

a. Belum maksimalnya kinerja pengelolaan air minum pada SPAM yang tersedia.
b. Jaringan SPAM yang tersedia sudah banyak yang rusak (bocor) sehingga perlu pemeliharaan atau pembangunan dengan biaya yang relatif mahal.
c. Pengelolaan BPSPAM/KPSPAM belum maksimal sehingga jaringan air bersih skema Pamsimas belum dapat dinikmati oleh masyarakat.
d. Sebaran rumah masyarakat yang membutuhkan sanitasi terpencar sehingga membutuhkan operasional yang besar dalam pembangunan sanitasi dalam kawasan permukiman.

e. Spesifikasi teknis pembangunan sanitasi rumah tangga yang belum memenuhi kebutuhan sanitasi masyarakat.

f. Pola hidup masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sanitasi (jamban) dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.72
Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	144	144	-	100
2	Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	10	10	-	100

Capaian penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana adalah 100 persen karena tidak ada bencana alam dan melanjutkan program rehabilitasi rumah korban bencana di Desa Muara Sikabaluan (20 unit), Monganpoula (10 unit), Sirilogui (10 unit), Simalegi (40 unit), Cimpungan (31 unit), Muntei (33 unit). Begitu juga dengan capaian penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah adalah 100 persen karena sudah melakukan identifikasi dan pendataan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah di Desa Tuapejat (10 unit).

Tabel 2.73
Realisasi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET PELAYANAN SPM	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	88.389	88.389	-	100
2	Pelayanan informasi rawan bencana	17.678	17.443	235	98,67
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	17.678	17.443	235	98,67
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	8.981	8.981	-	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	17.425	16.600	825	95,27

Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2024 adalah :

a. Masih kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal pada mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum.
b. Dalam pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bahwa Satpol PP mengalami kekurangan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana yang ada.
c. Masih terdapatnya perbedaan pemahaman dan persepsi tentang pedoman perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pelaporan standar pelayanan minimal antar pihak yang berkepentingan.

Tabel 2.74
Realisasi Capaian SPM Bidang Bidang Sosial Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET PELAYANAN SPM	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	469	469	-	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	123	123	-	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	2.552	2.552	-	100
4	Rehabilitasi Sosial dasar Tuna sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	2	2	-	100
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap Darurat dan Pasca Bencana bagi korban bencana	-	-	-	

Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial tahun 2024 adalah :

a. Kendala dalam pengumpulan data diantaranya cakupan wilayah yang luas dan berbentuk kepulauan sehingga harus dijangkau menggunakan transportasi antarpulau. Selain itu juga terdapat kendala terkait akses ke daerah yang cenderung terpelosok dan jumlah personil yang masih kurang cukup.
b. Berdasarkan data yang dihimpun, seharusnya masih banyak penerima pelayanan dasar di luar target yang benar-benar membutuhkan bantuan pelayanan dasar namun tidak sejalan

dengan anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi pelayanan dasar terhadap semua klaim luar panti.

c. Sarana dan prasarana yang seharusnya aktif namun sedang dalam kondisi kurang aktif saat ini seperti puskessos di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurang mendukung terealisasinya pelayanan dasar di masyarakat.

2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

1. Isu Global

Isu global yang menjadi perhatian daerah adalah penuntasan pencapaian *Sustainable Development Goal's* (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan komitmen baru oleh berbagai negara dengan menargetkan 3 tujuan mulia yang dicapai ditahun 2030 yakni mengakhiri kemiskinan, mengatasi dan menekan kesenjangan, serta mengatasi perubahan iklim. TPB/SDG's bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas

lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak meninggalkan satu orangpun (*No-one Left Behind*) merupakan Prinsip utama SDG's. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDG's harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan keadilan subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal. TPB/SDG's merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1) Tanpa Kemiskinan;
2) Tanpa Kelaparan;
3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4) Pendidikan Berkualitas;
5) Kesetaraan Gender;
6) Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7) Energi Bersih dan Terjangkau;
8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10) Berkurangnya Kesenjangan;
11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;

12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;

13) Penanganan Perubahan Iklim;

14) Ekosistem Lautan;

15) Ekosistem Daratan;

16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;

17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

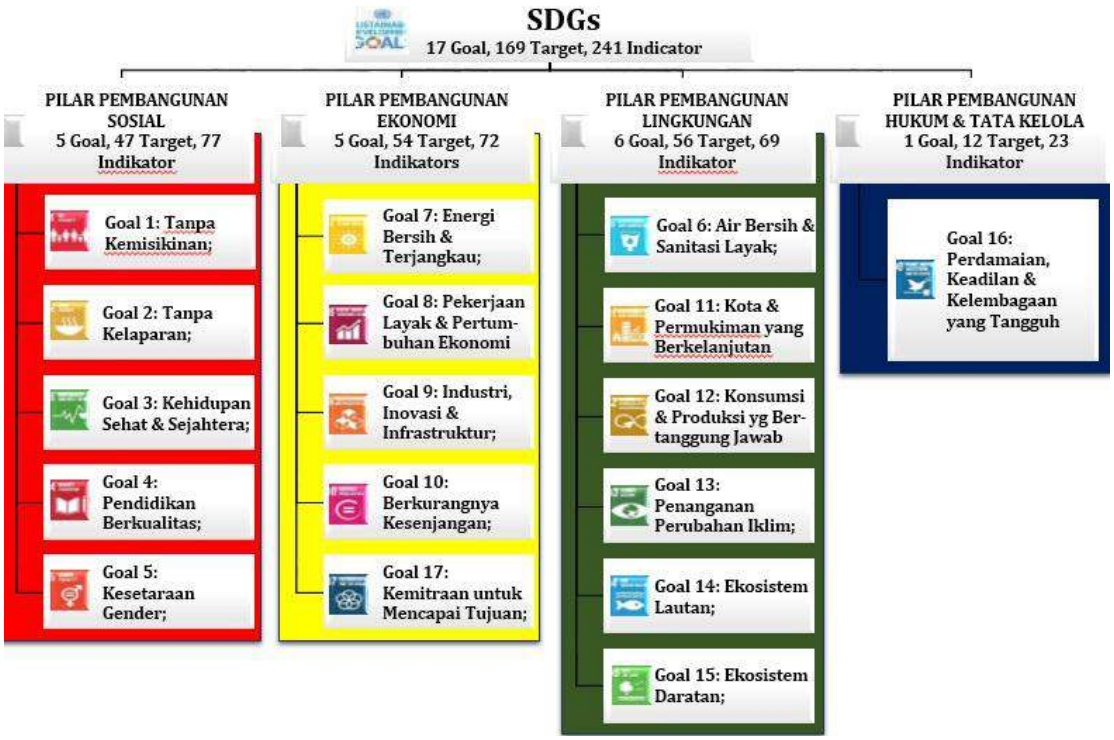
Gambar 2.35
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sebagai upaya dalam mengimplementasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selayaknya DNA SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk

memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan.

Gambar 2.36
Konektivitas Antar Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



2. Isu Nasional

Industri 5.0

Kesiapan Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dan memasuki industri 5.0 turut menjadi perhatian. Kemampuan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi dan infrastruktur telekomunikasi menjadi indikator kematangan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era industri 5.0.

Kekhawatiran tersebut tidaklah tanpa alasan, sebab sektor industri di Indonesia masih belum mendekati Industri 5.0, contoh saja pada industri agraris, masih ada petani menggunakan

cangkul, walaupun beberapa daerah petaninya sudah memasuki Industri 5.0, tidak semua petani menguasai komputer/gadget, selain itu, masalah lainnya terletak pada banyaknya penduduk Indonesia yang tidak memiliki SDM memadai, karena diperkirakan dengan masuknya industri ini akan memangkas tenaga manusia dengan kemampuan SDM rendah dan kemungkinan meningkatkan angka pengangguran. Revolusi Industri 5.0 lebih menitikberatkan pada integrasi antara teknologi canggih seperti AI, IoT, dan teknologi robot teknologi dengan keahlian manusia dan inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem produksi yang lebih adaptif terhadap perubahan permintaan pasar, lebih berfokus pada pengalaman pelanggan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas. Secara keseluruhan, Revolusi Industri 5.0 diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi industri, pelanggan, pekerja dan masyarakat pada umumnya, seperti meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keamanan produksi, serta menciptakan peluang kerja baru dan mengurangi dampak lingkungan yang negatif.

Manfaat yang dirasakan dari industri 5.0 diprediksi tidak hanya sekadar peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya saja. Ketika sebuah proses otomasi dapat mengurangi waktu dari pekerjaan yang repetitif, para karyawan dapat fokus pada

pekerjaan strategis sehingga menciptakan sebuah sebuah pekerjaan dengan kebutuhan skill yang tinggi. Berikut adalah beberapa keuntungan lainnya.

a. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas

   Revolusi Industri 5.0 akan memungkinkan peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai industri dengan otomatisasi proses dan penggunaan teknologi baru seperti pemanfaatan AI dan analisis data. Misalnya saja pada bidang HR, pemanfaatan teknologi HRIS memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan data perusahaan. Hal ini dapat memudahkan perusahaan dalam pengelolaan data karyawan dan juga inventaris dalam satu platform yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun.

b. Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan

   Dengan menggunakan teknologi canggih, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat posisi mereka di pasar.

c. Peningkatan Fleksibilitas Produksi

   Revolusi Industri 5.0 akan memungkinkan perusahaan untuk memproduksi produk yang lebih beragam dan menyesuaikan permintaan pasar dengan cepat.

d. Peningkatan Keselamatan Kerja

Perkembangan teknologi menuju era 5.0 akan memungkinkan adanya penggunaan robot dan teknologi canggih lainnya untuk mengurangi risiko kecelakaan dan cedera di tempat kerja.

e. Peningkatan Keberlanjutan

Inti dari era 5.0 adalah membantu perusahaan lebih peduli terhadap lingkungan. Hal ini dapat dimulai dengan menggunakan teknologi energi hijau dan proses produksi yang lebih efisien dan bertanggung jawab tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga dampaknya pada lingkungan.

f. Peningkatan Daya Saing

Dengan menerapkan teknologi canggih dan proses produksi yang lebih efisien, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global dan memperluas pangsa pasar mereka. SDM yang ada juga dituntut untuk terus meningkatkan skill mereka sehingga mereka tidak hanya mengerjakan pekerjaan repetitif, tapi juga mampu memiliki pemikiran strategis untuk tingkatkan performa.

g. Peningkatan Kualitas Hidup

Revolusi Industri 5.0 dapat membantu memperbaiki kualitas hidup manusia dengan meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, serta memungkinkan pengembangan kota cerdas atau *smart island* yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pemilu Serentak (4 Periodisasi)

Pelaksanaan pemilu serentak menjadi bagian penting dalam dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Pesta demokrasi ini menjadi perhatian serius dalam menjaga situasi stabilitas sosial, politik dan ekonomi masyarakat, persiapan penyelenggaraan bahkan gejolak sosial dan politik masyarakat tentunya akan dan sudah mulai terasa sebelum dilaksanakannya pemilu, begitu juga untuk periodisasi pemilukada dengan atmosfer sosial ekonomi yang akan menyita perhatian publik. Peningkatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kampanye politik turut memberikan sumbangsih pada perekonomian. Perilaku pelaku usaha dan investor serta sentimen pasar juga berperan memengaruhi perekonomian di tahun politik. Kondisi ini akan memberikan dampak secara makro pada pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional bahkan tingkat daerah.

Selain potensi pertumbuhan ekonomi yang positif dikarenakan meningkatnya aktivitas dan pengeluaran masyarakat/ lembaga, yang perlu menjadi perhatian adalah situasi keamanan dan ketertiban menjelang pesta demokrasi berlangsung. Politik identitas yang menjadikan terjadinya dikotomi masyarakat akan menjadi ruang perbedaan yang dirancang akan menjadi isu besar yang harus dapat dikendalikan akan tidak melebar menjadi permasalahan yang menyebabkan keamanan dan ketertiban terganggu. Politisasi SARA bisa memperbesar potensi

hambatan lain, terutama konflik horizontal, ketika itu terjadi, masyarakat akan makin terpecah dan tidak baik bagi penyelenggaraan pemilu, terutama dalam upaya konsolidasi demokrasi dan persatuan bangsa.

3. Isu Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Pembangunan Manusia yang Holistik

Manusia menjadi aset yang paling berharga dan sangat penting bagi pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadi sebuah kepastian akan meningkatkan dan mensejahterakan manusia. Pembangunan manusia dapat dilakukan pada dimensi pendidikan, kesehatan, budaya dan pengembangan ekonomi.

Pada dimensi pendidikan, pembangunan harus memastikan bahwa akses layanan pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, tanpa memperhatikan gender dan memperhatikan masyarakat yang memerlukan perhatian khusus (penyandang disabilitas), dan berpihak pada masyarakat rentan/miskin/miskin ekstrem. Penyediaan sarana

dan prasarana utama pendidikan yang menjadi tantangan karena Kepulauan Mentawai yang luas, begitu juga dengan karakteristik wilayah dan permukiman masyarakat yang tersebar di mana akses transportasi darat belum ada dan layanan pendidikan terdekat belum tersedia sehingga masyarakat harus berpikir untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan baik SD, SMP maupun SMA. Begitu juga dengan dalam hal pemerataan penguasaan bidang sains dasar, bahasa dan matematika. Ini membawa akibat pada keberlanjutan pendidikan yang terhambat pada masalah mutu. Kemampuan literasi dan numerasi yang masih rendah sehingga memerlukan strategi khusus untuk mengatasinya. Di sisi lain, dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing sedangkan masyarakat Mentawai didominasi dengan mata pencarian di sektor primer akan sulit untuk melanjutkan pendidikan di jenjang S1 ataupun diploma (vokasi) sehingga butuh intervensi yang terukur pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia.

Pada dimensi kesehatan, akses layanan kesehatan, alat kesehatan dan ketersediaan tenaga medis masih menjadi perhatian kedepan. Sistem kesehatan daerah dengan konsep kepulauan mengharuskan adanya rumah sakit rujukan yang berkualitas dan representatif di setiap pulau besar seperti di Pulau Siberut (RS Pratama Siberut) yang sudah dibangun, di Pulau

Sipora (RSUD Tuapejat) dan di Pulau Pagai Utara Selatan, ini menjadi kebutuhan utama dalam konektivitas layanan kesehatan daerah. Begitu juga dengan kelangkaan tenaga medis, khususnya dokter spesialis untuk penanganan penyakit tertentu menjadi tantangan ke depan dan berbagai inovasi-inovasi layanan kesehatan akan muncul untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Tantangan kedepan dalam pembangunan manusia adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat tingginya angka *stunting* daerah. Permasalahan gizi juga berdampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu masih tingginya prevalensi anak balita pendek (*stunting*). *stunting* adalah sebuah kondisi berdasarkan pengukuran Tinggi Badan menurut Umur seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan yang seusianya berdasarkan standar yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 (dua) tahun. Dalam jangka pendek, *stunting* menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme karena pengasuhan dan praktik pemberian makanan pendamping ASI yang belum lengkap, selain dari masalah rendahnya imunisasi lengkap dan sanitasi. Dalam jangka panjang, *stunting* menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual dan akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Pembangunan manusia kedepan akan diperhadapkan pada eksistensi dan pola hidup yang modern sehingga potensi kehilangan jati diri, budaya, nilai-nilai luhur, kearifan lokal akan sangat besar. Pembangunan kebudayaan sudah mulai sedini mungkin menjadi bagian pembangunan manusia baik di tingkat pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA bahkan di jenjang perguruan tinggi. Pembangunan kebudayaan ke depan akan menjadi bagian dari pembangunan manusia dengan elaborasi kebijakan yang inklusif yang non-diskriminatif, ramah pada penyandang disabilitas, tidak membeda-bedakan (gender) berdasarkan partisipasi masyarakat lokal dan unsur-unsur nilai kebudayaan.

Pembangunan harus menjadikan manusia sebagai subjek yang produktif. Menciptakan wira usaha (*enterprenuer*) bukan sekadar melakukan pelatihan atau memberikan sarana dan prasarana latihan, namun hal yang lebih bernilai adalah eksistensi, konsistensi dan kontiniunitas wira usaha atau pelaku usaha dalam mengembangkan potensinya. Pendampingan calon pelaku usaha/ wira usaha di Kepulauan Mentawai harus dilakukan, stigma terhadap memulai usaha harus memiliki modal dana yang besar menjadi alasan utama masyarakat sulit untuk mengembangkan diri. Pemanfaatan teknologi informatika menjadi tantangan dan peluang dalam memulai dan mengembangkan peluang usaha sehingga diperlukan inovasi pendampingan calon wira usaha mulai dari hulu peningkatan kapasitas/ pelatihan,

bisnis proses, hingga dihilirnya yaitu pangsa pasar yang tersedia menjadi proses yang satu kesatuan dalam pendampingan ke depan.

Tingkat Kemiskinan yang Tinggi

Salah satu indikator ditetapkannya Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah tertinggal adalah karena tingkat kemiskinannya yang sangat tinggi yaitu 13,89 persen pada tahun 2024. Penurunan tingkat kemiskinan ini masif relatif lambat, jika dibandingkan capaian tingkat kemiskinan tahun 2023 sebesar 13,72 persen. Akar masalahnya pada produktivitas rendah, dan kesalahan dan kebiasaan dalam pola konsumsi (masalah rokok) yang menyebabkan proses investasi pada rumah tangga relatif rendah. Penanganan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya sektor sosial saja, penyelesaiannya harus terintegrasi dan terpadu (lintas sektor) dengan basis data yang akurat dan tepat sasaran. Penuntasan atau pengurangan kemiskinan menjadi tujuan dan cita-cita pembangunan daerah, program pembangunan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan daya beli dan mengurangi beban hidup masyarakat miskin menjadi pilihan terbaik dalam mengentaskan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di Kepulauan Mentawai. Penduduk dengan tingkat pendidikan rendah bahkan tidak atau belum menempuh jenjang sekolah sangat rentan terhadap gejolak sosial ekonomi yang menjadikannya miskin. Masyarakat Mentawai dengan

lapangan pekerjaan utama didominasi pada sektor pertanian yaitu 66,45 persen atau sebanyak 31.504 jiwa sangat rentan terhadap gejolak sosial ekonomi yang terjadi. Oleh karena itu melalui program pemerintah dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat untuk menjaga daya beli adalah melalui pemberian jaring pengaman sosial.

Kemiskinan akan sangat dekat kaitannya dengan rendahnya partisipasi sekolah dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu kemampuan dan kemauan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok khususnya ketercukupan asupan gizi menjadi hal yang akan sulit dipenuhi jika masyarakat atau keluarga tersebut dalam keadaan miskin. Prevalensi *stunting* sebagai indikator untuk melihat permasalahan kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sangat rentan terjadi pada masyarakat atau keluarga miskin, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Dengan capaian prevalensi *stunting* Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 sebesar 33,7 persen menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan menjadi isu strategis dalam pembangunan manusia kedepan.

Hilirisasi Komoditi Sektor Primer

Reformasi struktur ekonomi daerah dari yang bertumpu pada sektor primer (*raw material*) ke sektor perdagangan/jasa atau

pada sektor industri. Kepulauan Mentawai dengan potensi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang besar dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi (tren pertumbuhan ekonomi stagnan) sehingga permasalahan pembangunan seperti pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan dapat diatasi. Hilirisasi penting dilakukan untuk memperbaiki produktivitas dan peningkatan daya saing. Hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pengembangan BUMD/BUMDes dan Koperasi yang siap sebagai pelopor pembangunan ekonomi di daerah dan di desa, ini yang harus diseriusi dan dipastikan bertumbuh. BUMD fokus pada skala lebih besar dan BUMDes pada skala desa, keduanya mendorong peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan pemanfaatan potensi lokal. Begitu juga dengan koperasi yang memiliki peran penting dalam kemajuan daerah dan desa, yaitu dengan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan, pelatihan, dan pendampingan, serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum

Pengembangan Pariwisata Mentawai

Sebagai destinasi pariwisata yang telah dikenal hingga mancanegara, tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan segala sumber daya baik itu amenitas,

aksesiblitas, atraksi, sumber daya manusia, dan menjaga kelestarian kawasan destinasi. Menjadi bagian dari destinasi prioritas yang telah ditetapkan, Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berbenah dalam mempersiapkan destinasi kawasan pariwisata dengan menjalin kerjasama/ kolaborasi di setiap sektor baik di internal pemerintah daerah maupun di luar pemerintah daerah, pihak swasta, pelaku ekonomi kreatif, investor. Selain itu pendampingan kawasan desa wisata yang bagian terintegrasi dengan pengembangan destinasi pariwisata prioritas daerah menjadi hal penting dilakukan agar citra dan *length of stay* semakin baik, begitu juga dengan pengalaman (*experience*) lebih bermakna.

Aksesibilitas dan Infrastruktur Publik

Sebagai prasyarat pembangunan dan kemajuan daerah, pembangunan infrastruktur dasar dan publik menjadi unsur utama yang harus disediakan. Dengan adanya infrastruktur jalan akan mengurangi biaya (*cost*), memaksimalkan efisiensi dan efektivitas, mempercepat layanan, meningkatkan produktivitas dan mempercepat reformasi struktur ekonomi daerah. Sebagai daerah kepulauan, tantangan aksesibilitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada dua, yaitu di sisi darat adalah pembangunan jalan disepanjang pulau dengan terhubung pada setiap pelabuhan penyeberangan (*hub*) di setiap ujung pulau dan disisi laut tersedianya sarana penyeberangan kapal antar pulau.

Keadaan ini menjadi tantangan dikarenakan kondisi jalan yang tersedia/terbangun (trans Mentawai) dengan persentase yang masih rendah, begitu juga masih terdapat setidaknya 4 pelabuhan penyeberangan yang harus dibangun serta kapal penyeberangan antar pulau yang memadai belum tersedia. Infrastruktur publik yang menjadi perhatian khusus dalam memberikan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau antara lain penyediaan air bersih, sanitasi, pengelolaan persampahan, listrik, dan transportasi menjadi stimulus pengembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Begitu juga dengan infrastruktur telekomunikasi yang sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat turut menjadi perhatian khususnya dalam pengembangan investasi rumah tangga dan sosial budaya masyarakat. Namun di sisi lain, edukasi pemanfaatan teknologi perlu dilakukan pencegahan dampak negatif teknologi terhadap degradasi keberlangsungan mutu manusia.

Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seiring dengan tuntutan pengelolaan pemerintahan yang baik/*good governance,* maka sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah

perlu melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi meliputi usaha pembenahan pada delapan area perubahan yaitu area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan Sistem Manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbaikan terhadap delapan area tersebut masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan implementasi reformasi birokrasi yang ditandai dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi.

Perwujudan birokrasi kelas dunia menjadi faktor determinan yang perlu bersama-sama kita akselerasi implementasinya, sehingga memastikan adanya perubahan *mindset* dan *cultural set* ASN sebagai komponen utama mesin birokrasi. Pembangunan sumber daya manusia ASN Unggul, yang antara lain dicirikan dengan SDM yang memiliki jiwa pekerja keras, bekerja *smart*, dinamis, adaptif dan agile serta terampil menguasai IT, memiliki kapabilitas dan integritas serta komitmen kerja yang tinggi.

Penataan kelembagaan diperlukan adanya transformasi kelembagaan melalui penyederhanaan birokrasi, melalui pengintegrasian kelembagaan dan organisasi yang memiliki kemiripan tugas pokok dan fungsi, agar dapat "*berlari kencang*" dalam menjawab tantangan perubahan yang sedemikian cepat, guna meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan.

Transformasi digital dalam pemerintahan menjadi keharusan dan syarat perlu untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif, responsif dan terpercaya. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan akan meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, memastikan inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan inovasi, mencegah dan memberantas korupsi.

Potensi Bencana

Sebagai wilayah yang dilintasi jalur Zona *Megathrust* Mentawai-Siberut sangat rentan pada potensi bencana gempa bumi dan tsunami. Zona megathrust Mentawai adalah daerah sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal yang lokasinya berada di sebelah barat Kepulauan Mentawai. Zona Megathrust Mentawai merupakan hasil dari aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia di bawah Lempeng Eurasia. Selain gempa bumi dan tsunami, potensi bencana lainnya juga menjadi permasalahan pembangunan kedepan seperti banjir, gelombang/ cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan. Kesiapsiagaan dalam memitigasi bencana menjadi hal penting dan strategis ke depan untuk meminimalisir segala kerugian yang ditumbulkan akibat bencana yang terjadi.

Alih Fungsi Lahan

Seiring dengan perkembangan penduduk dan kebutuhan akan pembangunan, maka potensi pengembangan wilayah melalui alih fungsi lahan menjadi syarat utama dalam pembangunan. Kawasan areal penggunaan lainnya sebesar 18,11 persen atau 108.841 hektare termasuk wilayah/kawasan pesisir yang menjadi ruang pembangunan daerah. Potensi alih fungsi lahan seperti lahan pertanian perkebunan menjadi sangat besar sehingga sarana kebijakan untuk mengakomodir kebutuhan tersebut sudah mulai untuk disusun salah satunya melalui revisi RTRW.

Wilayah Pesisir dan Pantai

Sebagai daerah kepulauan, dengan panjang garis pantai sebesar 1.402,66 km dengan 33 desa berada pada wilayah pantai/ pesisir. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi pengembangan kawasan pesisir khususnya pariwisata. Namun, disisi lain pemanfaatan wilayah pesisir dan pantai memiliki potensi besar pada degradasi lingkungan yang berdampak pada luasan kawasan pesisir dan ekosistem yang ada di dalamnya. Penebangan hutan Mangrove, pengambilan pasir dan karang sangat berakibat pada kerusakan daerah pesisir, berkurangnya luasan pesisir dan bahkan adalah hilangnya sebuah wilayah pesisir dan pulau. Ini menjadi perhatian serius untuk pembangunan bagi seluruh pihak terutama menjaga kawasan pesisir dan pantai dari kerusakan dan menjadikan beberapa area

sebagai ruang terbuka (*green belt*) atau sabuk hijau sebagai zona bebas bangunan yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan upaya mitigasi kebencanaan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2025 diproyeksikan akan menunjukkan ketahanan meskipun menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Berbagai lembaga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 4,5% hingga 5,2%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 tercatat sebesar 4,87% (yoy). Angka ini sedikit di bawah target pemerintah dan beberapa proyeksi awal. Meskipun demikian, pertumbuhan ini menunjukkan resiliensi di tengah tekanan global. Begitu juga dengan perlambatan ekonomi mitra dagang utama diakibatkan oleh perlambatan ekonomi di Tiongkok dan potensi kebijakan tarif Amerika Serikat dapat menurunkan permintaan ekspor dari Indonesia. Tiongkok dan AS adalah mitra dagang utama Indonesia, sehingga gejolak di kedua negara tersebut akan sangat terasa.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026, menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,2% hingga 5,8%. Proyeksi ini menunjukkan optimisme yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan beberapa lembaga internasional untuk tahun 2025 (sekitar 4,7%-4,8%). Kinerja

ekonomi Indonesia di tahun 2025 akan menjadi fondasi penting bagi tahun 2026, hal ini dapat dilihat dari

a. Resiliensi Konsumsi Domestik: konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama di 2025, ini akan memberikan dorongan kuat untuk 2026.
b. Transisi Pemerintahan: Transisi pemerintahan yang mulus dan implementasi kebijakan ekonomi dari pemerintahan baru (Presiden Prabowo Subianto) akan sangat memengaruhi kepercayaan investor dan laju investasi.
c. Keberhasilan Hilirisasi: Upaya hilirisasi industri yang digencarkan pemerintah di 2025, khususnya pada komoditas seperti nikel, akan mulai menunjukkan hasil yang lebih nyata dalam peningkatan nilai tambah ekspor di 2026.

Kebijakan fiskal dan moneter di tingkat nasional, kondisi investasi, inflasi, dan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan akan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Begitu juga, kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil) memiliki dampak langsung pada kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan dan program strategis daerah, terutama di Kepulauan Mentawai dengan ketergantungan transfer pusat yang masih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang tumbuh positif dan didukung dengan semakin kuatnya ekonomi secara nasional

memberikan kepercayaan bahwa pada Tahun 2025 dan 2026 ekonomi daerah akan tumbuh positif begitu juga dengan konsumsi masyarakat diprakirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan meningkatnya produktivitas ekonomi masyarakat.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Tahun 2026

3.1.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi pada RPJMN 2025-2029 dimaksudkan sebagai bentuk pembangunan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkualitas dan berkelanjutan merupakan kesatuan wujud yang saling terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan kemiskinan dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Komponen ini bekerja secara sinergis. Pertumbuhan ekonomi menciptakan sumber daya manusia untuk mengatasi kemiskinan, sementara peningkatan modal manusia yang berkualitas mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Pertumbuhan ekonomi menjadi pendorong terciptanya lapangan kerja, investasi yang produktif dan inovasi. Industrialisasi, digitalisasi, pengembangan infrastruktur dan pengembangan pusat pertumbuhan baru di berbagai daerah dapat

memperkuat basis fiskal untuk menyejahterakan kehidupan sosial dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pendekatan lintas sektor digunakan dalam mengoperasionalkan strategi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2025 diperkirakan akan tetap resilien dan menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun di bayangi oleh berbagai tantangan global. Berkaca dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2025, Ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 4,87% (*year-on-year/yoy*). Angka ini menunjukkan optimisme di tengah ketidakpastian global. Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5% pada tahun 2025. Tantangan yang paling dominan adalah ketidakpastian global seperti konflik geopolitik, perang dagang, dan kondisi ekonomi global yang belum stabil terus menjadi bayangan. Begitu juga dengan konsumsi rumah tangga dijaga tetap positif dan tumbuh, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap PDB. Tekanan daya beli masyarakat dipengaruhi oleh pengangguran, ketimpangan ekonomi, inflasi pangan, dan ketergantungan terhadap impor pangan.

Sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2026 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan per kapita, sehingga akan membantu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi inklusif dilakukan dengan akselerasi hilirisasi sumber daya alam dan percepatan pengentasan kemiskinan.

Tema RKP tahun 2026 yaitu "Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Adapun sejumlah strategi dan langkah mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ialah peningkatan produktivitas industrialisasi (hilirisasi) berorientasi ekspor dan program padat karya, peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, lalu swasembada energi melalui ekonomi hijau. Peningkatan inovasi teknologi melalui transformasi digital, serta peningkatan investasi produktif terutama *Foreign Direct Investment*/Penanaman Modal Asing berorientasi ekspor dan investasi non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sejumlah strategi tersebut dapat berjalan dan didukung dengan deregulasi perizinan dan kondisi makro ekonomi yang stabil.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 6,3 persen, dengan sasaran *Gross National Income* (GNI) per kapita 5.870 dolar Amerika Serikat (AS), penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) 37,14 persen, indeks kualitas lingkungan hidup 76,67 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 6,5-7,5 persen, rasio gini 0,377-0,380, serta indeks modal manusia 0,57.

Pelaksanaan pemanfaatan anggaran pemerintah diarahkan untuk program dan kegiatan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, mendorong terobosan teknologi, mendukung swasembada pangan dan energi, serta meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah unggulan, percepatan Rumah Sakit (RS) daerah, transformasi digital, reformasi birokrasi, kemudahan berbisnis, pertahanan semesta, serta stabilitas makro ekonomi dan fiskal adaptif. Swasembada pangan dan energi, akan didukung pelaksanaan lumbung pangan, pengembangan energi terbarukan, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hulu hilir.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045 dan pencapaian RPJMN 2025-2029 dengan fokus kebijakan makro Tahun 2026 antara lain: **Percepatan Transformasi Ekonomi**; Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.

Pembangunan Inklusif; Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.

Pembangunan Berkelanjutan; Pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan berkelanjutan diarahkan pada pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.

Mewujudkan Stabilitas Ekonomi; Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2026, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian.

3.1.1.2 Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat

Kondisi perekonomian Sumatera Barat di tahun 2025 diperkirakan akan melanjutkan tren pertumbuhan positif,

meskipun dengan beberapa catatan dan tantangan yang perlu diantisipasi. Hasil pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada Triwulan I tahun 2025, Ekonomi Sumatera Barat menunjukkan fondasi pertumbuhan tahunan yang cukup kuat sebesar 4,66% (y-on-y). Namun, terjadi sedikit kontraksi secara kuartalan (-0,01% q-to-q), yang menandakan adanya dinamika musiman atau perlambatan sementara.

Sektor unggulan dan sebagai pendorong ekonomi seperti pada sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi Sumatera Barat. Pertumbuhan sektor pertanian di Triwulan I Tahun 2025 tercatat stabil sebesar 6,45%. Agribisnis, khususnya produk olahan khas seperti rendang dan kopi lokal, dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Begitu juga pada sektor Pariwisata memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekonomi kreatif. Kebangkitan pariwisata pasca pandemi diharapkan terus berlanjut. Industri kreatif menjadi sektor yang menjanjikan untuk diversifikasi ekonomi daerah. Sektor jasa keuangan menunjukkan kinerja yang solid di Triwulan I Tahun 2025, mendukung pertumbuhan ekonomi. Perbankan tumbuh stabil, dengan kredit UMKM menjadi perhatian utama. Perbankan syariah juga melaju kencang, dan BPR fokus pada pembiayaan UMKM. Jumlah investor pasar modal di Sumbar juga terus bertambah. Selain itu, Investasi EBT (Energi Baru Terbarukan) di Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam EBT dan siap menjadi pusat

investasi untuk data *center* dan industri digital berbasis energi bersih. Ini menjadi peluang besar untuk menarik investasi skala besar sehingga secara umum, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025 diproyeksikan berada di kisaran 4,5-5,2 persen.

Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat kedepannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penguatan sektor unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata halal, perikanan, dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dengan mendorong hilirisasi produk dan peningkatan nilai tambah melalui digitalisasi dan inovasi.
2. Peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM, termasuk fasilitasi akses terhadap permodalan, pelatihan vokasi dan integrasi dengan rantai pasok industri.
3. Pengembangan infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah, terutama akses jalan, pelabuhan dan jaringan logistik di wilayah pesisir dan perbatasan untuk membuka isolasi kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tertinggal.
4. Pembanguna ekonomi yang ramah lingkungan (*green economy*) termasuk pengembangan energi terbarukan, ekowisata dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagi bentuk kontribusi terhadap agenda pembangunan rendah karbon dan transisi energi.

5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa/nagari melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Desa/nagari (BUMDes/BUMNag), pertanian berkelanjutan dan pelestarian kearifan lokal sebagai basis pembangunan ekonomi kerakyatan.
6. Penguatan kolaborasi antar sektor pembangunan, termasuk sektor swasta, perguruan tinggi dan masyarakat dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang merata di seluruh wilayah provinsi.

3.1.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perkembangan ekonomi daerah yang dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi yang positif mengindikasikan semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai tumbuh positif yaitu tahun 2023 sebesar 4,04 persen dan tahun 2024 sebesar 3,97 persen. Seiring dengan situasi ekonomi nasional yang kondusif dan berbagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter dari pemerintah yang secara hati-hati diterapkan dalam mengantisipasi gejolak ekonomi global, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 seiring dengan tren pertumbuhan ekonomi nasional dan tren pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang diprediksi tumbuh positif. Pembangunan sumber daya ekonomi berbasis komoditas unggulan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2026,

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi menjadi fondasi dasar dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengoptimalkan kompetitif daerah, hilirisasi pertanian/*value added* dan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah. Hal ini selaras arah pembangunan nasional yang menitik beratkan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sumber daya manusia, digitalisasi/penguatan teknologi dan infrastruktur ekonomi. Momentum percepatan ekonomi yang menjadi fokus pembangunan nasional menjadi *trigger* bagi daerah yang diharapkan senantiasa memberikan efek pengganda untuk mendorong sektor publik, layanan dasar dan ekonomi terpenuhi.

Penyelarasan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan nasional melalui percepatan transformasi ekonomi menjadi ruang bagi daerah untuk ambil peran dan bagian yang integral sebagai satu kesatuan dengan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2026 antara lain:

1. Penguatan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang lebih mendorong pembangunan manusia dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, pengentasan *stunting*.

2. Pembangunan infrastruktur ekonomi sebagai prasyarat pengembangan sektor sosial ekonomi masyarakat senantiasa didorong dengan alokasi anggaran yang memadai.
3. Pengembangan produk komoditas unggulan daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah yang dapat dioptimalkan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Menjaga kestabilan harga komoditas pangan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui menjaga kelancaran distribusi logistik (transportasi penyeberangan) serta penguatan kemandirian dalam penyediaan pangan lokal.
5. Optimalisasi alokasi belanja pemerintah melalui penggunaan produk dalam negeri dan lokal untuk penguatan ekonomi masyarakat lokal dan peningkatan program dan kegiatan padat karya.
6. Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diarahkan melalui pengembangan destinasi wisata, pelaksanaan even pariwisata, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan desa wisata menuju pariwisata berkelanjutan.
7. Penguatan pemulihan sektor riil dilakukan dengan peningkatan kualitas produk UMK (optimalisasi *craft center* dan forum UMK,

sertifikasi dan uji produk UMK), perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan pengawasan UMK, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha UMK dan koperasi, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi, penguatan SDM UKM dan koperasi, pengembangan *sharing* program yang difokuskan pada pemberdayaan UKM dan koperasi.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026

Ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan perang harga dan perang dagang serta potensi krisis pangan dan energi yang berkembang hingga saat. Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi dalam pembangunan tahun 2025-2026 adalah:

1) Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Hal ini akan berpengaruh pada kebijakan dana transfer ke daerah yang akan mengalami penyesuaian yang ketat sedangkan sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan masih sangat terbatas.
2) Kemampuan daerah dalam meredam dan mengendalikan penyebaran COVID-19 dimana saat ini kasusnya meningkat di beberapa negara sehingga perlu menjadi perhatian terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kepastian berusaha/investasi daerah.

3) Optimalisasi pengembangan IPTEK dan inovasi dalam mengikuti perubahan pola perilaku konsumsi masyarakat.
4) Potensi pertanian, perkebunan dan perikanan yang melimpah tetapi belum memiliki nilai tambah sehingga perlu integrasi pengembangan komoditas unggulan hulu hilir hingga pada pemasarannya.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Tahun 2026 menjadi pijakan untuk reformasi struktural sebagai bentuk transformasi ekonomi nasional dan percepatan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan keuangan nasional memperhatikan kondisi yang tengah terjadi secara nasional dan global, namun tetap bertumpu pada keadaan fiskal yang sehat untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju.

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Berdasarkan perhitungan rasio kapasitas fiskal daerah dikelompokkan dengan kategori sebagai berikut:

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
RKFD < 0,905	sangat rendah
0,905 ≤ RKFD < 1,141	rendah

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
1,141 ≤ RKFD < 1,378	sedang
1,378 ≤ RKFD < 1,615	tinggi
1,615 ≤ RKFD	sangat tinggi

Melihat perkembangan nilai peta kapasitas fiskal daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020-2024 dengan memperhatikan PMK Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah menunjukkan bahwa kecenderungannya membaik. Artinya daerah dalam membiayai alokasi belanja rutin, belanja tertentu, pembiayaan tertentu sudah mempunyai kemampuan dan menjadi pertimbangan dalam berbagai skema pembiayaan pembangunan .

Perkembangan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2020-2024

Tahun	Rasio KFD	Kategori KFD
2020	0,415	Sangat Rendah
2021	0,628	Rendah
2022	1,552	Sedang
2023	1,730	Sangat Tinggi
2024	1,384	Tinggi

Sumber: PMK Nomor 65 Tahun 2024

Pada Tabel 3.1 tampak bahwa Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang baik yaitu dari kategori sangat

rendah pada tahun 2020 mengalami perbaikan hingga pada tahun 2024 kapasitas fiskal Kepulauan Mentawai dengan predikat tinggi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan tata kelola keuangan daerah sehat dan tetap pada koridor serta meningkatkan kepercayaan publik khususnya pada alternatif skema pembiayaan lainnya.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum untuk peningkatan Pendapatan Daerah tersebut dibutuhkan berbagai kebijakan sesuai dengan kondisi riil sumber Pendapatan dengan tanpa membebani sumber daya sosial ekonomi masyarakat. Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2026 antara lain:

1. Penguatan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui revisi peraturan daerah dan peraturan turunannya (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) sehingga lebih relevan, akurat dan menyesuaikan kebutuhan daerah.
2. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggunaan Teknologi Informasi/ implementasi sistem informasi *online* bekerja sama dengan Bank Nagari, serta penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan.
3. Pemberian insentif pajak dan retribusi daerah berupa keringanan pembayaran, penghapusan, penundaan

pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah melalui operasi patuh pajak dan berbagai sosialisasi terkait pajak.
5. Meningkatkan pelayanan pajak dan opsen pajak dengan mudah, murah dan cepat serta pelibatan masyarakat, pemangku kepentingan serta jejaring dalam peningkatan pajak.
6. Melakukan pendataan objek dan wajib pajak yang saat ini belum terdata, dan melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan secara lebih detail, seperti: Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Keberadaan data tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggali potensi wajib pajak daerah yang ada.
7. Melakukan koordinasi secara rutin lintas OPD yang terkait/lintas sektor yang memiliki peran dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
8. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan sosialisasi, perbaikan mekanisme pengendalian dan pengawasan,

perbaikan sistem dan prosedur administrasi pemungutan yang cepat, sederhana dan akuntabel, serta pemberian *reward and punishment.*

9. Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ kinerja BUMD termasuk upaya pengembangan BUMD dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif, begitu juga dengan percepatan pengelolaan RSUD melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat memberikan kontribusi pendapatan dari layanan kesehatan.
10. Peningkatan prestasi/ kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai indikator dalam upaya perolehan Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dan sejenisnya dalam setiap tahunnya.

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023-2027

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi/Target pada Tahun	
	2023	2024	2025	2026	2027
Pendapatan Asli Daerah	**50.360.638.686**	**53.053.048.383**	**59.324.354.251**	**82.113.767.819**	**122.677.480.116**
Pajak Daerah	6.066.362.757	9.167.884.951	9.750.886.640	25.084.673.000	47.593.140.790
Retribusi Daerah	21.110.275.929	15.367.248.573	22.307.054.501	25.307.054.000	40.837.759.951
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.099.000.000	16.476.655.254	16.476.655.254	16.476.655.254	16.476.655.254
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.085.000.000	12.041.259.605	10.789.757.856	15.245.385.565	17.769.924.121
Pendapatan Transfer	859.822.191.100	864.468.015.943	893.229.561.766	687.620.125.985,75	884.427.740.566
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	824.412.254.000	820.560.607.442	883.715.112.000	664.478.380.000	874.528.907.030
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	18.095.324.000	16.832.243.814	14.290.281.000	14.350.347.000	15.067.864.350
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	569.037.573.000	593.136.045.604	617.399.822.000	475.773.626.000	602.096.747.470
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	106.880.270.000	60.558.056.051	77.779.256.000	2.431.037.000	77.779.256.000
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	85.505.996.000	82.559.416.973	106.774.027.000	106.942.747.000	110.151.029.410
DID	-	20.978.611.000	21.715.422.000	21.715.422.000	22.366.884.660
Dana Desa	44.929.317.000	46.496.234.000	45.696.238.000	45.696.238.000	47.067.125.140
Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.382.562.871	43.907.408.501	9.514.449.766	23.141.745.985.75	9.898.833.536

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi/Target pada Tahun	
	2023	2024	2025	2026	2027
Pendapatan Bagi Hasil	41.125.926.871	43.907.408.501		23.141.745.985.75	9.898.833.536
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	41.125.926.871	43.907.408.501		23.141.745.985.75	9.898.833.536
Bantuan Keuangan	2.256.636.000	-			
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**7.817.957.663**	**7.945.022.383**	**7.014.568.732**	**8.990.834.400**	**7.014.568.732**
Hibah	-				
Dana Darurat	-				
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan	7.817.957.663	7.945.022.383	7.014.568.732	8.990.834.400	7.014.568.732
PENDAPATAN DAERAH	**862.728.048.145**	**925.466.086.709**	**959.568.484.749**	**778.724.728.254.75**	**1.014.119.789.414**

Proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2026 diestimasikan meningkat jika dibandingkan dengan kondisi pendapatan asli daerah yang secara nyata telah diterima oleh daerah pada tahun 2025 mengingat sumber pendapatan tersebut secara riel menjadi alokasi yang diterima secara maksimal untuk pembiayaan pembangunan daerah. Begitu juga dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 bahwa BBNKB tidak lagi menganut pola bagi hasil melainkan dengan pola opsen sehingga ketentuan terkait pajak daerah mengalami penambahan berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB serta dengan terbentuknya Badan Pendapatan Daerah. Beberapa target pendapatan pajak daerah dan pendapatan bagi hasil dari provinsi dilakukan penyesuaian dengan mengacu kepada target opsen PKB dan opsen BBNKB yang telah ditetapkan dengan keputusan Gubernur Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka pendapatan asli daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.82.113.767.819 dengan rincian pajak daerah sebesar Rp.25.084.673.000, Retribusi Daerah sebesar Rp.25.307.054.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.16.476.655.254, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.15.245.385.565.

Pendapatan transfer untuk tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.687.620.125.985.75 Pendapatan transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.

664.478.380.000 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.23.141.745.985.75 sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2026 yaitu sebesar Rp.8.990.834.400.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja. Analisis keuangan daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah dialokasikan ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga, yaitu:

1. Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.

   Belanja wajib: belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial).

   Belanja mengikat: belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam

tahun anggaran yang berkenaan, dan penjabaran lebih detail yakni belanja mengikat adalah : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

2. Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
3. Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Belanja daerah dialokasikan untuk membiayai program prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan arah kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan belanja mengikat. Pemenuhan belanja wajib digunakan untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka *stunting*. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah

daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

2. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
3. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja daerah dialokasikan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, yaitu untuk mendanai program prioritas pembangunan daerah diantaranya Pembangunan Infrastruktur Jalan, Penyediaan Listrik, Penyediaan jaringan Internet, Pembangunan Air Bersih, Pembangunan Manusia Berkualitas, Peningkatan Pendapatan Per Kapita.
5. Melakukan koordinasi (kontrol) secara rutin dengan seluruh OPD dan *stakeholder* untuk mendorong peningkatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan belanja daerah (efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja).

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023-2027

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Poyeksi/Target pada Tahun	
	2023	2024	2025	2026	2027
Belanja Operasi	**635.681.054.019**	**663.653.530.926**	**687.773.966.339**	**622.424.872.353.25**	**637.954.652.244**
Belanja Pegawai	319.567.764.046	331.088.804.278	430.438.708.980	411.017.045.006.75	366.988.411.824
Belanja Barang dan Jasa	295.255.928.253	288.981.660.207	242.373.884.359	198.541.666.346.50	255.364.867.420
Belanja Bunga	-			-	-
Belanja Subsidi	5.700.000.000	7.208.422.603	4.440.000.000	4.400.000.000	5.000.000.000
Belanja Hibah	13.463.361.720	35.433.087.998	9.976.139.000	8.136.161.000	10.026.139.000
Belanja Bantuan Sosial	1.694.000.000	941.555.840	545.234.000	330.000.000	575.234.000
Belanja Modal	**239.607.613.815**	**141.464.799.314**	**202.128.137.144**	**50.827.967.901.50**	**251.526.840.994**
Belanja Modal Tanah	1.006.000.000	213.300.000	4.200.000.000	1.000.000.000	14.000.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.684.648.564	22.511.776.874	19.855.769.552	12.645.127.175	25.000.000.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	106.582.098.774	26.067.914.028	42.537.052.280	21.452.691.550	70.000.000.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	102.129.466.477	91.142.885.630	135.505.315.312	15.346.461.876.75	142.426.840.994
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	205.400.000	1.213.077.782	30.000.000	383.687.299.75	100.000.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	134.310.000	315.845.000	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	**4.497.167.877**	**1.025.861.621**	**2.000.000.000**	**1.600.000.000**	**5.000.000.000**
Belanja Tidak Terduga	4.497.167.877	1.025.861.621	2.000.000.000	1.600.000.000	5.000.000.000

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Poyeksi/Target pada Tahun	
	2023	2024	2025	2026	2027
Belanja Transfer	**79.304.921.569**	**110.976.420.519**	**112.071.042.414**	**99.747.808.000**	**119.638.296.175**
Belanja Bagi Hasil	2.717.663.869	3.257.906.575	3.205.794.114	5.039.172.700	8.843.090.074
Belanja Bantuan Keuangan	76.587.257.700	107.718.513.944	108.865.248.300	94.708.635.300	110.795.206.101
BELANJA DAERAH	**959.090.757.280**	**917.120.612.380**	**1.003.973.145.897**	**774.600.648.254.75**	**1.014.119.789.413**

Belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.774.600.648.254.75. Belanja ini terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp.622.424.872.353.25 Belanja Modal sebesar Rp.50.827.967.901.50 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.1.600.000.000 dan Belanja Transfer sebesar Rp.99.747.808.000.

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Arah kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

1. Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dimana jumlahnya semakin menurun yang dialokasikan untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di daerah.
2. SILPA tahun berjalan dijadikan sebagai pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan anggaran (surplus/defisit). Apabila SILPA tahun berjalan yang dihasilkan positif/surplus, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan untuk menambah program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang

telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan. Sedangkan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif, maka pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pada tahun 2026, diproyeksikan untuk pembiayaan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp.4.124.080.000 dengan peruntukkan pada penyertaan modal daerah sedangkan SilPa diproyeksikan tidak ada, artinya bahwa untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2026 dialokasikan sesuai dengan peruntukan/penggunaannya sehingga SiLPA yang bersifat umum atau penggunaannya bebas/tidak terikat sudah ada peruntukkannya.

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023-2027

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Poyeksi/Target pada Tahun	
	2023	2024	2025	2026	2027
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**94.948.877.650**	**74.953.685.319**	**73.212.395.675**	**-**	**-**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	94.948.877.650	74.953.685.319	73.212.395.675	-	-
Pencairan Dana Cadangan					
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
Penerimaan Pinjaman Daerah					
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**94.948.877.650**	**74.953.685.319**	**73.212.395.675**	**-**	**-**
Pengeluaran Pembiayaan	-				
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan Modal Daerah	-			4.124.080.000	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo					
Pemberian Pinjaman Daerah					-

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Poyeksi/Target pada Tahun	
	2023	2024	2025	2026	2027
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**-**			**4.124.080.000**	**-**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**94.948.877.650**	**74.953.685.319**	**73.212.395.675**	**(4.124.080.000)**	**-**

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dokumen RKPD Tahun 2026 memiliki peran strategis dalam merumuskan secara teknis implementasi RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan Visi Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera. Sebagai penjabaran tahun ke-2 RPJMD Tahun 2025-2029, dokumen RKPD sebagai wujud operasional perencanaan tahunan dalam merumuskan sasaran prioritas pembangunan yang disusun untuk mencapai target tujuan pembangunan daerah. Penguatan infrastruktur daerah untuk peningkatan produktivitas menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dilaksanakan sebagai upaya akselerasi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, serta dimanifestasikan dalam sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menjadi perencanaan jangka menengah nasional periode pertama dan perencanaan tahun 2025 menjadi perencanaan tahun pertama. Sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka (tahun 2045) serta mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden mengamanatkan penyusunan visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Amanat ini ditujukan untuk meneguhkan kembali tujuan pembangunan yang terbentuk pada pembukaan UUD 1945. Pada visi Indonesia 2045 ditetapkan cita-cita untuk lepas dari jebakan *middle income trap* dan menjadi negara maju atau *high income country* sebelum tahun 2045.

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi Pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Kedudukan RKP Tahun 2026 sebagai penjabaran tahun pertama RPJMN Tahun 2025–2029 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2026 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh

penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Penyusunan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 mempertimbangkan arahan Presiden, evaluasi kebijakan tahun 2024-2025, forum konsultasi publik, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025, kerangka ekonomi makro, dinamika ketidakpastian global, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian. Memperhatikan beberapa koridor tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2026 ditetapkan yaitu:

"Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif"

Tema ini dipandang sebagai langkah dan tahapan pencapaian target sasaran RPJMN Tahun 2025–2029, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025–2029. Untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera diperlukan reformasi struktural yang konsisten dan berkelanjutan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan mampu memelihara momentum, menjaga kepercayaan pasar serta stabilitas ekonomi. Hal terefleksi pada pertumbuhan ekonomi yang resilien, terjaganya nilai tukar dan suku bunga, serta terkendalinya inflasi di level rendah. Upaya dan langkah tersebut melalui pencapaian sasaran Pembangunan tahun 2026 antara lain:

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Nasional, 2026

Indikator Sasaran	Satuan	Proyeksi Tahun 2026
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2 – 5,8
Tingkat Kemiskinan	%	6,5-7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,46 - 4,96
Rasio Gini	Nilai	0,377 – 0,380
Indeks Modal Manusia	Nilai	0,57
Inflasi	%	1,5-3,5

sumber: RKP 2025

Sasaran pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta menjaga inflasi pada posisi yang aman dan stabil.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2025

Visi Pembangunan Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan dijabarkan melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 diperlukan sebagai implementasi setiap misi setiap tahunnya melalui tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, 2025-2029

VISI **Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan**		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Pendidikan yang Merata dan Kesehatan yang Berkualitas	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia 2. Peningkatan efektifitas pendidikan di SMK /SMA/sederajat dalam melahirkan lulusan yang religius/ berkarakter, terampil, inovatif dan mandiri serta kompetitif masuk jenjang pendidikan tinggi. 3. Bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu, siswa berprestasi dan mahasiswa dalam dan luar negeri.
	Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas.	1. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. 2. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. 3. Terpenuhinya layanan kesehatan masyarakat yang cepat berkualitas dan hadirnya RS type A berstandar Internasional. 4. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial. 5. Pencegahan stunting melalui penerapan pola hidup sehat dan pemenuhan gizi ibu.
Misi 2: Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1. Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, Perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan. 2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Misi 3: Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan	Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/ desa sebagai basis kemajuan yang	1. Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal. 2. Meningkatnya kualitas

VISI **Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan**		
Misi	Tujuan	Sasaran
	mandiri dan berdaya saing	infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan
Misi 4: Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi.	1. Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah. 2. Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas. 3. Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil menengah sebagai pilar ekonomi daerah.
Misi 5: Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat dan mitigasi bencana.	1. Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. 2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan. 3. Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur.
Misi 6: Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	1. Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. 2. Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. 3. Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas.
Misi 7: Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UKM	Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah. 2. Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM.
Misi 8: Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	1. Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. 2. Meningkatnya kualitas layanan publik. 3. Meningkatnya Pendapatan Daerah.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat sejak tahun 2024 dan 2025, serta upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakkan ekonomi yang sehat dan merata dan bertumpu pada kemampuan ekonomi di Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2026, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yakni:

"Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Adapun narasi penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Perkuatan Fondasi

   Maksud: Memperbaiki dan memperkuat dasar-dasar yang menjadi landasan pengembangan sektor strategis, seperti infrastruktur, kebijakan, tata kelola, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM).

   Tujuan: Menyediakan basis yang kokoh untuk mendukung pelaksanaan program dan inisiatif pembangunan di sektor-sektor utama.

b. Transformasi Sektor Strategis

Maksud: Mengubah dan modernisasi sektor-sektor kunci perekonomian yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan nasional atau daerah. Contohnya:

a) Sektor pertanian dan perikanan: Ditransformasikan dengan pendekatan berbasis teknologi (pertanian cerdas atau *smart farming*).
b) Sektor pariwisata: Dikembangkan ke arah berbasis ekowisata dan budaya lokal.
c) Sektor industri kecil/UMKM : Diarahkan pada penguatan industry kecil/UMKM berbasis nilai tambah lokal dan ramah lingkungan.

Tujuan: Meningkatkan daya saing sektor-sektor tersebut di tingkat nasional maupun internasional sekaligus memastikan bahwa sektor tersebut memberikan manfaat luas kepada masyarakat.

c. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Maksud: Pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat secara merata kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang rentan atau terpinggirkan, seperti masyarakat miskin, perempuan, pemuda, dan kelompok marginal lainnya.

Tujuan: Mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan memastikan setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap peluang dan hasil pembangunan.

d. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Maksud: Pembangunan yang mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, keseimbangan sosial, dan kesinambungan ekonomi jangka panjang.

a) Lingkungan: Mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem melalui pendekatan ramah lingkungan (*green economy*).
b) Sosial: Menjaga stabilitas dan harmoni sosial melalui pemerataan manfaat pembangunan.
c) Ekonomi: Mengembangkan model bisnis dan kebijakan yang mampu bertahan dalam jangka panjang tanpa mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Tujuan: Menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya menguntungkan saat ini tetapi juga menjamin keberlanjutan untuk generasi mendatang.

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2026 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan sebagai langkah yang utuh dalam pencapaian visi dan isi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah

sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun sasaran pembangunan dalam Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Proyeksi Indikator Makro Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2026

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Target 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5
2	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	69,59
3	Indeks Gini (Rasio)	0,281
4	Tingkat Kemiskinan (%)	4,27-4,87
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,18 -5,66
6	IPM - Usia Harapan Hidup (Tahun) - Harapan Lama Sekolah (Tahun) - Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) - Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	77,98 74,83 14,62 9,58 12.074
7	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,59
8	Inflasi (%)	2,71-3,56

Sumber Rancangan RPJMD Prop. Sumatera Barat 2025-2029

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

Kebijakan pembangunan tahun 2026 yang fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi bagian penting bagi daerah dalam upaya pencapaian pentahapan pembangunan jangka menengah (RPJMD 2025-2029) dan jangka panjang (RPJPD 2025-2045). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (transformasi sosial) dan infrastruktur ekonomi berbasis komoditas unggulan (transformasi ekonomi) menjadi pondasi dasar dalam upaya

mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengoptimalkan kompetitif daerah, hilirisasi pertanian dan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 merupakan jabaran dari tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 seperti pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2026

VISI **Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera**		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas.	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Meningkatnya Mutu Pendidikan. 2. Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat. 3. Meningkatnya Produktivitas Masyarakat yang Inklusif.
Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah.	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. 2. Meningkatnya Investasi, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/ Hilirisasi. 3. Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas.
Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan. 2. Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif.
	Terwujudnya Kawasan sebagai Basis Kemajuan Wilayah yang didukung PSU Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	1. Meningkatnya Desa Mandiri. 2. Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan.
Misi 4: Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Berbasis Sosial Budaya dan Lingkungan	1. Memperkuat Tatanan Kehidupan Sosial, Budaya Masyarakat. 2. Pembangunan Kehidupan Keluarga dan Masyarakat yang Inklusif dan berwawasan lingkungan.
Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan	Terwujudnya ekosistem alam yang Berkualitas dan Resiliensi Terhadap Bencana	1. Meningkatnya pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan.

VISI **Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera**		
Misi	Tujuan	Sasaran
tangguh bencana		2. Menurunnya risiko terhadap dampak bencana.
Misi 6: Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia	Terwujudnya Pariwisata yang Berdaya Saing dan Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan	1. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam pembangunan Daerah. 2. Meningkatnya Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat.
Misi 7: Mewujudkan masyarakat yang aman harmonis dan berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Tenteram dan Imparsial	1. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum. 2. Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan.
Misi 8: Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dan tepercaya	Terwujudnya Birokrasi Kelas yang Prima	1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani.

Pembangunan ekonomi tahun 2026 akan dilaksanakan dengan semangat percepatan transformasi ekonomi dan sebagai pijakan awal menuju Mentawai Emas 2045 dengan memperhatikan strategi pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan baik nasional maupun regional, sehingga arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan yaitu:

"*Penguatan Infrastruktur Daerah untuk Peningkatan Produktivitas menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif*"

Tema tersebut memiliki arti yang penting sebagai wujud menghadirkan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas, menggali potensi daerah dalam upaya meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, menjadi efek pengganda untuk

menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh seluruh masyarakat dan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat. Tema prioritas pembangunan daerah Tahun 2026, memiliki makna antara lain:

1. Menyediakan dan memfasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi masyarakat sebagai prasyarat untuk mendorong transformasi ekonomi pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi melalui pelatihan, penyuluhan, jejaring usaha, akses keuangan perbankan, penguatan kelembagaan.
3. Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata/ ekonomi kreatif di dalam dan antar sektor ekonomi.

Pembangunan daerah tahun 2026 yang fokus pada tema pembangunan tahunan, namun pada prinsipnya dengan tidak mengabaikan komitmen dan upaya yang kuat untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi dan *mandatory spending* yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perwujudan tema pembangunan tersebut dicerminkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan target pembangunan daerah merujuk pada indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, dan untuk

target pembangunan yang telah tercapai di tahun sebelumnya atau tahun berjalan maka perumusan target sasaran dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan dokumen perencanaan atau dilakukan proyeksi.

Tabel 4.5
Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2026

Indikator Sasaran	Satuan	Proyeksi Tahun 2026
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Rp (dalam Juta)	84,34
IPM	indeks	67,35
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,7
Tingkat Kemiskinan	%	8,24-8,34
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,31
Gini Rasio	%	0,253

Sumber : Rancangan RPJMD Kab. Kepulauan Mentawai 2025-2029

Sebagai bentuk konsistensi dan keselarasan dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2026, berikut disajikan persandingan keselarasan tema pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah tingkat Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026.

Tabel 4.6
Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2026

Tema RKP Tahun 2026	Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Tema RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026
Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Infrastruktur Daerah untuk Peningkatan Produktivitas menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Keselarasan tema pembangunan terlihat dari upaya bersama bagaimana mewujudkan transformasi khususnya pada sektor ekonomi guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui salah satunya hilirisasi sumber daya alam berbasis

maritim untuk peningkatan nilai tambah yang didukung dengan pembangunan sumber daya ekonomi baik infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia *re-skilling/up-skilling*, kelembagaan, penguatan pasar, manajemen rantai pasok, dan penguatan investasi.

Tabel 4.7
Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2026

Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran RKP	Sasaran RKPD Provinsi Sumatera Barat	Sasaran RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Rp (dalam Juta)	5.870 US$	69,59	84,34
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,2–5,8	5,5	5,7
Tingkat Kemiskinan	Persen	6,5-7,5	4,27-4,87	8,24-8,34
Rasio Gini	Rasio	0,377–0,380	0,281	0,253
Indeks Modal Manusia/ Indeks Pembangunan Manusia	Persen	0,57	0,59/77,98	67,35
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,46-4,96	5,18-5,66	1,31

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 4.8
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 1

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	81,69–85,23

Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan memperkokoh ideologi Pancasila, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui (1) penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; (2) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; dan (3) pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan (4) internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi, dan penegakan hak asasi manusia.

Pada aspek penguatan demokrasi, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu (1) mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; (2) menegakkan kembali

kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas; (3) menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum; (4) penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan; (5) peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif. Dalam aspek penguatan demokrasi, perlu diperkuat juga dengan pelaksanaan komunikasi pembangunan dan informasi publik melalui (6) penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik; (7) pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri; serta (8) peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender.

Dalam upaya penegakan hak asasi manusia dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut (1) melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku; (2) memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya; (3) memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (4) memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya;

serta (5) transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.

2. Memperkokoh Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 4.9
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 2

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Asia Power Index (*Military Capability*)	Indeks	20
Asia Power Index (*Diplomatic Influence*)	Indeks	61,54
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	67,5
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	%	7,21
Indeks Ketahanan Energi	Indeks	6,77
Kapasitas tampungan air	m3/kapita	65,18
Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	39,20
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	12,5
Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Indeks	43
Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	70,80
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	20
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	24,00 (16,00 terdaur

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
		ulang)
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	0,44
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,68
Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)	 % %	 32,65 28,12

Arah kebijakan penguatan pertahanan negara dilakukan melalui (1) meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI, (2) memperkuat komponen cadangan, (3) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara, (4) memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber, (5) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum *essential* force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI, (6) meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar, (7) memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme (8) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta (9) pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.

Arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi

Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri, (3) pembentukan ekosistem industri pertahanan, (4) transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest*, dan (5) kolaborasi penelitian dan pengembangan alpalhankam.

Dalam penguatan keamanan negara, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme, (2) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara, (3) memperkuat konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia, (4) memperkuat instrumen keamanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (5) penguatan sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar, (6) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme.

Arah kebijakan dalam profesionalisme dan pelayanan kepolisian dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat polisi dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (2) peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita; (3) pelayanan

keamanan dan ketertiban masyarakat; (4) penguatan kapabilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan pelanggaran hukum, pemeliharaan keamanan, dan penanganan kriminalitas; (5) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil.

Dalam penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut, (3) kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia dan *choke point*, (4) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil lembaga keamanan laut, (5) pemetaan batimetri dan alur laut.

Arah kebijakan dalam keamanan siber, sandi, dan sinyal dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi; (2) pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal; (3) penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal; serta (4) penguatan operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis.

Arah kebijakan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat

penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga dengan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema *good neighbour policy*, (2) meningkatkan peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan atas asas bebas aktif dan melanjutkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral maupun multilateral sesuai amanat konstitusi, (3) meningkatkan peran aktif Indonesia dalam usaha mendorong perdamaian dunia, khususnya di antara negara-negara yang sedang berkonflik, (4) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia, (5) penyelesaian perundingan perbatasan darat negara, (6) mengintensifkan pemutakhiran dokumen dan bukti historis bersejarah di daerah perbatasan/ prioritas, (7) perbaikan tata kelola perizinan organisasi masyarakat asing, dan (8) optimalisasi promosi *aset soft power* Indonesia.

Arah kebijakan penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy dilaksanakan melalui strategi (1) meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional dengan pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur *smart diplomacy*, (2) melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan

kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap atau bekerja di luar negeri, serta (3) memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina antara lain dengan memperjuangkan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina dan mengangkat utusan khusus untuk mendorong proses kemerdekaan Palestina.

Arah Kebijakan Kerja Sama Pembangunan Internasional dilaksanakan melalui (1) penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan *Triangular*, (2) *Integrated National Financing Framework*, (3) pembangunan data economic intelligence berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (4) promosi *Trade, Tourism, Investment* (TTI) Terintegrasi, serta (5) penguatan kelembagaan kerja sama pembangunan dan pembiayaan.

Penguatan diplomasi ekonomi diarahkan melalui (1) penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi internasional, (2) kerja sama ekonomi internasional yang adaptif, (3) optimalisasi kerja sama ekonomi internasional dengan negara tetangga dan perbatasan, (4) partisipasi aktif mewujudkan pencapaian sasaran dan komitmen pembangunan global, (5) perluasan kesepakatan kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan orang, dan

(6) pengawalan proses aksesi Indonesia ke *Organization for Economic Co-operation and Development*.

Arah kebijakan swasembada pangan dilaksanakan melalui, (1) menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; (2) memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio; (3) meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (*digital farming*), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian; (4) mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya; (5) merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional; (6) memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara *holding* pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya; (7) menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan

melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk *start-up* untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan; (8) melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau *food estate* secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu; serta (9) memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (*blue food*) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur) (10) meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal; (11) menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan; (12) merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu,

sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional; serta (13) memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan.

Arah kebijakan swasembada energi dilaksanakan melalui (1) mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (*super power*) dalam bidang energi baru dan terbarukan (*renewable*s) dan energi berbasis bahan baku nabati (*bioenergy*); (2) mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; (3) memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional; serta (4) mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/ distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta.

Arah kebijakan swasembada air dilaksanakan melalui (1) penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau; (2) peningkatan kinerja layanan irigasi multi komoditas untuk mendukung ketahanan

pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi; (3) pengelolaan risiko bencana daya rusak air; (4) penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir; serta (5) revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga.

Arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global, melalui (1) penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal *value chain*, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim; (2) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional; (3) penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal; (4) penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan non bank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah; dan (5) penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah,

penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional.

Arah kebijakan ekonomi digital dilaksanakan melalui, (1) melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat, (2) mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro, (3) menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing, (4) mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

Arah kebijakan ekonomi hijau dilaksanakan melalui strategi, (1) mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (*circular economy*); (2) menerapkan ekonomi sirkular industri; (3) menerapkan efisiensi sumber daya; (4) mengembangkan produk ramah lingkungan; (5) menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material; (6) menguatkan ekosistem daur ulang; (7) mencegah dan menindak

tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan; (8) melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa; (9) peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber; (10) meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis *reduce, reuse,* dan *recycle*, (11) peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (12) optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan *landfill mining*; (13) perbaikan tata kelola persampahan; (14) mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang; serta (15) meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan). Strategi terkait keanekaragaman hayati meliputi strategi (16) mengurangi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies; (17) memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; (18) mengelola sumber daya genetik; (19) menguatkan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi; (20) memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi; (21) pengendalian dan eradikasi spesies asing invasif; (22) pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem; (23) peningkatan peran masyarakat yang terlibat alam

aksi perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati; (24) penguatan data, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi keanekaragaman hayati; (25) peningkatan pendanaan inovatif pengelolaan keanekaragaman hayati; (26) pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; (27) peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan; (28) inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru; (29) pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional; (30) peningkatan bioprospeksi sumber daya genetik; dan (31) pengembangan pengelolaan keamanan hayati (*biosafety*); (32) meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya; (33) meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah; (34) merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Tanaman Industri, dan hutan produksi dengan menerapkan skema *public private people partnership* dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat; (35) menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan

sumber daya ramah lingkungan. Strategi terkait peningkatan kualitas lingkungan meliputi strategi (36) meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau; (37) meningkatkan pengelolaan air limbah; (38) meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota di Indonesia; (39) meningkatkan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa; (40) meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut; (41) meningkatkan kualitas lahan; (42) menurunkan laju deforestasi; (43) meningkatkan kualitas ekosistem gambut; (44) melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; (45) menguatkan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; (46) pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan; (47) pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang; (48) penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta (49) penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (50) menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif; (51) memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran

hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi; (52) mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multi pihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan. Strategi terkait pembangunan rendah karbon meliputi strategi (53) menerapkan regulasi untuk membatasi produksi karbon dan aktivitas yang merusak lingkungan; (54) melakukan pembangunan rendah karbon; (55) peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer; (56) efisiensi energi; (57) peningkatan transportasi berkelanjutan; (58) peningkatan cadangan karbon; (59) pencegahan pengurangan cadangan karbon; (60) implementasi praktik pertanian yang rendah karbon; (61) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru; (62) pengembangan industri hijau; dan (63) pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular; (64) mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan *carbon sink* dan *carbon offset* untuk mengakselerasi target *net zero emission* dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau; (65) mengakselerasi perdagangan karbon baik di Bursa Efek Indonesia maupun penyempurnaan regulasi terkait *carbon trade* dan kelengkapan lembaga penunjang *carbon trade*; (66) melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (*coal-fired power plant retirement*) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan; (67)

menstimulasi konversi penggunaan energi fosil menjadi *renewable energy* sesuai dengan potensi alam masing-masing daerah; (68) mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan; (69) mendorong adopsi kendaraan listrik (*electric vehicle*) untuk transportasi umum. Strategi terkait pekerjaan hijau meliputi strategi (70) mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (*green jobs*) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing; (71) meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau; serta (72) memperkuat peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau.

Arah kebijakan ekonomi biru sebagai penghela pertumbuhan ekonomi (*prime mover*) dan sumber pertumbuhan baru, maka perlu dilaksanakan melalui (1) menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, *blue finance* dan *good neighbor policy*; (2) meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan

kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem *mangrove*, terumbu karang, dan lamun; (3) mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budi daya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi; (4) menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, terutama industri perkapalan dan garam, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam, pengembangan industri galangan kapal, dan penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan; (5) menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, termasuk untuk peningkatan konektivitas di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, pulau-pulau kecil dan terluar; (6) mengembangkan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan melalui

peningkatan penguatan sarana dan prasarana pariwisata bahari, penguatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan usaha dan investasi, memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata; (7) meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait *science, technology, engineering, art, and mathematics*, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global.

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan

Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

Untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, dirumuskan sasaran pembangunan tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 4.10
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 3

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	%	1,44
Rasio Kewirausahaan	%	3,14
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB	%	1,26
Rasio PDB Pariwisata	%	4,60
Devisa Pariwisata	(miliar USD)	22,10
Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	%	7,92
Aset Perbankan/PDB	%	59,50
Aset Dana Pensiun/PDB	%	8,10
Aset Asuransi/PDB	%	8,78
Kapitalisasi Pasar Modal/PDB	%	56,7
Total Kredit/PDB	%	35,1
Inklusi Keuangan	%	90,6

Arah kebijakan melanjutkan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui (1) membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah; (2) menyinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara

terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu; (3) menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi; (4) mengembangkan pelabuhan simpul *transhipment* sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik; (5) membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah; serta (6) memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat.

Arah kebijakan mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dilaksanakan melalui (1) menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran; (2) memberikan bantuan dan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha, termasuk melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah dengan standardisasi dan sertifikasi; (3) melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat; (4) mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan

sinkronisasi program kewirausahaan; (5) melakukan pendampingan pemanfaatan riset dan teknologi bagi wira usaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk melalui inkubasi usaha; (6) mengembangkan dan memperkuat kemitraan usaha melalui pengembangan ekosistem rantai pasok domestik dan global; (7) mengembangkan skema dan inovasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan *start-up*; serta (8) mengoptimalkan perwujudan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Arah kebijakan mengembangkan industri kreatif akan dijalankan melalui (1) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas; (2) integrasi data ekonomi kreatif; (3) percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka; (4) perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang

pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia; (5) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif; (6) pengembangan infrastruktur (termasuk pembangunan hub/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang didukung pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global; (7) penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk pengembangan badan layanan umum); (8) mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia; (9) memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global; (10) perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata; (11) menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata; (12) menerapkan prinsip *Blue-Green-Circular Economy* bagi para pelaku usaha pariwisata; (13) penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan; (14) reaktivasi pelaksanaan *event* dan *meetings*, *incentives, conventions, and exhibitions* serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandardisasi; (15) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana; (16)

pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata, (17) pengembangan kewilayahan pada 10 destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/*Integrated Tourism Master Plan*, 3 destinasi regeneratif Bali, greater Kepri, greater Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara (18) diversifikasi jenis pariwisata geopark (terutama di 10 UNESCO Global Geopark), gastronomi, kesehatan dan kebugaran, *meetings, incentives, conventions, and exhibitions*, olahraga, ramah muslim, *yacht and cruise*, desa wisata, dan wisata berbasis konservasi; serta (19) pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (*blended finance*).

Arah kebijakan penguatan koperasi dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi multipihak; (2) memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang *unbankable* menjadi koperasi *bankable*; (3) menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha

mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif; (4) memberikan bantuan peningkatan kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota; (5) mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa; (6) mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam; serta (7) memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Arah kebijakan pendalaman sektor keuangan dilakukan melalui (1) penguatan peran perbankan; (2) penguatan peran sektor keuangan nonbank, serta (3) peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Penguatan peran perbankan dilakukan melalui peningkatan keberagaman produk perbankan, kredit sektor produktif, pemerataan penyaluran kredit antar wilayah dan antarsektor, serta penguatan struktur sektor perbankan. Penguatan peran sektor keuangan nonbank dilakukan melalui peningkatan kelolaan dana pensiun, kepesertaan dan inovasi produk asuransi, perluasan akses *fintech*, penguatan pengawasan sektor keuangan nonbank, penguatan kolaborasi multipihak baik di level pusat maupun daerah, serta pendalaman pasar modal yang dilakukan dengan mempermudah investor dan emiten.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

Keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, sasaran pembangunan diukur melalui indikator berikut.

Tabel 4.11
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 4

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Hasil Pembelajaran: a. Rata-rata nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas c. Harapan lama sekolah (tahun)	 Nilai Nilai Nilai Tahun Tahun	 396 404 416 9,46 13,37
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tinggi	%	33,94
Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	66,78
Tingkat Penguasaan Iptek: a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) b. Peringkat Indeks Inovasi Global	 % Peringkat	 0,30 60
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,50-5,00
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	56,30
Usia Harapan Hidup	Tahun	74,43
Kesehatan Ibu dan Anak a. Angka Kematian Ibu b. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	 per 100.000 kelahiran hidup %	 122 18,80
Insidensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	272

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	70,29
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,425

Pembangunan dan pembentukan modal manusia harus menjamin bahwa sejak dalam kandungan, setiap anak termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan, serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi.

Arah kebijakan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, antara lain:

a. Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, mencakup (a) percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang; (c) revitalisasi pendidikan nonformal; (d) penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI); (e) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (f) penguatan tata kelola pendidikan; (g) menguatkan peran, fungsi,

kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (h) memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif; (i) memfasilitasi mobilitas dan perlindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif; (j) meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja; (k) meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi; (l) melaksanakan *reskilling* dan *upskilling* bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan *low-skilled* berbasis pembelajaran sepanjang hayat; (m) memfasilitasi transisi *school to work* dan integrasi *soft skills* bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi; (n) melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing; (o) mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga; serta (p) mengembangkan budaya literasi dan

meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

b. Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi, mencakup (a) perluasan layanan pendidikan anak usia dini melalui bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini; (b) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; (c) melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima; (d) penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing global; (e) meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional; (f) mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya; (g) memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi,

standardisasi kualitas lembaga perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang *Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics*; (h) memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; (i) memperkuat daya saing perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi diferensiasi misi; (j) meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk penguatan kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya; (k) meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional; (l) meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio; serta (m) menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global.

c. Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, mencakup (a) memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan

(*universal health coverage*) dan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; (b) menambahkan kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan *stunting*; (c) mencegah terjadinya *stunting* pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu dan Penambahan Vitamin); (d) memperkuat program gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dan lain lain); (e) meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan; (f) memperjuangkan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan nasional secara bertahap; (g) meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal; (h) mendorong pengembangan industri jamu yang merupakan ramuan herbal kearifan lokal dan berasal dari keragaman hayati nusantara; (i) menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah; (j) memastikan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan

penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas; (k) memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lebih pro rakyat, pro tenaga kesehatan, pro fasilitas kesehatan, dan pro pengadaan farmasi; (l) memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi posyandu, revitalisasi pos pembinaan terpadu, usaha kesehatan sekolah, pos kesehatan desa, dan pos kesehatan pesantren; (m) memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman *stunting* (gizi buruk); (n) meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran; (o) memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan; (p) membangun layanan baru yakni pelayanan kesehatan keluarga yang menjembatani pelayanan kesehatan masyarakat dan individu agar tercapai pelayanan kesehatan nasional yang efektif dan efisien (*family medicine*); (q) penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan promotif dan preventif

kesehatan ibu dan anak sesuai standar untuk percepatan penurunan kematian ibu dan anak; (r) penguatan kelembagaan dan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan; (s) eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta, *schistosomiasis*, rabies, dan lain lain), serta rekayasa lingkungan dan biologis untuk pengendalian penyakit vektor lainnya; (t) mendorong promosi produk pangan olahan sehat, pengendalian produk berdampak negatif bagi kesehatan, seperti produk hasil tembakau, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak antara lain melalui pengenaan cukai, pembatasan iklan dan pelarangan promosi; (u) penguatan *surveilans*, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan penanganan bencana, serta pengendalian resistensi antimikroba; (v) penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan penguatan regulasi *pre-market*, penguatan pengawasan siber, dan *farmakovigilans*; (w) investasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran, jaringan puskesmas dan dan peningkatan peran kader kesehatan; serta (x) peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kualitas sumber daya manusia

kesehatan serta peningkatan kualitas pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan.

d. Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, mencakup (a) penguatan kapasitas dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan; (b) penyediaan fasilitas pendukung keluarga; (c) penguatan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan; (d) pemenuhan hak anak secara universal; (e) perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak; (f) peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak; (g) penguatan *resiliensi* anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko; (h) penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan; (i) peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi; (j) penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di proses pembangunan; (k) penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia; (l) mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; (m) mengintensifkan dan memperluas program peningkatan

kesadaran publik untuk tidak memarjinalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas; (n) mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum; (o) memperluas program pendidikan formal maupun non formal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan; (p) meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat; (q) mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas; (r) membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas; serta (s) memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk *stereotype*, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat.

e. Meningkatkan Prestasi Olahraga, mencakup (a) mendorong pembudayaan olahraga melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan penyelenggaraan

kompetisi/festival olahraga; (b) mengembangkan program siswa olahragawan (*student athlete program*) secara berjenjang dan berkelanjutan; (c) meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang terstandar dan ramah disabilitas, serta dikelola melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha; (d) mengembangkan jaminan kesejahteraan olahraga melalui skema insentif, kemitraan, pendanaan inovatif serta dukungan pasca karier; (e) memperkuat pembinaan olahragawan elit kelas dunia dalam pemusatan latihan nasional, didukung tenaga keolahragaan bersertifikat internasional.

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Keberlanjutan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam serta peningkatan nilai tambah di dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 4.12
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 5

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Rasio PDB Industri Pengolahan	%	19,9-20,0
Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	30,1-30,2
Ekspor Barang dan Jasa	%	21,0-21,6
Biaya Logistik (% PDB)	%	13,50

Keberlanjutan hilirisasi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru terutama akan dilakukan terhadap komoditas yang memiliki kenaikan nilai tambah tinggi, potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri dan rencana investasi, serta ketersediaan cadangan sumber daya alam. Untuk itu, komoditas prioritas hilirisasi yang akan dikembangkan menjadi produk berdaya saing tinggi adalah nikel, tembaga, bauksit, produk agro (seperti sawit, karet, kelapa, dan kakao) serta produk maritim (seperti rumput laut).

Keberlanjutan hilirisasi dan industrialisasi akan dilakukan melalui (1) pengembangan pembiayaan inovatif (*innovatif financing*) dan optimalisasi insentif fiskal/non fiskal untuk menarik investasi dalam rangka pendalaman struktur industri dan pengembangan industri yang berorientasi ekspor; (2) penguatan ekosistem industrialisasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri melalui peningkatan ketersediaan efisiensi faktor produksi (bahan baku/penolong dan energi), perbaikan produktivitas dan peningkatan jumlah tenaga kerja terampil dan profesional, adopsi teknologi dalam proses produksi, dan optimalisasi penerapan standarisasi; (3) aglomerasi industri secara merata dalam pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baik yang baru maupun yang sudah ada; (4) optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk

peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri secara bertahap; (5) penguatan industri kecil dan menengah sebagai rantai pasok industri besar dan sedang; (6) akselerasi penerapan industri hijau melalui dekarbonisasi industri, pemanfaatan teknologi bersih, dan sirkular ekonomi.

Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global yang mendukung perekonomian diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi, berdaya saing, dan mendukung partisipasi pada rantai pasok global dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, integrasi ekonomi domestik dan global akan berfokus pada (1) pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi melalui (a) penciptaan pusat pusat pertumbuhan baru, (b) penguatan ekosistem rantai pasok di pusat pertumbuhan, dan (c) peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru; (2) optimalisasi *backbone* dalam mendukung integrasi ekonomi melalui (a) standardisasi infrastruktur dan fasilitas pada pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama, serta (b) peningkatan konektivitas integrasi *hinterland* dengan simpul utama; (3) penguatan sistem logistik nasional melalui (a) penguatan kebijakan logistik, (b) pengintegrasian dan digitalisasi logistik, (c) pengembangan infrastruktur penunjang logistik, (d) penguatan pelaku logistik, serta (e) peningkatan sumber daya manusia

logistik; (4) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global melalui (a) peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi, (b) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global, serta (c) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik; (5) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global melalui (a) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan global; (b) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi; (c) peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi; (d) peningkatan ekspor pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam; (e) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif; (f) peningkatan ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah dan integrasi dalam rantai nilai global; (g) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk *electric vehicle*; serta (h) peningkatan utilisasi *Free Trade Agreement/ Comprehensive Economic Partnership Agreement* untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global.

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

Keberhasilan proses membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, dapat dilihat dari pencapaian target pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam sasaran pembangunan pada tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 4.13
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 6

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk	%	15
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	43,19
Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	%	22
Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional	%	44,34
Persentase desa mandiri	%	4
Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	67,00

Prioritas Nasional 6 ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan dilakukan melalui tiga arah kebijakan yaitu (1) membangun desa dan membangun dari desa; (2) pemerataan ekonomi; serta (3) memberantas kemiskinan.

Arah kebijakan membangun desa dan membangun dari desa dilaksanakan melalui:

a. Peningkatan daya saing, produktivitas, penguatan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan desa, melalui program sosial seperti Program

Keluarga Harapan, Dana Desa, Subsidi Pupuk, Mekar, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa.

b. Penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan produktivitas dan inklusivitas sektor ekonomi dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam dan potensi lokal desa.
c. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan permukiman, konektivitas, energi, telekomunikasi, dan informatika) guna mendukung terciptanya kualitas hidup rakyat di desa setara dengan di kota.
d. Pengelolaan keruangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa serta kawasan perdesaan.
e. Peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa.
f. Penyederhanaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel melalui perbaikan birokrasi, serta pemanfaatan sistem informasi desa.
g. Optimalisasi sinergitas dukungan pendanaan pembangunan desa dan kelurahan, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa serta memperluas cakupan transfer dana daerah ke kelurahan (Dana Kelurahan).

h. Pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa asimetris berbasis karakteristik dan potensi desa serta kawasan perdesaan.
i. Penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan pembangunan desa dan supra desa.
j. Pengelolaan urbanisasi melalui pembagian peran dan kewenangan penyediaan layanan dasar serta pengaturan penataan desa berkarakteristik urban (delineasi wilayah, kepadatan penduduk, dan tata ruang desa).
k. Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan.
l. Pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan yang tercakup pada kecamatan perbatasan prioritas dan pusat kegiatan strategis nasional sebagai upaya afirmasi pembangunan desa dari pinggiran.
m. Percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh (daerah tertinggal dan sangat tertinggal) didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah yang menyasar hingga ke akar masalah pembangunan di level desa/ kelurahan/ kampung.

Arah kebijakan pemerataan ekonomi dilaksanakan melalui:

a. Pembangunan 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar) menjadi kota layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan.
b. Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional dengan tata kelola berstandar global berdasarkan prinsip hijau dan berkelanjutan yang menjadi referensi pembangunan perkotaan lainnya di Indonesia, dan sekaligus menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh kerangka ekosistem kerja sama tiga kota (Nusantara–Balikpapan–Samarinda).
c. Peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan termasuk dalam rangka penanganan permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan atau perbaikan rumah layak huni berdasarkan karakteristik wilayah yang didukung dengan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau khususnya pembelian rumah pertama, penegakan implementasi standar keandalan bangunan hunian, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan berbasis sistem informasi.

d. Pemberdayaan serta penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan akses pembiayaan yang murah bagi usaha mikro.
e. Pengembangan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi penumpang dan barang yang memadai dengan tarif terjangkau, penyediaan layanan perintis serta pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation*.

Arah kebijakan pemberantasan kemiskinan di tahun 2026 dilaksanakan melalui (a) penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendorong penggunaan satu data terpadu dan sinergi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; (b) penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup secara berkesinambungan; (c) penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan adaptif sesuai dengan tingkat kerentanan penduduk; (d) peningkatan cakupan kepesertaan melalui penjangkauan berbasis keagenan maupun komunitas dan peningkatan literasi secara masif pada program jaminan sosial; (e) penguatan integrasi dan interoperabilitas data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya; (f) reformasi perlindungan hari tua, baik melalui bantuan maupun jaminan sosial; (g) penguatan inklusivitas program jaminan sosial termasuk

perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu, termasuk untuk penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (h) peningkatan koordinasi serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial; (i) pengembangan dan penyediaan layanan sosial dan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (j) akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan; (k) penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan. Pelaksanaan dilakukan secara nasional dengan mengutamakan lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan absolut tinggi, risiko kerentanan tinggi, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Keberhasilan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, dirumuskan dalam pencapaian sasaran pembangunan pada tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 4.14
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Return on Asset (ROA) BUMN	%	3,45
Indeks Integritas Nasional	Indeks	74,52
Indeks Materi Hukum	Indeks	0,51
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,68
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,00
Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	38
Indeks Pembangunan Hukum	Indeks	0,69
Rasio Perpajakan terhadap PDB	%	10,70–11,20
Tingkat Inflasi	%	1,5-3,5

Prioritas Nasional dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.

Arah kebijakan reformasi politik dilaksanakan melalui (1) mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi; (2) membangun *Single Identity Number* dan Sistem Informasi Administrasi dan *Data Base* Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu; (3) menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan

berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada; (4) menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki; dan (5) penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik.

Arah kebijakan juga difokuskan pada reformasi hukum, yang dilaksanakan melalui (1) mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai *think-tank* dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan, sebagai cikal bakal pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dalam rangka penguatan tata kelola regulasi; (2) meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan; (3) menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *center of excellence* dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; (4) memperkuat program edukasi anti korupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti korupsi di sektor swasta dan publik; (5) memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman; (6) meningkatkan pelayanan terhadap

seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri; (7) mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara dan peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa; (8) penguatan budaya hukum; serta (9) penguatan kelembagaan hukum melalui penguatan lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum.

Arah kebijakan yang difokuskan pada reformasi tata kelola pemerintahan meliputi (1) membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan *soft competency* Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum; (2) memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi *targeted talent* untuk mau bergabung; (3) mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi *future jobs* di era digital; (4) memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total *reward* dan manajemen talenta yang akan menentukan

perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara; (5) memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total *reward*, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja, dan kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara; (6) memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan *talent pool* dan mobilitas talenta; (7) memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional; (8) penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah; (9) penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional; (10) harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah melalui (a) penataan otonomi daerah menyasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta kebijakan kerja sama multi-aktor, (b) peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah, (c) pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik, serta (d) optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah); dan (11) penguatan manajemen kinerja pembangunan.

Reformasi tata kelola pemerintahan juga didukung oleh transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik yang dilaksanakan melalui (1) menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien; (2) digitalisasi pelayanan publik; (3) pengembangan talenta digital pelayanan publik; (4) penguatan ekosistem digital pelayanan publik; dan (5) perluasan akses pelayanan publik. Di samping itu, tata kelola pemerintahan juga mencakup reformasi tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, melalui (1) optimalisasi pendapatan negara, (2) optimalisasi belanja negara, dan (3) perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan (pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang yang kredibel). Tata kelola pemerintahan juga mencakup upaya peningkatan harmonisasi kebijakan moneter fiskal, sektor keuangan dan sektor riil sebagai stabilisator perekonomian sekaligus juga sebagai stimulator pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Arah kebijakan yang difokuskan pada pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui (a) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah; (b) memperkuat lembaga rehabilitasi

penyalahgunaan narkoba; (c) meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa; (d) meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba; (e) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan narkoba, serta (f) meningkatkan kemampuan *surveillance* dan intelijen pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Arah kebijakan yang difokuskan pada penanggulangan judi dan penyelundupan melalui (a) menutup semua akses ke situs perjudian online, (b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, (c) meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerja sama dengan berbagai pihak, (d) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia, serta (e) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal.

8. Memperkuat Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan

makmur, pada tahun 2026 dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut.

Tabel 4.15
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 8

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	58,39
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	76,77
Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB	%	0,137

Arah kebijakan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang difokuskan pada:

1. Masyarakat adil, makmur, dan harmonis, melalui (a) mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang berkebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antar umat beragama serta sesama anak bangsa; (b) mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; (c) mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar-elemen masyarakat sejak dini; (d) mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan

pengajaran, baik yang bersifat formal maupun non formal; (e) menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya; (f) menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; (g) memperkuat moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan; (h) meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan; (i) memperkuat jaminan produk halal dalam rangka layanan keumatan sekaligus mendukung ekosistem industri halal; (j) meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, aman, dan nyaman; (k) merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama yang berkualitas dan merata; (l) meningkatkan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan; serta (m) mengembangkan dana sosial keagamaan yang produktif.

2. Melestarikan budaya, melalui (a) meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan; (b) menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital; (c) membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan termasuk bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia; (d) merevitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilai-nilai

luhur bangsa bagi generasi muda; (e) membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan, pengembangan, dan pemajuan seni-seni tradisional Indonesia; (f) memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi, rendahnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya; (g) mengalokasikan dana budaya dan memperbesar dukungan pendanaan untuk mendorong kemandirian komunitas-komunitas seni budaya di seluruh Indonesia; (h) melengkapi pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi seni tradisional Indonesia; (i) membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara; (j) memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya; (k) menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia; (l) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia; (m)

mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi seni masyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan kreativitas; (n) menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum; (o) memperkuat karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila; (p) mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan; (q) memperkuat jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; (r) mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia; (s) mengembangkan budaya bahari dan merevitalisasi jalur rempah; serta (t) melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.

3. Penanganan bencana, melalui (a) meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana; (b) memperkuat sistem deteksi bencana (*early warning system*) dengan penerapan teknologi terkini; (c) meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut; (d) membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana; (e) menata

koordinasi antar lembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana; (f) mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana; (g) menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana; (h) pemanfaatan ruang budi daya yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana; (i) mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi bidang penanggulangan bencana; (j) mengurangi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim khususnya pada empat sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan dengan melakukan intervensi aksi ketahanan iklim; serta (k) meningkatkan keandalan pencarian dan pertolongan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2025-2029 yang difokuskan kepada penguatan sektor strategis dalam peningkatan ekonomi daerah, selain itu, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 juga disusun mempertimbangkan ketidakpastian perkembangan ekonomi global, regional dan lokal serta guna

mendukung pencapaian Tema RKP, yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026. Arah kebijakan serta sasaran pembangunan daerah tahun 2026 akan difokuskan pada pencapaian Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yakni "Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yakni :

1. Transformasi sektor strategis difokuskan pada 3 sektor strategis Sumatera Barat dengan distribusi PDRB terbesar yakni Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Industri serta Sektor bagi penumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat yakni sektor Pariwisata, yang ditandai dengan indikator kinerja yakni :
    a. Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan target sebesar Rp.81.970.058.
    b. Konstribusi Sektor Industri terhadap PDRB, dengan target sebesar 8,61-8,70%.
    c. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, dengan target sebanyak 1,48%.
    d. Persentase Konstribusi Pariwisata pada PDRB, dengan target sebesar 1,37%.
    e. Persentase Konstribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB, dengan target sebesar 1,11%.

f. Rasio kewirausaahan Provinsi, dengan target sebesar 3,88%.

g. Rasio Pajak Daerah PDRB, dengan target sebesar 1,2%.

2. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada:

a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, yang ditandai dengan indikator kinerja yakni :

- Laju Pertumbuhan Ekonomi, dengan target sebesar 5,5%.
- PDRB ADHB Per Kapita, dengan target sebesar Rp.69,59 juta.
- Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan target 5,34%.

b. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang memastikan bahwa ekonomi yang tumbuh juga merata dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, yang ditandai dengan indikator kinerja yakni :

- Rasio Gini, dengan target sebesar 0,281.
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, dengan target 60,1%.
- Tingkat Kemiskinan, dengan target sebesar 4,27-4,87%.
- Pengeluaran Riil Perkapita, dengan target sebesar Rp.12.074 ribu.

c. Perluasan Akses dan Kesempatan yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses

terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kuallitas Sumber Daya Manusia, yang di tandai dengan indikator kinerja yakni:

- Indeks Pembangunan Manusia, dengan target sebesar 77,48.
- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan, dengan target sebesar 44,16%.
- Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman, dengan target sebesar 10,57%.
- Prevalansi Stunting, dengan target sebesar 19.25%.
- Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan, dengan target sebesar 98,88%.

Prioritas pembangunan pada tahun 2026 merupakan prioritas yang sama pada tahun 2025-2029, hal ini agar terjadinya konsistensi pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya serta menjaga agar arah pembangunan RPJMD tetap terjaga, sehingga hasil akhir di tahun 2029 dapat terwujud sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2026 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

1. Prioritas Pembangunan 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing.

Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Kualitas Pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkreativitas, berinovasi dan berdaya saing. Era globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi dengan kualifikasi tertentu yang ditandai dengan sertifikat kompetensi. Selain pendidikan berkualitas, pada Prioritas ini juga ingin mewujudkan sumber daya manusia yang terampil yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan akal/ pikiran/ ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna,sehingga mampu berdaya saing. Kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat diyakini akan meningkat dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Prioritas Pembangunan 2: Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah.

   Falsafah budaya Minangkabau dalam *Adaik Basandi Syara', Syara'Basandi Kitabullah* merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal-vertikal maupun horizontal-horizontal.

   Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pergumulan tentang perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling topang menopang membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.*

   Nilai-nilai filosofis ABS SBK akan terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat jika nilai-nilai tersebut secara masif disosialisasikan serta diajarkan kepada seluruh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya nilai-nilai

ABS-SBK tersebut menjadi kurikulum lokal yang diajarkan di setiap jenjang Sekolah dasar dan Menengah.

3. Prioritas Pembangunan 3: Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

   Pertanian dalam arti luas menjadi sektor strategis dalam pembangunan di Sumatera Barat karena beberapa alasan antara lain karena lebih dari 20% struktur perekonomian di Sumatera Barat di topang dengan sektor pertanian, selain itu sektor ini juga berperan dalam penyediaan suplai bahan pangan (tidak hanya untuk daerah Sumatera Barat tetapi juga provinsi tetangga), adanya potensi pengembangan agroindustri, didukung oleh kemampuan menghasilkan bahan baku yang dapat mendukung pengembangan dalam jangka panjang.

   Fokus perhatian perlu diarahkan kepada upaya peningkatan efisiensi kegiatan produksi dan peningkatan nilai tambah (melalui pengembangan agroindustri) dengan mengaplikasikan pendekatan pembangunan kawasan, peningkatan aplikasi teknologi dan upaya membuka peluang pasar yang lebih besar. Dalam kaitan dengan aplikasi teknologi ini ada kecenderungan bahwa tingkat aplikasi teknologi oleh petani/pelaku usaha masih rendah sementara ada banyak produk teknologi yang sudah disediakan atau dihasilkan. Dalam kaitan ini perlu menjadi perhatian upaya penyuluhan dan alih teknologi

pertanian yang memungkinkan petani mengatasi permasalahan usaha dan memanfaatkan sumberdaya lokal.

4. Prioritas Pembangunan 4: Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/ Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital.

   Prioritas pembangunan ini untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan Industri Kecil di Sumatera Barat. Secara struktur ekonomi Sumatera Barat juga di dominasi oleh Perdagangan dan juga Industri Pengolahan, meskipun tidak sebesar Sektor Pertenian, Kehutanan dan Perikanan, namun sektor perdagangan dan industri kedepan harus dikembangan sebagai sektor yang diyakini mampu meningkatan tingkat pendapatan masyarakat sehinnga Sumatera Barat dapat keluar dari *middle income trap*.

   Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di pesisir barat pusal Sumatera merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang tergabung dalam *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat.

5. Prioritas Pembangunan 5: Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan.

   Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang diharapkan menjadi industri dan salah satu basis pembangunan Sumatera Barat untuk kedepannya di samping pertanian. Sehingga proritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan salah satunya adalah meningkatkan kompetensi pihak pengelola sumber daya wisata atau sumber daya penunjang wisata agar dapat mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan. Pariwisata dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki *multiplier effect* yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/ minum, dan jasa-jasa. Dalam pengembangan sektor pariwisata, Sumatera Barat mengambil langkah pengembangan pariwisata berbasis komunitas atau *Community Based Tourism* (CBT) yang berarti memberikan pemberdayaan yang lebih demokratis dengan memberikan kesempatan atau akses kepada masyarakat setempat dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata serta menikmati hasilnya secara lebih adil dan merata.

Pariwisata berbasis komunitas atau *Community Based Tourism* (CBT) juga memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal atau sebagai upaya untuk mengelola sumber daya setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Syarat-syarat dari pariwisata berbasis komunitas *Community Based Tourism* (CBT) adalah memberdayakan dan melibatkan masyarakat untuk memastikan kepemilikan dan transparansi dalam pengelolaan, membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan, dapatkan posisi yang valid dengan otoritas terkait, meningkatkan martabat manusia dan kesejahteraan sosial, mekanisme pembagian manfaat yang adil dan transparan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, menghormati warisan budaya lokal, berpartisipasi aktif dalam konservasi sumber daya alam, meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dengan meningkatkan kualitas interaksi dan bertujuan untuk membentuk kemandirian masyarakat.

6. Prioritas Pembangunan 6: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

   Prioritas pembangunan ini untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk

beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi). Sehingga pada prioritas ini akan di fokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar yang berkualitas, penyediaan infrastruktur konektivitas untuk meminimalisir ketimpangan wilayah dengan tidak mengesampingkan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan. Disamping itu mengingat Sumatera Barat juga merupakan kawasan yang dengan indeks risiko bencana yang relatif tinggi, ketahanan bencana juga menjadi prioritas utama.

7. Prioritas Pembangunan 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas

   Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima bertujuan untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat

memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Proses transformasi pemerintahan di daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah saatnya mendapat perhatian. Untuk itu, dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien yang berlandasan dalam prinsip *good and clean government*. Penataan kelembagaan ini termasuk bagaimana menyesuaikan jenis, ukuran dan jumlah SKPD yang relevan dengan SDM dan keuangan yang tersedia untuk melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah agar efektif dan efisien. Tidak kalah pentingnya adalah dengan cara peningkatan penerapan sistem nilai melalui pembentukan pola pikir dan budaya kerja serta integritas birokrasi, peningkatan kualitas pengawasan yang independen, profesional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta peningkatan kualitas kepatuhan, transparansi dan profesionalisme aparatur.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, menjelaskan titik tekan pembangunan tahun berkenaan berdasarkan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Pembangunan ekonomi tahun 2026 akan dilaksanakan dengan semangat percepatan transformasi ekonomi, memperhatikan strategi pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan, sehingga arah kebijakan tahunan yang dituangkan dalam tema pembangunan yaitu "Penguatan Infrastruktur Daerah untuk Peningkatan Produktivitas menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif", yaitu:

1. Menyediakan dan memfasilitasi ketersediaan infrastruktur ekonomi pada pusat atau kawasan ekonomi unggulan daerah seperti pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata, dengan arah kebijakan antara lain:
    a. Membuka akses jalan menghubungkan pusat-pusat ekonomi, sosial, sistem jaringan dan sampul transportasi serta pusat pemerintahan.
    b. Pengembangan kawasan strategis daerah.
    c. Penguatan pelabuhan pengumpan dalam mendukung sistem transportasi daerah.
    d. Peningkatan layanan transportasi darat, laut.
    e. Fasilitasi dan mendorong perluasan dan peningkatan kualitas data dan telekomunikasi.

f. Percepatan penyediaan ases air bersih untuk masyarakat perdesaan.
g. Pembangunan destinasi wisata 3M1K (Mapadegat, Muntei, Madobag, Katiet).

2. Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi melalui pelatihan, penyuluhan, jejaring usaha, akses keuangan perbankan, penguatan kelembagaan, dengan arah kebijakan antara lain:
   a. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.
   b. Pendampingan kelompok usaha masyarakat, pemberdayaan masyarakat.
   c. Pendampingan kewirausahaan hulu hilir (peningkatan kapasitas, bisnis proses, akses finansial, akses pasar).
   d. Pembinaan tata kelola penyediaan air minum berbasis masyarakat.
   e. Pembinaan pembangunan desa wisata.
   f. Pendampingan industri pengolahan perikanan.
   g. Pendampingan budidaya perikanan.
   h. MoU dengan pasar atau badan usaha.
3. Mendorong transformasi ekonomi pada peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah.
   a. Hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan unggulan daerah (pisang, kepala. sagu dan ikan).
   b. Pengembangan komoditi pertanian yang berorientasi pasar.

c. Pembinaan hulu hilir pelaku usaha atau wirausaha (*enterprenuer*).

d. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

e. Kemudahan perizinan.

Tema pembangunan daerah ini diwujudkan dalam 6 prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan sebagai bagian dari arah kebijakan pada RPJMD Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Pembangunan Infrastruktur Jalan

   Pembangunan Infrastruktur Jalan, yaitu membangun jalan yang menghubungkan dusun ke dusun, dusun dengan desa, desa dengan kecamatan sehingga pergerakan orang dan barang lancar dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat tidak terganggu.

Tabel 4.16
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Infrastruktur Jalan Tahun 2026

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan		
1	Indeks Kualitas Infrastruktur	55,00
2	Indeks masyarakat digital indonesia	55,28
3	Konsumsi listrik per kapita (kwh/kapita)	310
4	Persentase kawasan /wilayah pertumbuhan yang terhubung	10
Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif		
1	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,0125
2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (%)ds	9,81
Meningkatnya Desa Mandiri		
1	Persentase Desa Mandiri (%)	9,30
Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan		
1	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	46,94
2	RT dengan Akses Sanitasi Aman	76
3	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16,26
4	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman	9,81

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
Meningkatnya pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan		
1	Indeks tutupan lahan (Indeks)	95,95
2	Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16,26
3	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	33,14
4	RT dengan Akses Sanitasi Aman (%)	76
Menurunnya risiko terhadap dampak bencana		
1	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	160,96

Ket: target pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan infrastruktur jalan difokuskan pada:

1. Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Pembangunan jalan Trans Mentawai.
3. Membuka akses jalan menghubungkan pusat-pusat ekonomi, sosial, budaya, sistem jaringan dan simpul transportasi serta pusat pemerintahan.
4. Integrasi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan *stunting*.
5. Pembangunan sistem layanan irigasi.
6. Penyediaan air baku.
7. Pengendalian abrasi sungai dan pantai.
8. Penanaman kembali lahan krisis pesisir pantai.
9. Revisi RTRW kabupaten.
10. Penyusunan regulasi rencana rinci tata ruang.
11. Penyediaan sistem informasi tata ruang.
12. Pengembangan kawasan strategis daerah

13. Penguatan pelabuhan pengumpan dalam mendukung sistem transportasi daerah.
14. Peningkatan layanan transportasi darat, laut.
15. Fasilitasi dan mendorong perluasan dan peningkatan kualitas data dan telekomunikasi.
16. Pengembangan SPBE (e-goverment).
17. Pembukaan jalan untuk mendukung perluasan transmisi PLN.
18. Pengembangan kawasan permukiman.
19. Pembangunan SPAM di desa prioritas (Muara Siberut, Sioban, Tuapejat).
20. Fasilitasi pembangunan SPAM (Sikabaluan).
21. Percepatan penyediaan kases air bersih untuk masyarakat perdesaan.
22. Pembinaan tata kelola penyediaan air minum berbasis masyarakat.
23. Pembangunan TPST Tuapejat.
24. Pembangunan TPS Kecamatan
25. Pengadaan sarana dan prasana persampahan.
26. Pengelolaan persampahan.
27. Pembangunan PSU di kawasan permukiman.

Pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan pembangunan infrastruktur jalan dilaksanakan dengan program prioritas seperti pada berikut ini.

Tabel 4.17
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Infrastruktur Jalan Tahun 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Pembangunan Infrastruktur Jalan			
1	Program Penyelenggaraan Jalan	55.237.659.166	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	14.712.267.402	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Program Penataan Bangunan Gedung	12.964.372.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.400.000.000	Dinas Perhubungan
5	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.651.386.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	20.266.479.732	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	337.344.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.590.339.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.677.861.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL		115.837.709.000	

Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan tahun 2026 dalam pelaksanaannya didukung 9 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.115.837.709.000.

2. Pemerataan Jaringan Listrik

   Pemerataan jaringan listrik untuk semua wilayah, yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan pihak terkait seperti BUMN (PT. PLN), Kementerian ESDM dan pihak-pihak lainnya. Selain itu, juga kita dapat memberikan bantuan pemasangan listrik bagi masyarakat yang tidak mampu serta memberikan dukungan pada penyediaan akses jalan untuk pengembangan

dan perluasan transmisi listrik pada daerah-daerah yang masih belum dapat dijangkau PLN.

Tabel 4.18
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pemerataan Jaringan Listrik Tahun 2026

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan		
1	Konsumsi listrik per kapita (kwh/kapita)	310
2	Persentase kawasan /wilayah pertumbuhan yang terhubung	10

Ket: target pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

Prioritas ini dilakukan melalui dukungan peningkatan kapasitas produksi listrik di Kepulauan Mentawai melalui fasilitasi koordinasi dan bekerjasama dengan PLN. Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi daerah.

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pemerataan Jaringan Listrik pada Tahun 2026 difokuskan pada:

1. Pembukaan jalan dalam rangka membuka akses untuk mendukung perluasan transmisi PLN.
2. Penyediaan listrik bagi kawasan permukiman melalui fasilitasi listrik bagi keluarga miskin baik pendanaan APBD Provinsi ataupun melalui kementerian/Lembaga dan swasta.

Tabel 4.19
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pemerataan Jaringan Listrik Tahun 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pemerataan Jaringan Listrik			
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.069.078.400	Sekretariat Daerah
2	Program Penyelenggaraan Jalan	55.237.659.166	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL		56.306.737.566	

Program prioritas mendukung prioritas pembangunan Pemerataan Jaringan Listrik Tahun 2026 dalam pelaksanaannya didukung 2 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.56.306.737.566.

3. Penyediaan Internet

Penyediaan jaringan Internet, yaitu dengan menyediakan fasilitas internet untuk mendukung layanan dasar dan layanan publik yang kita alokasikan melalui APBD. Seiring dengan itu, tetap dilakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dan berkualitas agar beberapa *blank spot* dapat diatasi serta peningkatan kualitas sinyal dan data pada daerah yang telah terbangun.

Tabel 4.20
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Penyediaan Internet Tahun 2026

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan		
1	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	55,28
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel		
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,14

Ket: target pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

Prioritas penyediaan listrik di Kepulauan Mentawai difokuskan pada optimalisasi pelayanan dasar dan pelayanan publik yang responsif, begitu juga untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, serta dalam mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga terwujud pelayanan pemerintahan yang prima dan handal.

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Penyediaan Internet pada Tahun 2026 difokuskan pada:

1. Pengadaan layanan internet (*starlink*) pada seluruh satuan pendidikan (TK, SD, SMP).
2. Pengadaan layanan internet (*starlink*) pada pemerintahan desa.
3. Pengadaan layanan internet (*starlink*) pada pusat layanan pemerintahan (kantor cabang/korwil, kecamatan, UPTD).
4. Penyediaan *wifi* gratis pada *spot* tertentu bagi masyarakat untuk menggali potensi, dan memberi ruang untuk berkreasi dan menjadi ruang imbal balik kepada pemerintah daerah.

Tabel 4.21
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Penyediaan Internet Tahun 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Penyediaan Internet			
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.651.386.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	473.523.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Program Pengelolaan Pendidikan	64.825.317.750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
TOTAL		67.950.226.750	

Program prioritas mendukung prioritas pembangunan Penyediaan Internet Tahun 2026 dalam pelaksanaannya didukung 3 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.67.950.226.750.

4. Pembangunan Air Bersih

Pembangunan Air Bersih, yaitu optimalisasi SPAM yang sudah ada sehingga berfungsi dan dapat melayani kebutuhan air masyarakat, meningkatkan kualitas air. Untuk wilayah yang belum dapat di jangkau oleh SPAM, dapat melalui penyediaan air bersih berbasis masyarakat sehingga perlu tata kelola air bersih kepada masyarakat serta program penyediaan air bersih non perpipaan juga menjadi solusi jangka pendek.

Tabel 4.22
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Air Bersih Tahun 2026

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif		
1	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,0125
2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (%)ds	9,81

Ket: target pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

Prioritas pembangunan air bersih di Kabupaten Kepulauan Mentawai fokus pada penyediaan air bersih pada 10 SPAM yang ada, selain tersedia juga dipastikan air yang mengalir berkualitas (layak dan aman) untuk dikonsumsi masyarakat. Selain itu, juga menyediakan pembangunan air bersih berbasis masyarakat untuk membuka akses air bersih kepada masyarakat yang belum terlayani melalui sistem penyediaan air minum daerah yaitu

dengan pembangunan Pamsimas dengan memastikan tata kelola dan keberlanjutan pengelolaannya oleh pemerintahan desa. Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Air Bersih pada Tahun 2026 difokuskan pada:

1. Pengelolaan air bersih melalui badan profesional oleh BUMD/Perusda.
2. Optimalisasi SPAM yang ada dan memastikan ketersediaan dan kualitas air yang disalurkan.
3. Penyediaan air bersih berbasis masyarakat (Pamsimas) untuk wilayah yang belum dijangkau oleh SPAM.
4. Penyediaan air bersih non perpipaan untuk daerah yang mengalami kesulitan akses air bersih.

Tabel 4.23
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Air Bersih Tahun 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Air Bersih			
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	20.266.479.732	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	20.576.090.634	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL		33.091.423.366	

Program prioritas mendukung prioritas Pembangunan Air Bersih Tahun 2026 dalam pelaksanaannya didukung 2 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.33.091.423.366.

5. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pada dimensi pendidikan, pembangunan harus memastikan bahwa akses layanan pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, tanpa memperhatikan gender dan memperhatikan masyarakat yang memerlukan perhatian khusus (penyandang disabilitas), dan berpihak pada masyarakat rentan/miskin/miskin ekstrem. Penyediaan sarana dan prasarana utama pendidikan yang menjadi tantangan karena Kepulauan Mentawai yang luas, begitu juga dengan karakteristik wilayah dan permukiman masyarakat yang tersebar di mana akses transportasi darat belum ada dan layanan pendidikan terdekat belum tersedia sehingga masyarakat harus berpikir untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan baik SD, SMP maupun SMA. Begitu juga dengan dalam hal pemerataan penguasaan bidang sains dasar, bahasa dan matematika. Ini membawa akibat pada keberlanjutan pendidikan yang terhambat pada masalah mutu. Kemampuan literasi dan numerasi yang masih rendah sehingga memerlukan strategi khusus untuk mengatasinya. Di sisi lain, dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing sedangkan masyarakat Mentawai didominasi dengan mata pencarian di sektor primer akan sulit untuk melanjutkan pendidikan di jenjang S1 ataupun diploma (vakasi) sehingga butuh intervensi yang terukur pemerintah

daerah untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia.

Pada dimensi kesehatan, akses layanan kesehatan, alat kesehatan dan ketersediaan tenaga medis masih menjadi perhatian kedepan. Sistem kesehatan daerah dengan konsep kepulauan mengharuskan adanya rumah sakit rujukan yang berkualitas dan representatif di setiap pulau besar. Memastikan tenaga kesehatan dan alat kesehatan tersedia dan merata disetiap layanan kesehatan. Memastikan layanan rujukan tidak mengalami kendala/hambatan melalui pengadaan ambulans laut. Pengembangan RSUD ke tipe C, dan pembangunan puskesmas untuk daerah yang masih kesulitan akses kesehatan seperti pada lokasi Desa Sagulubbeg, Desa Sinaka dan Desa Silabu. Tantangan kedepan dalam pembangunan manusia adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat tingginya angka *stunting* daerah. Permasalahan gizi juga berdampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu masih tingginya prevalensi anak balita pendek (*stunting*). *stunting* adalah sebuah kondisi berdasarkan pengukuran Tinggi Badan menurut Umur seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan yang seusianya berdasarkan standar yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak

berusia 2 (dua) tahun. Dalam jangka pendek, *stunting* menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme karena pengasuhan dan praktik pemberian makanan pendamping ASI yang belum lengkap, selain dari masalah rendahnya imunisasi lengkap dan sanitasi. Dalam jangka panjang, *stunting* menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual dan akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Pembangunan manusia kedepan akan diperhadapkan pada eksistensi dan pola hidup yang modern sehingga potensi kehilangan jati diri, budaya, nilai-nilai luhur, kearifan lokal akan sangat besar. Pembangunan kebudayaan sudah mulai sedini mungkin menjadi bagian pembangunan manusia baik di tingkat pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA bahkan di jenjang perguruan tinggi. Pembangunan kebudayaan ke depan akan menjadi bagian dari pembangunan manusia dengan elaborasi kebijakan yang inklusif yang non-diskriminatif, ramah pada penyandang disabilitas, tidak membeda-bedakan (gender) berdasarkan partisipasi masyarakat lokal dan unsur-unsur nilai kebudayaan.

Pembangunan harus menjadikan manusia sebagai subjek yang produktif. Menciptakan wirausaha (*enterprenuer*) bukan sekedar melakukan pelatihan atau memberikan sarana dan prasarana latihan, namun hal yang lebih bernilai adalah

eksistensi, konsistensi dan kontiniunitas wirausaha atau pelaku usaha dalam mengembangkan potensinya. Pendampingan calon pelaku usaha/ wirausaha di Kepulauan Mentawai harus dilakukan, stigma terhadap memulai usaha harus memliki modal dana yang besar menjadi alasan utama masyarakat sulit untuk mengembangkan diri. Pemanfaatan teknologi informatika menjadi tantangan dan peluang dalam memulai dan mengembangkan peluang usaha sehingga diperlukan inovasi pendampingan calon wirausaha mulai dari hulu peningkatan kapasitas/ pelatihan, bisnis proses, hingga dihilirnya yaitu pangsa pasar yang tersedia menjadi proses yang satu kesatuan dalam pendampingan ke depan.

Tabel 4.24
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Sumber Daya Manusia Tahun 2026

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
Meningkatnya Mutu Pendidikan		
1	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	L = 42,02 N=10,35
2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8.56
3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,42
4	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (persen)	13,09
Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat		
1	Usia Harapan Hidup	71,37
2	Angka Kematian Ibu	235
3	Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	30
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	84,5
5	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	82,8
Meningkatnya Produktivitas Masyarakat yang Inklusif		
1	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	99,32
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,24-8,34

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
3	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	51,22
4	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	15,64

Ket: target pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

Prioritas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Mentawai fokus penguatan layanan pendidikan dan kesehatan disertai dengan peningkatan produktivitas masyarakat khususnya masyarakat miskin. Adapun arah kebijakan pada prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2026 difokuskan pada:

1. Penyediaan akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.
2. Beasiswa pendidikan berprestasi.
3. Pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.
4. Pemberdayaan masyarakat miskin.
5. Perlindungan sosial secara menyeluruh bagi masyarakat miskin.
6. Akses layanan publik gratis bagi masyarakat miskin.

Tabel 4.25
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Sumber Daya Manusia Tahun 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Sumber Daya Manusia			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	64.825.317.750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	73.301.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	40.868.722.883	Dinas Kesehatan/ RSUD

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.719.440.000	Dinas Kesehatan
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	139.349.800	Dinas Kesehatan
6	Program Pemberdayaan Sosial	260.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Program Rehabilitasi Sosial	600.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	130.422.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	500.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TOTAL		114.116.553.433	

Program prioritas mendukung prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 dalam pelaksanaannya didukung 9 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.114.116.553.433.

6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita

   Peningkatan pendapatan masyarakat daat dilihat dari meningkatnya produktivitas di setiap sektor ekonomi masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata.

   Reformasi struktur ekonomi daerah dari yang bertumpu pada sektor primer (*raw material*) ke sektor perdagangan/jasa atau pada sektor industri. Kepulauan Mentawai dengan potensi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang besar dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi (tren pertumbuhan ekonomi

stagnan) sehingga permasalahan pembangunan seperti pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan dapat diatasi. Hilirisasi penting dilakukan untuk memperbaiki produktivitas dan peningkatan daya saing. Hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pengembangan BUMD/BUMDes dan koperasi yang siap sebagai pelopor pembangunan ekonomi di daerah dan di desa, ini yang harus diseriusi dan dipastikan bertumbuh. BUMD fokus pada skala lebih besar dan BUMDes pada skala desa, keduanya mendorong peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan pemanfaatan potensi lokal. Begitu juga dengan koperasi yang memiliki peran penting dalam kemajuan daerah dan desa, yaitu dengan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan, pelatihan, dan pendampingan, serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum.

Sebagai destinasi pariwisata yang telah dikenal hingga mancanegara, tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan segala sumber daya baik itu amenitas, aksesiblitas, atraksi, sumber daya manusia, dan menjaga kelestarian kawasan destinasi. Menjadi bagian dari destinasi prioritas yang telah ditetapkan, Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berbenah dalam mempersiapkan

destinasi kawasan pariwisata dengan menjalin kerjasama/ kolaborasi di setiap sektor baik di internal pemerintah daerah maupun di luar pemerintah daerah, pihak swasta, pelaku ekonomi kreatif, investor. Selain itu pendampingan kawasan desa wisata yang bagian terintegrasi dengan pengembangan destinasi pariwisata prioritas daerah menjadi hal penting dilakukan agar citra dan *length of stay* semakin baik, begitu juga dengan pengalaman/*experience* lebih bermakna.

Tabel 4.26
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Peningkatan Pendapatan Per Kapita Tahun 2026

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		
	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	47,13
	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	201,59
	Proporsi jumlah UKM non pertanian	200,58
	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	0,372
Meningkatnya Investasi, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/ Hilirisasi		
	ROA BUMD	0,4060
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	2,701
	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0,872
	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	19,718
	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	1,064
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,1649
	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	
	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	31,08
	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	47,25
	Total Kredit/PDRB	6,04
	Proporsi PDRB Jasa Keuangan	0,1185
	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	6,02
	Aset Dana Pensiun/PDRB	9,40
	Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	10.501.288.876,24
Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas		
	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.31
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	72,82
	Rasio Kewirausahaan	1,79
	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	83.88
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam pembangunan Daerah		
	Persentase retribusi terhadap PAD	0,872

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,1649
Meningkatnya Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat		
	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	1,064

Ket: target pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

Prioritas pembangunan Peningkatan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Kepulauan Mentawai fokus tranformasi ekonomi dalam rangka peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Adapun arah kebijakan pada prioritas Peningkatan Pendapatan Per Kapita pada Tahun 2026 difokuskan pada:

1. Investasi dalam Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Pengembangan Sektor Produktif.
3. Peningkatan Investasi dan Iklim Usaha
4. Penyediaan akses sarana dan prasarana pertanian.
5. Pengembangan Ekonomi Pedesaan
6. Akses Keuangan Inklusif

Tabel 4.27
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Peningkatan Pendapatan Per Kapita Tahun 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Peningkatan Pendapatan Per Kapita			
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.277.461.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.558.406.400	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.499.601.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Program Penyuluhan Pertanian	481.152.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Program Pengembangan UMKM	2.001.732.400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
			Perdagangan
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	542.123.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
7	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.000.000.000	Dinas Perikanan
8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	34.160.000	Dinas Perikanan
TOTAL		13.394.636.900	

Program prioritas mendukung prioritas Peningkatan Pendapatan Per Kapita Tahun 2026 dalam pelaksanaannya didukung 8 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.13.394.636.900.

Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengambil peran dan turut mendukung pencapaian 8 (delapan) Prioritas Nasional, sehingga terwujudnya keselarasan proritas Pembangunan baik tingkat nasional maupun di daerah. Adapun penyelarasan dan dukungan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.28
Dukungan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.	Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		Pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme.		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z.		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
				Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
				Pelaksanaan tugas Paskibraka
				Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
				Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
				Pembentukan Paskibraka
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten/kota.
		Mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Penyehatan media arus utama dan peningkatan kapasitas lembaga dan insan pers	Relasi Media
				Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				Pelayanan Informasi Publik
				Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
				Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
				Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
				Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
		Menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas.		

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum.		
		Penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan		
		Peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif.		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik	Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat.	Diseminasi Informasi
				Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				Pelayanan Informasi Publik
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
				Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
				Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
		Pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri	Penyehatan media arus utama dan peningkatan kapasitas lembaga dan insan pers	Relasi Media
				Penyusunan Konten
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
				Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
				Diseminasi Informasi
				Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				Pelayanan Informasi Publik
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
				Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
				Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
				Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
		Peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan *stereotip* gender.		Relasi Media
				Penyusunan Konten
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
				Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
				Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku.	Transformasi pengarusutamaan HAM	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
		Memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya.	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan bantuan hukum	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten/Kota
				Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
				koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.		Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
				Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
				koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya.	Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perlindungan dan pemulihan saksi dan korban	Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi.
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
				Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Alat Bantu
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
		Transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI.	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest.*	
		Memperkuat komponen cadangan.	Penguatan kapabilitas pertahanan termasuk CBRNE, penyempurnaan doktrin, penguatan postur, dan penguatan operasi lintas medan	
		Meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara.	Penguatan intelijen dan kontra intelijen	
		Memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber.	Operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum *essential force* dalam rangka meningkatkan Penguatan kapabilitas pertahanan termasuk CBRNE, penyempurnaan doktrin, penguatan postur, dan penguatan operasi lintas medanefektivitas menjaga kedaulatan NKRI.	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest.*	
		Meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar.	Pengawasan dan pemeliharaan keamanan laut di ALKI dan *choke point*	
		Memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan	Pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Bidang Negara,

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		penanggulangan aksi terorisme.		Fasilitasi Kelembagaan Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Bidang Negara, Fasilitasi Kelembagaan Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Bidang Negara, Fasilitasi Kelembagaan Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
		Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest.*	
		Pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest.*	
		Menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan	1. Pengembangan pangan akuatik. 2. Pengembangan pangan hewani. 3. Pengembangan pangan nabati. 4. Penguatan cadangan pangan. 5. Penjaminan mutu dan keamanan pangan. 6. Peningkatan produktivitas	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			hutan. 7. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri. 8. Penguatan pengelolaan hutan lestari. 9. Pemulihan ekosistem yang terdegradasi. *10.* Pemulihan luas lahan mangrove	
				Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil.
				Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
				Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
				Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
				Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
				Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				berdasarkan skala usaha dan risiko
				Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan perikanan mutu untuk dan skala keamanan usaha mikro hasil dan skala usaha kecil.
				Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan perikanan mutu untuk dan skala keamanan usaha mikro hasil dan skala usaha kecil
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
				Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
				Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
				Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
				Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
				Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
				Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
		Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio	1. Pengembangan pangan nabati. 2. Peningkatan produktivitas hutan. 3. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri. 4. Penguatan pengelolaan hutan lestari.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
		Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (*digital farming*), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian.	1. Pengembangan pangan hewani. 2. Pengembangan pangan nabati. 3. Penguatan cadangan pangan. 4. Penjaminan mutu dan keamanan pangan.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Biji/Benih
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
				Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
				Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
				Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
				Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kabupaten/Kota
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
				Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
				Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
		Mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya	1. Pengembangan pangan hewani. 2. Pengembangan pangan nabati. 3. Penguatan cadangan pangan. 4. Penjaminan mutu dan keamanan pangan.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
				Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Pemantauan Stok Pangan
				Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
				Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
				Penyusuna kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabuapaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
				Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
		Merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional	1. Peningkatan produktivitas hutan. 2. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri. 3. Penguatan pengelolaan hutan lestari. 4. Pemulihan ekosistem yang terdegradasi. 5. Pemulihan luas lahan mangrove	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
				Pelaksanaan rehabilitasi
				Pelaksanaan Restorasi
				Pelaksanaan remediasi
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
		Memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara *holding* pangan ID *Food* sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan,	Penguatan satu data pangan	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya		
				Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
				Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro
				Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
		Menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk *start-up* untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan		Pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota
				Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
		Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau *food estate* secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu	Pengembangan pangan nabati.	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
				Penyusunan *Action Plan*

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kot
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
		Memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (*blue food*) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur)	Pengembangan pangan akuatik.	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil.
				Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
				Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
				Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
				Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
				Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
		Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat Melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal	Penguatan cadangan pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		Menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan	Penjaminan mutu dan keamanan pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
				Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
				Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
				Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
				Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro
		Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan	1. Peningkatan produktivitas hutan. 2. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri. *3.* Penguatan pengelolaan hutan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional	lestari. *4.* Pemulihan ekosistem yang terdegradasi. *5.* Pemulihan luas lahan mangrove	
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		Memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan	Penguatan satu data pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
				Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
				Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
				Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
				Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
				Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
				Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
		Penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari	1. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air.	Pembangunan Bendungan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau	2. Penyediaan pasokan air berkelanjutan.	
				Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
				Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
				Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
				Normalisasi/Restorasi Sungai
				Peningkatan Kanal Banjir
				Peningkatan Tanggul Sungai
				Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
				Pembangunan Unit Air Baku
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pembangunan Bendung Irigasi
				Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
				Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
				Peningkatan Bendung Irigasi
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				Rehabilitasi Bendung Irigasi
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
		Peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi	1. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air. 2. Penyediaan pasokan air berkelanjutan.	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pembangunan Bendung Irigasi
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
				Peningkatan Bendung Irigasi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
				Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				Rehabilitasi Bendung Irigasi
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
				Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
				Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
				Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
		Pengelolaan risiko bencana daya rusak air	Pengelolaan risiko daya rusak air.	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
				Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
				Pembangunan Kanal Banjir
				Rehabilitasi Kanal Banjir
				Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
				Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
				Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
				Pembangunan Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
		Penyempurnaan tata kelola infrastruktur	Penyempurnaan tata kelola	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir	infrastruktur sumber daya air	untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
				Pembangunan Unit Air Baku
				Pembangunan Tanggul Sungai
				Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
				Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
				Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
				Rehabilitasi Unit Air Baku
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pembangunan Bendung Irigasi
		Revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga	1. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air. 2. Penyediaan pasokan air berkelanjutan.	Pembangunan Tanggul Sungai
				Pembangunan Kanal Banjir
				Pembangunan Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir
				Rehabilitasi Tanggul Sungai
				Rehabilitasi Kanal Banjir
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pembangunan Bendung Irigasi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal *value chain*, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim	Penguatan industri halal	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
				Pameran Dagang Nasional
				Pameran Dagang Lokal
				Peningkatan Citra Produk Ekspor
		Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional	Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
				Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
				Peningkatan Citra Produk Ekspor
				Pameran Dagang Nasional
		Penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal	Penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah (UMKM) halal	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
				Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
				Peningkatan Citra Produk Ekspor
		Penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah	Penguatan keuangan syariah	
		Penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari	Penguatan dana sosial syariah	

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		badan usaha milik negara dan swasta nasional		
		Melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat	Digitalisasi sektor ekonomi	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission Risk Base Approach* (OSS RBA)
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
				Penyusunan Konten
				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
				Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM
				Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
		Mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro	Digitalisasi sektor ekonomi	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
				Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM
		Menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing.	• Pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital di pemerintahan (*AI, blockchain, metaverse*) • Digitalisasi sektor ekonomi	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		Mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.	● Penguatan SDM digital. ● Digitalisasi sektor strategis. ● Digitalisasi sektor ekonomi	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
				Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
				Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM
		Mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (*circular economy*)	Perluasan implementasi teknologi bersih	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
				Peningkatan Citra Produk Ekspor
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		Menerapkan ekonomi sirkular industri	● Penerapan efisiensi sumber daya. ● Penguatan ekosistem daur ulang	Peningkatan Citra Produk Ekspor
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		Menerapkan efisiensi sumber daya	Penerapan efisiensi sumber daya	Peningkatan Citra Produk Ekspor
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		Mengembangkan produk ramah	Pengembangan produk ramah	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		lingkungan.	lingkungan	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		Menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material.	Penerapan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
				Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
				Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
		Menguatkan ekosistem daur ulang.	Penguatan ekosistem daur ulang	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
				Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
		Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan	Pemulihan ekosistem yang terdegradasi	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota
				Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
				Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
		Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa	Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber	Reformasi tata kelola persampahan, termasuk penguatan dan peningkatan kapasitas perencanaan serta pemisahan regulator, operator, dan pengawas serta penegakan hukum	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
				Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota
				Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
				Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
				Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		Meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis *reduce, reuse,* dan *recycle*	Penanganan sampah melalui pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pengolahan sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			reduce, reuse, recycle serta fasilitas pangolin lainnya	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Penanganan sampah melalui pengangkutan
				Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
				Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
		Peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Penanganan sampah melalui pengangkutan
				Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
		Optimalisasi tempat pengolahan sampah	Penyediaan, optimalisasi,	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan *landfill mining*	rehabilitasi, pengoperasian dan pemeliharaan, serta pengawasan infrastruktur persampahan, termasuk konservasi tempat pemrosesan akhir dan *landfill mining*	TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
		Perbaikan tata kelola persampahan	● Penyadartahuan dan pemicuan perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah, terutama peningkatan permintaan, partisipasi, serta kemauan untuk membayar Retribusi. ● Reformasi tata kelola persampahan, termasuk penguatan dan peningkatan kapasitas perencanaan serta pemisahan regulator, operator, dan pengawas serta penegakan hukum	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
				Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		Mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang	Peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
		Meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan)	● Peningkatan produktivitas hasil hutan. ● Penguatan pengelolaan hutan lestari.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
		Mengurangi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies	Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	Peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
		Mengelola sumber daya genetik	Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota
		Memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi	Pemulihan ekosistem yang terdegradasi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pelaksanaan remediasi
				Pelaksanaan rehabilitasi
				Pelaksanaan Restorasi
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Pengendalian dan eradikasi spesies asing invasif	Pengendalian spesies asing invasif	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
		Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem	Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Peningkatan peran masyarakat yang terlibat dalam aksi perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati	Peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
		Penguatan data, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi keanekaragaman hayati	Penguatan data, informasi, dan IPTEK keanekaragaman hayati	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota
		Peningkatan pendanaan inovatif pengelolaan keanekaragaman hayati	Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan PrasaranaKeanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan	Pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar dilakukan secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan	Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota
				Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
		Pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional	Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
		Pengembangan pengelolaan keamanan hayati (*biosafety*)	Pengembangan pengelolaan keamanan hayati *(biosafety)*	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota
		Meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya		

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya		
		Meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar,langka, dan terancam punah		
		Merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Tanaman Industri, dan hutan produksi dengan menerapkan skema *public private people partnership* dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat		
		Menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan.		Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
				Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Analisis denda terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
		Meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau	Penyediaan pasokan air berkelanjutan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Meningkatkan pengelolaan air limbah	Penguatan tata kelola penyelenggaraan sanitasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan ketahanan iklim	Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
				Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
				Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
				Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air LimbahDomestik (SPALD)
		Meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/ kota di Indonesia	Peningkatan pengelolaan kualitas udara di kab/kota di Indonesia	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Meningkatkan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa	Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut	Pengelolaan risiko daya rusak air	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Meningkatkan kualitas lahan	Peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian PanganBerkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
		Menurunkan laju deforestasi		
		Meningkatkan kualitas ekosistem gambut		
		Melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun	Pengelolaan B3 dan limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
		Menguatkan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan	Pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang	Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota
				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
				Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Hak MHA terkait dengan PPLH
				Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH
				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
		Penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif	Pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota
				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
				Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi	Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
				Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multipihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan	Penurunan laju deforestasi	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
		Menerapkan regulasi untuk membatasi produksi karbon dan aktivitas yang merusak lingkungan	Peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
		Melakukan pembangunan rendah karbon	Peningkatan implementasi praktik pertanian yang rendah karbon	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		Peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer	Peningkatan proporsi EBT dalam bauran energi primer	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED
				Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
				Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
				Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah
				Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah
		Efisiensi energi	Efisiensi energi	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
				Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
				Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
				Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
				Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
		Peningkatan transportasi berkelanjutan	Peningkatan transportasi berkelanjutan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pemenuhan fasilitas PelayananAngkutan pelabuhan Pengumpan lokal
				Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
				Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
				Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
		Peningkatan cadangan karbon	Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		Pencegahan pengurangan cadangan karbon	Peningkatan pencegahan pengurangan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		Implementasi praktik pertanian yang rendah karbon	Peningkatan implementasi praktik pertanian yang rendah	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			karbon	
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian PanganBerkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
		Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru	Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil
		Pengembangan industri hijau	Pengembangan industri hijau	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission Risk Base Approach* (OSS RBA)

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
		Pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular	● Penerapan efisiensi sumber daya. ● Penguatan ekosistem daur ulang	Peningkatan Citra Produk Ekspor
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		Mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan *carbon sink* dan *carbon offset* untuk mengakselerasi target *net zero emission* dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau	Pengembangan industri hijau	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				oordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Mengakselerasi perdagangan karbon baik di Bursa Efek Indonesia maupun penyempurnaan regulasi terkait carbon trade dan kelengkapan lembaga penunjang *carbon trade*		
		Melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (c*oal-fired power plant retirement*) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan		
		Menstimulasi konversi penggunaan energi fosil menjadi *renewable energy* sesuai dengan potensi alam masing-masing daerah	Peningkatan proporsi EBT dalam bauran energi primer	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED
				Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
				Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
				Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah
				Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan;	Peningkatan proporsi EBT dalam bauran energi primer	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED
				Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
				Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
				Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
				Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah
				Kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (*carbon tax/carbon trading*, dst) di daerah
		Mendorong adopsi kendaraan listrik (*electric vehicle*) untuk transportasi umum	Peningkatan transportasi berkelanjutan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (*green jobs*) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing	Pengembangan ekosistem tenaga kerja hijau	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
		Meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau	Pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
		Memperkuat peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau.	Penguatan peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) dalam pengembangan pekerjaan hijau dan tenaga kerja hijau	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
		Menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, *blue finance* dan *good neighbor policy*	Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
		Meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir	Rehabilitasi ekosistem karbon biru – mangrove dan lamun	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun		
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil
		Mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi	Pengembangan industri perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				(UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan perikanan mutu untuk dan skala Keamanan usaha mikro hasil dan skala usaha kecil
		Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait *science, technology, engineering, art, and mathematics*, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global	Penguatan data, informasi, dan IPTEK. keanekaragaman hayati	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan perikanan mutu untuk dan skala Keamanan usaha mikro hasil dan skala usaha kecil
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
				Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah	Penguatan infrastruktur dan layanan konektivitas	Pembangunan Jalan
				Rekonstruksi Jalan
				Pembangunan Jembatan
				Penggantian Jembatan
				Pemeliharaan Berkala Jalan
				Pelebaran Jalan Menuju Standar
				Rehabilitasi Jembatan
		Menyinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu.	Penguatan infrastruktur dan layanan konektivitas	Rekonstruksi Jalan
				Pembangunan Jembatan
				Penggantian Jembatan
				Pemeliharaan Berkala Jalan
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Bermotor
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
				Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
		Menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi.	Penguatan infrastruktur dan layanan konektivitas	Rekonstruksi Jalan
				Pembangunan Jembatan
				Penggantian Jembatan
				Pemeliharaan Berkala Jalan
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan kabupaten/kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/ kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah.		Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
				Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
				Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
		Memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat		Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
				Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
				Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
				Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
				Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM
		Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran.	Integrasi layanan usaha	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
				Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
				Perluasan Kesempatan Kerja
		Memberikan bantuan dan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha, termasuk melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah dengan standardisasi dan sertifikasi.	Formalisasi usaha serta standardisasi dan sertifikasi produk	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
				Pemulihan Usaha Mikro
				Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
				Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok
				Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat.		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
		Mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan sinkronisasi program kewirausahaan.	Inkubasi dan pendampingan wirausaha inklusif dan berkelanjutan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
				Pemulihan Usaha Mikro
				Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
		Melakukan pendampingan pemanfaatan riset dan teknologi bagi wirausaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk melalui inkubasi usaha.	Inkubasi dan pendampingan wirausaha inklusif dan berkelanjutan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
				Pemulihan Usaha Mikro
				Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
		Mengembangkan dan memperkuat kemitraan usaha melalui pengembangan ekosistem rantai pasok domestik dan global.		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro
				Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok
				Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Mengembangkan skema dan inovasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan *start-up*.	● Peningkatan kapasitas kelembagaan dan bisnis Koperasi. ● Pengembangan koperasi sektor produksi skala besar	Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
				Peningkatan Produktivitas, Nilai ambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
		Mengoptimalkan perwujudan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.	Pengembangan dan pemeliharaan basis data tunggal koperasi dan UMKM	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
				Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
		Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas.	Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif.	Pengembangan Sistem Pemasaran
				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
				Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
		Integrasi data ekonomi kreatif	Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi kreatif
				Perlindungan Hasil Kreativitas
				Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
		Percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis	● Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts. ● Penguatan ekosistem seni, budaya, kerajinan. ● Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi ● dan gim.	Perlindungan Hasil Kreativitas

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka	● Penguatan ekosistem kuliner.	
				Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
				Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif
		Perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia.		Pengembangan Sistem Pemasaran
				Penyediaan Infrastruktur
				Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
				Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual
		Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif.		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
				Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
		Pengembangan infrastruktur (termasuk pembangunan hub/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang didukung pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global.	● Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi. ● Peningkatan kapasitas sisi pasokan industri Digital.	Penyediaan Infrastruktur

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			● Digitalisasi sektor ekonomi ● Digitalisasi sektor strategis.	
				Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
				Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif
				Penyusunan Skema Insentif Daerah
		Penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk pengembangan badan layanan umum).		Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
				Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
				Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
		Mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia.		Pengembangan Pendidikan
				Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
				Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)
				Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
				Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif
				Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
		Memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global.		Penyusunan Skema Insentif Daerah
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Luar Negeri
		Perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata.		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Neger
		Menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata.		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya
		Menerapkan prinsip *Blue-Green-Circular Economy* bagi para pelaku usaha pariwisata.		Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota
				Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan.		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Reaktivasi pelaksanaan *event* dan *meetings, incentives, conventions, and exhibitions* serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandardisasi.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana.		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/Kota
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota
		Pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata.		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
				Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
		Pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (*blended finance*)	Perluasan akses dan inovasi pembiayaan.	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya
				Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota
		Memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		multipihak.		
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas
				Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
		Memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang unbankable menjadi koperasi *bankable.*		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
				Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
		Menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif.		Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi
				Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi
				Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
		Memberikan bantuan peningkatan kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota.		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas
				Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko,

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kinerja Keuangan, dan Permodalan
		Mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas
				Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
		Mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam.		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
				Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun dengan melakukan penguatan layanan 1 tahun pra sekolah (TK/RA/BA) dan percepatan wajib belajar 12 tahun yang berfokus pada jenjang pendidikan yang masih membutuhkan akselerasi pelaksanaan wajib belajar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
				Pengadaan Mebel Sekolah
				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
				Pemeliharaan Mebel Sekolah
				Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar
				Penyediaan infrastruktur TIK
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
				Penataan Ruang/Sudut Baca
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
				Pembangunan Ruang Kelas Baru
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang.	Penguatan pembelajaran berbasis teknologi	Penyediaan infrastruktur TIK

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			digital	
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
				Pembangunan Ruang Kelas Baru
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				Pembangunan Laboratorium
				Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
				Pembangunan Asrama Sekolah
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
				Pembangunan Fasilitas Parkir
				Pembangunan Kantin Sekolah
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pengadaan Mebel Sekolah
				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
				Pengadaan Mebel PAUD
				Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
				Pengadaan Perlengkapan PAUD
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
		Revitalisasi pendidikan nonformal.	Perluasan program pendidikan formal dan nonformal, di antaranya melalui pendampingan pada para pekerja dan komunitas seni, olahragawan, serta penyandang disabilitas	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Keseteraan
				Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal
				Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
				Pengendalian dan Pengawasan PerizinanIzin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
		Penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI).		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
				Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
		Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Nonformal/Kesetaraan
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Penguatan tata kelola pendidikan.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
		Menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kot
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
				Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif.		Perluasan Kesempatan Kerja
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
				Job Fair/Bursa Kerja
				Pelayanan antar Kerja
				Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
		Memfasilitasi mobilitas dan pelindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif	Mobilitas dan pelindungan tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
				Perluasan Kesempatan Kerja
				Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
				Job Fair/Bursa Kerja
				Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan
				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
				Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
				Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
		Meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja.	Peningkatan keahlian tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
				Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi.	Peningkatan keahlian tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
		Melaksanakan *reskilling* dan *upskilling* bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan *low-skilled* berbasis pembelajaran sepanjang hayat.	Peningkatan keahlian tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		Memfasilitasi transisi *school to work* dan integrasi *soft skills* bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi.		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		.		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
		Melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		Mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga.	Perluasan program pendidikan formal dan nonformal, di antaranya melalui pendampingan pada para pekerja dan komunitas seni, olahragawan, serta penyandang disabilitas.	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Mengembangkan budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	Pengembangan budaya literasi dan peningkatan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
				Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
				Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
				Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi
				Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
		Perluasan layanan pendidikan anak usia dini melalui bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini.		
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah.	Perluasan program pendidikan formal dan nonformal, di antaranya melalui pendampingan pada para pekerja dan komunitas seni, olahragawan, serta penyandang disabilitas.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		Melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima.	Perluasan cakupan bantuan pendidikan prestasi dan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar sampai jenjang pendidikan tinggi, termasuk beasiswa atlet dan seniman	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		Penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing global.	Penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung penguatan karakter peserta didik.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal
				Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar
				Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
		Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional.	Pemenuhan layanan pendidikan pesantren yang berkualitas dan pendidikan keagamaan lainnya.	
		Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya.	Penguatan kualitas dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis industri dan keunggulan wilayah	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pembangunan Ruang Praktik Siswa
				Pembangunan Ruang Laboratorium
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
				Pembangunan Asrama Sekolah
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Rehabilitasi Ruang Laboratorium
				Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Pengadaan Mebel Sekolah
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas lembaga	Penataan dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi dan program studi untuk peningkatan kualitas dan	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang *Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics.*	penguatan bidang STEAM.	
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal
				Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
				Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.	Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
				Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
		Memperkuat daya saing perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi diferensiasi misi.	Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
				Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk penguatan kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya.	Pengembangan kapasitas lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPenyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
		Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.	Pengembangan kapasitas lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
				Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
				Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
		Meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio.	Optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
		Menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing	Optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global.		
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
		Memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (*universal health coverage*) dan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif	Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional dan pendanaan kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Menambahkan kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan stunting.	Penurunan *stunting*	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		Mencegah terjadinya stunting pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu dan Penambahan Vitamin).	Penurunan *stunting*	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		Memperkuat program gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dan lain lain).	Pengendalian penyakit tuberkulosis. Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			kesehatan jiwa Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria).	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Investasi pelayanan kesehatan primer. Penguatan layanan nggulan dan pengembangan pelayanan kesehatan di daerah sulit akses	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
		Memperjuangkan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan nasional secara bertahap.		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Layanan Kesehatan
				Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center
		Meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
		Mendorong pengembangan industri jamu yang merupakan ramuan herbal kearifan lokal dan berasal dari keragaman hayati nusantara		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		Menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah.		
		Memastikan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas.		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lebih prorakyat, protenaga kesehatan, profasilitas kesehatan, dan propengadaan farmasi	Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional dan pendanaan kesehatan	
		Memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi posyandu, revitalisasi pos pembinaan terpadu, usaha		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		kesehatan sekolah, pos kesehatan desa, dan pos kesehatan pesantren.		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		Memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman *stunting* (gizi buruk).	Penurunan *stunting*	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		Meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
		Memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
		.		Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota
		Membangun layanan baru yakni pelayanan kesehatan keluarga yang menjembatani pelayanan kesehatan masyarakat dan individu agar tercapai pelayanan kesehatan nasional yang efektif dan efisien (*family medicine*).		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		Penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak sesuai standar untuk percepatan penurunan kematian ibu dan anak.		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		Penguatan kelembagaan dan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		Eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta, schistosomiasis, rabies, dan lain lain), serta rekayasa lingkungan dan biologis untuk pengendalian penyakit vektor lainnya.		Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
				Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia
				Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan
				Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis
				Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Mendorong promosi produk pangan olahan		Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		sehat, pengendalian produk berdampak negatif bagi kesehatan, seperti produk hasil tembakau, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak antara lain melalui pengenaan cukai, pembatasan iklan dan pelarangan promosi		
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Penguatan surveilans, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan penanganan bencana, serta pengendalian resistensi antimikroba.		Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
				Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
		Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan penguatan regulasi pre-market, penguatan pengawasan siber, dan farmakovigilans.		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
				Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
				Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Investasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran,		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		jaringan puskesmas dan dan peningkatan peran kader kesehatan		
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
		Peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kualitas pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan.	Produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal
				Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
		Penguatan kapasitas dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan.	Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
				Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
				Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Baduta/Balita)
		Penyediaan fasilitas pendukung keluarga.	Penyediaan fasilitas pendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi utama keluarga. Penguatan keluarga tunggal, pasca perceraian, dan pekerja migran untuk mengoptimalkan fungsi pengasuhan keluarga	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas
				Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas
		Penguatan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan.	Pemenuhan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga dan afirmasi bagi keluarga rentan	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
				Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga
		Pemenuhan hak anak secara universal.	Penyediaan layanan yang ramah anak dalam rangka pemenuhan hak anak secara universal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak.	Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya. Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan epemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan. Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak.		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota
				Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
				koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
		Penguatan resiliensi anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko.	Penguatan resiliensi dan peningkatan partisipasi anak secara bermakna	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota
				Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
				koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota
		Penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan.	Peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter, dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi.	Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan. Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan epemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan. Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonom Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			ketenagakerjaan.	
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		Penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di proses pembangunan.	Penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di proses pembangunan	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota
				Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
		Penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia.	Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut Usia.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
		Mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		Mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarjinalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		Mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
		Memperluas program pendidikan formal maupun nonformal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		Meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
				Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
		Mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
				Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
		Membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		disabilitas.	penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	
				Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
		Memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk *stereotype*, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		Mendorong pembudayaan olahraga melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan penyelenggaraan kompetisi/festival olahraga.	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
		Mengembangkan program siswa olahragawan (*student athlete program*) secara berjenjang dan berkelanjutan.	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
		Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang terstandar dan ramah disabilitas, serta dikelola melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
		Mengembangkan jaminan kesejahteraan olahraga melalui skema insentif, kemitraan, pendanaan inovatif serta dukungan pasca karier.	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
		Memperkuat pembinaan olahragawan elit kelas dunia dalam pemusatan latihan nasional, didukung tenaga keolahragaan bersertifikat internasional.	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
				Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
		Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional.	Peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi. Peningkatan ekspor pertanian, perikanan, dan industri berbasis SDA. Peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif.	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.	Peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru. Peningkatan konektivitas integrasi *hinterland* dengan simpul utama	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
				Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar
				Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan daya saing, produktivitas, penguatan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan desa, melalui program sosial seperti Program Keluarga Harapan, Dana	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Desa, Subsidi Pupuk, Mekar, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa.		
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		Penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan produktivitas dan inklusivitas sektor ekonomi dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam dan potensi lokal desa.	Transformasi dan pemberdayaan ekonomi perdesaan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa
		Pemenuhan ketersediaan infrastruktur perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan permukiman, konektivitas, energi, telekomunikasi, dan informatika) guna mendukung terciptanya		Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		kualitas hidup rakyat di desa setara dengan di kota		
		.		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center
				Mendukung Pembangunan Puskesmas
				Pembangunan Tanggul Sungai
				Normalisasi/Restorasi Sungai
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
				Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
				Optimalisasi TPA/TPST/SPA
				Pembangunan TPA/TPST/SPA
				Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
				Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		Pengelolaan keruangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa serta kawasan perdesaan.	Peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan perdesaan	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
				Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
				Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
		Peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa		Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
				Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Penyederhanaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel melalui perbaikan birokrasi, serta pemanfaatan sistem informasi desa.	Penguatan tata kelola, keuangan, dan pendampingan desa adaptif.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa
				Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
		.		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
				Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Optimalisasi sinergitas dukungan pendanaan pembangunan desa dan kelurahan, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa serta memperluas cakupan transfer dana daerah ke kelurahan (Dana Kelurahan).		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa asimetris berbasis karakteristik dan potensi desa serta kawasan perdesaan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan pembangunan desa dan supra-desa.		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Pengelolaan urbanisasi melalui pembagian peran dan kewenangan penyediaan layanan dasar serta pengaturan penataan desa berkarakteristik urban (delineasi wilayah, kepadatan penduduk, dan tata ruang desa		Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
		Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal melalui		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan		
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
		Pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan yang tercakup pada kecamatan perbatasan prioritas dan pusat kegiatan strategis nasional sebagai upaya afirmasi pembangunan desa dari pinggiran.		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh (daerah tertinggal dan sangat tertinggal) didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah yang menyasar hingga	Transformasi pembangunan daerah lambat tumbuh	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		ke akar masalah pembangunan di level desa/ kelurahan/ kampung.		
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
				Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan termasuk dalam rangka penanganan permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan atau perbaikan rumah layak huni berdasarkan karakteristik wilayah yang didukung dengan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau khususnya pembelian rumah pertama, penegakan implementasi standar keandalan bangunan hunian, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan berbasis sistem informasi.	Fasilitasi pembangunan rumah baru layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penanganan permukiman kumuh yang dilakukan secara terpadu.	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
				Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
		.		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		.		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
		Pemberdayaan serta penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah serta		Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		peningkatan akses pembiayaan yang murah bagi usaha mikro		
				Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
				Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen
		Pengembangan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi penumpang dan barang yang memadai dengan tarif terjangkau, penyediaan layanan perintis serta pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation*.		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendorong penggunaan satu data terpadu dan sinergi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat	Mendukung Basis Data Terpadu untuk pemberantasan kemiskinan melalui Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi	Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup secara Berkesinambungan.	Bantuan sosial yang adaptif melalui Kartu Sejahtera, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan, Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		.		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
				Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial
		Penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan adaptif sesuai dengan tingkat kerentanan penduduk.	Bantuan sosial yang adaptif melalui Kartu Sejahtera, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan, Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
		Peningkatan cakupan kepesertaan melalui penjangkauan berbasis keagenan maupun komunitas dan peningkatan literasi secara masif pada program jaminan sosial.	Bantuan sosial yang adaptif melalui Kartu Sejahtera, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan, Sembako, Program Indonesia Pintar,dan Kartu Indonesia Sehat.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
		Penguatan integrasi dan interoperabilitas data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya.	Perluasan cakupan Jaminan Sosial Nasional secara inklusif	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		Reformasi perlindungan hari tua, baik melalui bantuan maupun jaminan sosial.	Perluasan cakupan Jaminan Sosial Nasional secara inklusif	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Penguatan inklusivitas program jaminan sosial termasuk perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu, termasuk untuk penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain.	Rehabilitasi sosial dan layanan pengasuhan bagi penerima manfaat dari kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, termasuk melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial, Permakanan, dan Layanan Lansia Terintegrasi	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
		Peningkatan koordinasi serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial.	Perluasan cakupan Jaminan Sosial Nasional secara inklusif	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
		Pengembangan dan penyediaan layanan sosial dan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain	Rehabilitasi sosial dan layanan pengasuhan bagi penerima manfaat dari kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, termasuk melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial, Permakanan, dan Layanan Lansia Terintegrasi	Penyediaan Makanan
				Penyediaan Sandang
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
				Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Alat Bantu
				Pemberian Layanan Kedaruratan
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
		Akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan.		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
		Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan Pelaksanaan dilakukan secara nasional dengan mengutamakan lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan absolut tinggi, risiko kerentanan tinggi, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar		Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
		.		
8	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin *independensi*, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi.	Pengelolaan dan audit keuangan partai politik.	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Membangun *Single Identity Number* dan Sistem Informasi Administrasi dan Data	Digitalisasi pelayanan publik.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu.		
				Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
				Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
				Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
				Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
				Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
				Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
		Menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki.		Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
				Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
				Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai *think-tank* dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan, sebagai cikal bakal pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dalam rangka penguatan tata kelola regulasi.		
		Meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan		
		Menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *center of excellence* dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.		
		Memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik.		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		Memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan		

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.		
		Meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
				Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
		Mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara dan peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.		
		Penguatan budaya hukum		Fasilitasi Bantuan Hukum
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
		Membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan *soft competency* Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
				Kerjasama Pengawasan Internal
		Memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi *targeted talent* untuk mau bergabung.		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				dan Pemberantasan Korupsi
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
		Mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi *future jobs* di era digital.		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
				Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
		Memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total *reward* dan manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara.	Penerapan *total reward*	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
				Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
		.		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
		Memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total *reward*, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem	Penerapan *total reward*	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		pensiun), lingkungan kerja, dan kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara.		
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
				Pengelolaan *Assessment Center*
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
		Memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan *talent pool* dan mobilitas talenta		Pembinaan Disiplin ASN
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
				Pengelolaan Promosi ASN
				Pengelolaan Mutasi ASN
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
		Memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
				Pengelolaan Data Kepegawaian

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
		Penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
		Penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
		.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
		Transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik, melalui menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi	Digitalisasi pelayanan publik.	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien; digitalisasi pelayanan publik; Pengembangan talenta digital pelayanan publik; penguatan ekosistem digital pelayanan publik; dan perluasan akses pelayanan publik.		
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
				Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
		.		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
		.		Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
				Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
		Reformasi tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui optimalisasi pendapatan negara, optimalisasi belanja negara, dan perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan Perpajakan. Optimlaisasi *local taxing power*. Peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat. Optimalisasi kualitas belanja TKD. Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pembiayaan inovatif dan berkelanjutan	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
				Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah
				Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
				Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
		Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah.	Kolaborasi pencegahan penyalahgunaan narkotika	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Memperkuat lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
		Meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba.		
		Memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan narkoba.		
		Meningkatkan kemampuan *surveillance* dan Intelijen Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba		
		Menutup semua akses ke situs perjudian *online.*	Penutupan akses ke situs perjudian *online*	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
		.		
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
				Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi.		Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
		Meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerja sama dengan berbagai pihak.		
		Memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia.		
		Memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal.		
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang berkebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antarumat beragama serta sesama anak bangsa.	Peningkatan literasi keagamaan yang moderat, inklusif, dan bermaslahat.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.	Penguatan pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan, serta pembinaan ideologi Pancasila.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar-elemen masyarakat sejak dini.	Pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kampung
				Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional
				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
		Mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun nonformal.	Pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
				Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
		Menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya	Pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		Menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.	Peningkatan kerukunan umat beragama.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Memperkuat moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan.	Peningkatan literasi keagamaan yang moderat, inklusif, dan bermaslahat.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan.	Peningkatan kerukunan umat beragama.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Memperkuat jaminan produk halal dalam rangka layanan keumatan sekaligus mendukung ekosistem industri halal.	Penjaminan produk halal.	Pengembangan Usaha Mikro
		Meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, aman, dan nyaman.	• Peningkatan kerukunan umat beragama. • Transformasi layanan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			penyelenggaraan ibadah haji.	
		Merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama yang berkualitas dan merata.	● Peningkatan bimbingan keagamaan dan bimbingan perkawinan. ● Revitalisasi layanan KUA yang berkualitas, merata, dan inklusif.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Meningkatkan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan.	Peningkatan peran lembaga agama dan keagamaan dalam layanan keagamaan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Mengembangkan dana sosial keagamaan yang produktif.	Pengembangan dana sosial keagamaan untuk mendukung program pembangunan.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
		Meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan termasuk bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Merevitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilainilai luhur bangsa bagi generasi muda.	Pengelolaan terpadu cagar budaya.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan,		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		pengembangan, dan pemajuan seni-seni tradisional Indonesia		
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi, rendahnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
		.		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		Mengalokasikan dana budaya dan memperbesar dukungan pendanaan untuk mendorong kemandirian komunitas-komunitas seni budaya di seluruh Indonesia.	Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Melengkapi pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi seni tradisional Indonesia.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara.	Pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya.	Pengembangan produk dan jasa berbasis seni budaya.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		Mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia.		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		Mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi seni masyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan kreativitas.	Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		.		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum.		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Memperkuat karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila.	Penguatan pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan, serta pembinaan ideologi Pancasila.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan.	Pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Pemperkuat jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.	Pelindungan hutan adat dan tanah ulayat serta pemberdayaan asyarakat dan komunitas adat.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia.	Pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Mengembangkan budaya bahari dan merevitalisasi jalur rempah.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.	Transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
				Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota
				Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi
		Meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana.	Melaksanakan peningkatan peran lembaga dan kapasitas sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
		Memperkuat sistem deteksi bencana (*early warning system*) dengan penerapan teknologi terkini.	Membangun sistem peringatan dini multi ancaman bahaya dan pusat pengendali operasi penanggulangan bencana terpadu.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
		Meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi	Memulihkan pelayanan dasar bidang fisik, sosial, dan ekonomi	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut.	di daerah terdampak bencana.	
		Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana.	Melakukan pembangunan pusat logistik dan peralatan berbasis kewilayahan.	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
				Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		Menata koordinasi antarlembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana.		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
				Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana.		Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
				Pelaksanaan rehabilitasi
				Pelaksanaan Restorasi
		Menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana.		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
				Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
				Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
				Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
		Pemanfaatan ruang budi daya yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan	Melakukan pembangunan pusat logistik dan peralatan berbasis	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		bencana.	kewilayahan.	
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
		Mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi bidang penanggulangan bencana	Meningkatkan layanan literasi dan edukasi kebencanaan berbasis masyarakat, termasuk melalui desa tangguh bencana.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
		Mengurangi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim khususnya pada empat sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan dengan melakukan intervensi aksi ketahanan iklim.	● Meningkatkan ketahanan pesisir dan laut. ● Meningkatkan pembangunan dan konservasi sumber daya air. ● Meningkatkan pembangunan dan konservasi sumber daya air.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
		Meningkatkan keandalan pencarian dan pertolongan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi.	● Melakukan peningkatan keandalan dan kebermanfaatan infrastruktur tahan bencana, termasuk penguatan perijinan bangunan gedung. ● Penetapan dan penyelenggaraan rencana ● aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (RAK	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			LLAJ) secara komprehensif dan sinergis. ● Peningkatan penanganan daerah rawan kecelakaan (DRK). ● Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi udara, laut, dan darat	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
				Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi salah satu bahan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan hasil reses dari penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh Bappeda dengan berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Tabel 4.29
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	Manual Simamora	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Penambahan Gedung Sekolah SMP KRISTEN CAHAYA BANGSA karena ruang kelas tidak cukup sedangkan siswanya banyak	DUSUN TURONIA DESA TUAPEJAT KECAMATAN SIPORA UTARA, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	PAKET	-	-
2	Manual Simamora	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Penambahan Gedung Sekolah SD KRISTEN CAHAYA BANGSA karena ruang kelas kurang sedangkan siswa banyak	Dusun Turonia Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	PAKET	-	-
3	Alisandre Zalukhu	Perbaikan rumah tidak layak huni	Bantuan bedah rumah wilayah Desa Sikakap	Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25	unit	-	-
4	Alisandre Zalukhu	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Pembangunan jalan lingkungan wilayah Desa Sikakap Kecamatan Sikakap	Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3	Paket	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
5	Alisandre Zalukhu	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Bantuan alat pertanian mesin senso	Desa Sikakap, Desa Taikako, Desa Makalo, Desa Saumanganyak Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	40	Unit	-	-
6	Alisandre Zalukhu	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bibit ternak sapi	Desa Sikakap, Desa Makalo, Desa Taikako, Desa Saumanganyak, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	60	Ekor	-	-
7	Alisandre Zalukhu	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan alat tangkap nelayan	Desa Sikakap, Desa Makalo Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	40	Unit	-	-
8	Manual Simamora	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani/Ternak LALATEK LELEU	Dusun Karang Anyar Desa Sipora Jaya Kecamatan SIpora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	22	EKOR	-	-
9	Manual Simamora	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Pengadaan Bibit Ternak Babi untuk Kelompok Tani/Ternak MALEBAK KOAT	Dusun Mapadegat Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	24	EKOR	-	-
10	Manual Simamora	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Pengadaan Bibit Ternak Babi untuk Kelompok Tani/Ternak MONGAN MAPADEGAT	Dusun Mapadegat Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	24	EKOR	-	-
11	Manual Simamora	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Alat Pertanian untuk Kelompok Tani SUKA MAJU	Dusun Makoddiai Desa Sidomakmur Kec. Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
12	Manual Simamora	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Pengadaan Alat Pertanian untuk Kelompok Tani INGIN JAYA	Dusun Sagitsi Desa Nemnemleleu Kec. Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	PAKET	-	-
13	Manual Simamora	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Bantuan Alat Tangkap nelayan berupa Mesin tempel 15 PK sebanyak 10 unit dan Fiber Box 60kg sebanyak 10 unit untuk kelompok Nelayan MARLIN	Dusun Camp. Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	20	UNIT	-	-
14	Manual Simamora	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Pengadaan Alat tangkan nelayan berupa Mesin Tempel 5PK untuk kelompok Nelayan RORO SIBAU	Dusun Turonia Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	-	-
15	Manual Simamora	Perbaikan rumah tidak layak huni	Bantuan Bedah Rumah untuk Masyarakat Desa Bukit Pamewa	Desa Bukit Pamewa Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10	UNIT	-	-
16	Manual Simamora	Perbaikan rumah tidak layak huni	Bantuan Bedah Rumah untuk Masyarakat Desa Sipora Jaya	Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10	UNIT	-	-
17	Manual Simamora	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, pemanfaatan olah raga	Pembangunan Lapangan Volly untuk Masyarakat Desa Sipora Jaya	Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	PAKET	-	-
18	Kristinus	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Sapi Sitaimasusu	Dusun Maseppaket Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	15	Ekor	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				Kepulauan Mentawai					
19	Kristinus	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Pengadaan bibit ternak babi untuk Kelompok Ternak Babi Situarep	Dusun Maseppaket Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	50	Ekor	-	-
20	Kristinus	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan drum untuk penyulingan minyak nilam untuk Kelompok Nilam Simaroro	Dusun Ongah Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10	unit	-	-
21	Kristinus	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Bantuan pengadaan mesin ketam untuk Kelompok Kerajinan Loinak	Dusun Kinikdog Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13	Unit	-	-
22	Kristinus	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Bantuan pengadaan mesin boat 15 PK untuk Kelompok Nelayan Gorigak	Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10	unit	-	-
23	Kristinus	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Musara Simaeruk	Dusun Ugai Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Ekor	-	-
24	Kristinus	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Manai Simaroro	Dusun Ugai Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Ekor	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
25	Kristinus	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Mumunen	Dusun Sereming Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Ekor	-	-
26	Kristinus	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Sapi Simandaraingat	Dusun Malabbaet Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Ekor	-	-
27	Kristinus	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Sapi Simuinek	Dusun Buttui Desa Madobag kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Ekor	-	-
28	Kristinus	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan mesin domping (parutan sagu) dan peralatan lainnya untuk Kelompok Sagu Simabaga	Dusun Malabbaet Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2	Paket	-	-
29	Kristinus	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	pengadaan bantuan alat parutan sagu (mesin domping) untuk Kelompok Parutan Sagu Pusaraat	Dusun Sereming Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2	Paket	-	-
30	Kristinus	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan mesin domping (alat parutan sagu) untuk Kelompok Parutan Sagu Amiakenen	Dusun Ugai Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2	Paket	-	-
31	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang	Pembangunan Unit Sekolah Baru SD Fransisikus Filial Lahoen 3	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan	DINAS PENDIDIKAN DAN	1	Unit	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
		Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Lokal, Desa Simatalu Kec. Siberut Barat. (Rp. 800.000.000)	Mentawai	KEBUDAYAAN				
32	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Mobiler 2 Paket SDN 28 Simatalu Desa Simatalu. (Rp.90.000.000)	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2	Paket	-	-
33	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Ruang Kelas Baru 2 Lokal SDN 29 Simatalu Desa Simatalu. (Rp.600.000.000)	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2	Unit	-	-
34	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas	Bantuan Laptop dan Meja Komputer serta Proyektor SD Fransisikus Muara Sikabaluan. (Rp. 100.000.000)	Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	Unit	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
		Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
35	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Bantuan BBM Rujukan Umum Puskesmas Simatalu. (Rp.75.000.000)	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	1	Paket	-	-
36	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Bantuan BBM Rujukan Umum Puskesmas Simalegi. (Rp. 75.000.000)	Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	1	Paket	-	-
37	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Rehap Polindes Saikoat Beserta Penerangan Desa Simatalu (Rp.250.000.000)	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	1	Unit	-	-
38	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian,	Jalan Pertanian Arah SDN 28 Simatalu Panjang 200 Meter, Dusun Limu Desa Simatalu Kec. Siberut Barat. (Rp. 190.000.000)	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	Paket	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
		pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian							
39	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rehap Tambatan Perahu Dusun Simalibbek Desa Simatalu, Kec. Siberut Barat. (Rp. 190.000.000)	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERHUBUNGAN	1	Unit	-	-
40	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bibit ternak babi 14 pasang Rp 42.000.000	Dusun Nemnemleleu, Desa Sikakap Kecematan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	14	pasang	-	-
41	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Mesin Heler dengan Gudang Rp.150.000.000	Dusun Bubuget, Desa Sinaka Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	unit	-	-
42	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan ternak Kelompok Pusarat Saina Rp. 45.000.000	Desa Makalo Kecematan Pagai Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	15	pasang	-	-
43	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Motor Tangan Kelompok Tani Bere Rp 30.000.000	Desa Makalo Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2	unit	-	-
44	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Alat Pertanian Senso Kecil Kelompok Polaga Rp45.000.000	Desa Matobe Kecematan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	15	unit	-	-
45	Juni Arman, S. IP	BANTUAN MODAL USAHA/ALAT, PELATIHAN UMKM	Bantuan Modal Usaha di Sipora Utara dan Sipora Selatan (Rp.400.000.000)	Kecamatan Sipora Utara dan Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	400000000	Rupiah	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
					PERDAGANGAN				
46	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	BANTUAN MODAL USAHA/ALAT, PELATIHAN UMKM	Bantuan Perlengkapan Bengkel Kelompok BMS “MAJU TERUS” Dusun Nang_Nang Desa Muara Sikabaluan Kec. Siberut Utara. (Rp.150.000.000)	Dusun Nang-nang Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	Paket	-	-
47	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Mobiler 2 Unit SDN 29 Simatalu Desa Simatalu. (Rp. 90.000.000)	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2	Paket	-	-
48	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Ruang Kelas Baru 2 Lokal SDN 22 Simatalu Desa Simatalu. (Rp.600.000.000)	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2	Unit	-	-
49	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Jalan Penghubung Lubaga-Ba’I Desa Bojakan Kec. Siberut Utara (Rp.1.500.000.000)	Dusun Lubaga-Ba'i Desa Bojakan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Paket	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
50	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Jalan Penghubung Muntei-Poskoh Desa Simatalu Kec. Siberut Barat. (Rp.1.500.000.000)	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Paket	-	-
51	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian	Jalan Pertanian Betaet_Vise Desa Simalegi Kec. Siberut Barat. (Rp.190.000.000)	Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	Paket	-	-
52	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian	Jalan Pertanian Arah SDN27 Simatalu Panjang 200 Meter, Dusun Saikoat, Desa Simatalu Kec. Siberut Barat. (Rp.190.000.000)	Dusun Saikoat Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	Paket	-	-
53	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di kawasan Perumahan Permukiman	Jalan lingkung Rp.200.000.000	Desa Sinaka Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	unit	-	-
54	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Pengadaan Mobiler SD 19 Manganjo Rp.70.000.000	Desa Saumanganyak Kecematan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	unit	-	-
55	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Pengadaan Mobiler SMP N 2 Rp. 75.000.000	Dusun Guluk guluk Desa Saumanganyak Kecematan Pagai Utara, Kab. Kepulauan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	unit	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				Mentawai					
56	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Kelompok Tani Ronku Gulu2 Rp.45.000.000	Desa Saumanganyak Kecematan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	15	pasang	-	-
57	Safrijal Sageileppak	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan alat tangkap nelayan mesin boat 15 PK untuk kelompok nelayan dusun Kaleak	Dusun Kaleak Desa Sagulubbek Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	3	Unit	-	-
58	Safrijal Sageileppak	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan alat tangkap nelayan mesin boat 15 PK untuk kelompok nelayan Dusun Lumago	Dusun Lumago Desa Sagulubbek Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	2	Unit	-	-
59	Safrijal Sageileppak	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan alat tangkap nelayan, pompong untuk Desa Taileleu	Desa Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	20	Unit	-	-
60	Kristinus	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan mesin tempel 15 PK untuk Kelompok Nelayan Torisi	Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10	Unit	-	-
61	Kristinus	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Bantuan pembangunan jalan perekonomian 1,5 x 200 meter di Simoilaklak-Sirisurak Desa Saibi	Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Paket	-	-
62	Kristinus	Perbaikan rumah tidak layak huni	Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (Keret	Desa Saibi Samukop, Kab. Kepulauan	DINAS PERUMAHAN DAN	20	Unit	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			Baga)	Mentawai	KAWASAN PERMUKIMAN				
63	Kristinus	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan alat tangkap ikan (rabo) untuk Kelompok Nelayan Cahaya Malam	Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	2	Unit	-	-
64	Joni Kusma	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin boat 8 PK sebanyak 10 unit untuk Kelompok Nelayan MAJU TERUS	Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	-	-
65	Joni Kusma	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin boat 15 PK sebanyak 10 unit untuk Kelompok Nelayan ERUK MANUA	Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	-	-
66	Joni Kusma	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin boat 4 PK sebanyak 10 unit untuk Kelompok Nelayan GOSONG GURUKNA	Desa Sirilogui Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	-	-
67	Joni Kusma	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin boat 4 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok Nelayan TELUK LOGUI	Desa Sirilogui kec. Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	-	-
68	Joni Kusma	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin boat 15 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok Nelayan TUTUK TOGO	Desa Sikabaluan kecamatan siberut utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	-	-
69	Joni Kusma	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin boat 15 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan PANDARAI BEBE	Desa Sikabaluan kec, siberut utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
70	Joni Kusma	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin boat 15 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan CAHAYA RABO	Desa sikabaluan kec siberut utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	-	-
71	Joni Kusma	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin boat 15 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan SINAR HARAPAN	Desa Simalegi Kec Sberut barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	-	-
72	Joni Kusma	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin boat 15 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan REU-REU BAGA	Desa sigapokna kecamatan siberut barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	-	-
73	Joni Kusma	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin boat 15 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan SINAKI	Dusun malancan desa malancan kec, siberut utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	-	-
74	Joni Kusma	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bibit ternak sapi sebanyak 10 ekor untuk kelompok TUNAS HARAPAN	Desa Simalegi kec, siberut barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	EKOR	-	-
75	Joni Kusma	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan sarana transportasi berupa sepeda motor sebanyak 10 unit untuk kelompok Tani MOILE-MOILE CHEM	Desa Sirilogui kecamatan siberut utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10	UNIT	-	-
76	Joni Kusma	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan alat transportasi berupa sepeda motor sebanyak 10 unit untuk kelompok tani SIRIU-RIU	Desa Sirilogui kec. Siberut utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10	UNIT	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
77	Joni Kusma	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi sebanyak 11 ekor untuk kelompok BERKAT YAKIN	Desa sikabaluan kec, siberut utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	11	EKOR	-	-
78	Joni Kusma	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan pertanian berupa seng sebanyak 80 kodi dan seng plat sebanyak 8 lembar untuk kelompok tani SIMARENGGEU	Desa sirilogui kec,, siberut utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	PAKET	-	-
79	Juni Arman, S. IP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Modal usaha kebun Cabe kelompok Tani Raro Simalagak di Desa Nemnem Leleu Kecamatan Sipora Selatan (Rp.100.000.000)	Desa Nemnem Leleu Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	100000000	Rupiah	-	-
80	Juni Arman, S. IP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Bantuan Alat Perbengkelan Kelompok Bintang Montir Sipora Selatan (Rp.200.000.000)	Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	200000000	Rupiah	-	-
81	Juni Arman, S. IP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Tempel 4 PK untuk kelompok Nelayan Purimanuajat (Rp. 230.000.000)	Desa Nemnem Leleu Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	11	Unit	-	-
82	Juni Arman, S. IP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin tempel 15 PK untuk kelompok Nelayan Roroi Baga Dusun Matuptuman Desa Betumongan (Rp. 310.000.000)	Dusun Matuptuman Desa Betumonga Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	Unit	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
83	Juni Arman, S. IP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Tempel 4 PK untuk Kelompok Nelayan Pukatekat Sioban (Rp.115.000.000)	Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	5	Unit	-	-
84	Juni Arman, S. IP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Tempel 4 PK Untuk kelompok Nelayan Taiobaket Mongan Bosua (Rp. 230.000.000)	Dusun Mongan Bosua Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	Unit	-	-
85	Juni Arman, S. IP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Tempel 4 PK untuk Kelompok nelayan Tonem Baga Dusun Pukarayat Desa Tuapejat (Rp.230.000.000)	Dusun Pukarayat Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	Unit	-	-
86	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Boat 4pk Kelompok Nelayan Koat Malebak	Dusun Pukarajat DesaTuapejat Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	7	Unit	-	-
87	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Boat 4 pk Kelompok Nelayan	Dusun Turonia Desa Tuapejat Kecematan Sipora Utara,Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	Unit	-	-
88	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN MODAL USAHA/ALAT, PELATIHAN UMKM	Modal Usaha Kelompok Kilibaget Rp. 5.000.000/org dan Bantuan Keranjang Jualan 12 buah	Desa Sioban Kecematan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	60000000	Rupiah	-	-
89	Bruno Guimek	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan	Rehap 2 Lokal SDN 20 Malacan, Dusun Terekan	Desa Malancan, Kecamatan Siberut	DINAS PENDIDIKAN DAN	1	Unit	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
	Sagalak, S. Pd	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Hulu, Desa Malancan, Kec. Siberut Utara (Rp. 150.000.000)	Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	KEBUDAYAAN				
90	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Mobiler 1 Paket SDN 20 Malacan, Dusun Terekan Hulu, Desa Malancan, Kec. Siberut Utara (Rp. 75.000.000)	Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2	Unit	-	-
91	Juni Arman, S. IP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Modal Kerja Tani Cabe Desa Mara Kecamatan Sipora Selatan (Rp. 200.000.000)	Desa Mara Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	200000000	Rupiah	-	-
92	Juni Arman, S. IP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Tempel 4 PK Kelompok Nelayan Simatalu Desa Simatalu Kecamatan Sipora Selatan (310.000.000)	Desa Mara Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	14	Unit	-	-
93	Ibrani Sababalat, SH	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di kawasan Perumahan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkugan Dari simpang Bosua Menuju Puskesmas Bosua	Desa Bosua KecematanSiporaSelatan,Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	200000000	paket	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
94	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN MODAL USAHA/ALAT, PELATIHAN UMKM	Bantuan Alat Sulingan Nilaim	Dusun Sagitsi Desa Nemnemleleu Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2	Unit	-	-
95	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN MODAL USAHA/ALAT, PELATIHAN UMKM	Bantuan Alat Sulingan Nilam	Dusun Monga Desa Mara Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2	Unit	-	-
96	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN MODAL USAHA/ALAT, PELATIHAN UMKM	Bantuan Alat Sulingan Nilam	Dusun Sao Desa Bosua Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2	Unit	-	-
97	Ibrani Sababalat, SH	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Ternak Babi	Dusun Sagitsi Desa Nemnemleleu Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	20	ekor	-	-
98	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Boat 15 PK Kelompok Nelayan Lebak Koat	Dusun Monga Desa Mara Kecematan Sipora Selatan,Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	Unit	-	-
99	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Boat 4 PK Kelompok Nelayan Ogok Simalainge	Dusun Turoni Desa Tuapejat Kecmatan Sipora Utara Kab.Kep.Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	7	Unit	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
100	Ibrani Sababalat, SH	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di kawasan Perumahan Permukiman	Pembangunan Jalan SD 01 Sioban (Bagat Lelet)	Dusun Bagat Lelet Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan Kab.Kep.Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	200000000	Rupiah	-	-
101	Ibrani Sababalat, SH	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian	Pembangunan Jalan Pertanian di Dusun Bagat Lelet Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan	Dusun Bagat Lelet Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	200000000	Rupiah	-	-
102	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Boat 4 pk Kelompok Nelayan KERET BAGA	Dusun Mongan Bosua Desa Bosua Kecematan Sipora Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	Unit	-	-
103	Wahyu Setiadi	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, pemanfaatan olah raga	Pengadaan Lapangan Futsal Rp. 200.000.0000	Dusun Malakopa Sibau Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	unit	-	-
104	Wahyu Setiadi	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi pariwisata	Rehab Destinasi Wisata Salib Kasih Tugu Salib Rp. 100.000.000	Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	paket	-	-
105	Wahyu Setiadi	BANTUAN MODAL USAHA/ALAT, PELATIHAN UMKM	Bantuan Usaha UMKM Rp.200.000.000	Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	20	unit	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
					PERDAGANGAN				
106	Wahyu Setiadi	Penyediaan perlengkapan prasarana jalan (penerangan jalan umum, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas)	Penerangan Jalan Desa Rp. 200.000.000	Dusun Malakopa Sibau Desa Malakopak Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERHUBUNGAN	1	paket	-	-
107	Wahyu Setiadi	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Tempel 15 Pk dan 8 Pk Rp. 250.000.000	Dusun Sabiret Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	-	-
108	Wahyu Setiadi	Perbaikan rumah tidak layak huni	Rehab Rumah Rp. 400.000.000	Dusun Baleraksok Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20	unit	-	-
109	Wahyu Setiadi	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Pengadaan Gedung Posyandu Rp. 70.000.000	Dusun Sibabai Desa Sikakap Kecematan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	1	unit	-	-
110	Wahyu Setiadi	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Alat Pertanian Mesin rumput, senso dan alat semprot Rp. 120.000.000	Dusun Purorogat Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	12	orang	-	-
111	Wahyu Setiadi	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di kawasan Perumahan Permukiman	Jalan Lingkung Rp.200.000.000	Dusun Malakopa Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	paket	-	-
112	Wahyu Setiadi	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di kawasan	Jalan Lingkung Rp.	Dusun Malakopa Desa Malakopa Kecematan	DINAS PERUMAHAN DAN	1	paket	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
		Perumahan Permukiman	200.000.000	Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	KAWASAN PERMUKIMAN				
113	Wahyu Setiadi	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di kawasan Perumahan Permukiman	Jalan Lingkung Rp. 200.000.000	Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	paket	-	-
114	Wahyu Setiadi	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Rumah Dinas SDN 14 Malakopa Rp. 200.000.000	Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	paket	-	-
115	Wahyu Setiadi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Pembangunan MCK Sekolah SDN Muntei Rp 150.000.000	Dusun Muntei Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	unit	-	-
116	Wahyu Setiadi	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Gapura Sekolah SMPN 1 Pagai Selatan Rp. 50.000.000	Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	unit	-	-
117	Wahyu Setiadi	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan,	Pembangunan Jembatan Pamintaijat Rp.	Desa Malakopa Kecematan Pagai	DINAS PEKERJAAN	1	paket	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
		Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	200.000.000	Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	UMUM DAN PENATAAN RUANG				
118	Wahyu Setiadi	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Tempel 8 PK Rp. 250.000.000	Dusun Parabatu Desa Makalo Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	-	-
119	Wahyu Setiadi	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian	Jalan Pertanian Rp 150.000.000	Dusun Sabiret Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	paket	-	-
120	Wahyu Setiadi	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan alat pertanian mesin senso (Lolo Simanoep) Rp. 120.000.000	Dusun Sabiret Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	17	unit	-	-
121	Wahyu Setiadi	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Rehab Puskesmas Malakopa Rp. 200.000.000	Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	1	paket	-	-
122	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Pembangunan Jalan KM 14 Makalo Rabat Beton Rp 8.500.000.000	Dusun Makalo Desa Makalo Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	km	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
123	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Pembangunan Jembatan Rp 200.000.000	Dusun Makalo Desa Makalo Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25	meter	-	-
124	Nelsen Sakerebau, S. Th	Penyediaan perlengkapan prasarana jalan (penerangan jalan umum, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas)	Pengadaan Penerangan Jalan Umum Makalo Rp. 200.000.000	Dusun Makalo Desa Makalo Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERHUBUNGAN	20	unit	-	-
125	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Peremajaan Cengkeh Leleu Sabeu - Bosua dan Maileppet - Ailou- Leleu Bukku Kelompok Tani Leleu Lagai Rp 135.000.000	Dusun Makalo Desa Makalo Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	40	ha	-	-
126	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Peremajaan Kelapa Bere Sigoiso dan Bea Sabeu Kelompok Tani Kabei Kere Rp. 135.000.000	Dusun Makalo Desa Makalo Kecematan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	30	ha	-	-
127	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Peremajaan Cengkeh Leleu Bere Kelompok Tani Kuoba Kai Rp 135.000.000	Dusun Bere Desa Makalo Kecematan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	30	ha	-	-
128	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Kegiatan Peremajaan Kelapa Kelompok Tani Konan Rp. 135.000.000	Dusun Saumanganyak Desa Saumanganya Kecematan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	30	ha	-	-
129	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Peremajaan Kelapa Kelompok Tani Nirwana Rp 135.000.000	Dusun Manganjo Desa Saumanganya Kecematan Pagai Utara, Kab. Kepulauan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	30	ha	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				Mentawai					
130	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Peremajaan Kelapa Kelompok Tani Urep Toitet Rp 135.000.000	Dusun Mabulau Buggei Desa Saumanganya Kecematan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	30	ha	-	-
131	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Peremajaan Kelapa Kelompok Tani Purimanuajatta Rp 135.000.000	Dusun Pinaruk dan beubukku Desa Saumanganyak Kecematan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	30	ha	-	-
132	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Peremajaan kelapa Kelompok Tani Paroman Rp. 135.000.000	Dusun Mapinang Utara Desa Saumanganya Kecematan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	30	ha	-	-
133	Joni Kusma	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian	Pengadaan Pembangunan Jalan Pertanian di Desa Sirilogui	Desa Sirilogui, Kec Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	PAKET	-	-
134	Joni Kusma	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian	Pengadaan Pembangunan Jalan Pertanian di Desa Sigapokna	Desa Sigapokna, Kec Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
135	Joni Kusma	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan Pembangunan Pondok kecil-kecil untuk ibu-ibu UMKM Desa Sirilogui	Desa sirilogui, kec siberut utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5	UNIT	-	-
136	Joni Kusma	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Pengadaan Pembangunan dan penataan halaman sekolah SDN Mongan Poula	Desa Mongan Poula, Kec siberut utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	PAKET	-	-
137	Joni Kusma	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan seng sebanyak 75 kodi untuk kelompok tani BOBLO	Desa Mongan Poula, Kec siberut utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	75	KODI	-	-
138	Joni Kusma	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan senso sthill sebanyak 15 unit untuk kelompok Tani SAILEMPEN	Desa Mongan Poula Kec, Siberut utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	15	UNIT	-	-
139	Joni Kusma	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan alat transportasi berupa sepeda motor sebanyak 16 unit untuk kelompok tani TAINAOK	Desa Mongan Poula, kec siberut utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	16	UNIT	-	-
140	Gerson	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan alat sulingan nilam (drom) untuk masyarakat di Dusun Bagan lelet	Dusun bagan lelet desa sioban kec, sipora selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	35000000	RUPIAH	-	-
141	Gerson	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan	Pengadaan Pembangunan jalan penghubung dari dusun mara tengah sampai	Dusun mara tengah desa mara kec sipora selatan, Kab. Kepulauan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	200	METER	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
		Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	ke SDN 10 Mara	Mentawai	PENATAAN RUANG				
142	Gerson	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Pengadaan pembangunan jalan di dusun malabbaet	dusun malabbaet desa sioban, kec sipora selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200	METER	-	-
143	Gerson	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan berupa Freezer box untuk kelompok UMKM Desa Tuapejat	Desa Tuapejat kec. sipora utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	30	UNIT	-	-
144	Gerson	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bibit ternak babi untuk masyarakat dusun malabbaet	Dusun malabbaet desa sioban kec, sipora selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	20	EKOR	-	-
145	Gerson	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak babi untuk masyarakat dusun takkuman	dusun takkuman desa sioban kec sipora selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	20	EKOR	-	-
146	Gerson	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, pemanfaatan olah raga	Pengadaan bantuan sepeda air untuk pemuda dusun paddarai	dusun paddarai desa sioban kec sipora selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	10	UNIT	-	-
147	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bibit Sapi Rp.160.000.000	Dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kecematan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	15	ekor	-	-
148	Nelsen	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di kawasan	Peningkatan jalan lingkungan Rp	Dusun Guluk guluk Desa Saumanganya	DINAS PERUMAHAN DAN	150	meter	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
	Sakerebau, S. Th	Perumahan Permukiman	200.000.000	Kecematan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	KAWASAN PERMUKIMAN				
149	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Kelompok Tani Pisang Rp. 100.000.000	Dusun Bulasat Desa Bulasat Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	15	ha	-	-
150	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Peremejaan Kelapa Kelompok Tani Ukra Rp 135.000.000	Dusun Guluk guluk Desa Saumanganya Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	30	ha	-	-
151	Adi Hamdani, S.A.P	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	bantuan pengadaan bibit ternak untuk Kelompok Ternak Sapi Siagou	Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Ekor	-	-
152	Adi Hamdani, S.A.P	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Tani Bailaket Sejahtera	Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Ekor	-	-
153	Adi Hamdani, S.A.P	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan mesin tempel 15 PK dan alat tangkap nelayan untuk Kelompok Nelayan KAMRA	Dusun Puro II, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13	Unit	-	-
154	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Boat 4 pk Kelompok Nelayan Simakerek	Dusun Usutngaik,Desa Matobe Kecematan Sipora Selatan,Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	8	Unit	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
155	Ibrani Sababalat, SH	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian	Bantuan Mesin Ramba Kelompok Purimanuajat	Dusun Mapadegat Desa Tuapejat Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	15	Unit	-	-
156	Ibrani Sababalat, SH	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Bibit Babi Kelompok Ternak Tauraunia Betina16 ekor dan jantan 4 ekor	Desa Matobe Kecematan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	20	ekor	-	-
157	Hendrikus Erik	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Pengadaan Perbaikan Jalan Lingkungan di Dusun Simaonaibaga	Dusun Simaonaibaga desa maileppet kecamatan siberut selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200000000	RUPIAH	-	-
158	Hendrikus Erik	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Pengadaan Perbaikan Jalan Lingkungan di Dusun Puro I	Dusun Puro I Desa Muara Siberut kecamatan siberut selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200000000	RUPIAH	-	-
159	Hendrikus Erik	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Pengadaan Perbaikan PUSTU TOLOULAGGO karena sudah rusak berat	Dusun Toloulaggo Desa Katurei kec siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	200000000	RUPIAH	-	-
160	Hendrikus Erik	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan,	Pengadaan Perbaikan Pustu Maileppet karena	Dusun Siritengah Desa Maileppet kec siberut selatan, Kab. Kepulauan	DINAS KESEHATAN	200000000	RUPIAH	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
		Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	sudah rusak berat	Mentawai					
161	Hendrikus Erik	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian	Pengadaan Perbaikan Jalan pertanian di Dusun Salappa	Dusun salappa desa muntei kecamatan siberut selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	200000000	RUPIAH	-	-
162	Hendrikus Erik	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian	Pengadaan perbaikan jalan pertanian di Dusun Siguluguluk	Dusun siguluguluk desa saliguma kecamatan siberut tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	200000000	RUPIAH	-	-
163	Hendrikus Erik	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian	Pengadaan perbaikan/rehabilitasi jalan pertanian Malupetpet	Dusun Puro I desa muara siberut kec, siberut selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	200000000	RUPIAH	-	-
164	Hendrikus Erik	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit kelapa untuk masyarakat desa maileppet	Desa maileppet kecamatan siberut selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	300000000	RUPIAH	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
165	Hendrikus Erik	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin tempel 5 PK sebanyak 7 unit untuk kelompok nelayan GABAT PURIMANUAET	Desa Nemnemleleu kecamatan sipora selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	7	UNIT	-	-
166	Hendrikus Erik	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin tempel 15 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan BULAUBUGGEI	Dusun Gotab Desa saliguma kecamatan siberut tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	-	-
167	Hendrikus Erik	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin tempel 5 PK sebanyak 15 unit untuk kelompok nelayan SETCET OJUK	Dusun pasakiat desa maileppet kecamatan siberut selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	15	UNIT	-	-
168	Adi Hamdani, S.A.P	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Tani Peleteu	Desa Madobag Kec. Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Ekor	-	-
169	Adi Hamdani, S.A.P	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Tani Bio	Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Ekor	-	-
170	Adi Hamdani, S.A.P	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Maju Bersama	Dusun Pariok Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Ekor	-	-
171	Alisandre Zalukhu	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat	Bantuan rehabilitasi bangunan Sekolah Dasar Negeri	Desa Taikako, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	Unit	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
		Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
172	Alisandre Zalukhu	BANTUAN MODAL USAHA/ALAT, PELATIHAN UMKM	Bantuan modal usaha untuk UMKM Desa Sikakap	Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	350000000	Rupiah	-	-
173	Kristinus	BANTUAN MODAL USAHA/ALAT, PELATIHAN UMKM	Bantuan modal usaha untuk Kelompok UMKM Peigu Karya	Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10	orang	-	-
174	Kristinus	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan alat tangkap nelayan (rabo) untuk Kelompok Nelayan Simanja	Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	2	Unit	-	-
175	Kristinus	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian	Bantuan pembangunan jalan pertanian persawahan Malupetpet sepanjang 300 meter	Dusun Puro Desa Muara Siberut Kec. Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	Paket	-	-
176	Julius Tairarak, S. Pt	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Bantuan pembangunan MCK untuk SDN 25 Simatalu sebesar Rp 150.000.000	Desa Simatalu, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	Unit	-	-
177	Julius Tairarak,	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga	Pengadaan bantuan mobiler (kursi, meja,	Desa Simatalu, Kab.	DINAS	10	buah	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
	S. Pt	Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	lemari) untuk pustu / polindes Simatalu sebesar Rp. 100.000.000	Kepulauan Mentawai	KESEHATAN				
178	Julius Tairarak, S. Pt	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian	Pembangunan jalan pertanian sepanjang 100 meter dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000	Dusun Sakaladat Desa Simalegi, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	100	meter	-	-
179	Julius Tairarak, S. Pt	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pembangunan rehabilitasi rumah dinas SDN 17 Simatalu	Desa Simatalu, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	150000000	Rupiah	-	-
180	Adi Hamdani, S.A.P	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Mongan Oinan	Dusun Salapa Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Ekor	-	-
181	Adi Hamdani, S.A.P	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Sapi Teitei Leleu	Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Ekor	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
182	Nelsen Sakerebau, S. Th	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di kawasan Perumahan Permukiman	Jalan Lingkung Rp. 200.000.000	Dusun Seay Lama Desa Sikakap Kecematan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	paket	-	-
183	Gerson	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan ternak babi untuk kelompok Ternak TORO LAGGOK	Dusun Sioban dalam Desa Sioban kec sipora selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	20	EKOR	-	-
184	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Peremajaan Kelapa Kelompok Tani Oong Rp.135.000.000	Dusun Manganjooo Desa Saumanganya Kecematan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	30	ha	-	-
185	Adi Hamdani, S.A.P	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Sapi Simaoba Paalei (KTSSP)	Dusun Sereming Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Ekor	-	-
186	Adi Hamdani, S.A.P	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Sapi Simaeruk	Dusun Ugai Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Ekor	-	-
187	T. F Yohanes Pardede	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin tempel merek YAMAHA 8 PK untuk kelompok NELAYAN SUNGAI RIMAU	Dusun mabulau buggei desa saumanganya kec. pagai utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	-	-
188	Isar Taileleu, S. PAK	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Mesin rumput Kelompok Tani Simalatcat	Dusun Belekroksok sara leleu, Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	20	unit	-	-
189	Isar Taileleu, S.	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak,	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	Dusun Palukkuek Desa Malakopa Kecematan	DINAS KETAHANAN	20	unit	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
	PAK	peralatan pertanian	Kelompok Tani Onibaga	Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	PANGAN DAN PERTANIAN				
190	Isar Taileleu, S. PAK	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Mesin Pemotong Rumput Kelompok Tani Toro Gerat	Dusun Puru Pugat, Beleraksok Desa Malakopa Kevcematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	17	unit	-	-
191	Isar Taileleu, S. PAK	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian	Pengadaan Jalan Usaha Tani Rp 200.000.000	Dusun BeleraksoK Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	500	meter	-	-
192	Isar Taileleu, S. PAK	BANTUAN MODAL USAHA/ALAT, PELATIHAN UMKM	Pengadaan Kulkas Pendingin/Frezer Kelompok Usaha Durian Rp.300.000.000	Dusun Makukuet Desa Matobe Kecematan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	21	unit	-	-
193	Isar Taileleu, S. PAK	BANTUAN MODAL USAHA/ALAT, PELATIHAN UMKM	Bantuan Frezer Kelompok Korananta Rp.300.000.000	Desa Matobe Kec Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	21	unit	-	-
194	Isar Taileleu, S. PAK	Perbaikan rumah tidak layak huni	Pembangunan Rumah Layak Huni	Dusun Beleraksok Desa Malakopa Kecematan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25	unit	-	-
195	Isar Taileleu, S.	Perbaikan rumah tidak layak huni	Pembangunan Rumah	Dusun Malakopa Desa Malakopa Kecematan	DINAS PERUMAHAN DAN	13	unit	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
	PAK		Layak Huni	Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	KAWASAN PERMUKIMAN				
196	Isar Taileleu, S. PAK	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Rehab berat Polindes Rp. 199.000.0000	Dusun Beleraksok Desa Malakopa Kec Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	1	unit	-	-
197	Isar Taileleu, S. PAK	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Pembangunan Polindes Rp 199.000.000	Dusun Bukku Desa Muara Taikako Kec Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	1	unit	-	-
198	Safrijal Sageileppak	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Pengadaan bantuan BBM untuk pasien rujukan di Puskesmas Taileleu	Desa Pasakiat Taileleu, Kec. Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	70000000	RUPIAH	-	-
199	Isar Taileleu, S. PAK	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan	Pembangunan Gedung Paud Rp 199.000.000	Dusun Saraleleu Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	unit	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
		Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
200	Isar Taileleu, S. PAK	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin boad Kelompok Nelayan Kinabela 15 pk	Dusun Aban Baga Desa Sinaka Kec Pagai Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	15	unit	-	-
201	Isar Taileleu, S. PAK	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Mesin Boad 4pk Kelompok Nelayan AIU PET-PET KOAT	Dusun Limosua Desa Bulasat Kec Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	15	unit	-	-
202	Isar Taileleu, S. PAK	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Mesin Boad 15 pk Kelompok Nelayan Pusaraat	Dusun Makukuet Desa Matobe Kec Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	15	unit	-	-
203	Isar Taileleu, S. PAK	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Mesin Boad 8pk Kelompok Nelayan Tulu Kabu	Dusun Mangka Uluh Desa Sinaka Kec Pagai Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	14	unit	-	-
204	Safrijal Sageileppak	BANTUAN MODAL USAHA/ALAT, PELATIHAN UMKM	Pengadaan bantuan untuk UMKM Muara Siberut	Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	100000000	RUPIAH	-	-
205	H. Rasyidin Syaiful, SH., MH	BANTUAN MODAL USAHA/ALAT, PELATIHAN UMKM	Bantuan modal usaha Kelompok UMKM Baklo Masing masing anggota 30.000.000 terdiri dari 20 orang Rp 600.000.000	Desa Muara Siberut Kecematan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	20	orang	-	-
206	H. Rasyidin	BANTUAN MODAL USAHA/ALAT,	Bantuan Modal usaha Kelompok UMKM Orek	Desa M.Siberut Kecematan Siberut	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL	20	orang	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
	Syaiful, SH., MH	PELATIHAN UMKM	Rp.600.000.000	Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
207	H. Rasyidin Syaiful, SH., MH	BANTUAN MODAL USAHA/ALAT, PELATIHAN UMKM	Bantuan Modal Usaha Kelompok UMKM Kole Rp. 600.000.000	Desa Maileppet Kec Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	30	orang	-	-
208	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit Kelapa sebanyak 2500 batang untuk kelompok Tani RORO SIMERU	Desa saumanganya kecamatan pagai utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2500	BATANG	-	-
209	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan dana untuk penebangan kayu dan pembersihan lahan untuk kegiatan peremajaan kelapa Kelompok Tani RORO SIMERU	Desa saumanganya kec pagai utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	25000000	RUPIAH	-	-
210	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan dana untuk penanaman bibit kelapa pada kegiatan peremajaan kelapa kelompok Tani RORO SIMERU	Desa saumanganya, kec pagai utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	25000000	RUPIAH	-	-
211	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan mesin senso kecil merek STHILL untuk mengoptimalkan kegiatan peremajaan kelapa kelompok Tani RORO SIMERU	Desa saumanganya, kecamatan pagai utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	6	UNIT	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
212	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan mesin rumput merek STHILL untuk mengoptimalkan kegiatan peremajaan kelapa Kelompok Tani RORO SIMERU	Desa saumanganya, kecamatan pagai utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	11	UNIT	-	-
213	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan mesin potong rumput merek sthill untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengembangan dan produkdi hasil pertanian kelompok Tani PETAK BERBAGI	Dusun mabulau buggei desa saumanganya kec pagai utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	12	UNIT	-	-
214	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan Sprayer Elektrik Knapsack Baterai 2in1 untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengembangan dan produksi hasil pertanian kelompok Tani PETAK BERBAGI	Dusun mabulau buggei desa saumanganya kecamatan pagai utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	12	UNIT	-	-
215	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan Mesin Thresher Kubota (perontok gaba) untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengembangan dan hasil produksi pertanian kelompok Tani PETAK BERBAGI	Dusun mabulau buggei desa saumanganya kec, pagai utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	UNIT	-	-
216	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN MODAL USAHA/ALAT, PELATIHAN UMKM	Bantuan Alat Sulingan Nilam	Desa Mara Kecamatan Sipora Selatan Kab.Kep.Mentawai, Kab.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN	1	Unit	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				Kepulauan Mentawai	DAN PERDAGANGAN				
217	Ibrani Sababalat, SH	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di kawasan Perumahan Permukiman	Bantuan Rumah Baru	Dusun Monga Desa Mara Kecamatan Sipora Selatan Kab.Kep.Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10	Unit	-	-
218	Ibrani Sababalat, SH	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di kawasan Perumahan Permukiman	Bantuan Bedah Rumah	Dusun Rokot Desa Matobek Kecamatan Sipora Selatan Kab.Kep.Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10	Unit	-	-
219	Ibrani Sababalat, SH	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di kawasan Perumahan Permukiman	Bantuan Rumah Baru	Dusun Sagitsi Desa Nemnemleleu Kecamatan Sipora Selatan Kab.Kep.Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10	Unit	-	-
220	T. F Yohanes Pardede	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin 4 PK untuk kelompok Nelayan PUSARAAT	Dusun Bere Desa Makalo kecamatan pagai selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	-	-
221	T. F Yohanes Pardede	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin 4 PK untuk kelompok Nelayan SOPO SIMAERU	Dusun Bukku Monga Desa Taikako Kec, sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	14	UNIT	-	-
222	T. F Yohanes Pardede	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin 4 PK untuk kelompok Nelayan OBA SIMERU	Dusun Muara Taikako desa taikako kec, sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	11	UNIT	-	-
223	T. F Yohanes	Bantuan armada dan alat tangkap	Pengadaan bantuan mesin 4 PK untuk kelompok	Dusun Limu Desa Bulasat Kec, pagai	DINAS	10	UNIT	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
	Pardede	nelayan kecil	Nelayan TAIREIMANG	selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	PERIKANAN				
224	T. F Yohanes Pardede	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin 4 PK untuk kelompok Nelayan KARONEMIENTA	Dusun Taikako Hulu Desa Taikako kec sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	-	-
225	T. F Yohanes Pardede	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin 4 PK untuk kelompok Nelayan LAGGAI SIBURU	Dusun Taikako Barat Desa Taikako Kec, Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	-	-
226	T. F Yohanes Pardede	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin 4 PK untuk kelompok Nelayan LAPRAT SIBAU	Dusun Pinatektek Desa Sikakap kec, sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	15	UNIT	-	-
227	T. F Yohanes Pardede	Perbaikan rumah tidak layak huni	Pengadaan bantuan rumah untuk masyarakat tidak mampu di Desa Sikakap	Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20	UNIT	-	-
228	T. F Yohanes Pardede	Perbaikan rumah tidak layak huni	Pengadaan bantuan rumah untuk masyarakat tidak mampu di Desa Bulasat	Desa Bulasat kecamatan pagai selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10	UNIT	-	-
229	T. F Yohanes Pardede	Perbaikan rumah tidak layak huni	Pengadaan bantuan rumah untuk masyarakat tidak mampu di Desa Saumanganya	Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30	UNIT	-	-
230	T. F Yohanes Pardede	Perbaikan rumah tidak layak huni	Pengadaan bantuan rumah untuk masyarakat tidak mampu di Desa Taikako	Desa Taikako kecamatan sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15	UNIT	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
231	Kristinus	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Sapi Simasingin	Dusun Sereming Desa Madobag, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Ekor	-	-
232	T. F Yohanes Pardede	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Pengadaan bantuan pembangunan Jalan lingkungan di Dusun Sikakap	Dusun sikakap desa sikakap kecamatan sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200000000	RUPIAH	-	-
233	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit kelapa untuk peremajaan kelapa kelompok Tani TOILET KILIBET BAGA	Dusun Pinairuk Desa saumanganya kec, pagai utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2500	RUPIAH	-	-
234	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan dana untuk penanaman bibit kelapa kelompok Tani TOILET KILIBET BAGA	Dusun Pinairuk Desa Saumanganya kec, pagai utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	25000000	RUPIAH	-	-
235	Adi Hamdani, S.A.P	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan mesin tempel 15 PK untuk Kelompok Mongan Simangkat	Dusun Sarausau Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10	Unit	-	-
236	T. F Yohanes Pardede	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan mesin meja kayu kombinasi serba guna potong dan ketam untuk UMKM KARONIET	Dusun biu-biu desa saumanganya kec pagai utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15000000	RUPIAH	-	-
237	T. F Yohanes Pardede	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan Mesin Diesel Yanmar TF 155 untuk UMKM KARONIET	Dusun Biu-biu Desa Saumanganya kecamatan pagai utara, Kab. Kepulauan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN	45000000	RUPIAH	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				Mentawai	DAN PERDAGANGAN				
238	James Sibarani	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi pariwisata	Rehab resort di Katiet Rp.300.000.000	Dusun Katiet Desa Bosua Kec Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	paket	-	-
239	James Sibarani	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Pengecoran Jalan SAMPING RSUD-KODIM Rp. 1.000.000.000	Desa Sipora Kecematan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	700	meter	-	-
240	James Sibarani	BANTUAN MODAL USAHA/ALAT, PELATIHAN UMKM	Bantuan Modal UMKM Rp.400.000.000 Karunia Indah, robusa jaya, cahaya hati, berkah harapan, campur sari, semoga jaya, sukses bersama, usaha barokah, harapan baru, bukit indah	Desa Bukit Pamewa Kec Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10	kelompok	-	-
241	James Sibarani	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Kandang Ayam 3bh dan Bibit ayam 15 rb Ekor dan Pakam ayam 750 karung kelompok Sumber usaha, tunas baru, boiler maju Rp 900.000.000	Desa Bukit Pamewa Kec Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3	kelompok	-	-
242	James Sibarani	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pembelian traktor mini, pupuk kompos, pupuk kimia, mulsa cabe dan bibit cabe. Kelompok sipora maju dan Tani makmur Rp 300.000.000	Desa Sipora Jaya Kec Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2	kelompok	-	-
243	James Sibarani	BANTUAN MODAL USAHA/ALAT,	Bantuan Modal Usaha Kelompok Harapan Baru	Desa Tuapejat Kec Sipora Utara, Kab.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL	2	kelompok	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
		PELATIHAN UMKM	jati dan Roro Sibau Rp. 100.000.000	Kepulauan Mentawai	DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
244	James Sibarani	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Body Boat Kelompok Nelayan Gerapuh dan Ambu ambu Rp.200.000.000	Desa Tuapejat Kec Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	1	unit	-	-
245	James Sibarani	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Frezer untuk Kelompok Nelayan Rp. 75.000.000	Desa Tuapejat Kec Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	45	unit	-	-
246	James Sibarani	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Bibit Sapi Bali Rp. 150.000.000	Desa Bukit Pamewa Kec Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	ekor	-	-
247	James Sibarani	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Bibit Babi Kelompok Ternak Martabe dan pakan babi 100 karung Rp. 200.000.000	Desa Tuapejat Kec Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	100	ekor	-	-
248	James Sibarani	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Bibit bebek remaja 3000 ekor dan pakan bebek 300 karung Rp.300.000.000 Kelompok ternak Bebek kering	Desa Tuapejat Kec Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	kelompok	-	-
249	James Sibarani	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan alat suling nilam dan bibit tampik nilam Kelompo Tani Nilam Maju Rp. 75.000.000	Desa Bosua Kec Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	paket	-	-
250	James Sibarani	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Bantuan alat ketam dan alat potong kayu Kelompok Perabot Maju	Desa Betumonga Kec Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN	1	paket	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			Rp.75.000.000		DAN PERDAGANGAN				
251	James Sibarani	Perbaikan rumah tidak layak huni	Bantuan perumahan Rp 225.000.000	Desa Sioban Kec Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	unit	-	-
252	James Sibarani	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian	Pembangunan parit pembuangan dari sawah ke laut Rp.500.000.000	Desa Sidomakmur Kec Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	km	-	-
253	James Sibarani	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Bibit babi dan pakam kelompok ternak sioban matobe Rp 200.000.000	Desa Sioban Kec Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	paket	-	-
254	James Sibarani	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian	Pembangunan jalan persawahan Rp.1.000.000.000	Desa Matobek Kec Sipora Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3	km	-	-
255	Isar Taileleu, S. PAK	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Alat Semprot dan Bibit Padi 150kg Kelompok Momopegu	Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	paket	-	-
256	Nelsen Sakerebau, S. Th	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin 8pk Kelompok Nelayan Sorot	Dusun Bosua Girau Desa Taikako Kec Sikakap, Kab.	DINAS PERIKANAN	10	unit	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			Poi	Kepulauan Mentawai					
257	Nelsen Sakerebau, S. Th	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan alat tangkap mesin boat 15 pk	Dusun seay baru Desa Sikakap Kec Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	-	-

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan prioritas merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026

Program prioritas Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 terdiri dari program prioritas yang menunjang pencapaian tujuan pembangunan. Rincian program prioritas dihubungkan dengan prioritas nasional Tahun 2026.

Adapun rencana program/kegiatan pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 diuraikan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Rekapitulasi RKPD Tahun 2026

No	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	255,693,830,021.00
2	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	92,090,577,884.00
	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	14,664,542,000.00
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS MAPADDEGAT	2,134,730,000.00
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS SIOBAN	1,616,362,500.00
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS BOSUA	938,535,500.00
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS MUARA SIBERUT	1,702,660,100.00
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS PEIPEI	1,319,548,000.00
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP	1,368,970,250.00
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN	1,553,206,000.00
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS BETAET	842,900,000.00
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS SIKAKAP	1,866,200,000.00
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS MALAKOPA	1,125,997,000.00

No	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS BULASAT	909,490,000.00
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS SAREREIKET	655,802,800.00
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS SIMATALU	728,044,000.00
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS SIGAPOKNA	1,003,187,600.00
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS SAUMANGANYA	1,281,520,000.00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	28,355,342,348.00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT	50,000,000.00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	UPT Pengelolaan Air Minum Daerah	1,000,000,000.00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	20,962,286,243.00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	4,786,619,920.25
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,213,958,523.25
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,771,302,559.50
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	UPTD PPA	65,000,000.00
8	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	17,811,043,666.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4,406,464,948.00
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6,058,353,265.75
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5,933,192,785.25
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4,626,231,571.00
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3,731,202,176.50
14	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3,356,946,779.75
15	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	5,190,160,119.00
16	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	31,460,287,973.00
17	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	25,453,496,223.00
18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	8,172,324,863.25
19	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	141,872,938,788.00
20	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3,293,137,639.00
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	34,504,541,281.75
22	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	6,966,237,819.00
23	KECAMATAN SIBERUT UTARA	KECAMATAN SIBERUT UTARA	2,566,653,970.50
24	KECAMATAN SIBERUT TENGAH	KECAMATAN SIBERUT TENGAH	1,574,763,968.50
25	KECAMATAN SIBERUT BARAT	KECAMATAN SIBERUT BARAT	1,584,097,756.00
26	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	1,553,383,771.50

No	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*
27	KECAMATAN SIBERUT SELATAN	KECAMATAN SIBERUT SELATAN	2,295,533,024.50
28	KECAMATAN SIPORA UTARA	KECAMATAN SIPORA UTARA	1,987,948,673.00
29	KECAMATAN SIPORA SELATAN	KECAMATAN SIPORA SELATAN	2,610,242,064.00
30	KECAMATAN PAGAI UTARA	KECAMATAN PAGAI UTARA	1,723,925,492.25
31	KECAMATAN PAGAI SELATAN	KECAMATAN PAGAI SELATAN	1,781,938,449.25
32	KECAMATAN SIKAKAP	KECAMATAN SIKAKAP	2,654,654,779.00
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,730,333,159.00
TOTAL			**774,600,648,254.75**

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**255.693.830.021,00**							**266.361.594.634,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**253.193.830.021,00**							**263.861.594.634,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**253.193.830.021,00**							**263.861.594.634,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**188.911.732.271,25**							**195.168.104.884,00**	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 persen	188.848.732.271,25			-	-	Pegawai Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	195.130.104.884,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1900 Orang/bulan	188.848.732.271,25	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN KHUSUS GURU	-	-	Pegawai Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai		195.130.104.884,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 persen	63.000.000,00			-	-	Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	38.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	63.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai		38.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					**53 persen 55 persen 32,5 persen 32 persen 46 persen**	**63.882.097.749,75**							**68.293.489.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*APK SD/MI/Paket A* *APM SD /MI/ paket A*	-			100 persen 90 persen	31.880.693.850,00			-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa	-	37.228.559.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		1.697.204.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				8 Unit	1.765.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		1.960.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	494.583.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		1.659.773.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				10 Paket	816.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		810.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	568.090.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	1.802.769.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		969.807.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				300 Orang	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				250 Orang	2.544.304.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		1.676.337.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				136 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				135 Satuan Pendidikan	380.566.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				135 Orang	170.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				268 Orang	400.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				10 Dokumen	553.627.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		403.627.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				4 Dokumen	486.370.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		187.298.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				10 Komunitas	405.742.350,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		305.870.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				5 Paket	1.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				4 Kegiatan	130.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				7 Ruang	1.825.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				538 Orang	714.236.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		714.236.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				136 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Ruang	2.249.028.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		2.549.028.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				14000 Peserta Didik	15.125.376.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		15.125.376.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*APK SMP/MTS/ Paket B APM SMP /MTS/ Paket B*	-			100 persen 64 persen	26.399.528.899,75			-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa	-	25.113.076.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				3 Unit	4.503.519.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		4.503.519.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1.470.850.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		1.470.850.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	964.450.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		964.450.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1.277.528.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		1.277.400.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1.250.383.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		1.250.383.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	3.175.603.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		3.175.603.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				4 Paket	501.837.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		501.837.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5000 Peserta Didik	8.136.875.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		7.454.375.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				50 Peserta Didik	501.413.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		207.633.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				0 Orang	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	697.291.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		797.291.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				35 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				34 Satuan Pendidikan	313.034.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		149.610.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				68 Orang	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				34 Dokumen	288.352.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		245.052.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				5 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				10 Komunitas	199.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				34 Satuan Pendidikan	281.519.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		224.517.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	1.386.871.799,75	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		740.554.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*APK PAUD (5-6)*	-			57 persen	3.554.865.000,00			-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa	-	3.904.843.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		349.978.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1050 Orang	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				110 Orang	800.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				114 Satuan Pendidikan	130.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				114 Satuan Pendidikan	2.184.865.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOP PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		2.184.865.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				10 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				40 Peserta didik	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan*	-			4,3 persen	2.047.010.000,00			-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa	-	2.047.010.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				35 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				14 Satuan Pendidikan	90.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				14 Satuan Pendidikan	1.682.010.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		1.682.010.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				8 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**					**-**	**400.000.000,00**							**400.000.000,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-			-	400.000.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				2 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.500.000.000,00**							**2.500.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.500.000.000,00**							**2.500.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**					**65 persen**	**1.400.000.000,00**							**1.400.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pengelolaan, Pelindungan, Pemajuan, Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal*	-			100 persen	525.000.000,00			-	-	Cagar Budaya, Masyarakat	-	525.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				5 Objek	525.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Cagar Budaya, Masyarakat		525.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Lestarinya Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 persen	875.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Cagar Budaya, Masyarakat	-	875.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				10 Objek	875.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Cagar Budaya, Masyarakat		875.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**					**5 persen**	**600.000.000,00**							**600.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pelestarian Seni Tradisional*	-			100 persen	600.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				40 Orang	600.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Masyarakat		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**					**52 persen**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan*	-			100 persen	150.000.000,00			-	-	Cagar Budaya, Masyarakat	-	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				10 Objek	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Cagar Budaya, Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan*	-			100 persen	350.000.000,00			-	-	Cagar Budaya, Masyarakat	-	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				10 Objek	350.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Cagar Budaya, Masyarakat		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN						**92.090.577.884,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**92.090.577.884,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**92.090.577.884,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**73.246.043.934,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS Terlaksananya pembayaran honor tenaga kerja dengan perjanjian kerja dengan Perjanjian (Kontrak)*	-			1 Tahun 1 Tahun	73.182.043.934,00			-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	73.182.043.934,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Rekening air yang dibayarkan Rekening Listrik Yang dibayarkan*	-			1 Tahun	64.000.000,00			-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	64.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**15 Puskesmas 100 Persen 1 RSUD 23/1.000 1000 KH 250/100.000 100 KH 14 Persen 2.6 1 Tahun**	**17.580.095.150,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Sakit Yang ditingkatkan Fungsinya* *Jumlah Rumah Sakit Yang ditingkatkan Fungsinya* *Jumlah fasilitas kesehatan yang dibangun* *Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas* *Jenis Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan yang tersedia* *Jumlah Rumah Sakit yang direhabilitasi* *Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang direhabilitasi* *Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan* *Jumlah Puskesmas Yang ditingkatkan Fungsinya* *Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi* *Jumlah Puskesmas Dan Fasilitas Kesehatan Lainnya Yang di rehab* *Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya* *Jenis Alat Kesehatan yang tersedia* *Jenis Alat Kesehatan yang tersedia* *tersedianya obat dan vaksin di pelayanan kesehatan*	-			2 Unit 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 1 Unit 2 Unit 100 Persen 100 Persen 2 Unit 100 Persen	6.975.926.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				100% Unit	256.632.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				10 Unit	600.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Beriulou Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Malancan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Katurei Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100% Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				100% Unit	2.100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				100% Paket	3.484.165.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				100% Keluarga	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan				100% Layanan	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				100% Paket	465.129.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jenis Kegiatan pengelolaan Surveilans Kesehatan* *Jenis Kegiatan Lanjut Yang ke pelayanan Kesehatan* *Jenis Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang dilajukan* *Jenis Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olah Raga* *Jenis Kegiatan Pelayanan Rumah sakit* *Jenis Kegiatan penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat* *Jenis Kegiatan upaya Promosi kesehatan yang Dilaksanakan* *Jenis layanan rujukan dan rujuk balik* *Jenis Penyakit Menular dan Tidak Menular Yang diilayani* *Jenis tanaman obat yang dikembangkan* *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar/ Sekolah* *Jumlah desa yang melakukan STBM* *Jumlah Ibu Hamil Yang*	-			100 Persen 100 Persen	10.604.169.150,00			-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Mendapat Pelayanan Kesehatan *Jumlah Ibu yang mendapatkan Pelayanan dengan Jaminan Persalinan* *Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan* *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang* *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* *Jumlah pasien HIV Yang Terinfeksi yang ditangani* *Jumlah Pasien yang ditangani* *Jumlah penderita gangguan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan* *Jumlah penderita penyakit Diabetes melitus yang ditangani* *Jumlah penderita penyakit Hipertensi yang ditangani* *Jumlah Petugas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita* *Jumlah UKS dan Dokter Kecil yang dilatih Jenis kegiatan sanitasi yang dilaksanakan* *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir* *Persentase Kesembuhan TB* *Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat* *Tersedianya biaya Operasional IFK* *Tersedianya Obat dan BMHP*														
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	409.888.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	441.595.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	205.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	125.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	279.672.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100% Orang	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100% Orang	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100% Orang	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				100% Dokumen	120.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				100% Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100% Dokumen	193.368.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				100% Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100% Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				100% Dokumen	20.105.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				100% Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100% Dokumen	120.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				100% Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				100% Dokumen	5.948.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				100% Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				100% Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				100% Dokumen	196.718.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100% Orang	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100% Orang	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100% Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				100% Dokumen	84.221.850,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				100% Dokumen	350.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**					**100 % (Persen)**	**797.147.000,00**							**0,00**	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	797.147.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tenaga Kesehatan	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100% Orang	797.147.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tenaga Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**					**15 Puskesmas**	**327.942.000,00**							**0,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jenis kegiatan pengawasan yang dilaksanakan*	-			100 Persen	63.790.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				100% Dokumen	63.790.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Terbitnya sertifikat bagi industri rumah tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	-			100 Persen	108.764.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				100% 0	108.764.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumalah Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan*	-			100 Persen	155.388.000,00			-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				100% Unit	155.388.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**100 Persen**	**139.349.800,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penyuluhan untuk hidup sehat di puskesmas*	-			15 Puskesmas	139.349.800,00			-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				100% Dokumen	139.349.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						**14.664.542.000,00**							**17.201.279.430,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.664.542.000,00**							**17.201.279.430,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**14.664.542.000,00**							**17.201.279.430,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3.396.622.800,00**							**3.716.163.800,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			3 Sub Kegiatan	446.182.800,00			-	-	Pemberi dan Penerima Layanan Kesehatan	-	445.363.800,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.820.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemberi dan Penerima Layanan Kesehatan		25.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	315.566.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemberi dan Penerima Layanan Kesehatan		315.567.800,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	104.796.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemberi dan Penerima Layanan Kesehatan		104.796.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			2 Sub Kegiatan	2.652.970.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pemberi dan Penerima Layanan Kesehatan	-	2.970.800.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	470.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pemberi dan Penerima Layanan Kesehatan		470.800.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.182.170.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pemberi dan Penerima Layanan Kesehatan		2.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			1 Sub Kegiatan	297.470.000,00			-	-	Barang Milik Daerah yang ada di RSUD	-	300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	297.470.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Barang Milik Daerah yang ada di RSUD		300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**B 95/100000 Penduduk Madya 100 %**	**4.877.626.200,00**							**5.778.334.730,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar* *Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan sesuai Standar*	-			17 Layanan 6 SubKegiatan	3.422.442.858,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	4.551.758.730,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				60 Unit	613.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		900.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				8 Paket	2.809.042.858,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		3.651.758.730,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan kualitas layanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan* *Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan* *Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan* *Persentase Persentase Penyediaan kualitas layanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan*	-			80 % 2 SubKegiatan 100 % 84 %	1.455.183.342,00			-	-	-	-	1.226.576.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				10 Dokumen	1.455.183.342,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		1.226.576.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**					**-**	**6.390.293.000,00**							**7.706.780.900,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.390.293.000,00			-	-	Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	7.706.780.900,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				30 Orang	6.390.293.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Sumber Daya Manusia Kesehatan		7.706.780.900,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		PUSKESMAS MAPADDEGAT						**2.134.730.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.134.730.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.134.730.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**100 Persen 14 Persen 15 Puskesmas (BLUD) 23 1000 KH 250 100 ribu/KH 1 RSUD (BLUD) 2.6 1 Tahun**	**2.134.730.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*	-			100 Persen	2.134.730.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	PUSKESMAS MAPADDEGAT
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	2.134.730.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK , PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	PUSKESMAS MAPADDEGAT
		PUSKESMAS SIOBAN						**1.616.362.500,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.616.362.500,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.616.362.500,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**1 RSUD 14 Persen 250 100 ribu/KH 23 1000 KH 2.6 1 Tahun 100 Persen 15 Puskesmas**	**1.616.362.500,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*	-			100 Persen	1.616.362.500,00			-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	PUSKESMAS SIOBAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	1.616.362.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK , PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	PUSKESMAS SIOBAN
		PUSKESMAS BOSUA						**938.535.500,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**938.535.500,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**938.535.500,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**1 RSUD 15 Puskesmas 100 Persen 2.6 1 Tahun 23 /1000 KH 250 100 ribu/KH 14 Persen**	**938.535.500,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*	-			100 Persen	938.535.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	PUSKESMAS BOSUA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	938.535.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK , PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	PUSKESMAS BOSUA
		PUSKESMAS MUARA SIBERUT						**1.702.660.100,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.702.660.100,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.702.660.100,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**14 Persen 100 Persen 15 Puskesmas 1 RSUD 23 1000 KH 250 100 ribu/KH 2.6 1 Tahun**	**1.702.660.100,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*	-			100 Persen	1.702.660.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	PUSKESMAS MUARA SIBERUT
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	1.702.660.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK , PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	PUSKESMAS MUARA SIBERUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS PEIPEI						**1.319.548.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.319.548.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.319.548.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**2.6 1 Tahun 14 Persen 1 RSUD 23 1000 KH 15 Puskesmas 250 100 ribu/KH 100 Persen**	**1.319.548.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*	-			100 Persen	1.319.548.000,00			-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	PUSKESMAS PEIPEI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	1.319.548.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK , PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	PUSKESMAS PEIPEI
		PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP						**1.368.970.250,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.368.970.250,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.368.970.250,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**250 100 ribu/KH 23 /1000 KH 14 Persen 100 Persen 1 RSUD 15 Puskesmas 2.6 1 Tahun**	**1.368.970.250,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*	-			100 Persen	1.368.970.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	1.368.970.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK , PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP
		PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN						**1.553.206.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.553.206.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.553.206.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**1 RSUD 100 Persen 23 1000 KH 250 100 ribu/KH 14 Persen 2.6 1 Tahun 15 Puskesmas**	**1.553.206.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*	-			100 Persen	1.553.206.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	1.553.206.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK , PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS BETAET						**842.900.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**842.900.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**842.900.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**14 Persen 250 100 ribu/KH 15 Puskesmas 23 1000 KH 1 RSUD 100 Persen 2.6 1 Tahun**	**842.900.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*	-			100 Persen	842.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	PUSKESMAS BETAET
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	842.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK , PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	PUSKESMAS BETAET
		PUSKESMAS SIKAKAP						**1.866.200.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.866.200.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.866.200.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**23 1000 KH 26 1 Tahun 14 Persen 1 RSUD 250 100 ribu/KH 100 Persen 15 Puskesmas**	**1.866.200.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*	-			100 Persen	1.866.200.000,00			-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	PUSKESMAS SIKAKAP
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	1.866.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK , PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	PUSKESMAS SIKAKAP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS MALAKOPA						**1.125.997.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.125.997.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.125.997.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**23 1000 KH 14 Persen 250 100 ribu/KH 100 Persen 1 RSUD 2.6 1 Tahun 15 Puskesmas**	**1.125.997.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*	-			100 Persen	1.125.997.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	PUSKESMAS MALAKOPA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	1.125.997.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK , PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	PUSKESMAS MALAKOPA
		PUSKESMAS BULASAT						**909.490.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**909.490.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**909.490.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**14 Persen 2.6 1 Tahun 1 RSUD 23 1000 KH 100 Persen 250 100 ribu/KH 15 Puskesmas**	**909.490.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*	-			100 Persen	909.490.000,00			-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	PUSKESMAS BULASAT
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	909.490.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK , PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	PUSKESMAS BULASAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SAREREIKET						**655.802.800,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**655.802.800,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**655.802.800,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**1 RSUD 23 1000 KH 250 100 ribu/KH 2.6 1 Tahun 15 Puskesmas 14 Persen 100 Persen**	**655.802.800,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*	-			100 Persen	655.802.800,00			-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	PUSKESMAS SAREREIKET
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	655.802.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Madobag	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK , PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	PUSKESMAS SAREREIKET
		PUSKESMAS SIMATALU						**728.044.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**728.044.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**728.044.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**23 1000 KH 100 Persen 15 Puskesmas 250 100 ribu/KH 1 RSUD 14 Persen 2.6 1 Tahun**	**728.044.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*	-			100 Persen	728.044.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	PUSKESMAS SIMATALU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	728.044.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK , PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	PUSKESMAS SIMATALU
		PUSKESMAS SIGAPOKNA						**1.003.187.600,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.003.187.600,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.003.187.600,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**1 RSUD 23 1000 KH 2.6 1 Tahun 250 100 ribu/KH 100 Persen 15 Puskesmas 14 Persen**	**1.003.187.600,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*	-			100 Persen	1.003.187.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	PUSKESMAS SIGAPOKNA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	1.003.187.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK , PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	PUSKESMAS SIGAPOKNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SAUMANGANYA						**1.281.520.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.281.520.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.281.520.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**100 Persen 1 RSUD 14 Persen 250 100 ribu/KH 23 /1000 KH 15 Puskesmas 2.6 1 Tahun**	**1.281.520.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*	-			100 Persen	1.281.520.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	-	0,00	PUSKESMAS SAUMANGANYA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	1.281.520.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK , PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	PUSKESMAS SAUMANGANYA
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**28.355.342.348,00**							**258.866.770.359,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**28.355.342.348,00**							**258.866.770.359,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**28.355.342.348,00**							**258.866.770.359,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**7.311.288.048,00**							**97.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD*	-			100 Persen	27.065.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	27.065.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Kabupaten Kepulauan Mentawai		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi keuangan ASN perangkat daerah*	-			100 persen	6.719.608.048,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Dinas PUPR	-	7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				89 Orang/bulan	6.719.608.048,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Dinas PUPR		7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran*	-			100 Persen	257.212.500,00			-	-	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.365.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kabupaten Kepulauan Mentawai		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	53.900.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Kabupaten Kepulauan Mentawai		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Kabupaten Kepulauan Mentawai		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Kabupaten Kepulauan Mentawai		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	172.696.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kabupaten Kepulauan Mentawai		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya operasional penunjang kegiatan*	-			100 persen	146.460.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan	ASN Dinas PUPR	-	90.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	91.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan	ASN Dinas PUPR		90.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	54.780.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas PUPR		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya keandalan BMD*	-			100 Persen	160.942.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	137.992.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	22.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**					**56.63 persen 6.46 persen**	**650.000.000,00**							**22.900.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase meningkatnya jumlah infrastruktur pengelolaan SDA dalam kondisi baik*	-			60 persen	0,00			-	-	Masyarakat	-	21.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0099	Peningkatan Kanal Banjir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan				1 KM	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0102	Pembangunan Breakwater														
			Panjang Breakwater yang Dibangun				1 KM	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi				0,2 KM	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku														
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun				1 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat		3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun				3 KM	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Masyarakat		7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				6 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				8 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Makalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0132	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku														
			Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase meningkatnya luas daerah irigasi dengan sistem irigasi primer dan sekunder kondisi baik*	-			4.10 persen	650.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				3.3 KM	650.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Nemnemleleu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Matobe Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Masyarakat		1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi														
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				2 UNIT	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**					**64.65 persen**	**1.788.576.000,00**							**16.410.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM*	-			7.64 persen	1.788.576.000,00			-	-	Masyarakat	-	16.410.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				130 Orang	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat		260.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				4 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 4. Pembangunan Air Bersih	Masyarakat		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				15.3 Liter/Detik	695.787.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				145 SR	1.092.788.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Matotonan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat		5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**					**0 persen**	**0,00**							**675.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase timbulan sampah yang dikelola TPST*	-			0 Ton	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	675.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				3 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Masyarakat		675.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**					**70.94 persen**	**600.000.000,00**							**2.600.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan sistem air limbah domestik*	-			1.26 persen	600.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	2.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				264 Rumah Tangga	600.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Silabu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muntei Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Bojakan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Malancan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**					**18.33 persen**	**0,00**							**1.900.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kawasan perkotaan yang dilengkapi drainase lingkungan*	-			1.19 persen	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				550 M	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Masyarakat		1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**					**35.88 persen**	**1.296.541.000,00**							**4.860.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki PBG dan SLF*	-			2.5 persen	1.296.541.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	4.860.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Masyarakat		4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				30 Dokumen	296.541.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat		360.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**					**-**	**0,00**							**208.912.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-	-	208.912.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		208.912.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					**21.20 persen**	**16.344.054.300,00**							**111.912.858.359,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang*	-			0.95 persen	16.344.054.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan	Masyarakat	-	111.912.858.359,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				8 Dokumen	720.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan	Masyarakat		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1130,2 KM	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan	Masyarakat		925.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				18,70 KM	2.985.948.331,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Beriulou Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat		3.105.955.859,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				13.71 KM	2.500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat		17.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				13.99 KM	5.237.319.969,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan	Masyarakat		75.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi				27.70 KM	320.586.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat		4.414.610.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang jembatan yang dibangun				210 Meter	4.579.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Beriulou Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Masyarakat		8.967.292.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**					**undefined undefined**	**64.883.000,00**							**200.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Persentase peningkatan tenaga kerja konstruksi terampil*	-			undefined undefined	64.883.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	64.883.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**					**20 persen**	**300.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Meningkatnya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang*	-			20 persen	186.492.000,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	186.492.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW dan RDTR*	-			100 persen	113.508.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Masyarakat	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	113.508.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT						**50.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**50.000.000,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**50.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**50.000.000,00**							**0,00**	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya keandalan BMD*	-			100 Persen	50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	0,00	UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Kabupaten Kepulauan Mentawai		0,00	UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT
		UPT PENGELOLAAN AIR MINUM DAERAH						**1.000.000.000,00**							**2.500.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.000.000.000,00**							**2.500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**1.000.000.000,00**							**2.500.000.000,00**	
1.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**					**64.65 persen**	**1.000.000.000,00**							**2.500.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM*	-			7.64 persen	1.000.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 4. Pembangunan Air Bersih	Masyarakat	-	2.500.000.000,00	UPT PENGELOLAAN AIR MINUM DAERAH
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				7 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 4. Pembangunan Air Bersih	Masyarakat		2.500.000.000,00	UPT PENGELOLAAN AIR MINUM DAERAH
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN						**20.962.286.243,00**							**14.215.470.600,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.297.725.403,00**							**6.872.963.840,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**14.297.725.403,00**							**6.872.963.840,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**11.000.760.495,25**							**2.692.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah Terlaksananya pemenuhan adminsitrasi dan laporan keuangan perangkat daerah*	-			100 persen 100 persen	10.714.970.495,25			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	2.600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	10.714.970.495,25	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		2.600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana*	-			100 persen 100 persen	285.790.000,00			-	-	-	-	92.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	285.790.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		92.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**					**45 persen 17 persen**	**1.249.098.200,00**							**15.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	-			100 persen	16.136.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	16.136.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Terlaksananya sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupten/kota*	-			100 persen 100 persen	28.600.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				120 Orang	28.600.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana*	-			100 persen 67 unit	1.191.482.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				40 Unit Rumah	661.264.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				45 Unit Rumah	530.218.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Cimpungan Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana Meningkatnya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten*	-			100 persen 100 persen	12.879.000,00			-	-	Masyarakat	-	15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			0				0 0	12.879.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-	Masyarakat		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**					**100 Persen**	**912.427.800,00**							**55.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Meningkatnya kawasan permukiman yang tertata*	-			100 Persen	912.427.800,00			-	-	Masyarakat	-	55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			0				0 0	867.271.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Bukit Pamewa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU														
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				1 Dokumen	33.940.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-	Masyarakat		40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	11.216.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**					**20 Persen 100 Persen 65 persen**	**1.135.438.907,75**							**4.110.963.840,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Meningkatnya permukiman yang didukung oleh PSU Terlaksananya urusan penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum*	-			100 persen 100 persen 100 Persen	1.135.438.907,75			-	-	Masyarakat pada kawasan permukiman	-	4.110.963.840,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				22 Lokasi	1.135.438.907,75	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Mara Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Mongan Poula Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Cimpungan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-	Masyarakat pada kawasan permukiman		4.110.963.840,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.664.560.840,00**							**7.342.506.760,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**1.195.125.890,00**							**1.202.506.760,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**524.408.234,00**							**639.239.040,00**	
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	228.978.084,00			-	-	-	-	87.805.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				47 Paket	151.830.084,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		86.485.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Dokumen/ Laporan	77.148.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.320.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	295.430.150,00			-	-	-	-	551.433.740,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	65.540.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		81.299.240,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	229.890.150,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		470.134.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**					**-**	**1.000.000,00**							**1.100.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	1.000.000,00			-	-	-	-	1.100.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.100.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
3.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**					**-**	**8.111.800,00**							**8.922.980,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	8.111.800,00			-	-	-	-	8.922.980,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				16 Badan Usaha	8.111.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.922.980,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
4.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**					**-**	**1.000.000,00**							**1.100.000,00**	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-			-	1.000.000,00			-	-	-	-	1.100.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				5 MHA/ Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.100.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
5.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**					**-**	**500.000.000,00**							**550.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	500.000.000,00			-	-	-	-	550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
6.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**					**-**	**160.605.856,00**							**2.144.740,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	160.605.856,00			-	-	-	-	2.144.740,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				16 Unit	999.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.099.560,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				9.843 Ton	159.606.256,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.045.180,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**5.469.434.950,00**							**6.140.000.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**219.434.950,00**							**290.000.000,00**	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah Terlaksananya pemenuhan adminsitrasi dan laporan keuangan perangkat daerah*	-			100 persen 100 persen	47.820.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	90.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	47.820.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		90.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	45.762.450,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.983.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	21.779.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	125.852.500,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	125.852.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**					**-**	**4.400.000.000,00**							**5.000.000.000,00**	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.400.000.000,00			-	-	-	-	5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				5 Laporan	4.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**					**-**	**850.000.000,00**							**850.000.000,00**	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-			-	850.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	850.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Unit	850.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		850.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						**4.786.619.920,25**							**5.335.327.418,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.786.619.920,25**							**5.335.327.418,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**4.786.619.920,25**							**5.335.327.418,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3.918.793.438,00**							**4.130.827.418,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.799.594.038,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Satpol PP	-	3.776.381.912,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	3.799.594.038,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Satpol PP		3.726.381.912,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	ASN Satpol PP		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	85.899.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	86.699.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		9.999.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	47.065.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		47.065.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		8.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	19.934.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		19.934.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	234.446.206,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		26.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		208.046.206,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	33.300.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	33.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	16.030.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		16.030.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	7.270.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.270.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**-**	**145.250.000,00**							**204.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	102.500.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	154.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				1 laporan	102.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		102.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		52.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-			-	42.750.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	42.750.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**					**-**	**722.576.482,25**							**1.000.000.000,00**	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	722.576.482,25			-	-	-	-	1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				500 Orang	722.576.482,25	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**5.213.958.523,25**							**5.827.700.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.213.958.523,25**							**5.827.700.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**5.213.958.523,25**							**5.827.700.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3.183.203.523,25**							**3.327.700.000,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Kepatuhan Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.904.158.523,25			-	-	ASN	-	3.022.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	2.881.958.523,25	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		3.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	22.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		22.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Kepatuhan Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	89.252.000,00			-	-	ASN dan Masyarakat	-	105.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.430.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Masyarakat		3.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.662.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN dan Masyarakat		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN dan Masyarakat		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Masyarakat		7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	48.660.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Masyarakat		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	700.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kepatuhan Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	57.000.000,00			-	-	ASN dan Masyarakat	-	65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	57.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Masyarakat		65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kepatuhan Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	132.093.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN dan Masyarakat	-	135.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	36.711.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN dan Masyarakat		45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	82.021.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN dan Masyarakat		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	12.660.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Masyarakat		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan	ASN dan Masyarakat		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					**80 Persen**	**1.560.730.000,00**							**1.900.000.000,00**	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya*	-			80 Persen	1.000.700.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan	Masyarakat	-	1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				10 Kawasan	700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan	Masyarakat		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				2 Kawasan	1.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana*	-			100 Persen	510.030.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat	-	350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				200 Orang	211.542.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				200 Orang	298.487.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase Penanganan Pasca Bencana*	-			100 Persen	50.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat	-	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				2 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**					**-**	**470.025.000,00**							**600.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran*	-			2 Kecamatan	470.025.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat	-	600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	470.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**5.771.302.559,50**							**6.242.913.256,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.911.302.559,50**							**5.374.313.256,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**4.911.302.559,50**							**5.374.313.256,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 persen**	**3.495.880.559,50**							**3.778.012.036,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			2/1 dokumen /laporan	4.594.000,00			-	-	-	-	4.639.940,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4.594.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.639.940,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase gaji dan honor ASN yang terbayar*	-			100 persen	3.309.680.559,50			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	3.525.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	3.287.480.559,50	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		3.500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	22.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dan kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor*	-			100 persen	61.573.500,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	107.169.071,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.695.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		2.721.950,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	17.887.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		18.052.841,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1.920.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.939.640,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	39.071.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		39.454.640,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase barang milik daerah yang diadakan*	-			100 Persen	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa pelayanan umum kantor dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar*	-			100 persen	58.400.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	58.984.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	58.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		58.984.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah layak pakai*	-			100 persen	61.632.500,00			-	-	-	-	62.219.025,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	5.225.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.227.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	19.787.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		19.985.375,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	6.620.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		6.706.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		30.300.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**					**0828208 PersenPersen**	**260.000.000,00**							**265.200.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PSKS yang dilatih*	-			01200 Persen	260.000.000,00			-	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	-	265.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Keluarga	120.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		121.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Lembaga	140.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		144.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**					**80 Persen**	**600.000.000,00**							**770.125.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial*	-			40 Persen	600.000.000,00			-	-	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintah	-	770.125.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintah		164.125.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	120.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintah		202.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				240 Orang	480.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintah		404.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**					**80 Persen**	**130.422.000,00**							**182.226.220,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*terpenuhi Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial*	-			40 Persen	130.422.000,00			-	-	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	182.226.220,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	130.422.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		182.226.220,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**					**80 Persen**	**425.000.000,00**							**378.750.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Korban bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam*	-			60 Persen	415.000.000,00			-	-	Korban bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam	-	368.650.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	252.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-	Korban bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam		204.525.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	162.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-	Korban bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam		164.125.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Korban bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam*	-			60 Persen	10.000.000,00			-	-	Korban bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam	-	10.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana														
			Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi				20 Orang	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Korban bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam		10.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**860.000.000,00**							**868.600.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**860.000.000,00**							**868.600.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**					**75 Persen**	**460.000.000,00**							**464.600.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Peran serta perempuan di bidang Politik, Ekonomi, sosial, dan budaya*	-			60 Persen	60.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat	-	60.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				2 Lembaga	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat		60.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan*	-			1 Lembaga 1 lembaga	400.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	404.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				3 Lembaga	400.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		404.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**					**54 Indeks**	**200.000.000,00**							**202.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)*	-			52,50 Indeks	200.000.000,00			-	-	Organisasi, Dunia Usaha, Media Massa Anak	-	202.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Lembaga	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Organisasi, Dunia Usaha, Media Massa Anak		202.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**					**54,85 Indeks**	**200.000.000,00**							**202.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Tercapainya Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)*	-			52,50 Indeks	200.000.000,00			-	-	Organisasi, Dunia Usaha, Media Massa Anak	-	202.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				3 Kegiatan	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Organisasi, Dunia Usaha, Media Massa Anak		202.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		UPTD PPA						**65.000.000,00**							**66.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**65.000.000,00**							**66.000.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**65.000.000,00**							**66.000.000,00**	
1.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**					**70 Persen**	**10.000.000,00**							**15.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensih*	-			60 Persen	10.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Perempuan Korban Kekerasan dan TPPP	-	15.500.000,00	UPTD PPA
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				5 orang	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Perempuan Korban Kekerasan dan TPPP		15.500.000,00	UPTD PPA
2.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**					**70 Persen**	**55.000.000,00**							**50.500.000,00**	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapat layanan*	-			60 Persen	55.000.000,00			-	-	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	50.500.000,00	UPTD PPA
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				7 Orang	55.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anak yang memerlukan perlindungan khusus		50.500.000,00	UPTD PPA
		DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN						**17.811.043.666,00**							**23.779.704.737,05**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**459.374.000,00**							**1.882.732.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**459.374.000,00**							**1.882.732.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**20.400.000,00**							**100.515.000,00**	
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan monitoring di 43 Desa*	-			12 laporan	20.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	100.515.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	20.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		100.515.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**					**55 persen**	**438.974.000,00**							**1.782.217.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Alat untuk melihat keseimbangan antara ketersediaan pangan dan penggunaan pangan Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat*	-			1 dokumen 58 persen	358.974.000,00			-	-	Kelompok Tani	-	1.385.038.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				13 Laporan	345.094.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Matotonan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Malancan	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-	Kelompok Tani		1.177.022.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	13.880.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Kelompok Tani		208.016.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase pemenuhan cadangan pangan pemerintah*	-			100 Persen	80.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Kelompok Tani	-	397.179.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				20000 Ton	80.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Kelompok Tani		397.179.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**17.351.669.666,00**							**21.896.972.737,05**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**2.530.499.801,00**							**0,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**					**-**	**2.000.000.000,00**							**0,00**	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.000.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	2.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Madobag Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Bojakan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Betumonga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**					**-**	**100.000.000,00**							**0,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				20 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**					**-**	**430.499.801,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	230.499.801,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				11000 Ton	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				20 Pelaku Usaha	130.499.801,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**14.821.169.865,00**							**21.896.972.737,05**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**11.422.277.365,00**							**8.943.810.931,00**	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kesejahteraan ASN*	-			100 Persen	11.215.977.765,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	8.690.558.931,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/bulan	11.187.897.765,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		8.590.478.931,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	28.080.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		100.080.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Bahan bacaan dan perundang-undangan yang dibayar* *Lancarnya administrasi perkantoran* *Jumlah Bahan Logistik yang Tersedia* *Jumlah Barang Cetakan Tersedia* *Jumlah Komponen Listrik Tersedia*	-			5 Paket 100 Persen 7 Paket 2 Paket 2 Paket	98.952.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	226.752.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	42.091.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		46.882.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		6.070.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	5.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		16.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	45.611.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terbayarnya Tagihan Air* *Terbayarnya Tagihan Listrik* *Terkelolanya administrasi perkantoran* *Tersedianya 1 buah Printer*	-			12 bulan 12 bulan 100 Persen 1 Unit	97.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	-	6.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	87.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian		6.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terkelolanya barang-barang milik daerah*	-			100 pe	9.947.000,00			-	-	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	-	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	4.947.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					**85 Persen**	**2.273.050.900,00**							**7.272.628.806,05**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Meningkanya Pendapatan Petani/Kelompok Tani*	-			85 Persen	998.720.500,00			-	-	KELOMPOK TANI/POKMAS	-	3.302.063.006,05	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	998.720.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-	KELOMPOK TANI/POKMAS		3.302.063.006,05	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan				1 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	KELOMPOK TANI/POKMAS		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Meningkatnya populasi ternak dan kesejahteraanan petani/ peternak* *Meningkatkan kesejahteran/ perekonomian masyarakat ternak* *Tersedianya hijauan pakan ternak*	-			100 persen 85 persen 50 ha	1.274.330.400,00			-	-	Kelompok Ternak Masyarakat	-	3.970.565.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				4106 Ekor	1.274.330.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-	Kelompok Ternak Masyarakat		3.970.565.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					**100 Persen**	**764.720.800,00**							**3.944.951.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Peta Rencana induk Pengembangan Kawasan Pertanian* *Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok/ Masyarakat Tani*	-			1 Dokumen 100 Persen	96.562.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Kelompok Tani	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				1 Dokumen	96.562.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Kelompok Tani		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*meningkatkan pendapatan petani*	-			85 persen	668.158.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Kelompok Tani	-	3.944.951.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				7 Unit	668.158.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saliguma Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Kelompok Tani		3.944.951.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-	Kelompok Tani		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**					**100 Persen**	**107.518.800,00**							**220.935.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*tersedianya sarana dan prasaran penanganan dan pengendalian organisme penggagu tanaman, dan penyakit tanaman*	-			2 Paket	107.518.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Kelompok Tani Perkebunan	-	220.935.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				5 Ha	107.518.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Kelompok Tani Perkebunan		220.935.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**					**100 Persen**	**253.602.000,00**							**1.514.647.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Terlaksananya Penas di Gorontalo* *Jumlah kelompok tani yang sudah terbentuk* *Terbayarnya Biaya Operasional Penyuluh selama satu tahun*	-			1 Paket 40 Persen 37 Orang	253.602.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Penyuluh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	1.514.647.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				37 Orang	168.720.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Penyuluh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Unit	84.882.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Penyuluh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		1.514.647.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**4.406.464.948,00**							**4.620.860.741,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.406.464.948,00**							**4.620.860.741,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**4.406.464.948,00**							**4.620.860.741,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**6 Dokumen**	**3.396.464.948,00**							**3.510.775.741,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan tugas Layanan Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	10.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	10.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		10.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terbayarnya Gaji Pegawai*	-			34 orang	2.992.144.948,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	3.003.164.985,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	2.969.464.948,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		2.980.464.985,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	22.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		22.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terbayarnya Kebutuhan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			100 %	261.332.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	349.310.756,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6.002.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		6.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	125.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		125.655.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	26.892.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		27.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	102.937.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		190.555.756,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terbayarnya Kebutuhan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			100 %	74.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	73.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	74.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		60.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		13.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terbayarnya Kebutuhan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			100 %	58.987.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	75.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	58.987.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		15.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**					**40 % 70 % 98.75 % 99.1 %**	**0,00**							**0,00**	
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	Masyarakat Kepulauan Mentawai	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				36 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	Masyarakat Kepulauan Mentawai		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**					**undefined undefined**	**1.000.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	1.000.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	-	-	1.100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				10 Laporan	1.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	-		1.100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**					**1 buku**	**10.000.000,00**							**10.085.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Meningkatnya Kualitas Profile Kependudukan*	-			1 Buku	10.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	-	-	10.085.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				10 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	-		10.085.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**6.058.353.265,75**							**1.196.300.600,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.058.353.265,75**							**1.196.300.600,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**4.436.356.255,75**							**32.675.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**3.595.050.455,75**							**32.675.000,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya Persentase Tertibnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			80 Persen	10.440.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Dinas PMDP2KB	-	10.475.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	10.440.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Dinas PMDP2KB		10.475.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	3.420.756.455,75			-	-	ASN Dinas PMDP2KB	-	22.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	3.398.556.455,75	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas PMDP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	22.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas PMDP2KB		22.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			95 Persen	111.699.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Dan Masyarakat	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2.515.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Dan Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	28.535.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Dan Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	29.310.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dan Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	11.313.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Dan Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Dan Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	40.026.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Dan Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			85 Persen	37.800.000,00			-	-	ASN DPMDP2KB	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	37.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN DPMDP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN DPMDP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya*	-			2 Unit	14.355.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas PMDP2KB	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	14.355.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas PMDP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas PMDP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**					**80 Persen**	**225.000,00**							**0,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Penyelenggaraan Penataan Desa*	-			80 Persen	225.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				1 Desa	225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**					**80 Persen**	**140.805.800,00**							**0,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	-			80 Persen	140.805.800,00			-	-	Aparatur Desa dan BPD	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				43 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur Desa dan BPD		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				43 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Aparatur Desa dan BPD		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				129 Orang	10.325.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Aparatur Desa dan BPD		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				43 Dokumen	13.503.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Aparatur Desa dan BPD		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				43 Dokumen	12.983.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Aparatur Desa dan BPD		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				43 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur Desa dan BPD		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				43 Desa	6.992.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Aparatur Desa dan BPD		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**					**80 Persen**	**700.275.000,00**							**0,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			80 Persen	700.275.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				43 Lembaga	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	275.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				43 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Lembaga Kemasyarakatan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**1.621.997.010,00**							**1.163.625.600,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**					**2,40 Persen**	**96.600.000,00**							**96.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	-			80 Persen	96.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat	-	96.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				12 Laporan	54.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		54.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	Masyarakat		42.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**					**80 Persen**	**1.091.197.010,00**							**632.825.600,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal*	-			80 Persen	609.985.360,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat	-	224.745.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				12 Laporan	59.999.960,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		59.999.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	354.704.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				12 Laporan	81.830.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	Masyarakat		81.830.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				12 Dokumen	30.534.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				43 Organisasi	82.916.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	Masyarakat		82.916.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai*	-			80 Persen	249.852.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat	-	236.352.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				500 Orang	236.352.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		236.352.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	13.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*	-			80 Persen	231.359.650,00			-	-	Masyarakat	-	171.728.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				43 Unit	59.631.650,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				43 Kampung	168.324.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	Masyarakat		168.324.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	3.404.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		3.404.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**					**80 Persen**	**434.200.000,00**							**434.200.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	-			80 Persen	91.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat	-	91.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				43 Unit	91.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		91.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Meningkatnya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	-			80 Persen	343.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat	-	343.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				12 laporan	156.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		156.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				12 laporan	187.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	Masyarakat		187.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**5.933.192.785,25**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.933.192.785,25**							**0,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**5.933.192.785,25**							**0,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**2.808.283.785,25**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran*	-			100 Persen	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	Aparatur Dinas Kominfo	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	Aparatur Dinas Kominfo		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kesejahteraan ASN*	-			100 Persen	2.389.606.885,25			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	Aparatur Dinas Kominfo	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	2.367.406.885,25	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	Aparatur Dinas Kominfo		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	22.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur Dinas Kominfo		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			100 Persen	233.973.000,00			-	-	Aparatur Dinas Kominfo	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur Dinas Kominfo		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	64.236.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	Aparatur Dinas Kominfo		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	39.997.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	Aparatur Dinas Kominfo		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	Aparatur Dinas Kominfo		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	114.750.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur Dinas Kominfo		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Kesadaran Perangkat Daerah Pentingnya Adminsitrasi BMD*	-			100 persen	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	97.400.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	Aparatur Dinas Kominfo	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	97.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Penyediaan Jaringan Internet	Aparatur Dinas Kominfo		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah*	-			100 Persen	87.303.900,00			-	-	Aparatur Dinas Kominfo	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	70.003.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur Dinas Kominfo		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	17.300.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur Dinas Kominfo		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**					**80 persen**	**473.523.000,00**							**0,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	-			80 persen	473.523.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Penyediaan Jaringan Internet	Pemda dan masyarakat	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				2 Laporan	400.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Penyediaan Jaringan Internet	Pemda dan masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			0				8 0	35.523.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda dan masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				1 Media	38.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda dan masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**					**2,6 indeks**	**2.651.386.000,00**							**0,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengelolaan E-goverment Pemerintah Daerah*	-			50 persen	2.651.386.000,00			-	-	Pemda dan masyarakat	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				31 Perangkat Daerah	2.651.386.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemda dan masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**4.626.231.571,00**							**12.989.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.527.850.971,00**							**8.509.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**4.527.850.971,00**							**8.509.000.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 persen**	**2.774.216.570,75**							**5.009.000.000,00**	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah*	-			100 persen	2.577.985.570,75			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Pegawai ASN di Dinas Koperindakop	-	2.960.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	2.551.705.570,75	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Pegawai ASN di Dinas Koperindakop		2.800.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	26.280.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai ASN di Dinas Koperindakop		160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah*	-			100 Persen	92.821.000,00			-	-	-	-	306.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	32.771.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	14.848.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		26.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	45.202.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-	-	1.032.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		132.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		900.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 persen	38.000.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	38.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah*	-			100 persen	65.410.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-	-	671.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				27 Unit	65.410.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		71.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**					**-**	**0,00**							**300.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				20 Unit Usaha	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**					**85 persen**	**0,00**							**700.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 persen	0,00			-	-	pengurus dan pengawas koperasi	-	700.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				43 Orang	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-	pengurus dan pengawas koperasi		700.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**					**-**	**0,00**							**350.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota														
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				129 Unit Usaha	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**					**-**	**0,00**							**250.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				50 Unit Usaha	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**					**85 persen**	**1.753.634.400,25**							**1.900.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Terlaksananya pengembangan usaha mikro dengan peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil*	-			100 persen	1.753.634.400,25			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	usaha mikro	-	1.900.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				75 Unit Usaha	1.753.634.400,25	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	usaha mikro		1.900.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**98.380.600,00**							**4.480.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**98.380.600,00**							**3.980.000.000,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**					**-**	**0,00**							**530.000.000,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	280.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik														
			Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik				6 laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		280.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-	-	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0002	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C														
			Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				10 dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**					**15 persen**	**35.915.000,00**							**1.500.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan*	-			100 persen	35.915.000,00			-	-	masyarakat	-	1.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	35.915.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-	masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**					**40 persen**	**26.715.000,00**							**700.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota*	-			100 persen	26.715.000,00			-	-	Masyarakat KKM	-	450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				10 Laporan	26.715.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-	Masyarakat KKM		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				10 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Masyarakat KKM		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				70 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**					**-**	**0,00**							**250.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-	-	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				5 Pelaku Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**					**60 persen**	**35.750.600,00**							**550.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Terlaksananya pelaksanaan metrologi legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan*	-			100 persen	35.750.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Mayarakat KKM	-	550.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				8 Unit	35.750.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Mayarakat KKM		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				100 Orang	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Mayarakat KKM		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**					**-**	**0,00**							**450.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	0,00			-	-	-	-	450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				30 UMKM	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**0,00**							**500.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**					**-**	**0,00**							**250.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-	-	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				25 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**					**-**	**0,00**							**250.000.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-	-	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				20 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**3.731.202.176,50**							**1.863.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.731.202.176,50**							**1.863.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**500.000.000,00**							**950.000.000,00**	
1.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**					**70 persen**	**500.000.000,00**							**800.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan*	-			70 persen	500.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Masyarakat	-	800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				16 Orang	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**					**30 persen**	**0,00**							**150.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja*	-			30 persen	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Masyarakat	-	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				12 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**3.231.202.176,50**							**913.000.000,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 persen**	**3.131.310.176,50**							**613.000.000,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran*	-			100 persen	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Aparatur DPMPTSP	-	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Aparatur DPMPTSP		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.795.602.176,50			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-	-	70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32/12 Orang/bulan	2.773.402.176,50	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	22.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	193.156.000,00			-	-	-	-	327.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	76.792.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	14.607.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	96.756.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	82.800.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-	-	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	82.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	59.752.000,00			-	-	-	-	81.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	46.352.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	13.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		16.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**					**95 persen**	**49.892.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan*	-			95 persen	49.892.000,00			-	-	Pelaku Usaha	-	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	49.892.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pelaku Usaha		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**					**90 persen**	**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase realisasi investasi*	-			90 persen	50.000.000,00			-	-	Pelaku Usaha	-	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				3 Kegiatan Usaha	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pelaku Usaha		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						**3.356.946.779,75**							**3.422.607.874,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.356.946.779,75**							**3.422.607.874,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**3.310.946.779,75**							**3.262.607.874,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**2.310.946.779,75**							**2.512.607.874,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Acuan/Pedoman perangkat Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran*	-			90 Persen	15.000.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang menerima gaji Meningkatkan kesejahteraan ASN*	-			23 Orang/bulan 100 Persen	2.154.854.679,75			-	-	-	-	2.260.607.874,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2.135.054.679,75	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.200.607.874,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	19.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			90 Persen	84.807.600,00			-	-	-	-	168.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	14.982.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	29.998.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		41.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	9.899.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	29.928.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		75.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*	-			90 Persen	22.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	22.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja pelaksanaan Tupoksi PD*	-			90 Persen	34.284.500,00			-	-	-	-	44.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	29.294.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	4.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		14.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**					**35 Persen**	**1.000.000.000,00**							**750.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai SNP Persentase Perpustakaan Sesuai SNP*	-			20 Persen 20 Persen	465.000.000,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				16 Perpustakaan	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		260.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4 Orang	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				100 Eksemplar	65.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		70.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat*	-			30 Persen undefined undefined	535.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				5 Perpustakaan	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				20 Lokus	185.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		190.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**46.000.000,00**							**160.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**					**50 Persen**	**46.000.000,00**							**160.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya tata kelola arsip dinamis Tersedianya naskah dinas yang diciptakan dan digunakan*	-			25 Persen 60 Berkas	46.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				4 Berkas	46.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				36 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				54 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA						**5.190.160.119,00**							**9.295.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.288.344.000,00**							**1.074.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**1.288.344.000,00**							**1.074.000.000,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**288.344.000,00**							**314.000.000,00**	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			35 Orang/bulan	11.240.000,00			-	-	ASN dan Tenaga Non ASN	-	40.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	11.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Tenaga Non ASN		40.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah*	-			12 Dokumen	46.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				6 Dokumen	46.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	46.108.000,00			-	-	ASN dan Tenaga Non ASN	-	96.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	8.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Tenaga Non ASN		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	38.108.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Tenaga Non ASN		76.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkinerja baik*	-			1 Dokumen	132.000.000,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 3. Penyediaan Jaringan Internet	ASN dan Tenaga Non ASN	-	127.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	132.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 3. Penyediaan Jaringan Internet	ASN dan Tenaga Non ASN		127.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kebutuhan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat*	-			undefined undefined	52.996.000,00			-	-	ASN dan Tenaga Non ASN	-	51.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	52.996.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Tenaga Non ASN		51.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**					**undefined undefined 15 organisasi**	**250.000.000,00**							**450.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Meningkatnya jumlah unit usaha kreatif pemuda mandiri*	-			3 Unit	250.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	PEMUDA	-	450.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				30 Orang	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	PEMUDA		450.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**					**undefined undefined 10 Cabang olahraga**	**750.000.000,00**							**310.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terbuatnya perencanaan penataan lapangan sepak bola didesa muntei dan maileppet meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga Terbayarnya hibah dana mengikuti PORDA/PORPROV/kEJURNAS Terbayarnya hibah operasional KONI Kabupaten*	-			0 Paket 30 Orang 1 kali 1 Paket	750.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	PEMUDA	-	310.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				3 Dokumen	750.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	PEMUDA		310.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**3.901.816.119,00**							**8.221.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**3.901.816.119,00**							**8.221.000.000,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3.901.816.119,00**							**431.000.000,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			35 Orang/bulan	3.856.704.519,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	3.856.704.519,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	30.001.600,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	30.001.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kebutuhan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat*	-			undefined undefined	15.110.000,00			-	-	-	-	431.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	15.110.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		31.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**					**-**	**0,00**							**3.300.000.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				2 Lokasi	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Lokasi	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		600.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				40 Orang	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**					**-**	**0,00**							**3.580.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	3.580.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		510.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				5 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		610.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				5 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		410.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Promosi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		750.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**					**-**	**0,00**							**460.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	460.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				3 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		210.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**					**-**	**0,00**							**450.000.000,00**	
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-			-	0,00			-	-	-	-	450.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				60 Orang	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		450.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SEKRETARIAT DAERAH						**31.460.287.973,00**							**32.037.888.371,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**31.460.287.973,00**							**32.037.888.371,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**31.460.287.973,00**							**32.037.888.371,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 persen**	**27.193.381.673,00**							**26.723.132.671,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Renstra,Renja,Laporan Keuangan,LAKIP SKPFD*	-			20 Dokumen	10.700.000,00			-	-	OPD	-	28.747.628,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	10.700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		28.747.628,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			105 Orang/bulan	10.338.475.197,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD	-	10.340.149.477,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/bulan	10.220.905.197,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		10.214.149.477,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	117.570.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		126.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Aneka Alat Tulis Kantor*	-			12 bulan	2.131.628.800,00			-	-	OPD	-	2.144.865.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	797.437.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		570.773.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	119.374.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		119.374.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	322.910.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		662.980.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	891.907.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		791.738.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-			11 Unit	681.412.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD	-	2.131.628.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				11 Unit	9.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		1.202.317.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	671.422.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		929.311.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	-			12 Laporan	3.121.850.000,00			-	-	OPD	-	2.046.750.281,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	633.850.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		544.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	2.488.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		1.501.800.281,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	-			8 Unit	6.999.775.682,00			-	-	OPD	-	5.880.439.491,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	348.997.491,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		379.897.491,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	4.958.616.191,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		3.948.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	190.450.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		195.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1.501.712.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		1.356.742.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	-			2 Orang/bulan	2.330.594.494,00			-	-	OPD	-	2.000.362.494,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	613.838.494,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		613.838.494,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				28 Paket	140.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		161.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	1.576.756.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		1.225.524.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*	-			12 Paket	930.538.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD	-	978.321.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	493.555.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		541.338.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	436.983.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		436.983.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah Dokumen Penataan Organisasi*	-			36 Dokumen	277.717.800,00			-	-	OPD	-	575.504.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				36 Dokumen	116.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		220.186.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	48.540.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		104.952.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				36 Dokumen	52.278.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		114.865.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Dokumen	19.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		51.040.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	40.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		84.461.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*	-			12 Laporan	370.688.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD	-	596.362.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	170.732.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		257.743.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	99.957.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		189.052.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	99.999.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		149.567.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**100 persen**	**3.197.827.900,00**							**3.569.205.900,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Tersedianya Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan*	-			100 Persen	220.000.000,00			-	-	OPD	-	424.884.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		98.467.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		129.817.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		196.600.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	-			2 Dokumen	2.497.428.100,00			-	-	OPD, MASYARAKAT	-	2.323.785.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	1.244.444.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	OPD, MASYARAKAT		1.123.785.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				3 Dokumen	1.252.983.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD, MASYARAKAT		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*	-			15 Dokumen	460.399.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD, MASYARAKAT	-	770.536.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				7 Dokumen	158.907.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD, MASYARAKAT		252.141.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus	239.785.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD, MASYARAKAT		415.532.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1 Dokumen	61.707.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD, MASYARAKAT		102.862.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*	-			1 Dokumen	20.000.000,00			-	-	OPD, MASYARAKAT	-	49.999.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD, MASYARAKAT		49.999.800,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					**90 persen**	**1.069.078.400,00**							**1.745.549.800,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*	-			2 Dokumen	218.911.200,00			-	-	OPD,Masyarakat	-	357.545.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	132.911.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD,Masyarakat		271.894.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				8 Laporan	86.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD,Masyarakat		85.651.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah*	-			1 Dokumen	188.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD,Masyarakat	-	432.039.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD,Masyarakat		88.366.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD,Masyarakat		114.561.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD,Masyarakat		229.112.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	-			12 Dokumen	632.169.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD	-	887.058.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	248.967.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		291.581.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	332.467.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		370.229.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				80 Orang	50.733.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		225.248.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air,Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,Pertanahan*	-			1 Dokumen	29.997.600,00			-	-	OPD,Masyarakat	-	68.906.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	29.997.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD,Masyarakat		68.906.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD						**25.453.496.223,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**25.453.496.223,00**							**0,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**25.453.496.223,00**							**0,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**41 Orang**	**14.492.937.223,00**							**0,00**	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan*	-			41 Orang	3.671.187.273,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Sekretariat DPRD	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	3.516.777.273,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	154.410.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*jumlah laporan adminisstrasi umum perangkat daerah*	-			8 Laporan	552.934.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Sekretariat DPRD	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.735.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	72.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	282.076.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	55.119.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	122.324.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket pengadaan barang milik daerah*	-			2 Paket	103.195.200,00			-	-	Sekretariat DPRD	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	36.280.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	66.915.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			12 bulan	117.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Sekretariat DPRD	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	117.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah barang milik daerah yang dipeliharan*	-			48 Unit	492.047.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Sekretariat DPRD	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	200.960.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	83.032.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	57.375.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*	-			20 Orang	9.531.892.350,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	9.326.212.350,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	205.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*jumlah laporan layanan administrasi DPRD*	-			5 Laporan	24.681.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				5 Laporan	24.681.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**					**16 Dokumen**	**10.960.559.000,00**							**0,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	-			16 Dokumen	1.099.187.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	201.555.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				12 Dokumen	673.700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				2 Dokumen	223.932.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran*	-			5 Dokumen	625.562.000,00			-	-	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	15.147.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	15.147.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	193.504.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	196.494.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	205.266.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan*	-			15 Laporan	2.053.771.800,00			-	-	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				3 Laporan	382.232.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				3 Laporan	390.756.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3 Laporan	390.725.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				3 Laporan	380.360.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				3 Laporan	351.249.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	158.449.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Jumlah laporan hasil peningkatan kapasitas dprd*	-			6 Laporan	1.795.745.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	1.302.344.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				12 Dokumen	26.151.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				6 Dokumen	67.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Jumlah laporan hasil penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat*	-			8 Laporan	4.170.439.400,00			-	-	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				3 Laporan	860.595.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	3.309.844.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Jumlah laporan hasil fasilitasi tugas DPRD*	-			8 Laporan	1.215.853.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				3 Dokumen	1.200.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				3 Laporan	15.353.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH						**8.172.324.863,25**							**8.899.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.172.324.863,25**							**8.899.000.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**8.142.324.863,25**							**8.859.000.000,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**7.227.628.463,25**							**7.829.000.000,00**	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Kesejahteraan ASN*	-			100 Persen	6.510.974.863,25			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD	-	7.030.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	6.488.774.863,25	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		7.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	22.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			85 Persen	171.428.350,00			-	-	OPD	-	199.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	48.415.550,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	8.012.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		9.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD*	-			undefined undefined	50.000.000,00			-	-	opd	-	70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	opd		70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*	-			85 Persen	298.550.000,00			-	-	OPD	-	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	298.550.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi PD*	-			85 Persen	196.675.250,00			-	-	OPD	-	230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	91.670.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	5.970.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	64.035.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**					**100 persen**	**659.696.400,00**							**730.000.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sesuai dengan Tahapannya*	-			100 persen	589.696.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD	-	630.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	44.732.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	264.963.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		280.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				2 Dokumen	280.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase penyusunan perencanaan berbasis analisis data dan informasi pembangunan daerah*	-			100 persen	70.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				40 Orang	70.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**					**100 Persen**	**255.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	-			85 Persen	85.000.000,00			-	-	OPD	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				2 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	45.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase Keselarasan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA*	-			85 Persen	85.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				2 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	45.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase Keselarasan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	-			85 Persen	85.000.000,00			-	-	OPD	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				2 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	45.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**30.000.000,00**							**40.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**					**-**	**30.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	10.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase Penyusunan Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Disusun Berdasarkan Kebutuhan Perencanaan Daerah*	-			100 persen	20.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**141.872.938.788,00**							**171.435.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**141.872.938.788,00**							**171.435.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**141.872.938.788,00**							**171.435.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**38.222.880.188,00**							**47.520.000.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	22.323.000,00			-	-	ASN	-	20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	22.323.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	36.703.279.188,00			-	-	ASN	-	45.450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	36.668.789.188,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		45.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	34.490.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	ASN		450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	254.028.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	ASN	-	470.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	13.300.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	ASN		15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	14.188.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	ASN		40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	31.208.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	ASN		190.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	18.970.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	ASN		45.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	158.362.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		155.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah*	-			100 %	1.237.150.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	ASN	-	1.550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	1.237.150.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	ASN		1.550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	6.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	OPD	-	30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	6.100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	OPD		30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**					**30 %**	**102.950.059.200,00**							**123.090.000.000,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan APBD*	-			100 %	1.000.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	OPD dan Masyarakat	-	170.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	OPD dan Masyarakat		30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD dan Masyarakat		30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	392.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	OPD dan Masyarakat		55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	508.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	OPD dan Masyarakat		55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Meningkatnya realisasi pencairan dana APBD, semakin efektif dan efisien*	-			95 %	302.251.200,00			-	-	OPD	-	185.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				8 Dokumen	95.085.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				5 Dokumen	64.667.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				5 Laporan	82.632.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				5 Dokumen	59.867.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	OPD		60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	-			95 %	300.000.000,00			-	-	OPD	-	235.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				36 Dokumen	26.666.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				16 Laporan	73.826.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	96.333.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	103.174.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	101.347.808.000,00			-	-	Masyarakat	-	122.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1.600.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		2.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	99.747.808.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Masyarakat		120.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**					**100 % 70 %**	**699.999.400,00**							**825.000.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Meningkatnya Barang dan Jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik*	-			100 %	699.999.400,00			-	-	OPD	-	825.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	12.450.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	49.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				36 Laporan	425.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	62.480.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	OPD		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	75.068.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	OPD		85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	74.999.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	OPD		25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**3.293.137.639,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.293.137.639,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**3.293.137.639,00**							**0,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**1.574.228.239,00**							**0,00**	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.301.898.439,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	1.293.137.639,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.760.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	212.644.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	9.973.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	9.997.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	182.674.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	24.925.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24.925.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	34.760.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	24.760.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					**-**	**1.718.909.400,00**							**0,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	1.718.909.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 dokumen Dokumen	359.981.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan Laporan	94.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	313.910.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				1 Obyek Pajak	200.038.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 dokumen Dokumen	99.668.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 dokumen Dokumen	99.996.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 dokumen Dokumen	99.996.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan Laporan	451.119.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**34.504.541.281,75**							**18.886.724.992,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**34.504.541.281,75**							**18.886.724.992,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**34.504.541.281,75**							**18.886.724.992,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**90 persen undefined undefined**	**34.096.296.481,75**							**17.786.724.992,00**	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Lancaranya kegiatan perkantoran,tersedianya Gaji dan Tunjangan serta tambahan Penghsilan ASN*	-			1 Tahun	6.495.869.281,75			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	3.851.174.992,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	6.445.031.281,75	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		3.754.414.592,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	22.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		66.260.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	28.638.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.500.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Lancarnya Kegiatan Perkantoran*	-			55 Jenis	244.612.800,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	271.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.005.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		3.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	38.568.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	65.931.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	8.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	130.108.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Perkantoran*	-			4 Laporan	27.309.510.000,00			-	-	-	-	13.617.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	113.910.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	27.195.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		13.467.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan terpiliharanya barang milik Daerah*	-			12 Unit	46.304.400,00			-	-	-	-	46.950.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	46.304.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		46.950.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**					**30 persen**	**408.244.800,00**							**1.100.000.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Terpenuhinya Pemberhentian dan Informasi ASN Terpenuhunya ASN sesuai dengan formasi jabatan dan analisis kebutuhan Indeks Profesionalitas ASN*	-			75 Persen 3770 ASN 550 ASN	49.879.800,00			-	-	-	-	70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				20 Dokumen	24.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2325 PNS,1445 PPPK Dokumen	24.880.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan terpenuhinya persyaratan dalam penyesuaian ijazah dan pindahgolongan*	-			320 ASN	169.309.800,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	580.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				30 Dokumen	151.075.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		540.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				40 Dokumen	18.234.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan tepenuhinya persyaratan dalam penyesuian Ijazah dan pindah golongan ruang ASN*	-			387 ASN	153.349.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				51 Orang	153.349.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah rekomendasi perbaikan kinerja yang di berikan*	-			2 Dokumen	35.706.200,00			-	-	-	-	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				10 Orang	35.706.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT						**6.966.237.819,00**							**10.947.388.453,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.966.237.819,00**							**10.947.388.453,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**6.966.237.819,00**							**10.947.388.453,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**5.444.221.627,00**							**7.686.302.461,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai standar*	-			100 Persen	4.257.306.466,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	5.124.040.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	4.153.266.466,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		5.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	104.040.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		124.040.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai standart*	-			100 Persen	212.892.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	412.892.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	212.892.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		412.892.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai standar*	-			100 Persen	534.085.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	689.703.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	13.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	51.357.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		71.357.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	130.846.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.846.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		17.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	308.382.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	691.568.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		85.968.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	276.390.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	532.551.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	95.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		115.900.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	180.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		416.651.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	163.547.761,00			-	-	-	-	235.547.761,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	13.986.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.986.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	34.004.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		54.004.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	28.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		58.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	87.557.761,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		107.557.761,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**					**70 Persen**	**1.237.787.200,00**							**2.683.856.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Meningkatnya Kwalitas Pengawasan dan Pengendalian Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*	-			65 Persen	940.242.000,00			-	-	-	-	2.024.242.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	73.918.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		158.918.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				4 Laporan	67.610.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		157.610.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				131 Laporan	222.888.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		642.888.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				37 Laporan	64.043.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		84.043.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				22 Laporan	300.477.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		419.477.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	109.501.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		309.501.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	101.805.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		251.805.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Meningkatnya Kwalitas Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	-			67 Persen	297.545.200,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	659.614.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	147.192.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		358.260.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				8 Laporan	150.352.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		301.354.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**					**3.30 Level 3.00 Level**	**284.228.992,00**							**577.229.992,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Meningkatnya kwalitas Kebijakan*	-			70 Persen	55.242.000,00			-	-	-	-	139.242.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				4 Rekomendasi	55.242.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		139.242.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi*	-			75 Persen	228.986.992,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	437.987.992,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				10 perangkat daerah	54.010.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		159.011.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				26 perangkat daerah	55.345.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		119.345.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	71.099.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		91.099.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 perangkat daerah	48.532.992,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		68.532.992,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN SIBERUT UTARA						**2.566.653.970,50**							**2.822.478.757,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.566.653.970,50**							**2.822.478.757,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.566.653.970,50**							**2.822.478.757,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**2.478.149.970,50**							**2.724.764.857,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Layanan Perencanaan, Pengangaran dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah*	-			100 Persen	17.050.000,00			-	-	Kecamatan	-	18.755.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	17.050.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan		18.755.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.327.854.070,50			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan	-	2.560.639.367,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	2.254.654.070,50	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan		2.480.119.367,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen Dokumen	73.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan		80.520.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	87.715.900,00			-	-	Kecamatan	-	96.487.490,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	2.412.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan		2.653.750,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	32.059.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan		35.264.900,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1.744.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan		1.918.840,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	51.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan		56.650.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	12.000.000,00			-	-	Pegawai Kantor Camat Siberut Utara	-	12.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan Laporan	12.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Kantor Camat Siberut Utara		12.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	-			100 Persen	33.530.000,00			-	-	Pegawai Kantor Camat Siberut Utara	-	36.883.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	19.520.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Kantor Camat Siberut Utara		21.472.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	11.170.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Kantor Camat Siberut Utara		12.287.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	2.840.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Kantor Camat Siberut Utara		3.124.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**100 Persen**	**12.355.000,00**							**13.950.500,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Meningkatnya Pelayanan E KTP*	-			100 Persen	12.355.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat	-	13.950.500,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6 Laporan	12.355.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		13.950.500,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 Persen**	**30.964.000,00**							**34.060.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Mussrenbang Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan*	-			100 Persen	30.964.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pemerintahan Desase Kecamatan Siberut Utara	-	34.060.400,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	21.234.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pemerintahan Desase Kecamatan Siberut Utara		23.357.400,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	9.730.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintahan Desase Kecamatan Siberut Utara		10.703.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**90 Persen**	**28.435.000,00**							**31.278.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terciptanya warga masyarakat kecamatan yang cinta terhadap NKRI/bangsa dan Negara*	-			80 Persen	28.435.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Siberut Utara	-	31.278.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	19.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Kecamatan Siberut Utara		21.175.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	9.185.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Siberut Utara		10.103.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**90 Persen**	**16.750.000,00**							**18.425.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Tersedianya jumlah laporan keuangan dan terkelolanya aset Desa secara maksimal dan efisien*	-			80 Persen	16.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pemerintahan Desa se Kecamatan Siberut Utara	-	18.425.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				0 Dokumen	16.750.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pemerintahan Desa se Kecamatan Siberut Utara		18.425.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
		KECAMATAN SIBERUT TENGAH						**1.574.763.968,50**							**2.024.279.366,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.574.763.968,50**							**2.024.279.366,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.574.763.968,50**							**2.024.279.366,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**1.435.338.968,50**							**1.829.778.366,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan di Tingkat Desa* *Persentase Kepatuhan Penyusunan ,Perencanaan dan pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah*	-			90 persen 100 Persen	15.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Siberut Tengah	-	71.496.500,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			0				0 0	15.750.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Siberut Tengah		71.496.500,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah* *Jumlah Pelayanan adminsitrasi yang dilaksanakan*	-			100 Persen 2 layanan	1.360.213.968,50			-	-	ASN	-	1.596.310.866,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				11 0	1.268.763.968,50	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		1.450.310.866,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	91.450.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		146.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah* *Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Umum*	-			100 Persen 100 persen	53.375.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Siberut Tengah	-	147.971.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.325.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Siberut Tengah		5.844.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	14.530.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur dan Masyarakat Siberut Tengah		70.620.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur dan Masyarakat Siberut Tengah		10.902.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	36.720.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Siberut Tengah		60.605.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Peningkatan Layanan Operasional Perkantoran* *Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*	-			100 persen 100 Persen	6.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat dan ASN	-	7.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat dan ASN		7.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Umum Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah*	-			0 persen 100 Persen	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	7.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		7.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**B INDEKS** **B Indek**	**16.200.000,00**							**18.100.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan /Dilaksanakan(Rekam E-KTP)* *Persentase Kegiatan yang telah dilaksanakan Oleh Pemerintah Kepada camat*	-			300 Jiwa 90 persen	16.200.000,00			-	-	Masyarakat 3 Desa Diwilayah Kecamatan Siberut Tengah	-	18.100.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	16.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat 3 Desa Diwilayah Kecamatan Siberut Tengah		18.100.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**70 persen** **80 Persen**	**21.800.000,00**							**49.568.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Menininggkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan* *Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan*	-			90 persen B INDEKS	21.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat 3 Desa Diwilayah Kecamatan Siberut Tengah	-	49.568.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	14.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat 3 Desa Diwilayah Kecamatan Siberut Tengah		35.368.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	7.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat 3 Desa Diwilayah Kecamatan Siberut Tengah		14.200.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**76.825.000,00**							**86.180.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* *Persentase Kwalitas Masyarakat akan Nilai nilai Luhur Jiwa Kebangsaan*	-			100 Orang 100 Persen	76.825.000,00			-	-	3 Desa di wilayah Kecamatan Siberut Tengah	-	86.180.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	76.825.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	3 Desa di wilayah Kecamatan Siberut Tengah		86.180.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**100 Persen**	**24.600.000,00**							**40.653.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa Yang Diberi Pembinaan dan Pengawasan*	-			3 Desa	24.600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat 3 Desa Diwilayah Kecamatan Siberut Tengah	-	40.653.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	24.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat 3 Desa Diwilayah Kecamatan Siberut Tengah		40.653.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
		KECAMATAN SIBERUT BARAT						**1.584.097.756,00**							**1.937.466.756,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.584.097.756,00**							**1.937.466.756,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.584.097.756,00**							**1.937.466.756,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**1.496.395.956,00**							**1.711.076.756,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			12 Dokumen	29.087.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	-	53.550.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	29.087.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		53.550.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			13 Orang	1.346.217.956,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	-	1.469.107.756,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.185.097.956,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		1.195.097.756,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48 Dokumen Dokumen	161.120.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		274.010.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			4 Kegiatan	88.590.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	-	143.249.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.383.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		5.490.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	32.112.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		50.070.200,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1.600.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		2.758.800,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	51.495.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		84.930.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerinatahan Daerah*	-			12 Dokumen	24.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerataan Jaringan Listrik	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	-	30.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerataan Jaringan Listrik	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		30.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara*	-			5 Unit	8.500.000,00			-	-	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	-	15.170.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	8.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		15.170.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**100 Persen**	**27.900.000,00**							**35.075.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Data Layanan Publik*	-			400 Dokumen	27.900.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	-	35.075.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	27.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		35.075.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 Persen**	**20.836.800,00**							**45.705.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	-			30 Lembaga Kemasyarakat	20.836.800,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	-	45.705.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15 Lembaga Kemasyarakatan	15.355.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		30.215.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Dokumen Laporan	5.481.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		15.490.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**100 Persen**	**8.240.000,00**							**75.890.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			100 Orang	8.240.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	-	75.890.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	3.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		60.780.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	4.440.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		15.110.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**100 Persen**	**30.725.000,00**							**69.720.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumalh Dokumen Desa yang diverifikasi*	-			30 Dokumen	30.725.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	-	69.720.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	30.725.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		69.720.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA						**1.553.383.771,50**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.553.383.771,50**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.553.383.771,50**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**13 Dokumen undefined**	**1.496.051.771,50**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN*	-			13 Dokumen undefined	37.640.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Desa di Kecamatan Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	37.640.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Desa di Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas ASN Perangkat Daerah yang diterima*	-			13 Dokumen undefined	1.261.843.871,50			-	-	ASN Kantor Camat Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1.166.418.871,50	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Kantor Camat Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13 Dokumen	95.425.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Kantor Camat Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang tersedia*	-			4 Dokumen undefined	160.596.900,00			-	-	ASN Kantor Camat Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	6.997.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Kantor Camat Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	51.308.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kantor Camat Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2.300.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kantor Camat Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	99.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Kantor Camat Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	-			1 Dokumen undefined	14.971.000,00			-	-	ASN Kantor Camat Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	14.971.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Kantor Camat Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			4 Dokumen undefined	12.000.000,00			-	-	ASN Kantor Camat Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Kantor Camat Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen undefined	9.000.000,00			-	-	ASN Kantor Camat Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	9.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Kantor Camat Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**-**	**18.460.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	9.230.000,00			-	-	Masyarakat Desa di Kecamatan Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	9.230.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Desa di Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat*	-			3 Dokumen undefined	9.230.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Desa di Kecamatan Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	9.230.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Desa di Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3 Dokumen undefined**	**13.912.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa*	-			3 Dokumen undefined	13.912.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Desa di Kecamatan Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Dokumen Lembaga Kemasyarakatan	13.912.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Desa di Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**1 Dokumen undefined 2 Dokumen undefined**	**14.010.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah* *Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*	-			1 Dokumen undefined 2 Dokumen undefined	14.010.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Desa di Kecamatan Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				30 Orang	4.850.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Desa di Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	9.160.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Desa di Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**3 Dokumen undefined**	**10.950.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan keuangan desa*	-			3 Dokumen undefined	10.950.000,00			-	-	Masyarakat Desa di Kecamatan Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	10.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Desa di Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
		KECAMATAN SIBERUT SELATAN						**2.295.533.024,50**							**3.116.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.295.533.024,50**							**3.116.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.295.533.024,50**							**3.116.800.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**2.203.197.024,50**							**2.669.800.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan*	-			100 %	30.940.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan	-	37.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	30.940.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan		37.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan*	-			23 Orang	2.005.476.524,50			-	-	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	2.098.300.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	1.961.076.524,50	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai		2.000.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	44.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai		98.300.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Adminsitrasi Kinerja Aparatur Perangkat Daerah*	-			100 %	109.330.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan	-	267.500.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.577.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan		8.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan		6.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	43.883.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan		59.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	3.670.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan		8.500.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan		25.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	59.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan		161.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksanannya PengadaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan	-	132.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan		32.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan		100.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	22.000.000,00			-	-	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan	-	12.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	22.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan		12.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan		0,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang berhasil dipelihara*	-			2 Unit	35.450.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	123.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	32.690.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		60.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.760.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		25.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**B Indeks**	**14.640.000,00**							**99.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Selatan*	-			B Indeks	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan	-	38.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan		38.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	-			undefined undefined	14.640.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan	-	61.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	14.640.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan		61.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 Persen**	**32.118.000,00**							**88.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan*	-			10 Lembaga Kemasyarakat	32.118.000,00			-	-	Lembaga Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan	-	88.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	15.318.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Lembaga Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan		27.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	16.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Lembaga Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan		61.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**100 Persen**	**25.848.000,00**							**165.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			30 Orang	25.848.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan	-	165.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	11.088.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan		120.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	14.760.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan		45.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**100 Persen**	**19.730.000,00**							**95.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Penetapan APBDes tepat waktu* *Persentase serapan APBDes diatas 90 persen*	-			100 Persen 100 Persen	19.730.000,00			-	-	Pemerintahan Desa	-	95.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	19.730.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintahan Desa		65.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintahan Desa		30.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
		KECAMATAN SIPORA UTARA						**1.987.948.673,00**							**2.213.564.300,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.987.948.673,00**							**2.213.564.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.987.948.673,00**							**2.213.564.300,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 persen**	**1.868.242.273,00**							**2.003.564.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Acuan dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan* *Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			95 Persen 75 Persen 95 Persen	28.125.200,00			-	-	Masyarakat dan Desa	-	50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	28.125.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat dan Desa		50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya KegiatanAdministrasi Keuangan* *Meningkatnya Kesejahteraan ASN*	-			100 Persen 100 Persen	1.679.228.673,00			-	-	-	-	1.718.564.300,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.661.948.673,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.673.564.300,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	17.280.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Lancarnya Operasional perkantoran* *Persentase terlaksananya Administrasi Umum Daerah*	-			100 Persen 100 Persen	82.878.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	135.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4.980.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		5.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.499.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	34.899.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urrusan Pemerintah Daerah Meningkatnya Layanan Operasinal Perkantoran*	-			100 Persen 100 Persen	26.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	26.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	52.010.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	32.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		5.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	1.830.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	15.180.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**B Indek** **100 Persen** **70 Persen** **B Indek** **B Indeks**	**14.998.800,00**							**25.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	14.998.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				6 Laporan	14.998.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**95 Persen** **70 persen** **90 Persen** **92 Persen**	**39.815.800,00**							**50.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	39.815.800,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	19.816.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	19.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**39.945.000,00**							**95.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala daerah* *Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan* *Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah* *Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			2 Urusan 1 Urusan 95 Persen 100 Persen	39.945.000,00			-	-	-	-	95.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	14.945.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**95 Persen 68 Persen 92 Persen**	**24.946.800,00**							**40.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	24.946.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				18 Dokumen	24.946.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		40.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
		KECAMATAN SIPORA SELATAN						**2.610.242.064,00**							**2.610.241.564,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.610.242.064,00**							**2.610.241.564,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.610.242.064,00**							**2.610.241.564,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**2.476.243.064,00**							**2.476.242.564,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah*	-			1 Laporan	30.000.000,00			-	-	Meningkatnya serta Lancarnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Pembangunan di Desa	-	30.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya serta Lancarnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Pembangunan di Desa		30.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Penerima GAJI DAN TUNJANGAN PNS*	-			27 Orang	2.311.242.564,00			-	-	Terwujudnya Tata kelola Keuangan Perangkat daerah yang Efektif dan efisien	-	2.311.242.064,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	2.286.242.564,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Terwujudnya Tata kelola Keuangan Perangkat daerah yang Efektif dan efisien		2.286.242.064,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Terwujudnya Tata kelola Keuangan Perangkat daerah yang Efektif dan efisien		25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum*	-			1 Kegiatan	90.000.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 2. Pemerataan Jaringan Listrik	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan yang Efektif dan efisien	-	90.000.500,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4.999.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 2. Pemerataan Jaringan Listrik	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan yang Efektif dan efisien		4.999.500,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan yang Efektif dan efisien		15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan yang Efektif dan efisien		0,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	40.066.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan yang Efektif dan efisien		40.066.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	29.935.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan yang Efektif dan efisien		29.935.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Tagihan Listrik Penerangan Bangunan Kantor*	-			3 REKENING	24.000.000,00			-	-	Tersediasnya Sumber Daya Air dan Listrik kantor	-	24.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	24.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Tersediasnya Sumber Daya Air dan Listrik kantor		24.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Orang Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Tersediasnya Sumber Daya Air dan Listrik kantor		0,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Darat Operasional Kantor*	-			4 Unit	21.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Tersedianya Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas /Operasional Kantor	-	21.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	21.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Tersedianya Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas /Operasional Kantor		21.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**100 Persen**	**29.999.500,00**							**29.999.500,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya pembinaan Perempuan dan Keluarga di Tingkat Kecamatan*	-			1 Laporan	15.000.000,00			-	-	Meningkatnya pembinaan Perempuan dan keluarga	-	15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya pembinaan Perempuan dan keluarga		15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			300 Orang	14.999.500,00			-	-	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	-	14.999.500,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	14.999.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien		14.999.500,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 Persen**	**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan ,Lembaga Adat,Hukum Adat dalam Pembangunan*	-			200 Orang	15.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	-	15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				22 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa		15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyrakat dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera (KS)*	-			20 KK	15.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Terwujudnya Penumbuhan Keluarga yang berkarakter	-	15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				10 Keluarga	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Terwujudnya Penumbuhan Keluarga yang berkarakter		15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**100 Persen**	**58.999.500,00**							**58.999.500,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Meningkatnya Kesadaram Masyarakat akan Ideologi Kebangsaan*	-			400 Orang	58.999.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakan Berlandaskan Pancasila Demokrasi dan HAM	-	58.999.500,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				400 Orang	58.999.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakan Berlandaskan Pancasila Demokrasi dan HAM		58.999.500,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakan Berlandaskan Pancasila Demokrasi dan HAM		0,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**90 Persen**	**15.000.000,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Meningkatnya tata kelola Aset Desah*	-			1 Laporan	15.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Terwujudnya PengelolaanKeuangan dan aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	-	15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Terwujudnya PengelolaanKeuangan dan aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel		15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
		KECAMATAN PAGAI UTARA						**1.723.925.492,25**							**210.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.723.925.492,25**							**210.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.723.925.492,25**							**210.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**1.610.937.092,25**							**210.000.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentasi Jumlah Kesejahteraan Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN* *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*	-			90 Persen 100 Persen	1.478.433.492,25			-	-	Pegawai Kantor Kecamatan	-	210.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.411.925.492,25	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Kantor Kecamatan		0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	66.508.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pegawai Kantor Kecamatan		210.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah*	-			80 persen	120.503.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Semua Kelurahan	-	0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Semua Kelurahan		0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	57.693.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Semua Kelurahan		0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	7.610.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Semua Kelurahan		0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan Laporan	55.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Semua Kelurahan		0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Peningkatan Palayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*	-			80 persen	12.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	wilayah Kecamatan	-	0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	wilayah Kecamatan		0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	wilayah Kecamatan		0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**95 persen** **95 persen**	**13.500.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan*	-			3 Laporan	13.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Masyarakat diwilayah Kecamatan	-	0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	13.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Masyarakat diwilayah Kecamatan		0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**70 persen 95 Persen**	**39.488.400,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di wilayah kecamatan*	-			95 Persen	39.488.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	wilayah Kecamatan	-	0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	39.488.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	wilayah Kecamatan		0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 Orang	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**92 Persen**	**60.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu*	-			92 Persen	60.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Semua Kelurahan	-	0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Semua Kelurahan		0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Semua Kelurahan		0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
		KECAMATAN PAGAI SELATAN						**1.781.938.449,25**							**1.977.951.678,67**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.781.938.449,25**							**1.977.951.678,67**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.781.938.449,25**							**1.977.951.678,67**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen**	**1.667.530.449,25**							**1.850.958.798,67**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evalusi KInerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	36.520.000,00			-	-	ASN Kecamatan Pagai Selatan	-	40.537.200,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	36.520.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Kecamatan Pagai Selatan		40.537.200,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.486.568.449,25			-	-	ASN Kecamatan Pagai Selatan	-	1.650.090.978,67	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.402.138.449,25	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Kecamatan Pagai Selatan		1.556.373.678,67	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				52 Dokumen	84.430.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kecamatan Pagai Selatan		93.717.300,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*	-			100 Persen	124.542.000,00			-	-	ASN Kecamatan Pagai Selatan	-	138.241.620,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	985.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Kecamatan Pagai Selatan		1.093.350,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kecamatan Pagai Selatan		13.320.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	26.185.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kecamatan Pagai Selatan		29.065.350,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.765.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kecamatan Pagai Selatan		1.959.150,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	83.607.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kecamatan Pagai Selatan		92.803.770,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*	-			100 Persen	4.800.000,00			-	-	ASN Kecamatan Pagai Selatan	-	5.328.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Kecamatan Pagai Selatan		5.328.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kecamatan Pagai Selatan		0,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*	-			100 Persen	15.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kecamatan Pagai Selatan	-	16.761.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5.170.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kecamatan Pagai Selatan		5.738.700,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	9.930.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kecamatan Pagai Selatan		11.022.300,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**B Indeks**	**25.898.000,00**							**28.746.780,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	-			100 Persen	25.898.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan	-	28.746.780,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	25.898.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		28.746.780,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 Persen**	**14.190.000,00**							**15.750.900,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			100 Persen	14.190.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan	-	15.750.900,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	10.100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		11.211.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4.090.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		4.539.900,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**100 Persen**	**29.160.000,00**							**32.367.600,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			100 Persen	29.160.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan	-	32.367.600,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	13.090.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		14.529.900,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	16.070.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		17.837.700,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**100 Persen**	**45.160.000,00**							**50.127.600,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu*	-			100 Persen	45.160.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	4 Desa di Kecamatan Pagai Selatan	-	50.127.600,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				16 Dokumen	45.160.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	4 Desa di Kecamatan Pagai Selatan		50.127.600,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
		KECAMATAN SIKAKAP						**2.654.654.779,00**							**455.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.654.654.779,00**							**455.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.654.654.779,00**							**455.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 persen**	**2.560.189.379,00**							**380.500.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah* *Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Persentase Peningkatan Palayanan Aparatur*	-			100 persen 1 layanan 75 persen	5.250.000,00			-	-	Kecamatan Sikakap	-	22.500.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	5.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Sikakap		22.500.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* *Persentasi Jumlah Kesejahteraan Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN* *persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas ASN Perangkat Daerah yang diterima*	-			100 Persen 80 persen 100 persen	2.451.914.779,00			-	-	Kecamatan Sikakap	-	220.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang Orang/bulan	2.345.654.779,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Sikakap		0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen Dokumen	106.260.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Sikakap		220.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah*	-			4 kegiatan 70 persen	90.174.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan Sikakap	-	117.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	1.942.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan Sikakap		4.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Sikakap		0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	36.992.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Sikakap		42.800.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	51.240.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kecamatan Sikakap		70.200.000,00	KECAMATAN SIKAKAP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan Palayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*	-			1 layanan 70 persen	9.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan Sikakap	-	10.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan Sikakap		10.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Sikakap		0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara sebagai penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			8 Buah 3 unit	3.850.000,00			-	-	Kecamatan Sikakap	-	11.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	3.850.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Sikakap		11.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**1 Laporan** **B Indek**	**5.240.000,00**							**24.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase terpenuhi dokumen kependudukan masyarakat*	-			1 Sub Kegiatan 60 persen	5.240.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan Sikakap	-	24.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	5.240.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan Sikakap		24.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**95 persen**	**29.566.400,00**							**45.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah Layanan Koordinasi Pemberdayaan Desa*	-			3 Laporan 1 Sub Kegiatan	29.566.400,00			-	-	Kecamatan Sikakap	-	45.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	25.722.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Sikakap		39.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	3.844.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan Sikakap		6.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**100 Persen**	**43.259.000,00**							**6.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah layanan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah*	-			1 Layanan	43.259.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan Sikakap	-	6.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	40.282.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan Sikakap		0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				10 Dokumen	2.977.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Sikakap		6.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**92 Persen**	**16.400.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan keuangan desa* *Jumlah layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* *Persentasi Jumlah dan Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Kecamatan*	-			3 desa 3 desa 80 persen	16.400.000,00			-	-	Kecamatan Sikakap	-	0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	16.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Sikakap		0,00	KECAMATAN SIKAKAP
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**3.730.333.159,00**							**5.333.500.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**3.730.333.159,00**							**5.333.500.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**3.730.333.159,00**							**5.333.500.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 Persen 100 Parsen undefined undefined**	**1.382.424.653,00**							**1.563.500.000,00**	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah*	-			12 Orang/bulan	1.181.333.253,00			-	-	ASN DAN PPPK	-	1.254.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1.181.333.253,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN DAN PPPK		1.254.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	152.591.400,00			-	-	-	-	213.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	4.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	50.995.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	70.596.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	24.000.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan Laporan	24.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	24.500.000,00			-	5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 unit Unit	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	9.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**					**-**	**1.001.522.080,00**							**1.720.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	1.001.522.080,00			-	-	-	-	1.720.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				20 orang Orang	219.979.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				33 Orang	781.543.080,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.320.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**					**-**	**699.375.946,00**							**750.000.000,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	699.375.946,00			-	5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				8 Dokumen Dokumen	699.375.946,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**					**-**	**70.971.600,00**							**180.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	70.971.600,00			-	-	-	-	180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Laporan	70.971.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**					**-**	**212.075.000,00**							**370.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	212.075.000,00			-	5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	370.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				3 Dokumen Dokumen	70.776.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		170.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Orang	70.616.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			0				0 0	70.682.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				5 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**					**-**	**363.963.880,00**							**750.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	363.963.880,00			-	-	-	-	750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50 Orang	70.906.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Orang	70.906.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Laporan	71.632.920,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pemban gunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		190.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	150.518.760,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**774.600.648.254,75**							**898.691.313.886,72**	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RKPD tahun 2026 mengacu pada capaian dan target Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, hal ini dimaksudkan agar penetapan target kinerja RKPD tahun 2026 konsisten dengan target pada RPJMD. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan IKU dan target capaian pada Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	65,17
2	Pendapatan Per Kapita	Rp. juta/ kapita	80,640
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,7
4	Rasio Gini	Rasio	0,253
5	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	1,81-2,60
6	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	2,701
7	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	%	19,718
8	Tingkat Kemiskinan	%	8,24-8,34
9	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Rp.Juta/ kapita	201,59
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82.34

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pada akhir penyelengaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah (IKD) dibagi menjadi 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah serta aspek pelayanan umum.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Aspek Geografi dan Demografi		
1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	9,85
2	Konsumsi listrik per kapita	kwh/ kapita	310
3	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman	%	9,81
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82.34
5	RT dengan Akses Sanitasi Aman	%	76
6	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	16,26
7	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	33,14
8	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	160,96

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,7
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,24-8,34
3	Pendapatan per Kapita	Rp.Juta/ kapita	80,640
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1.31
5	Rasio Gini	Rasio	0,253
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	65,17
7	Usia Harapan Hidup	tahun	71,37
8	Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	30
9	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	%	L = 42,02 N=10,35
10	Rata-rata Lama Sekolah	tahu	8.56
11	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,42
12	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	13,09
13	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	51,22
14	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	56,12
15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,828-0,820
16	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	64,5
III	Aspek Daya Saing Daerah		
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	2,701
2	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	%	19,718
3	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	%	0,872
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	72,82
5	Rasio Kewirausahaan	rasio	1,79
6	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Inovatif (46,26)
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	%	31,08
8	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	%	47,25
9	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	46,94
10	Persentase Desa Mandiri (%)	%	9,30
11	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,1649
IV	Aspek Pelayanan Umum		
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,14
2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks	1,81-2,60

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Survei penilaian integritas (SPI) KPK	Nilai	71,23
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	82,98
5	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	61,61
6	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3
7	Indeks Daya Saing Daerah	3,37	3,43

BAB VII

PENUTUP

RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran tahun 2026, disusun dengan memedomani Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan daerah. RKPD Tahun 2026 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui transformasi struktural yang inklusif dan berkelanjutan menjadi fokus pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Tahun 2045. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menitikberatkan pembangunan pada sektor komoditas unggulan dengan pembangunan sumber daya ekonomi, peningkatan produktivitas masyarakat terutama pada hilirisasi komoditas pertanian. Kolaborasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga pemerintah lainnya bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia usaha perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program

pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2026 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI